Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2008

Jakarta, Maret 2009

Daftar Isi

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Grafik		iii
Daftar Gambar		iv
Daftar Lampiran		v
Glosarium Kelompok Temuan Hasil Pemeriksaan		vi
PENDAHULUAN		1
PEMERIKSAAN KEUANGAN		7
Bab 1	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
Bab 2	Laporan Keuangan Badan Lainnya	21
PEMERIKSAAN KINERJA		25
Bab 3	Penyelenggaraan Ibadah Haji 1428H/2007M	27
Bab 4	Pelayanan Kesehatan	29
Bab 5	Pelayanan Pendidikan	39
Bab 6	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias	45
Bab 7	Proses Administrasi Pemekaran Daerah	49
Bab 8	Pemeriksaan Kinerja Lainnya	53
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU		57
Bab 9	Pelaksanaan Belanja	59
Bab 10	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya	71
Bab 11	Manajemen Hutan dan Pembangunan Hutan Tanaman Industri	75
Bab 12	Pengelolaan Pertambangan Batubara	85
Bab 13	Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri	95
Bab 14	Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan	97
Bab 15	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penunjang Pembinaan	99
Bab 16	Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi	101
Bab 17	Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum	103
Bab 18	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum	107
Bab 19	Operasional Bank Pembangunan Daerah	113
Bab 20	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	117
HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN		121
HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH		131
Lampiran		
Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2008		

DAFTAR TABEL

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007
2. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2004-2007
3. Opini LKPD Tahun 2007 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
4. Kelompok Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 (LHP Semester II Tahun 2008)
5. Opini Laporan Keuangan Badan Lainnya
6. Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas RSUD
7. Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Kesehatan
8. Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Pendidikan
9. Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
10. Kelompok Temuan PDTT atas Belanja Pemerintah Pusat
11. Kelompok Temuan PDTT atas Belanja Pemerintah Daerah dan Pilkada
12. Anggaran dan Realisasi Dana BOS TA 2007 dan Semester I TA 2008
13. Klasifikasi Temuan PDTT atas Dana BOS dan DPL
14. Kelompok Temuan PDTT atas Manajemen Hutan dan Pembangunan HTI
15. Kelompok Temuan PDTT atas Pengelolaan Pertambangan Batubara
16. Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/KPU
17. Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU
18. Kelompok Temuan PDTT atas Operasional PDAM
19. Kelompok Temuan PDTT atas Operasional BPD
20. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga s.d Semester II Tahun 2008
21. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BUMN s.d Semester II Tahun 2008
22. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah s.d Semester II Tahun 2008
23. Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Kerugian/Pidana
24. Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat
25. Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN
26. Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Daerah dan BUMD

DAFTAR GRAFIK

1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2004-2007
2. Perbandingan Opini LKPD Tahun 2007 berdasarkan Tingkat Pemerintahan
3. Persentase Nilai Rekomendasi Tindak Lanjut Kementerian/Lembaga
4. Perbandingan Rekomendasi Tindak Lanjut Kementerian/Lembaga
5. Status Penyelesaian Tindak Lanjut pada BUMN s.d Semester II Tahun 2008
6. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN
7. Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut pada BUMN
8. Persentase Nilai Rekomendasi Tindak Lanjut di Lingkungan Pemerintah Derah
9. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah
10. Persentase Jumlah Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti pada Pemerintah Daerah

DAFTAR GAMBAR

1. Jamaah Haji Indonesia Menuju Padang Arafah untuk Melaksanakan Wukuf
2. Pasien yang Tengah Menjalani Rawat Inap di RSUD
3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
4. Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
5. Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Utara dan Gorontalo
6. Jalur Khusus Busway yang Tidak Steril
7. Bantuan Operasional Sekolah untuk Membantu Proses Belajar Mengajar
8. Deforestasi Hutan Lindung Gambut Arus Deras yang dikonversi menjadi perkebunan sawit
9. Deforestasi Hutan Lindung S. Mahato (Riau)
10. Overlay titik GPS pada Peta SK Penunjukkan Taman Nasional Tanjung Puting pada lokasi yang telah diberikan pelepasan kawasan
11. Perkebunan PT GS di atas HPT
12. Lokasi Pertambangan PT BP yang berada dalam kawasan IUPHHK-HA PT AB
13. Lokasi Pertambangan PT KPC yang berada di TNK
14. Lokasi Pertambangan PT Santan Batubara yang berada di Hutan Lindung
15. KP di Kawasan Hutan Produksi Kab. Kutai Kartanegara
16. Overlay Areal Konsesi KP dengan Kawasan Hutan Produksi di Kab. Lahat
17. Lokasi KP eksplorasi dan eksploitasi (belum ada penambangan) di wilayah Kab. Tanah Bumbu yang berada di kawasan hutan
18. Lokasi KP Eksplorasi di Wilayah Kab. Barito Utara yang berada di Kawasan Hutan
19. Lahan Konsesi PT Bara Sentosa Lestari di Kawasan Hutan
20. Penimbunan *top soil* pada PT Borneo Indobara yang belum dibuat sistem berjenjang/ terasiring dan *cover crop* masih belum merata
21. Ceceran Oli CV. PHI, Kab. Kutai Kartanegara
22. Kolam Oli KSU Wijaya Kusuma Kab. Kutai Kartanegara

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 (LHP Semester II Tahun 2008)
3. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 (LHP Semester II Tahun 2008)
4. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Rumah Sakit Umum Daerah
5. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja atas Rumah Sakit Umum Daerah
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Kesehatan
7. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Kesehatan
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Pendidikan
9. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Pendidikan
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
11. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja atas Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan PDTT atas Belanja Pemerintah Pusat
13. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Belanja Pemerintah Pusat
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan PDTT atas Belanja Pemerintah Daerah dan Pilkada
15. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Belanja Pemerintah Daerah dan Pilkada
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan PDTT atas Manajemen Hutan dan Pembangunan HTI
17. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Manajemen Hutan dan Pembangunan HTI
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan PDTT atas Pengelolaan Pertambangan Batubara
19. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Pengelolaan Pertambangan Batubara
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan PDTT atas Operasional PDAM
21. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Operasional PDAM
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan PDTT atas Operasional BPD
23. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas PDTT atas Operasional BPD
24. Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga
25. Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BUMN
26. Daftar Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

Glosarium Kelompok Temuan Hasil Pemeriksaan

Daftar ini memuat pengertian kelompok temuan hasil pemeriksaan yang digunakan dalam narasi dan lampiran ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). Temuan-temuan tersebut mengungkap adanya **ketidakpatuhan yang mengakibatkan** hal-hal berikut.

- **Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan**

  Temuan dianggap masuk kategori kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 : "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

- **Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan**

  Kerugian dianggap berpotensi karena belum terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 namun masih berupa risiko terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan benar-benar terjadi di kemudian hari.

- **Kekurangan Penerimaan**

  Penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah/perusahaan, tetapi tidak masuk ke kas negara/daerah/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan.

- **Uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan**

  Penggunaan uang negara/daerah/perusahaan yang belum/tidak jelas pertanggungjawabannya dan belum dapat dipastikan apakah penggunaan dana tersebut sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Administrasi**

  Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian/potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- **Indikasi Tindak Pidana**

  Temuan yang mengungkap adanya indikasi tindak pidana, yaitu temuan yang mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

- **Ketidakhematan/Pemborosan**

  Temuan ini mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

- **Ketidakefektifan**

  Temuan ini berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkap kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

PENDAHULUAN

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II Tahun 2008 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. IHPS dimaksud disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta kepada Presiden, Gubernur/Bupati/Walikota untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

IHPS merupakan ringkasan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam satu semester. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah pusat, lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum (BLU), dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Sejak Semester I Tahun 2005 s.d. Semester I Tahun 2008, IHPS disusun berdasarkan sistematika menurut entitas yang diperiksa dan berurut berdasarkan pengelompokan komisi di DPR. Memperhatikan masukan dari berbagai pihak, BPK menyusun IHPS II Tahun 2008 dalam format baru yang lebih sederhana berdasarkan jenis dan tema pemeriksaan yang dilaksanakan BPK dalam satu semester.

Perubahan format ini dilakukan untuk memudahkan para pemilik kepentingan *(stakeholders)* mengetahui permasalahan secara menyeluruh mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Obyek pemeriksaan BPK dalam semester II Tahun 2008 dilakukan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU yang seluruhnya sejumlah 683 obyek pemeriksaan seperti disajikan pada tabel berikut.

Entitas Yang Diperiksa	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah
Pemerintah Pusat	4	12	98	114
Pemerintah Daerah	191	44	278	513
BUMN	2	-	18	20
BUMD	2	2	30	34
BHMN/BLU	1	1	-	2
Jumlah	**200**	**59**	**424**	**683**

Dengan demikian, IHPS II Tahun 2008 merupakan ikhtisar dari 683 LHP. Hasil pemeriksaan yang lengkap dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang bersangkutan dalam *compact disc (CD)* terlampir atau melalui laman *(website)* www.bpk.go.id.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan berdasarkan jenis dan tema pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 191 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2007 dan sembilan laporan keuangan badan lainnya.

BPK **tidak memberikan pendapat** – TMP (*disclaimer*) atas 72 LKPD, opini **tidak wajar** (TW) atas delapan LKPD, opini **wajar dengan pengecualian** (WDP) atas 110 LKPD, dan opini **wajar tanpa pengecualian** (WTP) atas satu LKPD, yaitu Kabupaten Aceh Tengah.

Cakupan pemeriksaan keuangan atas 191 LKPD senilai Rp730,90 triliun meliputi aset senilai Rp258,42 triliun, kewajiban senilai Rp6,27 triliun, ekuitas senilai Rp250,28 triliun, pendapatan senilai Rp110,48 triliun, dan belanja senilai Rp105,43 triliun. Total temuan senilai Rp11,84 triliun atau 1,62% dari cakupan pemeriksaan.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah sejak LKPD Tahun 2004. Perkembangan opini LKPD Tahun 2004 s.d. 2007 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Hal tersebut ditunjukkan dengan turunnya persentase opini WTP dan WDP dan kenaikan persentase opini TMP dan TW. Dengan kata lain, semakin banyak persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan, sedangkan persentase LKPD yang informasi keuangannya dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan semakin sedikit.

Perkembangan opini pada pemeriksaan LKPD Tahun 2004 s.d. 2007 dapat dilihat dalam grafik berikut.

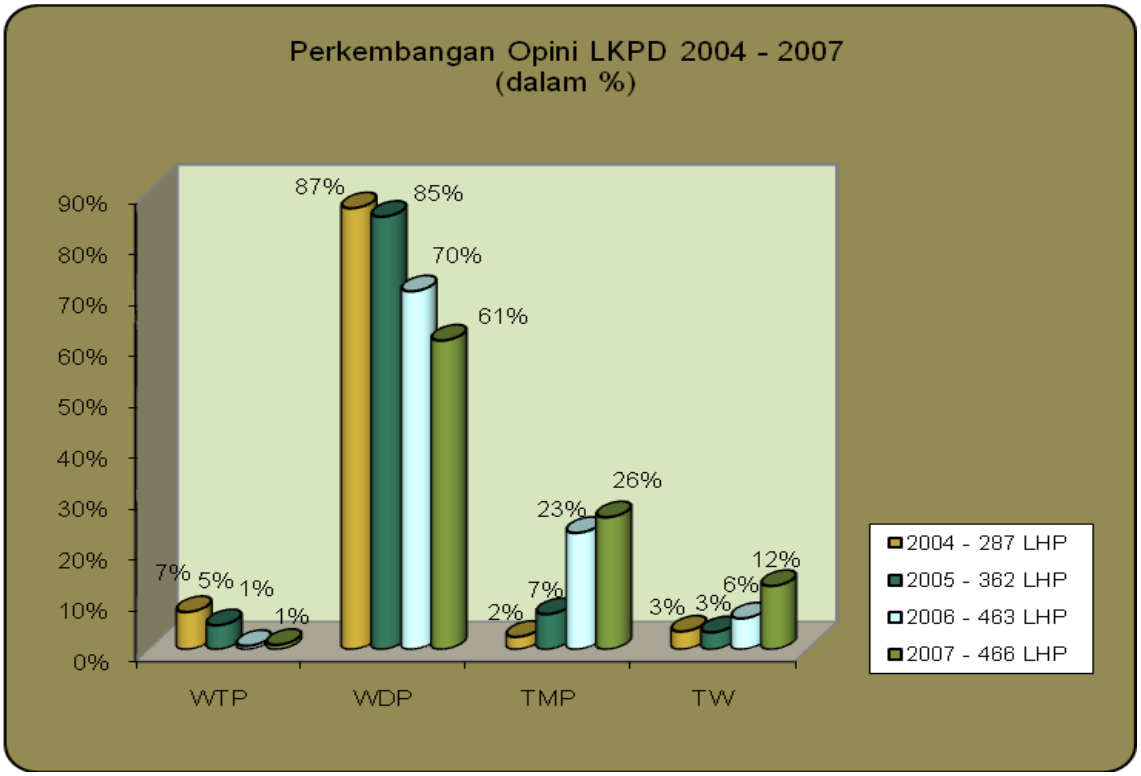

BPK memberikan opini TMP *(disclaimer)* atas LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 1428H/2007M, LK Dana Abadi Umat Tahun 2006 dan 2007, LK BPMIGAS dan PT Gorontalo Fitrah Mandiri, opini WDP atas LK Perum Peruri dan PDAM Ternate, opini WTP – Dengan Paragraf Penjelasan atas LK Perum Damri, dan opini WTP atas LK Proyek ETESP – ADB.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pada Semester II Tahun 2008, obyek pemeriksaan kinerja mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan semester sebelumnya.

Pemeriksaan kinerja dilaksanakan terhadap 59 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 12 pada pemerintah pusat, 44 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dua BUMD dan satu BLU. Pemeriksaan kinerja tersebut meliputi beberapa tema yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan kesehatan jamaah haji, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, proses administrasi pemekaran daerah, dan pemeriksaan kinerja lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan, antara lain sebagai berikut.

- Departemen Agama belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1428H/2007M;
- BLU RSUP Persahabatan belum efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian Tahun 2007 dan Semester I Tahun 2008;
- Pelayanan kesehatan, baik pada RSUD maupun Dinas Kesehatan belum dilaksanakan secara efektif karena sebagian besar pelayanan kesehatan masih berada di bawah standar pelayanan minimum, sarana dan prasarana kesehatan pada RSUD belum tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
- Pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif karena penyelenggaraan pelayanan pendidikan belum memenuhi standar pelayanan minimum, pemanfaatan barang tidak sesuai rencana, dan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran;
- Perencanaan, pencapaian dan pemanfaatan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada BRR NAD-Nias atas bidang perumahan dan permukiman, bidang agama, sosial dan budaya, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang transportasi udara belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan; dan
- Proses administrasi pemekaran daerah belum berjalan efektif karena Pemerintah belum mempunyai *grand desain* yang mengatur arah kebijakan dan strategi pemekaran daerah, observasi untuk pemekaran daerah dilakukan oleh ahli yang tidak kompeten dan independen, proses pemekaran daerah seringkali mengabaikan ketentuan, dan Depdagri tidak mendokumentasikan seluruh proses pemekaran daerah secara memadai.

Selain belum efektifnya berbagai kegiatan tersebut di atas, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan temuan yang bersifat administrasi.

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi 424 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 98 obyek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 278 obyek pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, enam obyek pemeriksaan pada kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas bumi, 12 BUMN, dan 30 BUMD. PDTT meliputi beberapa tema sebagai berikut.

- Pelaksanaan belanja;
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan dana pendidikan dasar lainnya;
- Manajemen hutan dan pembangunan hutan tanaman industri;
- Pengelolaan pertambangan batubara;
- Pengelolaan pinjaman luar negeri;
- Pelaksanaan program penjaminan simpanan;
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penunjang pembinaan;
- Pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- Pelaksanaan subsidi;
- Operasional perusahaan daerah air minum;
- Operasional bank pembangunan daerah; dan
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Cakupan PDTT meliputi realisasi anggaran senilai Rp479,58 triliun, dengan total temuan senilai Rp29,86 triliun atau 6,22% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern atas entitas/program/kegiatan yang diperiksa dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya :

- kerugian keuangan negara/daerah/perusahaan;
- potensi kerugian keuangan negara/daerah/perusahaan;
- kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan;
- indikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan;
- ketidakefektifan;
- ketidakhematan; dan
- temuan yang bersifat administrasi.

Temuan signifikan dari PDTT antara lain sebagai berikut.

- Pelaksanaan belanja pada pemerintah pusat dan daerah belum dikelola dengan baik karena masih banyak terdapat kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.
- Pengelolaan hutan belum tertata dengan baik. Terdapat beberapa kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kerugian negara dan rusaknya lingkungan kawasan hutan, yaitu berubahnya fungsi hutan dari hutan lindung, hutan produksi dan taman nasional menjadi pemukiman daerah transmigrasi, kebun kelapa sawit, dan pengelolaan pertambangan.
- Pengelolaan tambang batubara oleh para pemegang kuasa pertambangan belum dikelola dengan baik karena masih banyak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu aspek perijinan, PNBP, dan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan terganggunya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya serta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnya karbondioksida ke udara bebas yang dapat menimbulkan pemanasan global, serta kekurangan penerimaan negara dari pengelolaan tambang batubara.
- Perencanaan, koordinasi, dan monitoring pengelolaan pinjaman luar negeri lemah sehingga beberapa hasil proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri senilai Rp438,47 miliar tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan secara optimal, serta adanya tambahan biaya minimal sebesar Rp2,02 triliun sehubungan keterlambatan pelaksanaan proyek.
- Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan ketentuan tentang penggunaan Dana Penunjang Pembinaan (DPP) mengabaikan pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat Nomor S-119/MK.07/2002 tanggal 19 April 2002 yang menyebutkan bahwa: (1) Alokasi biaya pemungutan pajak daerah kepada pusat untuk membiayai fungsi pembinaan pada dasarnya kurang tepat mengingat fungsi tersebut telah dibiayai dari dana APBN; (2) dalam hal alokasi biaya pemungutan kepada pusat diperlukan maka penggunaannya diarahkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
- Kekurangan penerimaan dari penghitungan kembali bagi hasil Pertamina *Petroleum Contract* (PPC) dan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina (KMGBP) periode 2003 s.d. 2007 sehubungan koreksi alokasi biaya depresiasi yang diperhitungkan dalam *cost recovery*. Hal tersebut mengakibatkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina (Persero) dan KKKS PT Pertamina EP mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tambahan bagian negara masing-masing senilai USD683.83 juta dan USD631.91 juta atau seluruhnya senilai USD1.31 miliar atau ekuivalen Rp14,40 triliun.

Simpulan

Opini atas LKPD Tahun 2004 sd. 2007 menunjukkan kecenderungan kualitasnya memburuk dan belum ada kemajuan yang signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Kinerja pelayanan pendidikan, kesehatan, ibadah haji, dan proses administrasi pemekaran daerah belum efektif karena belum sesuai dengan standar pelayanan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan/pelaksanaan kegiatan sesuai tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut di atas secara umum belum dilakukan dengan baik karena masih banyak ditemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan, indikasi tindak pidana korupsi dan pidana kehutanan, serta kerusakan lingkungan hidup.

BPK telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, baik secara tertulis maupun secara langsung dalam dialog publik yang dilakukan oleh Pimpinan BPK ke berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

BPK menghargai usaha yang dilakukan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara/daerah dan lembaga perwakilan sebagai pemegang hak budget melalui pembenahan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan tindakan hukum yang harus diambil untuk mengamankan dan menertibkan pengelolaan keuangan negara/daerah.

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai *(reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa.

- Opini **Wajar Tanpa Pengecualian** – WTP *(unqualified opinion*); menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat diandalkan.

- Opini **Wajar Dengan Pengecualian** – WDP *(qualified opinion*); menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat diandalkan.

- Opini **Tidak Wajar** – TW *(adverse opinion*); menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat diandalkan.

- Pernyataan **Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat** – TMP *(disclaimer of opinion*); menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat diandalkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah

tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN (LRA), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 UU tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut di atas, pada Semester I Tahun 2008 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), termasuk laporan keuangan kementerian/lembaga (LKK/L), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari sebagian besar provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR pada 3 Juni 2008. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 275 hasil pemeriksaan atas LKPD pada Semester I Tahun 2008 karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004.

Dalam Semester II Tahun 2008, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 191 LKPD dan sembilan laporan keuangan badan lainnya.

BAB 1

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.1 Pada Semester II Tahun 2008, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2007 pada **191** pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam tahun 2008 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 466 LKPD Tahun 2007 dari 469 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2007. Masih terdapat tiga pemerintah daerah yang belum menyerahkan laporan keuangan Tahun 2007 kepada BPK sampai akhir tahun 2008, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Yahukimo.

1.2 Cakupan pemeriksaan atas 191 LKPD senilai Rp730,90 triliun, meliputi neraca dan LRA, terdiri dari aset senilai Rp258,42 triliun, kewajiban senilai Rp6,27 triliun, dan ekuitas senilai Rp250,28 triliun serta pendapatan dan belanja masing-masing senilai Rp110,48 triliun dan Rp105,43 triliun.

Hasil Pemeriksaan

1.3 BPK memberikan opini WTP atas satu entitas, opini WDP atas 110 entitas, opini TMP atas 72 entitas , dan opini TW atas delapan entitas. Opini WTP diberikan kepada Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Opini LKPD Tahun 2007 atas 466 pemerintah daerah disajikan dalam tabel 1 berikut ini. Rincian opini untuk masing-masing entitas dapat dilihat pada **lampiran 1.**

Tabel 1 : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007

Opini	LHP LKPD Tahun 2007 Yang dilaporkan pada IHPS I 2008		LHP LKPD Tahun 2007 Yang dilaporkan pada IHPS II 2008		Total LHP LKPD Tahun 2007	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
WTP	3	1	1	1	4	1
WDP	173	63	110	57	283	61
TMP	48	17	72	38	120	26
TW	51	19	8	4	59	12
Jumlah	**275**	**100**	**191**	**100**	**466**	**100**

1.5 Perkembangan opini atas LKPD sejak BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2004 sampai dengan LKPD Tahun 2007 dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 : Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2004 – 2007

Tahun LKPD	Opini				Jumlah
	WTP	WDP	TMP	TW	
Tahun 2004	21	249	7	10	**287**
Tahun 2005	17	308	25	12	**362**
Tahun 2006	3	326	106	28	**463**
Tahun 2007	4	283	120	59	**466**

1.6 Dari tabel 2 di atas terlihat adanya peningkatan jumlah LKPD yang diperiksa BPK dari tahun ke tahun. Untuk LKPD Tahun 2004 BPK melakukan pemeriksaan atas 287 LKPD, Tahun 2005 atas 362 LKPD, Tahun 2006 atas 463 LKPD, dan Tahun 2007 atas 466 LKPD. Grafik 1 menyajikan perkembangan masing-masing jenis opini disajikan dalam persentase.

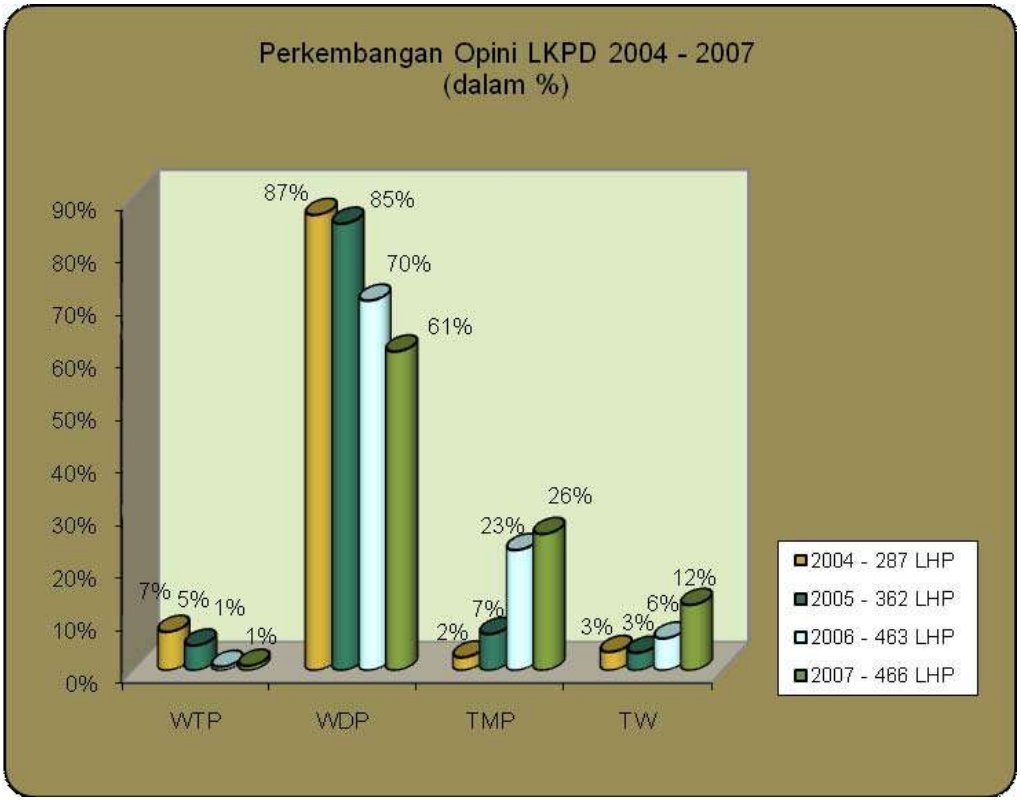

Grafik 1: Perkembangan Opini LKPD Tahun 2004 – Tahun 2007

1.7 Grafik 1 menunjukkan perkembangan opini LKPD yang semakin memburuk. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya persentase jumlah pemerintah daerah yang LKPDnya memperoleh opini WTP dan WDP, di sisi lain, persentase opini TMP dan TW mengalami kenaikan. Dengan kata lain, semakin banyak persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan, sedangkan jumlah persentase LKPD yang informasi keuangannya dapat diandalkan semakin sedikit.

1.8 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2008 terdiri dari 10 LKPD provinsi, 151 LKPD kabupaten, dan 30 LKPD kota. Sedangkan pada semester sebelumnya terdiri dari 23 LKPD provinsi, 197 LKPD kabupaten dan 55 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2007 yang diperiksa selama Tahun 2008 untuk masing-masing tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3 : Opini LKPD Tahun 2007 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	LKPD Tahun 2007 Yang dilaporkan pada IHPS I 2008					LKPD Tahun 2007 Yang dilaporkan pada IHPS II 2008					Total LKPD Tahun 2007				
	WTP	WDP	TMP	TW	Jumlah	WTP	WDP	TMP	TW	Jumlah	WTP	WDP	TMP	TW	Jumlah
Provinsi	1	17	3	2	23	-	4	5	1	10	1	21	8	3	33
Kabupaten	-	119	39	39	197	1	83	61	6	151	1	202	100	45	348
Kota	2	37	6	10	55	-	23	6	1	30	2	60	12	11	85
Jumlah	**3**	**173**	**48**	**51**	**275**	**1**	**110**	**72**	**8**	**191**	**4**	**283**	**120**	**59**	**466**

Grafik 2 menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2007 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

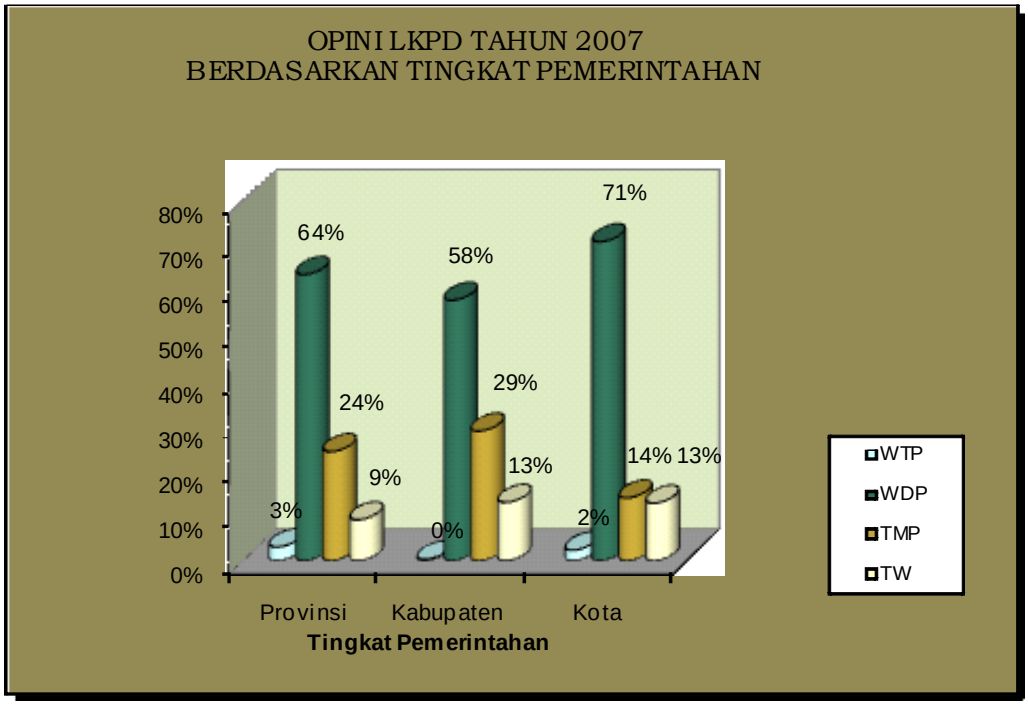

Grafik 2: Perbandingan Opini LKPD Tahun 2007 berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Dari grafik diatas terlihat bahwa secara rata-rata opini atas LKPD pada pemerintahan tingkat kota lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1.9 Selain opini, hasil pemeriksaan LKPD juga menyajikan kelemahan atas sistem pengendalian intern (SPI). SPI meliputi pengendalian atas aspek organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan intern. Suatu SPI disebut **memadai** apabila pengendalian atas aspek-aspek tersebut telah dilakukan sehingga entitas dapat menyajikan informasi keuangan yang dapat diandalkan.

1.10 Hasil pemeriksaan SPI secara keseluruhan (191 LKPD) menunjukkan hanya aspek pengendalian atas organisasi yang telah memadai, yaitu sebagian besar pemerintah daerah telah menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

1.11 Aspek-aspek pengendalian lainnya belum memadai karena sebagian besar pemerintah daerah belum **memenuhi pengendalian atas aspek-aspek tersebut, yaitu :**

- Penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah antara lain peraturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum dilakukan.
- Belum memiliki sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Hal ini mengakibatkan proses pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan daerah belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- Perencanaan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dilakukan, antara lain perencanaan APBD tidak berbasis kinerja, APBD terlambat disahkan sehingga penyerapan anggaran tidak optimal, dan penganggaran pendapatan daerah tidak sepenuhnya didukung dengan data potensi pendapatan yang nyata.
- Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah belum ditetapkan sehingga pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak tertib.
- Pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam laporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan LKPD yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pengawasan oleh Badan Pengawas provinsi/kabupaten/kota belum optimal dan sering dijumpai temuan-temuan BPK yang berulang dan lambat ditindaklanjuti.

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. 12 Selain opini dan temuan-temuan SPI, hasil pemeriksaan atas 191 LKPD Tahun 2007 juga menyajikan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3.051 kasus senilai Rp9,93 triliun sebagaimana disajikan dalam Tabel 4. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada **lampiran 2** dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam **lampiran 3**.

Tabel 4 : Kelompok Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 (LHP Semester II Tahun 2008)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan:			
1.	Kerugian Daerah	556	310.860
2.	Potensi Kerugian Daerah	126	1.319.005
3.	Kekurangan Penerimaan	629	2.200.620
4.	Uang yang Belum/ Tidak Dipertanggung-jawabkan	212	1.496.495
5.	Administrasi	411	-
6.	Ketidakhematan/Pemborosan	227	205.119
7.	Ketidakefektifan	475	2.486.309
8.	Lain-Lain	415	1.916.856
Jumlah		**3.051**	**9.935.265**

Kerugian Daerah

1.13 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan **kerugian daerah** terdiri atas delapan jenis temuan yaitu, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kelebihan pembayaran (kerugian daerah selain karena kekurangan volume), kurang volume atas pengadaan barang dan/jasa, pemahalan harga *(mark up*), pembayaran honorarium atau biaya perjalanan dinas ganda, spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sama dengan kontrak, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan pengembalian pinjaman kepada bank pemerintah macet atau pengembalian dana bergulir macet.

1.14 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 556 kasus **kerugian daerah** senilai Rp310,86 miliar terdiri dari:

- 27 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp19,30 miliar;
- 156 kasus kelebihan pembayaran (kerugian daerah selain karena kekurangan volume) senilai Rp102,59 miliar;
- 85 kasus kurang volume atas pengadaan barang dan/jasa senilai Rp38,11 miliar;

- 25 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp17,86 miliar;
- 36 kasus pembayaran honorarium atau biaya perjalanan dinas ganda senilai Rp7,96 miliar;
- 22 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sama dengan kontrak senilai Rp8,40 miliar;
- 202 kasus pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp107,77 miliar; dan
- 3 kasus pengembalian pinjaman kepada bank pemerintah macet atau pengembalian dana bergulir macet senilai Rp8,87 miliar;

1.15 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut, antara lain sebagai berikut.

- Provinsi Papua, adanya belanja penghasilan Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak sesuai ketentuan senilai Rp8,76 miliar.
- Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat kekurangan pekerjaan *Asphalt Course-Wearing Course (AC-WC)*, *Asphalt Treated Base (ATB), Agregat A dan B* pada 8 paket peningkatan jalan pada dinas pekerjaan umum dan permukiman prasarana wilayah (Kimpraswil) senilai Rp3,67 miliar.
- Provinsi Sumatra Utara, terdapat kekurangan pengadaan alat peraga/praktik BELMO senilai Rp2,25 miliar.
- Kabupaten Sorong Selatan, pekerjaan fisik pembangunan RSUD dan pengadaan ternak tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp7,64 miliar.
- Kabupaten Banyumas, terdapat pembayaran insentif pajak bumi dan bangunan kepada pejabat dan staf daerah senilai Rp4,54 miliar tidak didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat pembayaran tunjangan tambahan penghasilan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp1,78 miliar.

Potensi Kerugian Daerah

1.16 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah terdiri atas empat jenis temuan yaitu, hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, pinjaman atau dana bergulir berpotensi tak tertagih, penggunaan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan, dan pengelolaan rekening tidak tertib.

1.17 Hasil pemeriksaan menunjukan ada 126 kasus **potensi kerugian daerah** senilai Rp1,31 triliun terdiri dari:

- 13 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp31,06 miliar;

- 29 kasus pinjaman atau dana bergulir berpotensi tak tertagih senilai Rp54,10 miliar;

- 26 kasus pengunaan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan Rp21,12 miliar; dan

- 58 kasus pengelolaan rekening tidak tertib senilai Rp1,21 triliun.

1.18 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, antara lain, sebagai berikut.

- Provinsi Kalimantan Timur, penyajian piutang pajak senilai Rp2,95 miliar dalam neraca tidak memiliki dasar memadai dan penyelesaian piutang pajak air bawah tanah dan air permukaan (ABT/AP) PT KPC senilai Rp1,84 miliar berlarut-larut.

- Provinsi Sulawesi Barat, terdapat pengeluaran belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan senilai Rp1,56 miliar tanpa persetujuan gubernur dan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah.

- Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat belanja bantuan sosial pada sekretariat daerah senilai Rp9,14 miliar belum didukung bukti yang memadai, sehingga kurang dapat diyakini kebenaran penggunaannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

- Provinsi NAD, dana cadangan Pemprov NAD senilai Rp682,56 miliar belum ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur maksud, tujuan dan manfaat serta kegunaan pembentukan dana cadangan tersebut.

Kekurangan Penerimaan

1.19 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan **kekurangan penerimaan** terdiri atas tiga jenis temuan yaitu, pengelolaan penerimaan daerah tidak melalui mekanisme APBD, kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak dipungut dan disetor ke kas daerah, dan penerimaan negara (pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan) yang belum/terlambat disetor ke kas negara.

1.20 Hasil pemeriksaan menunjukan ada 629 kasus **kekurangan penerimaan** senilai Rp2,20 triliun terdiri dari:

- 170 kasus pengelolaan penerimaan daerah tidak melalui mekanisme APBD senilai Rp1,54 triliun; dan

- 459 kasus kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak dipungut disetor ke kas daerah senilai Rp655,82 miliar.

1.21 Kasus-kasus kekurangan penerimaan, antara lain, sebagai berikut.

- Provinsi Kalimantan Timur, terdapat pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di tiga RSUD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur TA 2007 tidak melalui mekanisme APBD senilai Rp141,77 miliar.

- Kabupaten Limapuluh Kota, bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2007 dari Pemerintah Provinsi terlambat dan/atau belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota senilai Rp12,68 miliar.

- Provinsi Sumatra Utara, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumut terlambat disetor ke kas negara senilai Rp38,07 miliar.

- Kabupaten Sorong Selatan, pendapatan dari biaya pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp2,42 miliar tidak dimasukkan ke kas daerah sehingga tidak tercatat sebagai realisasi pendapatan daerah Tahun 2007.

Uang Yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan

1.22 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya **uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan** terdiri atas dua jenis temuan yaitu, uang persediaan tidak sesuai dengan ketentuan dan uang belum/terlambat/tidak dipertanggungjawabkan.

1.23 Hasil pemeriksaan adanya 212 kasus **uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan** senilai Rp1,49 triliun, terdiri dari:

- 34 kasus uang persediaan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp101,42 miliar; dan

- 178 kasus uang belum/tidak dipertanggungjawabkan senilai Rp1,39 triliun.

1.24 Kasus-kasus uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan, antara lain, sebagai berikut.

- Kabupaten Mentawai, terdapat beberapa SKPD yang belum/terlambat menyampaikan SPJ Tahun 2007 senilai Rp74,87 miliar.

- Kabupaten Aceh Timur, penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) TA 2007 oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kepada badan pengelola keuangan daerah (BPKD) terlambat senilai Rp226,46 miliar.

- Kabupaten Timor Tengah Utara, terdapat sisa UUDP TA 2007 senilai Rp8,89 miliar terlambat disetor dan senilai Rp401,96 juta belum disetor, serta sisa UUDP TA 2006 senilai Rp51,04 juta belum disetor ke kas daerah, mengakibatkan terjadinya pengendapan uang pada Bendahara Pengeluaran yang membuka peluang terjadinya penyimpangan penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran.

- Kabupaten Barito Timur, terdapat penyetoran sisa uang persediaan (UP) TA 2007 senilai Rp3,09 miliar melampaui waktu yang ditentukan.

Administrasi

1.25 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah **administrasi** terdiri atas empat jenis temuan yaitu, pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak sah), penyertaan modal pemerintah daerah belum didukung dengan bukti, kepemilikan aset tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya.

1.26 Hasil pemeriksaan menunjukan ada 411 kasus **administrasi** terdiri atas empat jenis temuan terdiri dari:

- 314 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah);
- 36 kasus penyertaan modal pemerintah daerah belum didukung dengan bukti.
- 57 kasus kepemilikan aset tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah; dan
- 4 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya.

1.27 Kasus-kasus administrasi, antara lain, sebagai berikut.

- Kota Balikpapan, antara lain terjadi karena bukti pengeluaran kas atas realisasi belanja pada dinas kebersihan, pertamanan, dan pemakaman (DKPP) tidak dikelola dengan tertib sehingga pengeluaran tersebut tidak disajikan secara wajar.
- Kabupaten Seram Barat, antara lain realisasi belanja daerah dan penyertaan modal tidak dapat diyakini kebenarannya.
- Kabupaten Aceh Jaya, terdapat aset tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya seluas 322,37 Ha belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Ketidakhematan/pemborosan

1.28 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan **ketidakhematan/pemborosan** terdiri atas dua jenis temuan yaitu, pengeluaran yang tidak dianggarkan dan pemberian bantuan kepada instansi vertikal.

1.29 Hasil pemeriksaan menunjukan ada 227 kasus **ketidakhematan/pemborosan** senilai Rp205,11 miliar terdiri:

- 173 kasus pengeluaran yang tidak dianggarkan senilai Rp156,92 miliar; dan

- 54 kasus pemberian bantuan kepada instansi vertikal senilai Rp48,19 miliar.

1.30 Kasus-kasus ketidakhematan/pemborosan, antara lain, sebagai berikut.

- Kota Payakumbuh, terdapat alokasi anggaran belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan secara berulang pada TA 2006 dan 2007 untuk organisasi yang sama secara terus menerus senilai Rp17,86 miliar.

- Provinsi Kalimantan Barat, pembayaran honorarium dan bantuan kepada tim/ panitia kegiatan dilakukan dengan tidak selektif senilai Rp4,97 miliar, mengakibatkan pemborosan senilai Rp4,40 miliar.

- Provinsi Kalimantan Barat, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja minimal senilai Rp7,02 miliar tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.

- Provinsi Kalimantan Timur, realisasi bantuan sosial senilai Rp123,38 miliar tidak sesuai ketentuan, mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.

- Kabupaten Simeuleu, penggunaan belanja modal untuk instansi vertikal senilai Rp4,75 miliar tidak sesuai ketentuan.

Ketidakefektifan

1.31 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan **ketidakefektifan** terdiri atas tiga jenis temuan yaitu, pengadaan tidak dapat dimanfaatkan/anggaran tidak dapat direalisasikan, penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/peruntukan dan penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan.

1.32 Hasil pemeriksaan menunjukan ada 475 kasus **ketidakefektifan** senilai Rp2,48 triliun terdiri dari:

- 68 kasus pengadaan barang/jasa tidak dapat dimanfaatkan/anggaran tidak dapat direalisasikan senilai Rp412,82 miliar;

- 181 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/peruntukan Rp1,26 triliun; dan

- 226 kasus penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan senilai Rp807,13 miliar.

1.33 Kasus-kasus ketidakefektifan, antara lain, sebagai berikut:

- Kabupaten Supiori, pekerjaan atas 54 kegiatan senilai Rp42,33 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat; dan

- Kota Payakumbuh, hasil pembangunan baru Puskesmas Payolansek dan rumah dinas dokter serta paramedis pada dinas kesehatan belum dapat dimanfaatkan senilai Rp2,87 miliar.

Lain-lain

1.34 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah-masalah selain yang terdapat pada paragraf-paragraf sebelumnya, terjadi sebanyak 415 kasus senilai Rp1,91 triliun, antara lain adanya penyimpanan sementara dana kas (dana titipan) dan penyelesaian hutang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang berlarut-larut. Kasus-kasus lainnya, terjadi di daerah-daerah sebagai berikut.

1.35 Kasus lain-lain, antara lain, sebagai berikut:

- Kota Palembang, terdapat pengeluaran dana dari kas daerah ke rekening titipan (dana blokir) senilai Rp105,16 miliar;
- Kabupaten Tanah Toraja, terdapat penerbitan SP2D dan pencairan dana pada akhir tahun ke rekening bendahara atas pembayaran beberapa pekerjaan senilai Rp7,87 miliar;
- Provinsi NAD, terdapat penyelesaian hutang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berlarut-larut senilai Rp36,79 miliar; dan
- Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat penerbitan SP2D melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Timur senilai Rp53,26 miliar.

1.36 Uraian selengkapnya mengenai temuan-temuan pemeriksaan LKPD dapat dilihat pada LHP dalam *compact disk* (CD) terlampir atau diakses melalui laman (*website)* www.bpk.go.id.

BAB 2

Laporan Keuangan Badan Lainnya

2.1 BPK melakukan pemeriksaan atas sembilan laporan keuangan badan lainnya, sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5 : Opini Laporan Keuangan Badan Lainnya

No.	Entitas	Tahun Buku	Opini
1.	Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M	2007/08	TMP
2.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat Tahun 1427H/2006M	2006	TMP
3.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat Tahun 1428H/2007M	2007	TMP
4.	Perum Damri	2006	WTP-DPP
5.	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)	2007	WDP
6.	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)	2007	TMP
7.	PDAM Ternate	2007	WDP
8.	PT Gorontalo Fitrah Mandiri	2007	TMP
9.	*The Earthquake And Tsunami Emergency Support Project* (ETESP) pada *Project Management Office* BRR NAD Nias (PMO BRR)	2007	WTP

Laporan Keuangan Penyelenggara Ibadah Haji dan Dana Abadi Umat

2.2 BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Penyelenggara Ibadah Haji (LK PIH) Tahun 1428H/2007M dan Laporan Keuangan Dana Abadi Umat (LK DAU).

2.3 BPK **tidak memberikan pendapat** *(disclaimer)* atas LK PIH karena dampak kelemahan pengendalian intern dan permasalahan dalam setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), beban operasional yang masih harus dibayar, aktiva tetap dan permasalahan pendapatan lain-lain, serta BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memberikan pendapat.

2.4 Atas LK DAU Tahun 2006 dan 2007, BPK **tidak memberikan pendapat** *(disclaimer)* karena dampak kelemahan pengendalian intern dan permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan pendapatan hasil efisiensi BPIH yang kurang/belum diterima dalam LK DAU.

2.5 Laporan keuangan PIH Tahun 1428H/2007M meliputi neraca per 31 Maret 2008 yang menunjukkan aktiva senilai USD1.25 miliar (ekuivalen Rp11,57 triliun), kewajiban senilai USD1.24 miliar (ekuivalen Rp11,51 triliun) dan aktiva bersih senilai USD6.56 juta (ekuivalen Rp60,55 miliar). Sementara laporan aktivitas meliputi pendapatan senilai USD605 juta ekuivalen Rp5,57 triliun, beban senilai USD601 juta ekuivalen Rp5,54 triliun dan hasil efisiensi senilai USD3.9 juta ekuivalen Rp36 miliar.

2.6 Cakupan pemeriksaan atas LK DAU meliputi neraca per 31 Desember 2007 dan 2006 menunjukkan aktiva senilai Rp1,41 triliun dan Rp1,34 triliun, kewajiban senilai nihil dan Rp27,4 miliar, dan aktiva bersih senilai Rp102,06 miliar dan Rp65,25 miliar.

2.7 Hasil pemeriksaan atas LK PIH Tahun 1428H/2007M dan LK DAU Tahun 2007 dan 2006 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

2.8 Hasil pemeriksaan LK PIH mengungkapkan kelemahan atas sistem pengendalian intern, antara lain:

- Arus kas setoran awal BPIH tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Saldo akun beban operasional masih harus dibayar yang terdapat pada aplikasi *fisahaj* senilai USD5.07 juta tidak dapat dirinci per komponen;
- Setoran BPIH yang masih harus dikembalikan kepada jamaah yang batal berangkat senilai USD91.30 ribu tidak dapat dibayarkan karena prosedur konfirmasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga saldo akun BPIH senilai USD1.24 miliar (ekuivalen Rp11,51 triliun) tidak dapat diyakini kewajarannya;
- Penempatan deposito atas dana setoran awal BPIH pada 22 bank penerima setoran tidak didukung dengan pengendalian yang memadai;
- Saldo obat-obatan dan alat kesehatan pasca operasional haji Tahun 1428H/2007M tidak diketahui nilainya serta status kepemilikannya belum jelas; dan
- Tidak ada mekanisme pengawasan atas pertanggungjawaban dana senilai Rp2,18 miliar yang di*droping* oleh panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Embarkasi Makassar kepada badan pengelola asrama haji (BPAH), kandepag kabupaten/kota, KUA, dan embarkasi antara (Gorontalo).

2.9 Hasil pemeriksaan LK DAU mengungkapkan kelemahan atas sistem pengendalian intern, antara lain:

- Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan DAU belum memadai;
- Badan pengelola DAU tidak mencatat dan melaporkan aktiva tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang bersumber dari DAU dalam neraca per 31 Desember 2007;

- Badan pengelola DAU tidak mencatat dan melaporkan pendapatan efisiensi BPIH yang kurang/belum diterima dalam LK DAU Tahun 2007 dan 2006 masing-masing senilai Rp23,85 miliar dan Rp3,49 miliar;
- Pembukuan dan pelaporan atas biaya katering jamaah haji Indonesia di Madinah Tahun 1425 H/2005 M pada LK DAU Tahun 2006 tidak sesuai ketentuan;
- Pencatatan dan pelaporan akun beban lainnya senilai Rp27,43 miliar dalam LK DAU Tahun 2006 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
- Pencatatan dan pelaporan pendapatan lain-lain senilai Rp58,55 miliar dan akun beban lainnya senilai Rp19,40 juta dalam LK DAU Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

2.10 Hasil pemeriksaan LK (PIH) mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain:

- Terdapat kerugian BPIH senilai Rp5,45 miliar (ekuivalen USD596.23 ribu) atas selisih kurs dalam pengadaan mata uang asing;
- Kantor Teknis Urusan Haji Jeddah tidak memungut denda senilai SAR11.99 juta (ekuivalen Rp29,48 miliar) kepada *Majmu'ah* sebagai penyedia pemondokan di Madinah atas tidak terpenuhinya ketentuan 70% penempatan jamaah di wilayah Markaziah;
- Terdapat pembayaran ganda *Naqobah* untuk pengangkutan jamaah haji Indonesia dari pemondokan di Madinah ke airport Madinah yang mengakibatkan pemborosan BPIH senilai SAR371.71 ribu (ekuivalen Rp913,61 juta); dan
- Terdapat pemborosan atas pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi petugas haji non PPIH senilai Rp203,25 juta pada Embarkasi Jakarta – Pondok Gede.

2.11 Selain pemeriksaan atas Laporan Keuangan PIH, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kinerja penyelenggaran ibadah haji (Lihat Bab 3).

Laporan Keuangan Badan Lainnya

2.12 Cakupan pemeriksaan atas lima laporan keuangan, yaitu Perum Damri, Perum Peruri, BPMIGAS, PDAM Ternate, dan PT Gorontalo Fitrah Mandiri senilai Rp9,84 triliun, meliputi neraca dan laporan rugi laba. Neraca terdiri dari aset senilai Rp2,62 triliun, kewajiban senilai Rp1,89 triliun, dan ekuitas senilai Rp988,77 miliar. Laporan rugi laba terdiri dari pendapatan senilai Rp2,47 triliun dan belanja senilai Rp2,06 triliun. Cakupan pemeriksaan atas ETESP meliputi realisasi pengeluaran senilai Rp849,20 miliar.

2.13 Temuan signifikan pada pemeriksaan laporan keuangan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Ketidakpatuhan yang mengakibatkan **ketidakefektifan** pada Perum Damri antara lain senilai Rp22,86 miliar terjadi karena Direksi Perum Damri belum menyelesaikan kerjasama program jaminan hari tua (JHT) karyawan Perum Damri dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga iuran yang telah dibayarkan tersebut tidak jelas statusnya dan tidak memberikan manfaat sesuai tujuannya.
- Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi pada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) antara lain senilai Rp21,34 miliar terjadi karena Perum Peruri lebih membebankan insentif perbaikan pendapatan pegawai yang menyebabkan hutang pegawai per tanggal 31 Desember 2007 lebih disajikan senilai Rp21,34 miliar dan laba usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 kurang disajikan senilai Rp21,34 miliar.
- Kelemahan sistem pengendalian intern aset tetap pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) sehingga BPK tidak dapat menjalankan prosedur pemeriksaan. Selain itu, terdapat kondisi yang membatasi yaitu BPMIGAS belum memformalkan pedoman akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, tidak terdapat Neraca pembukaan BPMIGAS per 16 Juli 2002 karena Menteri Keuangan belum menetapkan kekayaan awal BPMIGAS, dan BPMIGAS tidak menyajikan kembali laporan keuangannya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2002, 2003, 2004, dan 2005.
- Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi pada PDAM Ternate senilai Rp23,33 miliar terjadi karena aktiva tetap pada PDAM Ternate yang dicatat pada neraca Tahun 2007 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.
- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan pada PT Gorontalo Fitrah Mandiri (PT GFM) antara lain belum digunakannya dasar akrual pada penyusunan laporan keuangan dan saldo persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Kelemahan sistem pengendalian intern pada *The Earthquake And Tsunami Emergency Support Project (ETESP)* pada *Project Management Office* BRR NAD Nias (PMO BRR) antara lain tidak terdapat petunjuk teknis atau kebijakan intern yang mengatur penggunaan dan/atau penyimpanan sisa-sisa dana bantuan kepada kelompok desa.

2.14 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam *compact disk* (CD) terlampir atau diakses melalui laman (*website)* www.bpk.go.id.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern juga dilakukan dalam pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan/entitas dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan mengambil tindakan koreksi, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Pada Semester I Tahun 2008, BPK hanya melakukan pemeriksaan kinerja sebanyak dua obyek pemeriksaan, karena pemeriksaan BPK berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Memperhatikan perhatian publik yang mulai lebih bergeser ke arah pencapaian efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah, BPK sesuai dengan kewenangannya melakukan beberapa hal untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah, salah satunya dengan memberikan perhatian lebih besar terhadap pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

Dalam Semester II Tahun 2008, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap 59 obyek pemeriksaan yang terdiri dari 12 obyek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 44 pemerintah provinsi/kabupaten/kota, 2 BUMD, dan 1 BLU. Pemeriksaan kinerja meliputi beberapa tema, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan kesehatan jamaah haji, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, proses administrasi pemekaran daerah, serta pemeriksaan kinerja lainnya.

Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji diarahkan pada standar pelayanan minimum (SPM) penyelenggaraan ibadah haji pada setiap embarkasi, pemondokan jamaah haji di Arab Saudi, transportasi udara dan darat di Arab Saudi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.

Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD diarahkan pada pencapaian SPM atau indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan, serta obat-obatan yang menunjang upaya pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan diarahkan pada pencapaian SPM atau indikator kinerja bidang pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias meliputi pemeriksaan pada bidang perumahan dan permukiman, bidang agama, sosial dan budaya, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang transportasi udara.

Pemeriksaan kinerja atas proses administrasi pemekaran daerah diarahkan pada pengelolaan proses pemekaran daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring untuk proses pemekaran daerah selama periode tahun 1999 s.d. 2007.

BAB 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M

3.1 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1428 H/2007 M. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai apakah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1428 H/2007 M sudah memadai untuk mencapai efektivitas pelayanan ibadah haji.

3.2 Metodologi pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji, adalah sebagai berikut:

- Pendekatan proses yang menggambarkan penyelenggaraan ibadah haji dari awal hingga akhir, baik di Indonesia dan Arab Saudi yang menghasilkan identifikasi potensi temuan yang didalami pada pemeriksaan terinci;
- Untuk menilai efektivitas pelayanan haji, program pemeriksaan mengembangkan kerangka kriteria pelayanan haji yang baik. Kriteria tersebut disusun dan dikembangkan didasarkan hasil identifikasi BPK pada saat melakukan pemantauan langsung penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1428 H/2007 M dan dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk penyempurnaan; dan
- Untuk memperoleh simpulan hasil pemeriksaan, teknik pemeriksaan diarahkan pada reviu dokumen atas temuan-temuan yang telah diungkapkan dalam pemeriksaan pendahuluan, melalui wawancara dan pengamatan pasca penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1428 H/2007 M.

Hasil Pemeriksaan

3.3 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1428 H/2007 M oleh Departemen Agama belum efektif karena adanya permasalahan-permasalahan berikut.

- Belum ditetapkannya SPM yang memadai dan seragam pada setiap embarkasi sehingga pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi prosedur, waktu, sarana, dan prasarana bervariasi. Hal ini terlihat dari berbedanya fasilitas yang disediakan oleh embarkasi, proses penanganan dokumen keberangkatan haji, mekanisme penyajian katering, dan pemeriksaan akhir kesehatan.
- Kebijakan strategis pola pemondokan haji Indonesia di Arab Saudi belum dirancang secara komprehensif dan berkesinambungan yang terlihat dari belum tercakupnya seluruh permasalahan penyelenggaraan haji dalam Rencana Strategis Departemen Agama Tahun 2005-2009. Ketidakjelasan Rencana Strategis tersebut mendorong pola pengadaan pemondokan lebih

bersifat reaktif dan kondisional pada pasar pemondokan di Arab Saudi. Hal ini diperburuk dengan lemahnya substansi kontrak pemondokan yang tidak implementatif di lapangan. Selain itu, Departemen Agama belum optimal melakukan upaya-upaya strategis dan sistematis untuk mengurangi dampak kurang tersedianya pemondokan dan ketergantungan terhadap pasar pemondokan di Arab Saudi, terutama mengantisipasi program perluasan Masjidil Haram.

- Pelayanan transportasi belum didukung dengan standar baku yang harus diikuti oleh penyedia transportasi dan petugas lapangan baik untuk transportasi udara maupun darat. Hal ini diperlemah oleh substansi kontrak yang tidak mengatur secara jelas mengenai teknis transportasi dan standar baku pelayanan yang harus ada pada setiap kegiatan transportasi. Rendahnya dukungan standar pelayanan dan kualitas kontrak mendorong terjadinya kasus-kasus penyediaan transportasi, diantaranya keterlambatan penerbangan, serta penumpukan penumpang dan kelangkaan transportasi darat.
- Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ibadah haji belum menyajikan indikator kinerja yang jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan.

Gambar 1: Jamaah Haji Indonesia Menuju Padang Arafah Untuk Melaksanakan Wukuf

3.4 Selain pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1428H/2007M oleh Departemen Agama, BPK juga melakukan pemeriksaan atas Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Tahun 1428 H/2007 M oleh Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan.

3.5 Temuan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern operasional Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji dan Pengelolaan Persediaan Obat/Alkes Bidang Kesehatan di Arab Saudi belum cukup memadai. Hal ini diketahui dari tidak adanya laporan akhir pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan, tidak adanya prosedur verifikasi pengeluaran keuangan, dan tidak adanya pencatatan yang memadai atas saldo persediaan obat dan alat kesehatan, serta tidak pernah dilakukan inventarisasi atas saldo-saldo tersebut, sehingga kontrol atas pengeluaran uang dan persediaan tersebut tidak memadai.

BAB 4
Pelayanan Kesehatan

4.1 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) RSUP Persahabatan, 32 RSUD provinsi/kabupaten/kota, dan sembilan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota.

BLU RSUP Persahabatan

4.2 Pemeriksaan kinerja pada BLU RSUP Persahabatan bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen RSUP Persahabatan dalam pelayanan farmasi dimana hasil penilaian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak manajemen untuk menciptakan atau meningkatkan efektivitas pelayanan farmasi.

4.3 Metodologi pemeriksaan kinerja pada BLU RSUP Persahabatan dilakukan melalui pengujian terhadap unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern, uji petik atas pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi dan pertanggungjawabannya, reviu dan analisis dokumen/data terkait peraturan yang mendasari BLU RSUP Persahabatan dan pelayanan farmasi, observasi lapangan, serta konfirmasi/wawancara kepada pejabat-pejabat pelaksana dan instansi terkait.

Hasil Pemeriksaan

4.4 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelayanan farmasi pada BLU RSUP Persahabatan belum efektif sehingga pasien belum dapat memperoleh pelayanan secara optimal. Ketidakefektifan tersebut meliputi:

- Perencanaan kebutuhan di Instalasi Farmasi belum dapat memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi BLU RSUP Persahabatan;
- Pengadaan, penerimaan, pendistribusian, dan penyimpanan perbekalan farmasi belum dilaksanakan secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan;
- Monitoring dan pelaporan yang belum didukung oleh sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang terintegrasi; dan
- Pelayanan kefarmasian belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan.

Temuan-temuan yang perlu mendapat perhatian

4.5 Usulan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi tidak mencakup seluruh kebutuhan yang ada di BLU RSUP Persahabatan karena perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi juga dilakukan oleh Apotek, Instalasi Patologi Klinik dan Mikrobiologi, serta Instalasi Logistik. Selain itu, Apotek RSUP

Persahabatan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi.

4.6 Pengadaan perbekalan farmasi khususnya obat-obatan di apotek, reagen dan gas medis Tahun 2007 dan Semester I Tahun 2008 tidak melalui panitia pengadaan barang/jasa, sehingga belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan dengan memperhatikan praktek bisnis yang sehat.

4.7 Penerimaan barang perbekalan farmasi khususnya gas medis dan reagen tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga penerimaan barang perbekalan farmasi khususnya reagen dan gas medis berpotensi terjadi penyimpangan.

4.8 Penyimpanan dan penanganan perbekalan farmasi yang telah kadaluarsa tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga kualitas/mutu perbekalan farmasi kurang terjamin dan aman.

4.9 Aktivitas distribusi perbekalan farmasi tidak sesuai prosedur dan beberapa aktivitas distribusi perbekalan farmasi belum didukung dengan prosedur kerja sehingga kegiatan distribusi perbekalan farmasi belum berjalan efektif.

4.10 Pengembangan perangkat lunak SIMRS di BLU RSUP Persahabatan untuk pengelolaan perbekalan farmasi belum optimal sehingga laporan-laporan yang dihasilkan tidak tepat waktu dan tingkat keakurasian data kurang dapat diandalkan.

4.11 Kegiatan pelayanan farmasi belum memadai, antara lain:

- Pelayanan farmasi klinik di BLU RSUP Persahabatan belum dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi rumah sakit sehingga pasien belum memperoleh pelayanan kefarmasian terpadu yang berorientasi kepada pelayanan pasien dan penyediaan obat yang bermutu, serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
- Pelaksanaan pelayanan resep rawat inap dan rawat jalan untuk pasien keluarga miskin (Gakin) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) tidak memperhatikan efisiensi waktu pelayanan sehingga waktu tunggu pelayanan obat menjadi sangat lama; dan
- Kegiatan pengembalian/retur uang obat apotek IGD dan rawat inap BLU RSUP Persahabatan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga pelayanan pengembalian uang obat kurang efektif.

RSUD provinsi/kabupaten/kota

4.12 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada 32 RSUD secara umum bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan kesehatan telah dilaksanakan secara ekonomis dan efektif, melalui penilaian apakah:

- Pelayanan kesehatan oleh RSUD telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum bidang kesehatan;

- Sistem pengendalian intern (SPI) atas pelayanan kesehatan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.13 Metodologi yang diterapkan dalam pemeriksaan kinerja pada RSUD dilakukan dengan terlebih dahulu memilih kegiatan yang akan menjadi fokus pemeriksaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor *risk, impact, auditability, dan significancy*. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan cara menghitung realisasi hasil pencapaian indikator pelayanan kesehatan masyarakat pada RSUD atas sasaran pemeriksaan kinerja dan membandingkannya dengan standar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan juga dilakukan dengan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya di RSUD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian Indikator Kinerja

4.14 Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan kesehatan secara umum mengacu kepada Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002. SPM tersebut menyebutkan beberapa jenis pelayanan minimum yang wajib dilakukan, yaitu bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, manajemen rumah sakit, dan pelayanan medis, serta pelayanan pendukung medis.

4.15 Pelayanan kesehatan pada RSUD belum efektif karena pada umumnya pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan masih berada di bawah SPM yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut.

4.16 RSUD Muara Bungo Jambi termasuk kategori **kurang** dalam pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin antara lain dari adanya kekurangan fasilitas tempat tidur dan tingkat kematian pasien yang tinggi. Selain itu, sarana dan prasarana kesehatan pada RSUD Muara Bungo belum tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya, biaya kegiatan dan pengelolaan pendapatan dalam upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan RSUD Muara Bungo belum dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta manajemen pengelolaan limbah RSUD Muara Bungo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

4.17 RSUD Raden Mattaher Jambi termasuk kategori **kurang** dalam pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan, antara lain karena pengelolaan limbah belum memenuhi persyaratan, serta sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan kesehatan belum memenuhi persyaratan atau tidak dimanfaatkan.

4.18 RSUD Wonosari Gunungkidul DIY termasuk kategori **kurang** dalam pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan, antara lain karena beberapa kegiatan di bidang pelayanan medis, pendukung medis, rumah tangga dan keuangan belum memenuhi standar yang ditetapkan.

4.19 RSUD Wangaya Denpasar Bali termasuk kategori **sedang** dalam pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan.

Kelemahan atas SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

4.20 Kelemahan SPI sebanyak 80 kasus terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, entitas tidak memiliki SOP yang formal, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal, serta struktur pengendalian yang ada tidak memadai/tidak berjalan optimal.

4.21 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan masalah administrasi, serta lain-lain dapat dilihat pada tabel 6. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada **lampiran 4** dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan pada **lampiran 5.**

Tabel 6: Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas RSUD

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Daerah	5	297
2	Potensi Kerugian Daerah	3	451
3	Kekurangan Penerimaan	23	14.758
4	Administrasi	6	-
5	Ketidakhematan	23	2.180
6	Ketidakefektifan	276	46.690
7	Lain-lain	24	31
	Jumlah	**360**	**64.407**

4.22 Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 360 kasus senilai Rp64,41 miliar. Rincian kelompok temuan dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Kerugian Daerah

4.23 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah karena kelebihan pembayaran sebanyak lima kasus senilai Rp297,32 juta. Kasus tersebut diantaranya terjadi di RSUD Dr. Djasemen Saragih Pematangsiantar Sumatera Utara sebanyak dua kasus senilai Rp171,07 juta, yaitu terdapat kelebihan pembayaran dalam pembangunan gedung senilai Rp42,24 juta, dan pengadaan jasa perawatan kebersihan merugikan keuangan daerah senilai Rp128,83 juta.

Potensi Kerugian Daerah

4.24 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah karena hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak sebanyak tiga kasus senilai Rp450,80 juta, diantaranya pengadaan dua belas unit alat kedokteran umum di RSUD Dr. Johanes Kupang NTT senilai Rp162,18 juta.

Kekurangan Penerimaan

4.25 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan karena penerimaan daerah/perusahaan/denda belum/tidak/terlambat dipungut/ diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 23 kasus senilai Rp14,76 miliar, diantaranya penerimaan rumah sakit daerah belum diterima atas pengajuan klaim asuransi kepada PT Askes di RSUD Dr. Johanes Kupang NTT senilai Rp5,34 miliar.

Administrasi

4.26 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi karena proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan sebanyak enam kasus, diantaranya kerjasama antara RSUD Muara Bungo Jambi dengan Apotek Cahaya Sehat dan Apotek Bersama melanggar prinsip-prinsip pengadaan obat.

Ketidakhematan

4.27 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan, diantaranya delapan kasus pemborosan keuangan daerah/perusahaan senilai Rp2,18 miliar. Kasus tersebut diantaranya terjadi di RSUD Dr. M Yunus Bengkulu dalam pelayanan obat-obatan kepada masyarakat miskin pada Program Jamkesmas yang tidak mengacu pada pedoman yang berlaku senilai Rp1,18 miliar.

Ketidakefektifan

4.28 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan terdiri atas enam jenis temuan, yaitu pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, serta fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

4.29 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 276 kasus senilai Rp46,69 miliar yang terdiri dari:

- 12 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp13,83 miliar;
- 17 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp31,39 miliar;
- 9 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp1,48 miliar;

- 14 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
- 156 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
- 68 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

4.30 Kasus tersebut diantaranya terjadi di RSUD Dr. Johanes Kupang NTT, yaitu barang yang dibeli pada Tahun 2007 tidak dapat dimanfaatkan sebanyak 119 unit peralatan medis senilai Rp14,82 miliar.

Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota

4.31 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada sembilan obyek pemeriksaan, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sabang, Dinkes Kota Payakumbuh, Dinkes Kabupaten Tanah Datar, Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Dinkes Provinsi NTB, Dinkes Provinsi NTT, Dinkes Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Dinkes Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dan Dinkes Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

4.32 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan secara umum bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan kesehatan telah dilaksanakan secara ekonomis dan efektif melalui penilaian apakah:

- Pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum bidang kesehatan;
- Sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan pelayanan kesehatan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.33 Metodologi pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan risiko yang didasarkan pada pemahaman entitas dan sistem pengendalian intern yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pencapaian kinerja kesehatan, serta pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Pemeriksaan dilakukan dengan pengujian atas kegiatan--kegiatan yang signifikan dan berisiko tinggi secara sampling.

Pencapaian Indikator Kinerja

4.34 Untuk menilai kinerja pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, indikator yang digunakan adalah standar pelayanan minimum (SPM) Bidang Kesehatan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 dan Keputusan Menkes Nomor 1457 Tahun 2003, yang meliputi Mortalitas, Morbiditas, Status Gizi, Keadaan Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat, Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Manajemen Kesehatan, dan Lintas Sektor.

4.35 Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan belum efektif karena pada umumnya pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut.

4.36 Dinkes Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi beberapa indikator kinerja pelayanan kesehatan dan belum menetapkan SPM bidang kesehatan. Hal ini mengakibatkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kesehatan belum dapat dicapai.

4.37 Dinkes Kota Payakumbuh belum memenuhi beberapa indikator kinerja pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Payakumbuh Sehat 2010, bahkan terdapat tiga indikator yang tingkat pencapaiannya adalah 0%.

4.38 Dinkes Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan belum memenuhi 22 indikator kinerja pelayanan kesehatan.

4.39 Dinkes Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat belum memenuhi beberapa indikator kinerja pelayanan kesehatan yang ditetapkan sehingga pelayanan kesehatan belum berjalan secara efektif.

4.40 Dinkes Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat belum memenuhi beberapa indikator kinerja pelayanan kesehatan, bahkan terdapat beberapa indikator yang tidak dapat diukur karena kegiatannya tidak dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan belum dapat dicapai.

4.41 Dinkes Provinsi NTB belum mencapai kinerja pelayanan kesehatan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut meliputi aspek perencanaan bidang kesehatan, aspek pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan, aspek pelaporan, evaluasi, penilaian risiko, pengukuran atas efektivitas program dan kegiatan, serta aspek pengendalian bidang kesehatan.

Kelemahan atas SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

4.42 Kelemahan SPI sebanyak 18 kasus terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, entitas tidak memiliki SOP yang formal, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal, serta struktur pengendalian yang ada tidak memadai/tidak berjalan optimal.

4.43 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan masalah administrasi, serta lain-lain dapat dilihat pada tabel 7. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada **lampiran 6** dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan pada **lampiran 7.**

Tabel 7: Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Kesehatan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Daerah	4	166
2	Potensi Kerugian Daerah	2	68
3	Kekurangan Penerimaan	4	254
4	Administrasi	7	-
5	Ketidakhematan	9	3.670
6	Ketidakefektifan	97	16.221
7	Lain-lain	6	1.442
	Jumlah	**129**	**21.821**

4.44 Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 129 kasus senilai Rp21,82 miliar. Rincian kelompok temuan dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Kerugian Daerah

4.45 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah karena kelebihan pembayaran sebanyak empat kasus senilai Rp165,64 juta, diantaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor pada Dinkes Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat di atas harga pasar dan harga penetapan oleh Bupati senilai Rp110,85 juta.

Kekurangan Penerimaan

4.46 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan karena penerimaan daerah/perusahaan/denda belum/tidak/terlambat dipungut/ diterima/disetor ke kas daerah sebanyak empat kasus senilai Rp254,31 juta, diantaranya terjadi di Dinkes Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat atas kekurangan pembayaran biaya kapitasi askeskin untuk biaya operasional puskesmas senilai Rp154,19 juta.

Administrasi

4.47 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi terdiri atas dua jenis temuan, yaitu bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/sah dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan.

4.48 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tujuh kasus yang terdiri dari dua kasus bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/sah dan lima kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan. Kasus tersebut diantaranya terjadi di Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur karena bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ sah atas pelaksanaan kegiatan peningkatan imunisasi dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan/Pemberantasan Penyakit.

Ketidakhematan

4.49 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan sebanyak sembilan kasus pemborosan keuangan daerah/perusahaan senilai Rp3,67 miliar. Kasus tersebut diantaranya terjadi di Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak dua kasus, yaitu pemborosan keuangan daerah atas pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp1,88 miliar.

Ketidakefektifan

4.50 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan terdiri atas tujuh jenis temuan, yaitu penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, serta fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

4.51 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 97 kasus senilai Rp16,22 miliar yang terdiri dari:

- 10 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp994,69 juta;
- 11 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp3,47 miliar;
- 11 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp4,08 miliar;
- 7 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,00 miliar;
- 12 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp5,65 miliar;
- 30 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp23,72 juta; dan
- 16 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

4.52 Kasus tersebut diantaranya terjadi di Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak tiga kasus senilai Rp4,47 miliar, yaitu:

- Pemanfaatan kendaraan bermotor tidak menunjang pelaksanaan program secara langsung senilai Rp1,77 miliar;
- Pengadaan alat kesehatan senilai Rp1,47 miliar dan buku senilai Rp367,62 juta pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), serta pengadaan alat kesehatan pada Program Pemberantasan/Penanggulangan Penyakit (P2P) senilai Rp866,00 juta tidak efektif; dan

- Evaluasi pelaksanaan tiga program bidang kesehatan tidak dilakukan secara optimal dan komprehensif.

Gambar 2 : Pasien yang Tengah Menjalani Rawat Inap di RSUD

BAB 5

Pelayanan Pendidikan

5.1 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan dilaksanakan pada empat obyek pemeriksaan, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pematangsiantar Sumatera Utara, Disdik Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara, Disdik Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, dan Disdik Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

5.2 Pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan secara umum bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan pendidikan telah dilaksanakan secara ekonomis dan efektif melalui penilaian apakah:

- Pelayanan pendidikan oleh Dinas Pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum bidang pendidikan;
- Sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan pelayanan pendidikan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

5.3 Metodologi pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan risiko yang didasarkan pada pemahaman entitas dan sistem pengendalian intern yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pencapaian kinerja pendidikan. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan cara menghitung realisasi hasil pencapaian indikator pelayanan pendidikan dan membandingkannya dengan standar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja

5.4 Untuk menilai kinerja pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota, indikator yang digunakan adalah standar pelayanan minimum (SPM) Bidang Pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 129a/U/2004. Indikator tersebut meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melanjutkan (AM), pengembangan pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B, sarana dan prasarana sesuai standar teknis, serta kualifikasi guru sesuai dengan kompetensi standar nasional pendidikan.

5.5 Pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan belum efektif karena pada umumnya pencapaian indikator kinerja pelayanan pendidikan belum memenuhi SPM yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut.

5.6 Disdik Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah secara umum belum memenuhi beberapa indikator kinerja pelayanan pendidikan. Indikator kinerja yang belum terpenuhi, yaitu APS, AM, dan SPM untuk kualifikasi guru, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI, serta jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs.

5.7 Disdik Kota Pematangsiantar Sumatera Utara belum memenuhi beberapa indikator kinerja pelayanan pendidikan. Berdasarkan indikator SPM tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang ditetapkan terdapat enam indikator yang berhasil dicapai dan tujuh indikator yang tidak tercapai, yaitu sebagai berikut:

- Indikator kinerja pendidikan dasar yang dapat dicapai, yaitu jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI yang diukur dengan APK dan APM, AM untuk jumlah lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs, jumlah anak dalam kelompok usia 12-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs, jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi, serta jumlah lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMK.
- Indikator kinerja pendidikan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu APS tingkat SD/MI yang melebihi standar, sekolah belum memiliki sarana dan prasarana minimum sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional, jumlah guru SD/MI belum memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional, APS tingkat SMP/MTs yang melebihi standar, sekolah tingkat SMP/MTs belum memiliki sarana dan prasarana minimum sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional, dan jumlah guru SMP/MTs belum memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

5.8 Disdik Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara belum memenuhi beberapa indikator kinerja pelayanan pendidikan atas penuntasan program wajib belajar sembilan tahun, yaitu sebagai berikut:

- APM pada tingkat SMP belum memenuhi SPM. Hal ini terlihat dari pencapaian APM tahun ajaran 2007/2008 dan 2008/2009 masing-masing sebesar 72,91% dan 76,57% masih berada di bawah SPM yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun pada Disdik Kota Padangsidimpuan belum dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak anak usia SMP (13-15 tahun) yang tidak melanjutkan pendidikan.
- Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi, yaitu jumlah guru SD yang memenuhi kualifikasi latar belakang pendidikan S-1 hanya sebanyak 16,11% dan yang memenuhi sertifikasi profesi guru hanya sebanyak 6,62%.
- Sarana dan prasarana sekolah baik tingkat SD maupun SMP belum memadai

5.9 Disdik Kabupaten Sambas Kalimantan Barat termasuk kategori cukup dalam pencapaian indikator kinerja pendidikan.

Kelemahan atas SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

5.10 Kelemahan SPI sebanyak tujuh kasus yang terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, entitas tidak memiliki SOP yang formal, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal, serta struktur pengendalian yang ada tidak memadai/tidak berjalan optimal.

5.11 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan masalah administrasi, serta lain-lain dapat dilihat pada tabel 8. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada **lampiran 8** dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan pada **lampiran 9**.

Tabel 8: Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Pendidikan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Daerah	2	169
2	Potensi Kerugian Daerah	1	47
3	Kekurangan Penerimaan	1	19
4	Administrasi	4	-
5	Ketidakefektifan	33	15.628
6	Lain-lain	2	350
	Jumlah	**43**	**16.213**

5.12 Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 43 kasus senilai Rp16,21 miliar. Rincian kelompok temuan dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Kerugian Daerah

5.13 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah karena kelebihan pembayaran sebanyak dua kasus senilai Rp168,73 juta, diantaranya pengadaaan sarana olahraga SD, SMP dan SMA Tahun 2008 di Disdik Kabupaten Sambas Kalimantan Barat senilai Rp140,38 juta.

Administrasi

5.14 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi terdiri atas dua jenis temuan, yaitu bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/sah dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan.

5.15 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya empat kasus yang terdiri dari dua kasus bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/sah dan dua kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan. Kasus tersebut diantaranya terjadi di Disdik Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, yaitu bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/sah atas pengadaan komputer Tahun 2007.

Ketidakefektifan

5.16 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan terdiri atas tujuh jenis temuan, yaitu penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan,

pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, serta fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik.

5.17 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 33 kasus senilai Rp15,63 miliar yang terdiri dari:

- 7 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp5,29 miliar;
- 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp224,78 juta;
- 1 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp601,65 juta;
- 2 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp1,70 miliar;
- 11 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp6,82 miliar;
- 8 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp232,80 juta; dan
- 2 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik senilai Rp762,89 juta.

5.18 Kasus tersebut diantaranya terjadi di Disdik Kabupaten Sambas Kalimantan Barat sebanyak 15 kasus senilai Rp11,69 miliar, yaitu:

- Realisasi belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOPP) dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) berpotensi tumpang tindih senilai Rp4,49 miliar;
- Penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan BOS Tahun 2007 senilai Rp108,30 juta;
- Distribusi bantuan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada Kabupaten Sambas Tidak Merata;
- Besaran alokasi DAK Tahun 2007 kepada sekolah tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007;
- Alokasi dana Tahun 2007 pada SLB Sambas belum berdasarkan skala prioritas yang seharusnya;
- Rehabilitasi fisik sekolah, pengadaan buku pengayaan dan buku referensi Program DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 pada beberapa sekolah dasar belum sesuai dengan ketentuan;
- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD yang bersumber dari dana DAU Tahun 2007 senilai Rp224,78 juta belum

menunjukkan skala prioritas dan diantaranya satu unit rumah belum ditempati senilai Rp56,19 juta;

- Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 berupa pengadaan alat peraga pendidikan, komputer dan buku pengayaan ketrampilan belum dapat dimanfaatkan senilai Rp601,65 juta;
- Penyaluran Dana BOS Tahun 2007 dan 2008 (s.d. Triwulan II 2008) belum terserap senilai Rp173,66 juta dan dana BOS Triwulan III (s.d. Agustus 2008) belum terealisasi senilai Rp6,09 miliar;
- Tenaga non guru yang tersedia belum dapat mencukupi kebutuhan;
- Kualifikasi dan jumlah guru tingkat SD/MI, Tingkat SMP/MTs dan Tingkat SMA/MA Kabupaten Sambas belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan penyebarannya belum merata;
- Angka Putus Sekolah Tahun Ajaran 2007/2008 belum memenuhi standar pelayanan minimum sehingga menghambat tercapainya program wajib belajar sembilan tahun;
- Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Pendidikan Dasar dan Tingkat Pendidikan Menengah Kabupaten Sambas Tahun Ajaran 2007/2008 relatif rendah;
- Alokasi dana pendidikan di Kabupaten Sambas belum mencapai 20% dari Dana APBD Kabupaten Sambas; dan
- Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sambas belum memenuhi standar pelayanan minimum.

Lain-lain

5.19 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah lain-lain terjadi di Disdik Kota Pematangsiantar Sumatera Utara, yaitu masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi pengembangan SD Sekolah Standar Nasional (SSN) Tahun 2008 tidak sesuai ketentuan senilai Rp350,00 juta.

BAB 6

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam–Nias

6.1 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Tahun 2006 dan 2007 pada empat bidang, yaitu bidang perumahan dan permukiman, bidang agama, sosial dan budaya, bidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang transportasi udara.

6.2 Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui dan menilai apakah:

- Perencanaan program rekonstruksi yang dibiayai dana bantuan luar negeri Tahun 2006 dan 2007 telah disusun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias) telah efektif;
- Pelaksanaan program rekonstruksi, khususnya pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
- Hasil rekonstruksi telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembangunannya.

6.3 Metodologi pemeriksaan yang digunakan antara lain dengan melakukan:

- Analisis atas organisasi, sistem dan prosedur yang berlaku dalam penanganan bencana;
- Pengujian atas sistem dan prosedur, bukti-bukti, dokumen dan catatan pendukung lainnya;
- Wawancara dan konfirmasi kepada pihak terkait; dan
- Pemeriksaan fisik di lapangan.

Hasil Pemeriksaan

6.4 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaaan, ketidakefektifan, dan masalah administrasi, serta lain-lain dapat dilihat pada tabel 9. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada **lampiran 10** dan rincian kelompok temuan menurut entitas disajikan pada **lampiran 11.**

Tabel 9: Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
1	Kerugian Negara	6	816
2	Potensi Kerugian Negara	1	1.998
3	Kekurangan Penerimaan	6	2.611
4	Administrasi	8	-
5	Ketidakefektifan	16	347.270
6	Lain-lain	1	6.233
	Jumlah	**38**	**358.928**

6.5 Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 38 kasus senilai Rp358,93 miliar. Rincian kelompok temuan dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Kerugian Negara

6.6 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara terdiri atas dua jenis temuan, yaitu kelebihan pembayaran dan kekurangan volume. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya enam kasus senilai Rp815,81 juta yang terdiri dari lima kasus kelebihan pembayaran senilai Rp733,29 juta dan satu kasus kekurangan volume senilai Rp82,52 juta.

6.7 Kasus tersebut diantaranya adalah:

- Terdapat *overestimated* pekerjaan rehabilitasi perumahan akibat kesalahan *Bill of Quantity* yang dibuat oleh konsultan perencana senilai Rp311,04 juta; dan
- Terdapat kelebihan pembayaran biaya pengujian pengendalian mutu kontrak rehabilitasi perumahan dan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp124,00 juta, serta kekurangan pekerjaan senilai Rp101,70 juta.

Potensi Kerugian Negara

6.8 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara karena hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas dua bandar udara di NAD yang mengakibatkan umur ekonomis atas hasil pekerjaan aspal tidak maksimal senilai Rp1,99 miliar.

Kekurangan Penerimaan

6.9 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan karena penerimaan negara/perusahaan/denda belum/tidak/terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak enam kasus senilai Rp2,61 miliar.

6.10 Kasus tersebut diantaranya adalah:

- 9 pekerjaan rehabilitasi bidang agama, sosial dan budaya mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp990,16 juta;
- Pembangunan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda fasilitas sisi darat terlambat dan kontraktor belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp665,20 juta; dan
- 11 paket pekerjaan pada satker BRR-Pendidikan, kesehatan dan peran perempuan pada Kabupaten Nias dan Nias Selatan terlambat dan kontraktor belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp527,62 juta.

Administrasi

6.11 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi terdiri atas empat jenis temuan, yaitu bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/sah, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang - undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa, serta perencanaan kegiatan tidak memadai.

6.12 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya delapan kasus yang terdiri dari:

- 1 kasus bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/sah;
- 2 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan;
- 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa; dan
- 4 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai.

6.13 Kasus tersebut diantaranya adalah:

- Penyaluran bantuan beasiswa Tahun 2007 di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan belum dilengkapi dengan laporan akhir pelaksanaan; dan
- Terdapat pelaksanaan lima pekerjaan lanjutan rekonstruksi bidang agama, sosial dan budaya tanpa disertai dengan kontrak.

Ketidakefektifan

6.14 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan terdiri atas lima jenis temuan, yaitu penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

6.15 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 16 kasus senilai Rp347,27 miliar yang terdiri dari:

- 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp16,24 miliar;

- 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp1,12 miliar;
- 7 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp141,73 miliar;
- 6 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp188,18 miliar; dan
- 1 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

6.16 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:

- Hasil pembangunan rumah dari *Multi Donor Trust Fund (MDTF)* Tahun 2006 dan 2007 sebanyak 992 unit belum dihuni senilai Rp52,58 miliar dan sebanyak 2.176 unit belum selesai dikerjakan senilai Rp115 miliar; dan
- Perencanaan relokasi rumah di Kecamatan Meurebo dan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang mengakibatkan 500 unit rumah tidak dapat segera dihuni karena sering terkena banjir pada musim penghujan senilai Rp39,08 miliar.

Lain-lain

6.17 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan penambahan nilai kegiatan tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan sebagian kegiatan tidak tercantum dalam RKA/KL pada rekonstruksi bidang agama, sosial dan budaya senilai Rp6,23 miliar.

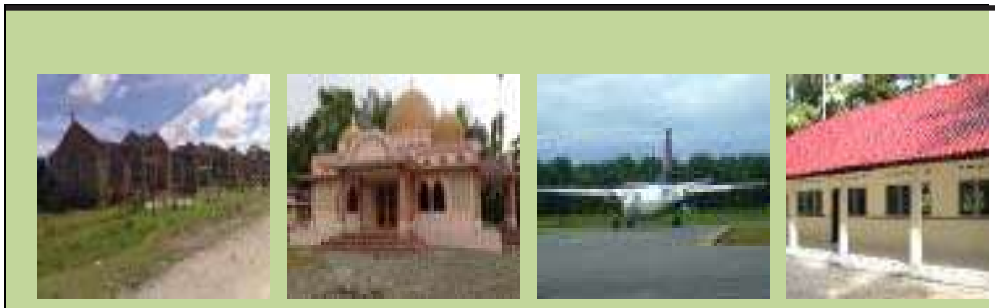

Gambar 3: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

Bab 7

Proses Administrasi Pemekaran Daerah

7.1 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas proses administrasi pemekaran daerah pada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Pemeriksaan kinerja tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas proses administrasi pemekaran daerah yang dilakukan oleh Depdagri dan DPOD.

7.2 Metodologi yang digunakan dalam pemeriksaan kinerja atas proses administrasi pemekaran daerah meliputi metode pengumpulan dan analisa bukti-bukti pemeriksaan. Pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan meliputi reviu dokumen, wawancara, konfirmasi, kuesioner dan analisis prosedur. Analisis prosedur yang dilakukan menggunakan sistem pengendalian. Sementara metode analisa data diantaranya menggunakan model logika program (*program logic model)*, bagan alur, dan *model of good management*. Pemeriksa melaksanakan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan teknik sampling dan mengevaluasi hasil sampel untuk menghasilkan bukti pemeriksaan yang cukup.

Gambar 4: Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Hasil Pemeriksaan

7.3 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa proses administrasi pemekaran daerah belum berjalan efektif karena adanya permasalahan-permasalahan berikut.

7.4 Sejak tahun 1999 s.d. 2008, Pemerintah telah melakukan pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 203 daerah, yaitu tujuh provinsi dan 196 kabupaten/kota. Namun sampai dengan saat ini, Pemerintah belum mempunyai *grand desain* yang mengatur arah kebijakan dan strategi pemekaran daerah, serta prediksi mengenai jumlah daerah otonomi ideal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Grand desain* tersebut dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah dan DPR RI dalam menyikapi aspirasi masyarakat mengenai pembentukan DOB.

7.5 Depdagri tidak mempunyai dokumen yang menunjukkan bahwa pemekaran daerah periode Tahun 1999 s.d. 2002 telah melalui observasi yang dilakukan oleh para ahli yang kompeten dan independen. Sedangkan untuk pemekaran daerah periode Tahun 2003 s.d. 2008 pada umumnya telah melalui proses observasi, untuk menilai kebenaran data teknis yang diusulkan oleh calon DOB. Pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa observasi tersebut dilakukan oleh tenaga ahli atau konsultan yang tidak kompeten dan independen, dengan bukti-bukti sebagai berikut.

- Penetapan konsultan/tenaga ahli yang akan melakukan pengkajian tidak melalui proses seleksi yang kompetitif;
- Penunjukan tenaga ahli/konsultan tidak ditetapkan secara resmi dan formal, serta tidak diikat dengan suatu perjanjian yang sah;
- Pelaksanaan observasi ke daerah sebagian dan/atau seluruhnya dibiayai dari calon daerah yang akan dimekarkan;
- Pemerintah Daerah dan Depdagri menggunakan konsultan yang sama dalam melakukan pengkajian kelayakan teknis calon DOB; dan
- Depdagri belum mempunyai pedoman yang mengatur tentang metodologi observasi yang harus diikuti oleh tim observasi.

7.6 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, proses pemekaran daerah harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan yang menjadi domain Pemerintah. Di sisi lain, penetapan undang-undang pembentukan DOB merupakan domain bersama antara Pemerintah dan DPR RI. Dalam prakteknya, gagasan pemekaran daerah pada umumnya merupakan inisiatif DPR RI yang dalam pelaksanaannya seringkali mengabaikan ketentuan mengenai proses pembentukan DOB yang diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000. Misalnya, RUU pembentukan DOB sudah diajukan oleh DPR kepada Presiden sebelum dilakukan pengujian persyaratan teknis oleh tim teknis DPOD, proses pembahasan RUU dengan DPR RI mendahului sidang DPOD, dan penyampaian RUU oleh DPR RI kepada Presiden mendahului sidang DPOD.

7.7 Setiap sidang DPOD yang diadakan untuk membahas usulan pemekaran daerah tidak dihadiri oleh sebagian besar menteri terkait sebagai anggota DPOD, tetapi diwakilkan kepada staf menteri yang ditunjuk. Hal ini berisiko bahwa keputusan yang diambil dalam sidang DPOD tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif/memadai dari seluruh anggota DPOD yang dianggap mempunyai kompetensi dalam bidang tugasnya.

7.8 Pembentukan DOB, baik yang berasal dari inisiatif Pemerintah maupun berasal dari inisiatif DPR RI, pada dasarnya harus melalui mekanisme sidang DPOD, karena dalam sidang tersebut dilakukan pembahasan mengenai kelayakan usulan pembentukan DOB ditinjau dari berbagai aspek sesuai persyaratan. Penelaahan lebih lanjut atas risalah hasil sidang DPOD, diketahui permasalahan berikut.

- Terdapat beberapa usulan DOB yang telah diterbitkan UU Pembentukannya, meskipun masih dalam proses pembahasan dan/atau belum diputuskan usulan pembentukannya dalam sidang DPOD; dan

- Pembentukan 97 DOB tanpa melalui keputusan sidang DPOD yang mengakibatkan pembentukan beberapa DOB tidak berdasarkan pertimbangan kelayakan yang diputuskan dalam sidang DPOD dan berpotensi menimbulkan adanya praktek-praktek kecurangan dalam pembuatan usulan keputusan pembentukan DOB. Daftar 97 DOB tersebut dapat dilihat pada softcopy LHP terlampir.

7.9 Depdagri dan/atau DPOD tidak mendokumentasikan seluruh proses pemekaran daerah secara memadai. Hal ini terlihat dari permasalahan berikut.

- Depdagri dan DPOD tidak memiliki sistem dan prosedur yang mengatur tata kelola dokumentasi dan tidak menunjuk pegawai yang secara khusus mengelola dokumen tersebut.
- Depdagri dan DPOD tidak melakukan tata kelola dokumen-dokumen dengan baik, seperti tidak mengklasifikasikan jenis dokumen, tidak melakukan indeksasi, tidak membuat buku kendali atau buku register arsip, dan tidak menyiapkan secara khusus tempat penyimpanan dokumen-dokumen kegiatan pemekaran daerah.

7.10 Meskipun sejak Tahun 1999 s.d. 2008 sudah terbentuk sebanyak 203 DOB, namun Depdagri belum melakukan evaluasi yang memadai terhadap kinerja DOB, sehingga tidak diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja pemekaran daerah, serta tidak ada *feed back* bagi Depdagri dan/atau DPOD dalam rangka menyikapi usulan pemekaran daerah.

Gambar 5: Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara menjadi Sulawesi Utara dan Gorontalo

BAB 8

Pemeriksaan Kinerja Lainnya

8.1 Selain tema pemeriksaan kinerja di atas, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada tujuh obyek pemeriksaan lainnya, yaitu lima obyek pemeriksaan pada Pemerintah Pusat dan dua obyek pemeriksaan pada BUMD, dengan rincian sebagai berikut:

- Pelayanan jasa pengujian bahan dan kalibrasi pada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Departemen Perindustrian;
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir wilayah daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
- Pengadaan Material Jembatan Rangka Baja (MJRB) tahap III yang dibiayai dari pinjaman pemerintah Spanyol pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum;
- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ) Jakarta, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan dan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Suradadi Kabupaten Tegal Jawa Tengah pada Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP);
- Pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pengelolaan dana/pungutan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans);
- Pelaksanaan operasional Transjakarta pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan BLU Transjakarta Busway; dan
- Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tarakan Kalimantan Timur.

8.2 Tujuan pemeriksaan kinerja pada umumnya adalah untuk menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif, menilai apakah sistem pengendalian intern kegiatan yang diperiksa telah memadai, serta menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Temuan-temuan yang perlu mendapat perhatian

8.3 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Departemen Perindustrian tidak efektif dalam memberikan pelayanan jasa pengujian bahan dan kalibrasi karena belum didukung dengan struktur organisasi dan sumber daya yang memadai.

8.4 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo pada Departemen Pekerjaan Umum kurang memprioritaskan pengendalian banjir dalam kebijakan pembangunan infrastruktur sehingga infrastruktur yang ada belum mampu mengatasi banjir sesuai dengan Master Plan 1974 yang mengakibatkan wilayah

di sekitar DAS Bengawan Solo Hilir, yaitu Kota Bojonegoro, Lamongan, Tuban dan Gresik terancam bahaya bencana banjir secara terus-menerus.

8.5 Yayasan Mangadeg belum memenuhi kewajiban atas penggunaan kawasan hutan seluas 8 ha untuk pembangunan Komplek Pemakaman Astana Giribangun, sehingga pengalihan fungsi hutan yang terjadi sejak Tahun 1976 telah mengurangi daya dukung hutan di sekitar DAS Bengawan Solo yang lebih lanjut berpotensi meningkatkan resiko terjadinya banjir dan tanah longsor.

8.6 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu pada Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum tidak berpedoman pada rencana lokasi awal dalam mendistribusikan Material Jembatan Rangka Baja sehingga tujuan program pengadaan MJRB tidak tepat sasaran dan pemerintah kehilangan kesempatan untuk menggunakan MJRB dengan konsekuensi biaya bunga dan komitmen yang harus ditanggung.

8.7 PPN Pekalongan pada Ditjen Perikanan Tangkap DKP tidak merencanakan kegiatan pengembangan pelabuhan secara memadai sehingga hasilnya belum menunjang kelancaran kegiatan operasional pelabuhan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masalah berikut.

- Pembangunan obyek wisata bahari senilai Rp4,24 miliar tidak sesuai dengan *master plan* yang mengakibatkan pembangunan tersebut kurang efektif dan memboroskan keuangan negara; dan
- Pembangunan sarana dan prasarana senilai Rp1,78 miliar tidak bisa dipergunakan secara optimal sehingga pemanfaatannya kurang efektif.

8.8 PPSNZ Jakarta pada Ditjen Perikanan Tangkap DKP lambat dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan perikanan dengan dana pinjaman dari *Japan Bank for International Corporation (JBIC),* dan kurang memprioritaskan penanggulangan masalah banjir pada akses jalan masuk sehingga belum menunjang pelayanan kepada masyarakat pengguna pelabuhan dari pengaruh banjir.

8.9 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007 tidak sesuai kontrak dan diduga terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp4,69 miliar.

8.10 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan BLU Transjakarta Busway belum optimal dalam mengoperasikan Transjakarta, karena belum ada kepastian *headway*, jalur khusus *busway* belum steril, terbatasnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan terbatasnya jumlah dan kapasitas kantong parkir. Hal ini disebabkan penyediaan fasilitas pendukung program *busway* belum disiapkan dan kurangnya koordinasi antar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan waktu tempuh operasi dan pengisian bahan bakar menjadi lama berdampak menumpuknya penumpang di halte.

Gambar 6: Jalur khusus Busway yang tidak steril

8.11 PDAM Kota Tarakan Kalimantan Timur tidak tertib dalam mengendalikan dan menatausahakan barang di gudang tempat penyimpanan senilai Rp1,60 miliar.

8.12 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam *compact disc* (CD) terlampir atau diakses melalui laman (*website)* www.bpk.go.id.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja dan memberikan rekomendasi. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati.

- Eksaminasi; pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria.

- Reviu; pemeriksa menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.

- Prosedur yang disepakati *(agreed upon procedures*); pemeriksa menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Dalam Semester II Tahun 2008, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 424 entitas/program/kegiatan yang terdiri dari 98 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 278 obyek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, enam obyek pemeriksaan pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, 12 BUMN dan 30 BUMD. Cakupan pemeriksaan atas 424 obyek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp478,98 triliun dengan total temuan senilai Rp29,54 triliun atau 6,16% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa tema sebagai berikut:

- Pelaksanaan belanja;
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana pendidikan lainnya (DPL);
- Manajemen hutan dan pembangunan hutan tanaman industri (HTI);
- Pengelolaan pertambangan batubara;
- Pengelolaan pinjaman LN pemerintah pusat;
- Pelaksanaan program penjaminan simpanan;
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penunjang pembinaan (DPP);
- Pelaksanaan kontrak kerja sama (KKS) minyak dan gas bumi;
- Pelaksanaan subsidi;
- Operasional perusahaan daerah air minum (PDAM);
- Operasional bank pembangunan daerah (BPD); dan
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

BAB 9

Pelaksanaan Belanja

9.1 Dalam Semester II Tahun 2008, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara umum tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja adalah untuk menilai apakah:

- entitas yang diperiksa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- proses pengadaan barang dan jasa telah memperhatikan aspek hemat, efektif, dan efisien; dan
- sistem pengendalian intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

Belanja Pemerintah Pusat

9.2 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja pada pemerintah pusat meliputi 23 kementerian/lembaga (K/L) mencakup 52 obyek pemeriksaan dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp14,63 triliun dengan total temuan Rp5,41 triliun atau 36,97% dari cakupan pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan

9.3 Hasil pemeriksaan mengungkapkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan temuan seperti disajikan pada tabel 10.

Tabel 10 : Kelompok Temuan PDTT atas Belanja Pemerintah Pusat

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
1	Kerugian Keuangan Negara	118	24.818
2	Potensi Kerugian Keuangan Negara	8	8.427
3	Kekurangan Penerimaan Negara	48	203.357
4	Uang Yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan	13	80.937
5	Administrasi	114	-
6	Ketidakhematan/Pemborosan	38	141.461
7	Ketidakefektifan	31	611.257
8	Lain-lain	6	4.348.007
	Jumlah	**376**	**5.418.264**

9.4 Berdasarkan tabel di atas hasil pemeriksaan mengungkapkan 376 kasus senilai Rp5,41 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil PDTT pada 23 K/L tersebut di atas. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada **lampiran 12** dan rincian per entitas dapat dilihat pada **lampiran 13**.

Kerugian Keuangan Negara

9.5 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan belanja terdiri atas tujuh jenis temuan yaitu kelebihan pembayaran, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, tuntutan perbendaharaan (TP), kurang volume, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak dan perjalanan dinas ganda.

9.6 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 118 kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp24,81 miliar yang terdiri dari:

- 90 kasus kelebihan pembayaran senilai Rp14,49 miliar;
- 4 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp2,19 miliar;
- 1 kasus tuntutan perbendaharaan (TP) senilai Rp66,59 juta;
- 18 kasus kurang volume senilai Rp6,26 miliar;
- 2 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp485,60 juta;
- 2 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp1,28 miliar; dan
- 1 kasus perjalanan dinas ganda senilai Rp23,60 juta.

9.7 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kelebihan pembayaran atas biaya langsung personil tenaga ahli karena diperhitungkan tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,59 miliar pada Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta;
- Pengambilan uang muka oleh beberapa rekanan atas pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap I seluruhnya senilai Rp1,24 miliar sampai batas waktu kontrak berakhir pekerjaannya belum dilaksanakan dan tidak ada jaminan uang muka pada Kementerian Koordinator Kesra; dan
- Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan alat instruksi/ alat penolong instruksi (alins/alonins) pada Dinas Pendidikan TNI AU senilai Rp1,22 miliar.

9.8 Departemen Hukum dan HAM dan TNI AD telah menindaklanjuti kasus kerugian keuangan negara sebanyak 10 dari 118 kasus senilai Rp720,77 juta atau 2,85%.

Potensi Kerugian Keuangan Negara

9.9 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara pada pelaksanaan belanja terdiri atas 4 jenis temuan yaitu jaminan pelaksanaan

pekerjaan tidak ada atau tidak disesuaikan dengan adendum, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset dikuasai pihak lain dan hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak/ketentuan.

9.10 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 8 kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp8,42 miliar yang terdiri dari :

- 1 kasus jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak ada atau tidak disesuaikan dengan adendum;
- 1 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp6,48 miliar;
- 1 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp183,03 juta; dan
- 5 kasus hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak/ketentuan senilai Rp1,76 miliar.

9.11 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Ditjen Perhubungan Udara di Jakarta, adanya ganti rugi tanah pada komplek perumahan Perhubungan Udara Jalan Warung Jati Timur Jakarta Selatan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku senilai Rp6,48 miliar; dan
- Kejaksaan, adanya proses pembongkaran gedung kantor Kejari Pangkep tidak sesuai ketentuan yang menimbulkan hilangnya aset negara senilai Rp183,03 juta.

Kekurangan Penerimaan Negara

9.12 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pada pelaksanaan belanja terdiri atas jenis temuan penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas negara.

9.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 48 kasus penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp203,35 miliar.

9.14 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Departemen Hukum dan HAM, adanya perjanjian penambangan batu kapur antara Depkumham dengan PT Semen Cibinong/PT Holcim Indonesia Tbk (PT SC/PT HI) tidak sesuai dengan ketentuan yg berlaku, yaitu ganti rugi pemanfaatan tanah (GRPT) senilai Rp111,27 miliar dan ganti rugi bentuk barang (GRBB) senilai Rp126,73 juta oleh PT SC/PT HI belum disetor ke Kas Negara; dan
- Departemen Kesehatan, terdapat kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp1,09 miliar dan denda keterlambatan yang belum dipungut minimal senilai Rp36,56 miliar atas pengadaan alat kesehatan.

9.15 Departemen Hukum dan HAM, TNI AD, dan TNI AL, telah menindaklanjuti kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara 6 dari 47 kasus senilai Rp661,24 juta atau 0,39%.

Uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan

9.16 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan pada pelaksanaan belanja terdiri atas jenis temuan penggunaan uang muka/belanja yang belum/tidak dipertanggungjawabkan dan pencairan uang untuk pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun.

9.17 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 kasus uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan senilai Rp80,93 miliar yang terdiri dari 10 kasus penggunaan uang muka/belanja yang belum/tidak dipertanggungjawabkan senilai Rp7,16 miliar, dan 3 kasus pencairan uang untuk pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun senilai Rp73,77 miliar.

9.18 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- TNI AD, adanya pertanggungjawaban pencairan anggaran atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun senilai Rp53,98 miliar pada Ditpalad TNI AD tidak sesuai dengan ketentuan;
- TNI AD, terdapat realisasi anggaran belanja pada Kodam VII/Wirabuana tidak sesuai dengan kegiatan senyatanya senilai Rp19,21 miliar dan jasa giro senilai Rp67,18 juta belum disetor ke kas negara; dan
- TNI AD, terdapat pertanggungjawaban pencairan anggaran atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir TA 2007 senilai Rp35,70 miliar dan di tampung dalam rekening bersama, jumlah seharusnya senilai Rp39,15 miliar sehingga terdapat kekurangan transfer senilai Rp3,44 miliar yang tidak jelas pertanggungjawabannya pada Puspenerbad TNI AD.

Administrasi

9.19 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi pada pelaksanaan belanja terdiri atas 13 jenis temuan. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 114 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri dari :

- 8 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
- 43 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah);
- 3 kasus pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah;
- 24 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- 2 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- 18 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- 1 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu/ketentuan intern organisasi yang diperiksa;
- 2 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai;
- 2 kasus struktur pengendalian yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal;
- 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai ;

- 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
- 1 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak; dan
- 8 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal;

9.20 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Departemen Perhubungan, terdapat penatausahaan barang pada Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan (Faslektrikpen) Ditjen Perhubungan Udara tidak tertib;
- Departemen Perdagangan, terdapat nilai sewa gedung kantor selama 13 tahun belum tercermin dalam neraca Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei/Departemen Perdagangan; dan
- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, terdapat penggunaan dana bantuan pembangunan stadion belum dipertanggungjawabkan.

Ketidakhematan

9.21 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan pada pelaksanaan belanja terdiri dari tiga jenis temuan yaitu pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga, penetapan kualitas/kuantitas barang/jasa tidak sesuai standar dan pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan.

9.22 Hasil pemeriksaan menunjukan ada 38 kasus ketidakhematan senilai Rp141,46 miliar yang terdiri dari 31 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp22,25 miliar, 2 kasus penetapan kualitas/kuantitas barang/jasa tidak sesuai standar senilai Rp656,01 juta, dan 5 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp118,55 miliar. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, terdapat pengadaan alat kontrasepsi untuk keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) tahun 2008 yang melebihi kebutuhan senilai Rp112,37 miliar;
- Departemen Kesehatan, terdapat ketidakhematan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan senilai Rp6,32 miliar; dan
- TNI AD, terdapat kemahalan harga dalam pengadaan barang dan jasa pada Puspenerbad TNI AD senilai Rp3,73 miliar.

9.23 Departemen Hukum dan HAM telah menindaklanjuti ketidakhematan/ pemborosan dengan penyetoran uang ke kas negara satu dari 38 kasus senilai Rp91,89 juta.

Ketidakefektifan

9.24 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan pada pelaksanaan belanja terdiri atas lima jenis temuan yaitu pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli tidak/belum dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, penggunaan anggaran tidak tepat

sasaran/tidak sesuai peruntukkan dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

9.25 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 31 kasus ketidakefektifan senilai Rp611,25 miliar yang terdiri dari:

- 6 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp8,28 miliar;
- 10 kasus barang yang dibeli tidak/belum dapat dimanfaatkan senilai Rp210,77 miliar;
- 6 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp274,02 miliar;
- 6 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan senilai Rp118,17 miliar; dan
- 3 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

9.26 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kementerian Koordinator Kesra, terdapat penggunaan dana bantuan penanggulangan pasca bencana pada senilai Rp112,02 miliar tidak tepat sasaran;
- Departemen Kesehatan, terdapat hasil pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan belum dimanfaatkan senilai Rp149,63 miliar; dan
- Lembaga Penyiaran Publik TVRI, terdapat penyelesaian pekerjaan pembangunan menara dan bangunan pendukungnya berlarut-larut senilai Rp28,70 miliar.

Lain-lain

9.27 Kelompok temuan lain-lain pada pelaksanaan belanja digunakan untuk menampung temuan-temuan yang tidak dapat dimasukkan kelompok temuan di atas diantaranya adalah hutang beras Mabes TNI kepada Perum Bulog yang belum dibayar senilai Rp1,38 miliar dan hutang Departemen Pertahanan atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) Pertamina meningkat menjadi Rp4,34 triliun.

Belanja Pemerintah Daerah

9.28 Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pada pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK pada Semester II Tahun 2008 meliputi pengadaan barang dan jasa (belanja daerah), dan belanja pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pada pemerintah daerah meliputi 148 entitas pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yaitu 124 entitas pemeriksaan belanja daerah dan 24 entitas pemeriksaan belanja pilkada, dengan cakupan pemeriksaan senilai Rp18,59 triliun.

Hasil Pemeriksaan

9.29 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah dan belanja pilkada mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 1.869 kasus senilai Rp1,22 triliun. Temuan-temuan tersebut dikelompokkan menjadi delapan kelompok temuan yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, potensi kerugian keuangan daerah, kekurangan penerimaan daerah, uang yang belum/ tidak dipertanggungjawabkan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan kelompok lain-lain. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam tabel 11.

Tabel 11 : Kelompok Temuan PDTT atas Belanja Pemerintah Daerah dan Pilkada

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
1	Kerugian Daerah	756	253.185
2	Potensi Kerugian Daerah	44	17.095
3	Kekurangan Penerimaan	350	74.865
4	Uang Yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan	67	125.809
5	Administrasi	191	-
6	Ketidakhematan/Pemborosan	160	53.784
7	Ketidakefektifan	72	306.789
8	Lain-lain	229	396.901
	Jumlah	**1.869**	**1.228.428**

9.30 Dari tabel di atas dapat diungkapkan bahwa terdapat 1.869 kasus senilai Rp1,22 triliun. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada **lampiran 14** dan rincian per entitas dapat dilihat pada **lampiran 15**.

Kerugian Keuangan Daerah

9.31 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah terjadi karena adanya lima jenis temuan yaitu kelebihan pembayaran, kekurangan volume, pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sama dengan kontrak, dan pembebanan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.

9.32 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 756 kasus yang merugikan keuangan negara senilai Rp253,18 miliar yang terdiri dari :

- 206 kasus kelebihan pembayaran senilai Rp52,05 miliar;
- 338 kasus kekurangan volume senilai Rp99,55 miliar;
- 34 kasus pemahalan harga senilai Rp6,83 miliar;
- 57 kasus spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp27,25 miliar; dan

- 121 kasus pembebanan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp66,98 miliar.

9.33 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp20,38 miliar dalam pelaksanaan 96 paket pekerjaan;
- Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, terdapat kelebihan pembayaran kegiatan swastanisasi kebersihan senilai Rp8,46 miliar; dan
- Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat beberapa pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kekurangan antara volume kontrak dan yang terpasang) mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp4,94 miliar.

Potensi Kerugian Keuangan Daerah

9.34 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian keuangan daerah terjadi karena adanya hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum seluruhnya dilakukan.

9.35 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 44 kasus hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum seluruhnya dlakukan senilai Rp17,09 miliar.

9.36 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Dinas Kimpraswil Kabupaten Bengkalis, terdapat pelaksanaan pekerjaan agregat kelas B dan agregat kelas C yang tidak layak untuk diprestasikan dan dibayarkan senilai Rp2,79 miliar;
- Kabupaten Bengkayang, terdapat volume pekerjaan yang belum dilaksanakan pada peningkatan ruas jalan Monterado, Pangkalan Makmur sampai dengan selesai senilai Rp1,30 miliar; dan
- Provinsi Bali, terdapat komposisi campuran material Laston dan Lataston atas pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi belum sepenuhnya sesuai dengan komposisi campuran yang ditawarkan pada RAB dengan perhitungan TA 2008 senilai Rp 1,31 miliar.

Kekurangan Penerimaan Daerah

9.37 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah terjadi karena adanya penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah.

9.38 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 350 kasus kekurangan penerimaan daerah karena adanya penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp74,86 miliar.

9.39 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam RAB kontrak yang belum diselesaikan rekanan senilai Rp13,74 miliar;

- Kabupaten Melawi, terdapat denda keterlambatan atas pekerjaan *multiyears* kegiatan penyediaan air bersih pada pekerjaan pembangunan prasarana pelayanan air bersih belum dikenakan senilai Rp 3,10 miliar; dan
- KPU Kabupaten Banyuasin, terdapat sisa dana senilai Rp1,91 miliar dan bunga jasa giro senilai Rp89,22 juta belum disetor ke kas daerah.

Uang yang Belum Dipertanggungjawabkan

9.40 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan uang yang belum dipertanggungjawabkan terjadi karena adanya penggunaan uang muka/belanja yang belum/tidak dipertanggungjawabkan.

9.41 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 67 kasus penggunaan uang muka/belanja yang belum/tidak dipertanggungjawabkan senilai Rp125,80 miliar.

9.42 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat belanja bantuan keuangan senilai Rp20,00 miliar belum dipertanggungjawabkan;
- Kabupaten Lumajang, terdapat PPK, PPS, dan KPPS belum mempertanggungjawabkan biaya operasional Pilkada senilai Rp7,19 miliar; dan
- Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengeluaran pada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi periode 2008 – 2013 senilai Rp6,21 miliar belum dipertanggungjawabkan.

Administrasi

9.43 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi terjadi karena adanya tiga jenis temuan yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau sah), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian) dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN/daerah.

9.44 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 191 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri dari:

- 47 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau sah);
- 129 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian); dan
- 15 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah.

9.45 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat penunjukan rekanan kegiatan manajemen konstruksi, penurapan, pembangunan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
- Provinsi Kalimantan Barat, terdapat pekerjaan peningkatan jalan Singkawang - Tebas dan Tebas - Sambas yang sumber dananya dari APBD dan IBRD 4744 - IND sangat berpotensi mengalami keterlambatan;

- Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat proses pelelangan 2 paket pekerjaan dilaksanakan secara formalitas.

Ketidakhematan

9.46 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan terjadi karena adanya pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

9.47 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 160 kasus ketidakhematan karena adanya pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp53,78 miliar.

9.48 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Provinsi Sumatera Barat, terdapat pembangunan jalan dan jembatan oleh Dinas Prasarana Jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp10,64 miliar;
- Kabupaten Ketapang, terdapat perencanaan pembangunan jalan Sei Awan - Tanjungpura, jalan Tanah Merah - Tanjungpura, dan jembatan Girder Ketapang Kecik tidak matang sehingga memboroskan keuangan daerah senilai Rp7,34 miliar; dan
- Kota Pasuruan, terdapat realisasi belanja bantuan sosial kepada lembaga kemasyarakatan keagamaan kota senilai Rp1,37 miliar tidak sesuai dengan asas kepatutan, sehingga memboroskan keuangan daerah.

Ketidakefektifan

9.49 Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan terjadi karena adanya dua jenis temuan yaitu penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan dan barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan.

9.50 Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat 72 kasus ketidakefektifan senilai Rp306,78 miliar yang terdiri dari :

- 38 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan; dan
- 34 kasus barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan.

9.51 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Provinsi DKI Jakarta, terdapat bangunan yang belum dapat difungsikan pada senilai Rp11,26 miliar;
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat beberapa pekerjaan yang penyelesaiannya berlarut-larut senilai Rp 208,23 miliar; dan
- Provinsi Banten, terdapat realisasi pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam DPA SKPD senilai Rp9,60 miliar.

Lain-lain

9.52 Kelompok temuan lain-lain digunakan untuk menampung temuan-temuan yang tidak dapat dimasukkan kelompok temuan di atas. Terdapat 229 kasus senilai Rp396,90 miliar.

9.53 Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah :

- Kabupaten Buton, terdapat hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan pembangunan fisik belum diserahkan kepada Bupati minimal senilai Rp85,44 miliar;
- Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat overhead dan profit pada jenis RAB kontrak pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp15,14 miliar; dan
- Kota Bima, terdapat belanja modal pada Dinas Kimpraswil senilai Rp7,05 miliar dan pada Dinas Perikanan dan Kelautan senilai Rp373,20 juta dilaksanakan dengan cara dipecah-pecah.

BAB 10

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya

10.1 Sejak Juli 2005, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menanggulangi secara bertahap Biaya Satuan Pendidikan (BSP) rata-rata per siswa per tahun yang diperlukan untuk menunjang terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. BSP dibedakan menjadi investasi dan BSP operasional. BSP lebih lanjut dibedakan menjadi biaya personil dan biaya non personil. Dalam hal ini prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah.

10.2 Dalam TA 2007 dan 2008, *unit cost* BOS untuk setiap siswa SD/MI dan SMP/MTs per tahun masing-masing senilai Rp254 ribu dan Rp354 ribu. Anggaran dan realisasi BOS TA 2007 dan TA 2008 (s.d semester I) adalah sebagai berikut.

Tabel 12 : Anggaran dan Realisasi Dana BOS TA 2007 dan Semester I TA 2008

Departemen	TA 2007 (miliar Rp)		TA 2008 (miliar Rp)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Depdiknas	10.436	10.323	10.597	4.944
Depag	1.952	1.845	1.986	894
Jumlah	**12.388**	**12.168**	**12.583**	**5.838**

10.3 Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain, dengan prioritas utama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dari partisipasi masyarakat yang mampu.

10.4 Sumber dana pendidikan lainnya (DPL) yang bersumber dari pemerintah pusat antara lain berupa dana alokasi khusus (DAK), unit sekolah baru (USB), ruang penunjang lainnya (RPL), rehab kelas, peralatan laboratorium IPA/bahasa/komputer. Sedangkan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota diantaranya berupa biaya operasional pendidikan (BOP), bantuan untuk siswa miskin dan lain-lain.

10.5 Pada Semester II Tahun 2008, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS dan DPL sumber dana APBN dan APBD TA 2007 dan Semester I TA 2008. Pemeriksaan dilakukan pada seluruh pemerintah provinsi (33) dan 62 pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah sekolah yang dijadikan sampel pemeriksaan sebanyak 4.127 sekolah.

Tujuan pemeriksaan

10.6 Tujuan pemeriksaan atas dana BOS adalah untuk menilai apakah:

- sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah memadai;
- dana BOS telah diterima oleh sekolah dalam jumlah, waktu, dan cara yang tepat;
- dana BOS telah dipergunakan dengan tepat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan; dan
- tujuan program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu telah tercapai.

10.7 Tujuan pemeriksaan DPL adalah untuk menilai apakah :

- DPL telah diterima sekolah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan;
- DPL telah dipergunakan sesuai peruntukkan; dan
- Aset yang diperoleh dari DPL telah dicatat dan dilaporkan sebagai barang milik negara/daerah.

Gambar 7 : Bantuan Operasional Sekolah Untuk Membantu Proses Belajar Mengajar

Hasil Pemeriksaan

10.8 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa secara umum pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan DPL telah cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, berkaitan dengan desain pengendalian intern maupun implementasi pelaksanaannya. Temuan hasil pemeriksaan atas dana BOS dan DPL disajikan pada tabel 13 berikut ini.

Tabel 13 : Klasifikasi Temuan PDTT atas Dana BOS dan DPL

Temuan Pemeriksaan		Nilai (Juta Rp)
Perencanaan	Penerimaan dana BOS dan DPL tidak dicantumkan dalam RAPBS	624.192
Penyaluran	Keterlambatan penyaluran dana BOS	-
	Pungutan, pemotongan, dan penyetoran kembali DAK bidang pendidikan ke Dinas Pendidikan (merugikan keuangan negara)	2.132
Penggunaan	Dana BOS reguler digunakan tidak sesuai Juknis BOS	28.140
	Dana BOS Buku dibelikan buku diluar jenis buku dalam Juknis dan sebagian buku hasil pembelian dana BOS Buku tidak dapat dimanfaatkan	1.219
	Dana Pendidikan Dasar Lainnya belum dimanfaatkan dan barang hasil pembelian DPL belum dimanfaatkan	36.228
	Penitipan Uang pajak DAK tidak disetorkan ke kas negara dan digunakan untuk keperluan lain	1.635
Pertanggungjawaban	Sisa dana BOS dan pendapatan jasa giro tidak disetor ke kas negara	23.393
	Penggunaan dan pertanggungjawaban dana safeguarding tidak sesuai ketentuan	2.409
	Aset hasil bantuan Pemerintah Pusat tidak jelas status kepemilikan dan pengurusannya	744.805
Lain-lain	Tujuan Program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu di tingkat pendidikan dasar pada 15 Kabupaten/Kota belum sepenuhnya tercapai	-
	Pelaksanaan Pekerjaan DAK tidak secara swakelola dan diarahkan kepada rekanan tertentu	96.718
Total		**1.560.871**

10.9 Berdasarkan tabel di atas hasil pemeriksaan atas dana BOS dan DPL dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Sebanyak 2.592 sekolah (62,84%) tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah (RAPBS) senilai Rp624,19 miliar, mengakibatkan akuntabilitas penerimaan sekolah atas berbagai sumber pembiayaan tidak transparan dan berpotensi untuk disalahgunakan;
- Sebanyak 47 SD dan 123 SMP pada 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, mengakibatkan tujuan program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu di tingkat pendidikan dasar belum sepenuhnya tercapai;
- Penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah pada 32 provinsi mengalami keterlambatan, mengakibatkan dana operasional sekolah tidak tersedia tepat waktu sehingga beberapa sekolah terpaksa melakukan peminjaman dana dari pihak lain untuk keperluan operasional sekolah dan mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah;

- Dana BOS digunakan tidak sesuai peruntukannya, mengakibatkan penggunaan dana BOS tidak tepat sasaran senilai Rp28,14 miliar;
- Sisa dana BOS tahun 2007 senilai Rp21,80 miliar dan pendapatan jasa giro di rekening penampungan Tim Manajemen BOS provinsi senilai Rp1,59 miliar tidak di setor ke kas negara, mengakibatkan pengendalian atas sisa dana BOS yang belum disalurkan lemah, dan penerimaan negara atas pendapatan jasa giro senilai Rp1,59 miliar tertunda;
- Penggunaan dan pertanggungjawaban dana *safeguarding* tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,40 miliar;
- Dana Pendidikan Lainnya (DPL) dan hasil pengadaan DPL belum dimanfaatkan, mengakibatkan DPL yang masih tersimpan di rekening sekolah minimal senilai Rp602,68 juta rawan disalahgunakan dan hasil pengadaan minimal senilai Rp35,62 miliar tidak efektif;
- Penitipan uang pajak senilai Rp1,21 miliar atas DAK bidang pendidikan yang diterima sekolah di Kota Jayapura dipergunakan untuk kepentingan lain dan sisa dana penitipan uang pajak senilai Rp423,18 juta belum disetor ke kas negara, sehingga penerimaan negara berasal dari pajak kurang diterima senilai Rp1,63 miliar dan penggunaan uang pajak senilai Rp1,21 miliar belum dapat diyakini kebenarannya;
- Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pungutan, pemotongan, dan menerima penyetoran kembali DAK dan DPL dari sekolah senilai Rp2,13 miliar, mengakibatkan pengelolaan dana senilai Rp2,13 miliar menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan senilai Rp1,46 miliar berindikasi merugikan daerah; dan
- Aset tetap di sekolah yang berasal dari sumber dana bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal senilai Rp744,80 miliar tidak jelas status kepemilikan dan pengurusannya, mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat menganggarkan biaya pemeliharaan atas aset yang dikuasainya karena belum menjadi aset milik pemerintah daerah dan risiko penyalahgunaan aset tetap, seperti hilang atau dikuasai pihak yang tidak berhak.

10.10 Laporan hasil pemeriksaan atas dana BOS dan DPL untuk masing-masing provinsi/kabupaten/kota secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* dalam *compact disc* terlampir atau melalui laman (*website*) www.bpk.go.id.

Bab 11

Manajemen Hutan dan Pembangunan Hutan Tanaman Industri

11.1 BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Manajemen Hutan dan Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pemeriksaan manajemen hutan dilakukan di Departemen Kehutanan (Pusat) dan empat provinsi sampel yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sedangkan pemeriksaan atas pembangunan HTI oleh PT Inhutani V dilakukan di Jakarta dan Provinsi Lampung.

Tujuan Pemeriksaan

11.2 Pemeriksaan atas Manajemen Hutan bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) telah memadai dan kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, mitigasi perubahan iklim, perizinan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, penebangan hutan dan pelaporannya, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pengamanan dan perlindungan kawasan hutan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11.3 Pemeriksaan atas Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh PT Inhutani V bertujuan untuk menilai apakah SPI terkait kegiatan pembangunan HTI telah didesain dan diimplementasikan dengan memadai serta untuk menilai apakah penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pengembalian Dana Reboisasi (DR) serta pembangunan HTI oleh PT Inhutani V telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Strategi Pemeriksaan

11.4 BPK telah mengembangkan satu strategi pemeriksaan atas manajemen hutan dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta menggunakan bantuan teknologi *geo-spatial* untuk mengidentifikasi permasalahan dan memilih sampel pemeriksaan. Penerapan penggunaan teknologi *geo-spatial* seperti penginderaan jauh/*Remote Sensing*, *Geographic Information System* (GIS) dan *Global Positioning System* (GPS) memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan biayanya lebih efisien. Bukti pemeriksaan yang diperoleh dengan penerapan teknologi *geo-spatial* kemudian diverifikasi kepada pihak yang berwenang (instansi kehutanan dan instansi lainnya yang menggunakan teknologi *geo-spatial*).

Hasil Pemeriksaan

11.5 Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kedua obyek di atas, disimpulkan bahwa masih ditemukan adanya kelemahan SPI antara lain kelemahan desain sistem/ kebijakan yang tidak konsisten dan/atau bertentangan dengan kebijakan yang lain dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, kekurangan penerimaan, indikasi tindak pidana dan kerusakan lingkungan.

Tabel 14 : Kelompok Temuan PDTT atas Manajemen Hutan dan Pembangunan HTI

No	Klasifikasi	Jumlah	Nilai (juta Rp/ribu USD)	
A	**Manajemen Hutan**			
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :				
1	Kerugian Keuangan Negara	1	Rp	300
2	Kekurangan Penerimaan Negara	34	Rp	164.902
			USD	25.668
3	Administrasi	7	Rp	-
4	Indikasi Tindak Pidana	11	Rp	64.541
			USD	502
5	Kerusakan Lingkungan	5	Rp	-
6	Lain-lain	12	Rp	-
Jumlah a)		**70**	**Rp**	**229.743**
			USD	**26.170**
B	**Kegiatan Pembangunan HTI**			
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :				
1	Kekurangan Penerimaan Negara	1	Rp	89.759
2	Lain-lain	3	Rp	-
Jumlah b)		**4**	**Rp**	**89.759**
Jumlah a)+b)		**74**	**Rp**	**319.503**
			USD	**26.170**

11.6 Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan adanya 74 kasus senilai Rp319,50 miliar dan USD26.17 juta dengan rincian sebagai berikut ini.

11.7 Kerugian keuangan negara karena adanya kekurangan volume dan/atau kelebihan pembayaran senilai Rp300 juta.

11.8 Kekurangan penerimaan negara pada manajemen hutan senilai Rp164,90 miliar dan USD25.67 juta serta pada kegiatan pembangunan HTI senilai Rp89,75 miliar karena adanya denda administratif yang belum dikenakan, penggunaan kurs konversi yang tidak tepat, hasil penebangan yang belum dilaporkan dan ganti rugi nilai tebangan belum dibayarkan serta pinjaman DR yang telah jatuh tempo belum dibayar.

11.9 Temuan administrasi karena adanya pelaksanaan lelang secara proforma.

11.10 Indikasi tindak pidana terdiri dari indikasi tindak pidana korupsi senilai Rp1,99 miliar dan indikasi tindak pidana kehutanan senilai Rp62,54 miliar dan USD501.85 ribu.

11.11 Kerusakan lingkungan yang disebabkan penyerobotan kawasan hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi.

11.12 Temuan pemeriksaan lainnya mengungkapkan penyimpangan atas kriteria/ peraturan lainnya yaitu :

- penanaman tidak sesuai sistem silvikultur yang ditetapkan;
- kerja sama operasi belum mendapatkan ijin dari Menhut pada pemeriksaan kegiatan pembangunan HTI serta tata batas yang belum dilaksanakan;
- pengamanan dan inventarisasi hutan tidak sesuai ketentuan; dan
- Departemen Kehutanan belum sepenuhnya melaksanakan komitmen terkait perubahan iklim;

Hasil Pemeriksaan Manajemen Hutan yang Perlu Mendapat Perhatian

Kelemahan Kebijakan

11.13 Beberapa Dinas Kehutanan Kabupaten di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah tidak mengenakan Dana Reboisasi (DR) atas lelang kayu sitaan, sehingga mengakibatkan PNBP berupa DR senilai USD1.45 juta tidak dapat diterima oleh Kas Negara. Hal ini terjadi karena kebijakan Menteri Kehutanan tidak mencabut ketentuan Pasal 23 Permenhut No.P.48/ Menhut-II/2006 yang tidak sesuai dengan Permenhut No.P.18/Menhut-II/2007.

11.14 Penerapan PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan mengenai tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) di bawah diameter 30 cm yang berasal dari hutan alam di Provinsi Riau tidak memperhatikan aspek keadilan atau tidak memperhatikan nilai guna dan kualitas kayu. Hal tersebut tampak dari tarif PSDH atas KBK yang tidak berubah sebesar 1% dibandingkan kelompok kayu berdiameter di bawah 30 cm lainnya seperti cerucuk batang, tiang jermal dan tiang pancang batang, galangan rel lori, arang, dan kayu bakar yang dikenakan tarif baru sebesar 10%. Hal tersebut mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan berupa PSDH senilai Rp38,28 miliar.

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

11.15 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diuraikan dalam beberapa aspek yaitu : inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan PNBP, dan Perijinan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Inventarisasi Hutan

11.16 Kegiatan inventarisasi hutan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pengukuhan kawasan hutan di wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan konflik karena tidak

mengacu kepada kondisi riil di lapangan, data sumber daya hutan tidak dapat diketahui secara pasti serta perencanaan kehutanan menjadi tidak terarah, terukur dan komprehensif.

Pengukuhan Kawasan Hutan

11.17 Perubahan kawasan hutan seluas 241.797,19 ha menjadi pemukiman transmigrasi tidak sesuai dengan ketentuan menghilangkan fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi pada kawasan hutan yang berubah menjadi pemukiman transmigrasi.

Mitigasi Perubahan Iklim

11.18 Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim, antara lain :

- belum dilakukannya *National Inventory Carbon*;
- Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) yang tidak berkekuatan hukum; dan
- Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang dibentuk tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, akuntabilitas dan kepentingan daerah;

Pengelolaan PNBP

11.19 Negara belum menerima denda keterlambatan penyetoran PSDH dan DR dari Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur masing-masing senilai Rp238,00 juta dan senilai USD70.56 ribu.

11.20 Negara belum menerima PSDH dan DR serta sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH) dan Tata Usaha Kayu (TUK) senilai Rp118,26 miliar dan DR senilai Rp7,39 miliar dan USD23.70 juta karena penyelesaian tunggakan PSDH dan DR serta sanksi berlarut-larut di Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

11.21 Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) belum diterima negara di Departemen Kehutanan (Pusat) Jakarta mengakibatkan kekurangan PNBP senilai Rp1,02 miliar.

11.22 Penerimaan negara dari denda administrasi atas penebangan kayu dibawah limit diameter dan kelebihan volume penebangan (per jenis kayu) yang diizinkan di Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur mengakibatkan hilangnya PNBP yang seharusnya diterima kas negara berturut-turut senilai Rp17,04 miliar dan Rp1,24 miliar.

11.23 Kekurangan penerimaan negara yang terjadi di Departemen Kehutanan (Pusat) Jakarta, Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah berupa PSDH dan DR meliputi penggunaan kurs konversi yang tidak tepat (selisih

kurs) senilai Rp2,89 miliar, pengenaan tarif tidak mendasarkan pada tarif yang berlaku senilai Rp41,16 juta, hasil penebangan yang belum dilaporkan senilai Rp2,75 miliar dan USD445.96 ribu, serta ganti rugi nilai tegakan yang belum dibayarkan senilai Rp4,13 miliar.

11.24 Hasil lelang kayu temuan di Provinsi Kalimantan Barat belum disetorkan ke Kas Negara sehingga berpotensi merugikan negara senilai Rp974,97 juta.

11.25 Penyalahgunaan uang hasil lelang kayu temuan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,99 miliar. Di samping itu, terdapat uang hasil lelang kayu temuan yang belum disetor ke kas negara senilai Rp1,67 miliar.

Perijinan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

11.26 Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan di Provinsi Riau diantaranya adalah :

- Pembangunan perkebunan sawit di kawasan hutan oleh Koperasi BTBB seluas 2.140 ha tanpa pelepasan kawasan mengakibatkan kerugian negara dari hilangnya tegakan kayu senilai Rp15,86 miliar;
- Pembangunan perkebunan sawit di kawasan hutan seluas 6.000 ha oleh PT MMJ tanpa pelepasan kawasan terlebih dahulu mengakibatkan kerugian negara dari hilangnya tegakan kayu senilai Rp15,62 miliar dan iuran kehutanan yang tidak terpungut yaitu PSDH senilai Rp1,56 miliar dan DR senilai USD263.16 ribu;
- Pelaksanaan eksploitasi tambang batubara di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai oleh PT CTR seluas 368 ha mengakibatkan kerugian negara dari nilai potensi tegakan kayu senilai Rp97,47 juta, serta iuran kehutanan berupa PSDH dan DR masing-masing senilai Rp9,75 juta dan USD1.74 ribu belum diterima negara; dan
- Pembangunan ruas jalan Sinaboi-Lubuk Gaung sepanjang 20 km di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai, mengakibatkan hilangnya tegakan kayu senilai Rp4,62 miliar serta iuran dari PSDH senilai Rp462,77 juta dan DR senilai USD144.05 ribu, serta terjadinya kerusakan hutan, dan kerugian ekologis berupa hilangnya fungsi hutan.

11.27 Penggunaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat diantaranya adalah :

- Hutan produksi Sungai Durian Sebatang seluas 695,72 ha oleh PT KUT untuk areal pertambangan bauksit sebelum memperoleh izin pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan, mengakibatkan kerugian negara dari hilangnya tegakan kayu PSDH dan DR senilai Rp5,12 miliar dan USD94.65 ribu;
- PT BiOS melakukan penebangan kayu di Hutan Lindung Sungai Bumbun mengakibatkan Kawasan Hutan Lindung S. Padu Ampat – S. Kerawang pada Kelompok Hutan Sungai Bumbun Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya terdeforestasi dan menimbulkan kerugian negara atas nilai kayu yang hilang senilai Rp2,02 miliar; dan

- HLG Arus Deras seluas 1.008,76 ha yang dibangun perkebunan kelapa sawit oleh PT RK mengakibatkan kerugian negara senilai Rp17,25 miliar serta terjadinya kerusakan hutan, dan kerugian ekologis berupa hilangnya fungsi hutan seperti terlihat pada gambar 8 berikut ini.

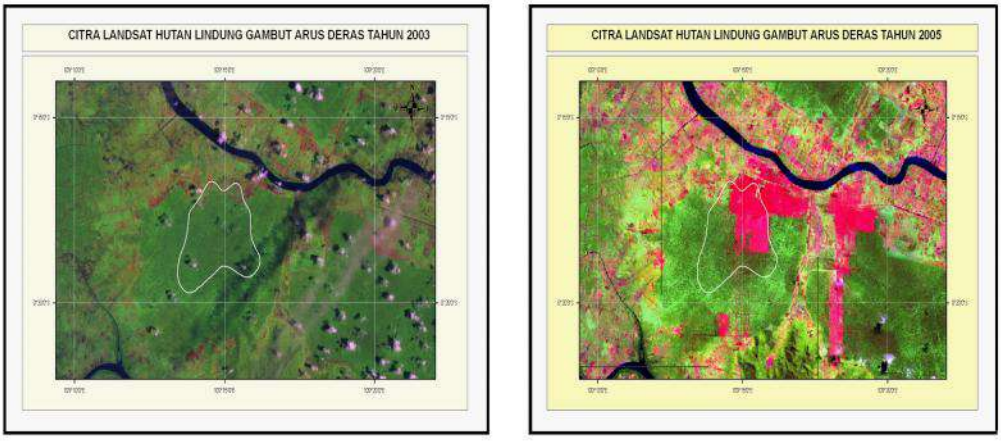

Gambar 8 : Deforestasi Hutan Lindung Gambut Arus Deras yang dikonversi menjadi perkebunan sawit

11.28 Berdasarkan gambar di atas tampak:

- Citra satelit HLG Arus Deras Tahun 2003 sebelum diberikan ijin perkebunan kepada PT RK. Warna hijau menunjukkan tutupan lahan masih berupa hutan; dan
- Citra satelit HLG Arus Deras Tahun 2005 yang terdeforestasi setelah diberikan ijin perkebunan kepada PT RK. Warna merah menunjukkan tutupan lahan bukan berupa hutan lagi.

11.29 Penyerobotan kawasan hutan di Provinsi Riau yang mengakibatkan hilangnya fungsi pokok hutan lindung, rusaknya fungsi areal konservasi, hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologis) yang berpotensi terjadinya bencana banjir dan kekeringan, diantaranya adalah :

- Hutan lindung Sungai Mahato seluas 23.900 ha untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT T dan PT MAI (gambar 9);
- Hutan Lindung Bukit Suligi seluas 24.753 ha untuk perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat;
- Suaka Margasatwa Balai Raja seluas 17.503 ha untuk perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat ; dan
- Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim seluas 2.518,52 ha untuk perkebunan kelapa sawit.

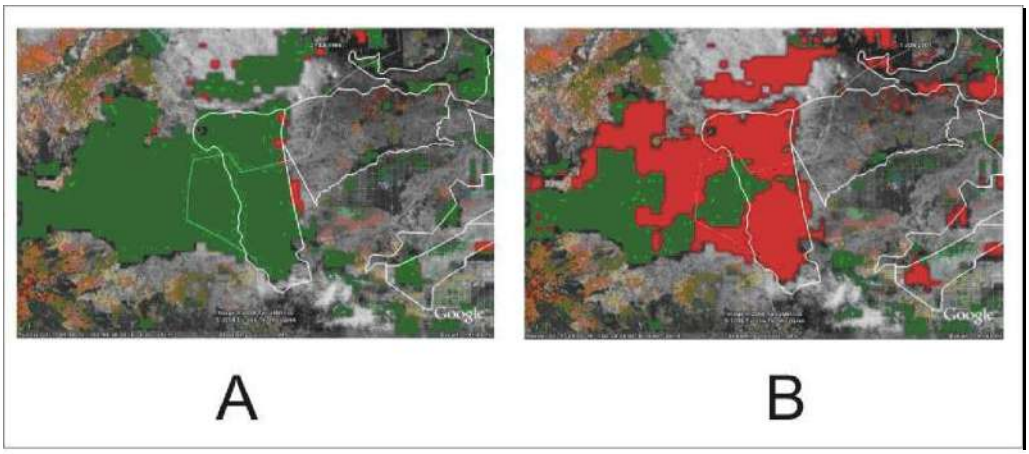

Gambar 9 : Deforestasi Hutan Lindung S. Mahato (Riau)

11.30 Berdasarkan gambar di atas tampak:

- Interpretasi citra satelit hutan lindung S. Mahato tahun 1999 menunjukkan hutan lindung tersebut masih memiliki tutupan lahan berwarna hijau yang berarti masih berupa hutan; dan
- Interpretasi citra satelit hutan lindung S. Mahato tahun 2007, warna merah di lokasi hutan lindung S. Mahato menunjukkan deforestasi di kawasan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan oleh PT T.

11.31 Penggunaan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya pembuatan jalan Mendawai-Bukit Kaki di dalam kawasan Taman Nasional (TN) Sebangau sepanjang 15 km, dan pelepasan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting seluas 2.501,65 ha untuk areal perkebunan (gambar 10), mengakibatkan kerusakan dan perambahan kawasan hutan TN Sebangau.

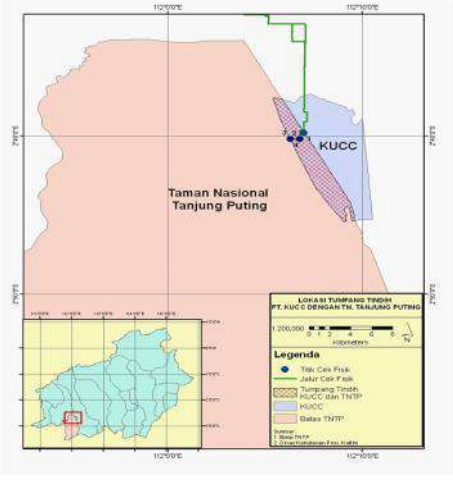

Gambar 10 : Overlay titik GPS pada Peta SK Penunjukan Taman Nasional Tanjung Putting pada lokasi yang telah diberikan pelepasan kawasan.

11.32 Perusahaan perkebunan PT GS di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur membangun perkebunan di atas Hutan Produksi Terbatas (HPT) melanggar ketentuan mengakibatkan HPT seluas 782 ha digunakan tanpa izin yang sah dan tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti terlihat pada gambar 11 yang menunjukkan ijin lokasi PT GS yang *overlap* di HPT dan telah dilakukan pembangunan kebun sawit (warna merah).

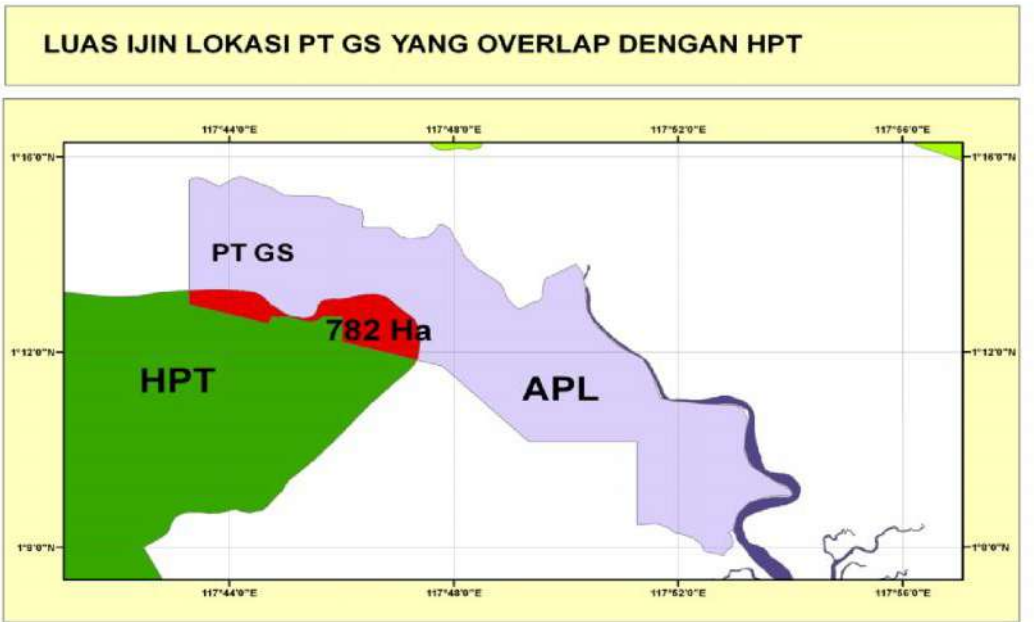

Gambar 11 : Perkebunan PT GS di atas HPT

11.33 Perusahaan tambang batubara PT BP belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.002 ha di Kabupaten Barito Utara dari Menteri Kehutanan namun sudah melaksanakan eksploitasi mengakibatkan potensi timbulnya kerusakan hutan, hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologis) sehingga dapat menimbulkan bencana banjir dan kekeringan (Gambar 12).

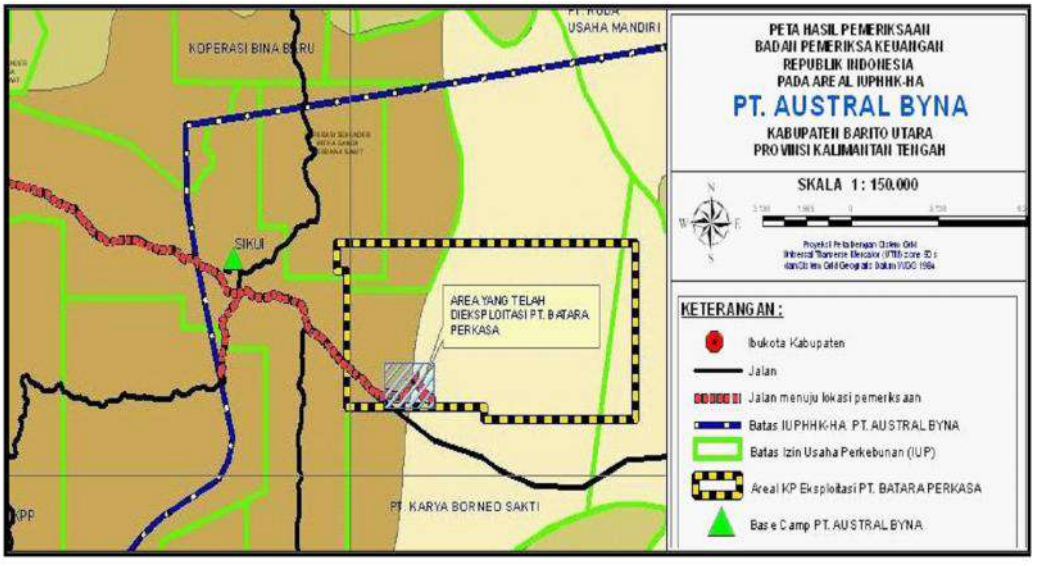

Gambar 12 : Lokasi Pertambangan PT BP yang berada dalam kawasan IUPHHK-HA PT AB

11.34 Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan tujuan pembangunan HTI dalam meningkatkan produktivitas lahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar tidak tercapai dan memberikan peluang pemegang IUPHHK-HT/HTI melakukan penebangan tanpa melakukan penanaman kembali.

11.35 Kebijakan Kepala Badan Planologi (Baplan) Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kawasan hutan seluas 267.346 ha di Kabupaten Barito Utara, Katingan dan Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah fungsi menjadi perkebunan dan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologis) sehingga berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringan.

Hasil Pemeriksaan Pembangunan HTI yang Perlu Mendapat Perhatian

11.36 PT Inhutani V Unit Lampung tidak melaksanakan penanaman dengan sistem silvikultur sesuai ketentuan sejak penghentian penyaluran DR tahun 1999/2000, sebagian besar areal konsesi seluas 56.547 ha berubah menjadi perkebunan singkong, mengakibatkan pengelolaan hutan tanaman secara lestari pada areal konsesi PT Inhutani V Unit Lampung tidak dapat dilaksanakan dan PT Inhutani V tidak dapat mengembalikan pinjaman DR.

11.37 PT Inhutani V belum pernah membayar pinjaman DR yang telah jatuh tempo sejak tahun 2000 senilai Rp89,75 miliar mengakibatkan penerimaan negara dari pengembalian pinjaman DR baik pinjaman DR 0% maupun pinjaman DR komersial menjadi tertunda serta Departemen Kehutanan dibebani kewajiban membayar *handling fee* kepada bank penyalur senilai 0,5% dari baki debet setiap bulan.

Bab 12

Pengelolaan Pertambangan Batubara

12.1 Batubara sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbaharui sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi yang tidak mengenal batasan administratif. Pengusahaan batubara akan merubah bentang alam serta menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari lingkungan, terjadinya bencana banjir dan kekeringan, serta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnya karbondioksida ke udara bebas sehingga dapat menimbulkan pemanasan global. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan batubara diperlukan kebijakan terkait dengan pendekatan alokasi wilayah pertambangan dan investasi pertambangan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, serta mempertimbangkan prinsip konservasi dan pelestarian lingkungan.

12.2 Bentuk pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 adalah Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). KP adalah wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada para pengusaha untuk melaksanakan usaha pertambangan. Sedangkan PKP2B adalah perjanjian karya antara Pemerintah dengan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara.

12.3 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pertambangan batubara Tahun Anggaran 2006 dan 2007 pada Departemen ESDM, empat pemerintah provinsi, 28 pemerintah kabupaten/kota, 1358 pemegang KP, 40 kontraktor PKP2B serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Tujuan Pemeriksaan

12.4 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pertambangan batubara ini dilakukan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern pengelolaan pertambangan batubara telah memadai dan apakah pemberian ijin, Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan lingkungan pertambangan batubara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan adanya kelemahan kebijakan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan negara, indikasi tindak pidana, dan kerusakan lingkungan.

Tabel 15 : Kelompok Temuan PDTT atas Pengelolaan Pertambangan Batubara

No.	klasifikasi	Jumlah Temuan	Nilai (juta Rp/ribu USD)
1	Kelemahan SPI	86	-
2	Indikasi Tindak Pidana	9	965
			USD 38
3	Kekurangan penerimaan	42	2.555.252
			USD 775.578
4	Potensi kerugian negara	9	127.839
			USD 3.183
5	Lain-lain	10	9.814
6	Kerusakan Lingkungan	56	-
Jumlah		**212**	**2.693.871**
			USD 778.800

12.5 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 212 kasus senilai Rp2,69 triliun dan USD778.8 juta dengan rincian sebagai berikut :

- 86 kasus temuan kelemahan SPI yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, kelemahan kebijakan dalam pemberian ijin PKP2B dan KP, pungutan negara disetorkan ke kas daerah, pengalokasian DBH dari DHPB kurang memperhatikan asas keadilan bagi daerah dan duplikasi pungutan;
- 9 kasus indikasi tindak pidana senilai Rp965 juta dan USD38 ribu yaitu indikasi tindak pidana kehutanan berupa kegiatan penambangan batubara di kawasan hutan tanpa ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan dan indikasi tindak pidana pemalsuan ijin ;
- 42 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp2,5 triliun dan USD775.57 juta karena adanya penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pembayaran belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima /disetor ke Kas negara/ daerah;
- 9 kasus potensi kerugian negara senilai Rp127,83 miliar dan USD3.18 juta, karena jaminan reklamasi yang belum disetor dan/atau ditempatkan dan ganti rugi tegakan kayu yang belum dibayar;
- 10 kasus lain-lain senilai Rp9,81 miliar yaitu DBH belum diperhitungkan dalam penyaluran kepada daerah; dan
- 56 kasus temuan kerusakan lingkungan yaitu kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Kelemahan Kebijakan

12.6 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, penyajian pendapatan royalti batubara dalam APBN Tahun Anggaran 2007 dan dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2007 menyesatkan, karena pendapatan royalti pertambangan umum dimaksud tidak hanya dari royalti batubara, tetapi juga dari royalti sumber daya alam (SDA) pertambangan umum lainnya seperti tembaga, nikel, emas, perak dan timah. Hal ini terjadi lagi pada APBN Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008. Masalah ini terjadi karena kesalahan dalam Penetapan Bagan Perkiraan Standar yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 13/PMK.06/2005 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 91/PMK.05/2007 tentang bagan akun standar, yang diantaranya merubah MAP 421312 Pendapatan royalti batubara menjadi akun 421312 pendapatan royalti. Namun demikian dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat pada lampiran bagian kelima untuk laporan arus kas dari PNBP sumber daya alam akun 421312 masih menyebutkan pendapatan royalti batubara.

12.7 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan pemerintah kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut pada Tahun 2006 dan 2007 kurang menerima haknya dari DBH SDA pertambangan batubara senilai Rp4,01 triliun. Hal ini terjadi karena pemerintah dalam mengalokasikan DBH SDA pertambangan batubara masih mendasarkan pada Keppres Nomor 75 Tahun 1996 yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah jo. PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

12.8 Tujuh pemerintah kabupaten dan satu pemerintah provinsi dhi, Provinsi Sumatera Selatan, melakukan pungutan kepada para pemegang KP berupa dana percepatan pembangunan, sumbangan pihak ketiga dan/atau dana pembangunan daerah. Pungutan tersebut besarannya diperhitungkan dari jumlah produksi batubara yang terjual. Kebijakan daerah yang menambah beban pungutan kepada pemegang KP minimal senilai Rp40,17 miliar tidak memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang melarang daerah menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

12.9 Negara kurang menerima PNBP senilai Rp1,97 miliar dan mengganggu ketepatan jumlah pengalokasian DBH karena iuran tetap dan royalti di Kabupaten Kutai Timur, Paser, Barito Timur, Gunung Mas dan Tanah Bumbu Tahun 2006 dan 2007 senilai Rp1,40 miliar tidak disetorkan ke kas negara melainkan disetorkan ke kas daerah dan senilai Rp569,90 juta digunakan langsung oleh daerah.

12.10 Penerbitan 640 ijin KP oleh sepuluh bupati di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan tidak didasari pemenuhan kewajiban penyetoran jaminan kesungguhan senilai Rp45,18 miliar sehingga pemerintah daerah, tidak mendapat jaminan untuk memperoleh

keyakinan atas kesungguhan pemegang KP dalam pengusahaan pertambangan batubara.

12.11 Menteri ESDM memberikan konsesi lahan kepada tiga kontraktor PKP2B dan satu pemegang KP seluas 238.962 Ha yang sebagian wilayah konsesinya seluas 98.548,61 Ha berada dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) dan seluas 130,82 Ha berada di hutan lindung di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

12.12 16 bupati di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan memberikan konsesi lahan kepada 326 pemegang KP seluas 1.757.477,12 Ha, diantaranya seluas 1.209.712,59 Ha arealnya berada di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.

Kedua permasalahan tersebut tidak mendukung upaya pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan di kawasan TNK, hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga dapat menimbulkan terganggunya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya (lihat gambar 13 dan 14).

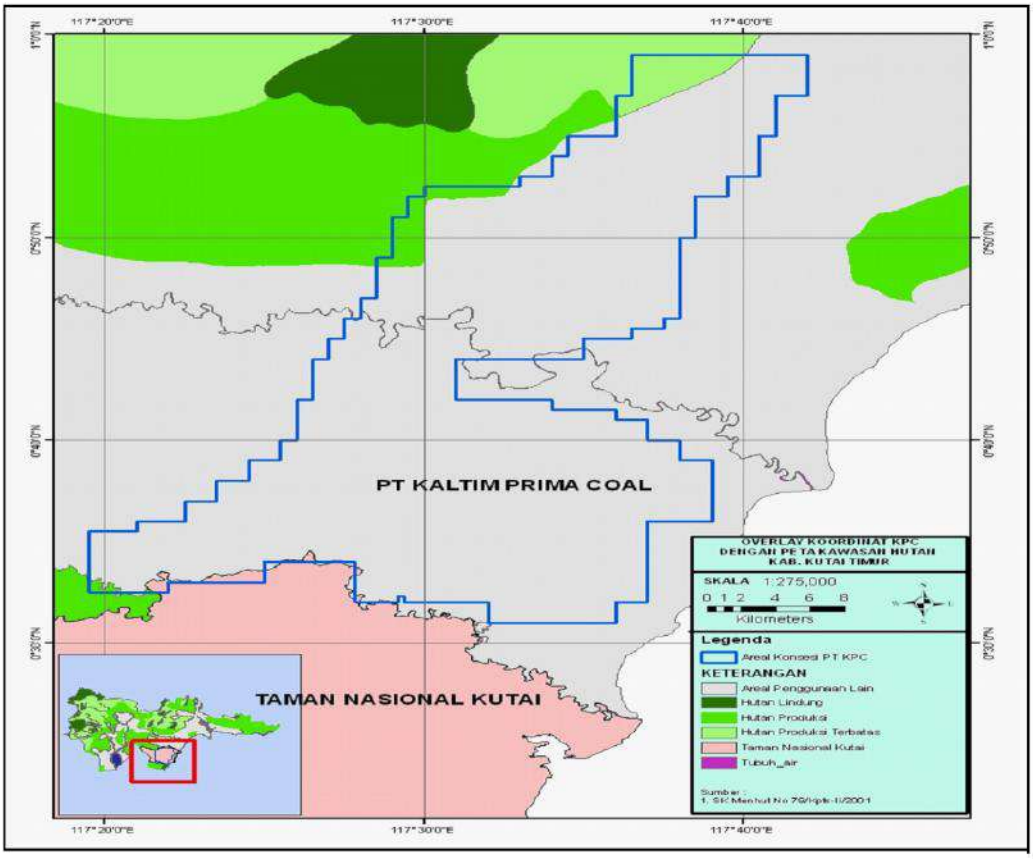

Gambar 13 : Lokasi Pertambangan PT KPC yang berada di TNK

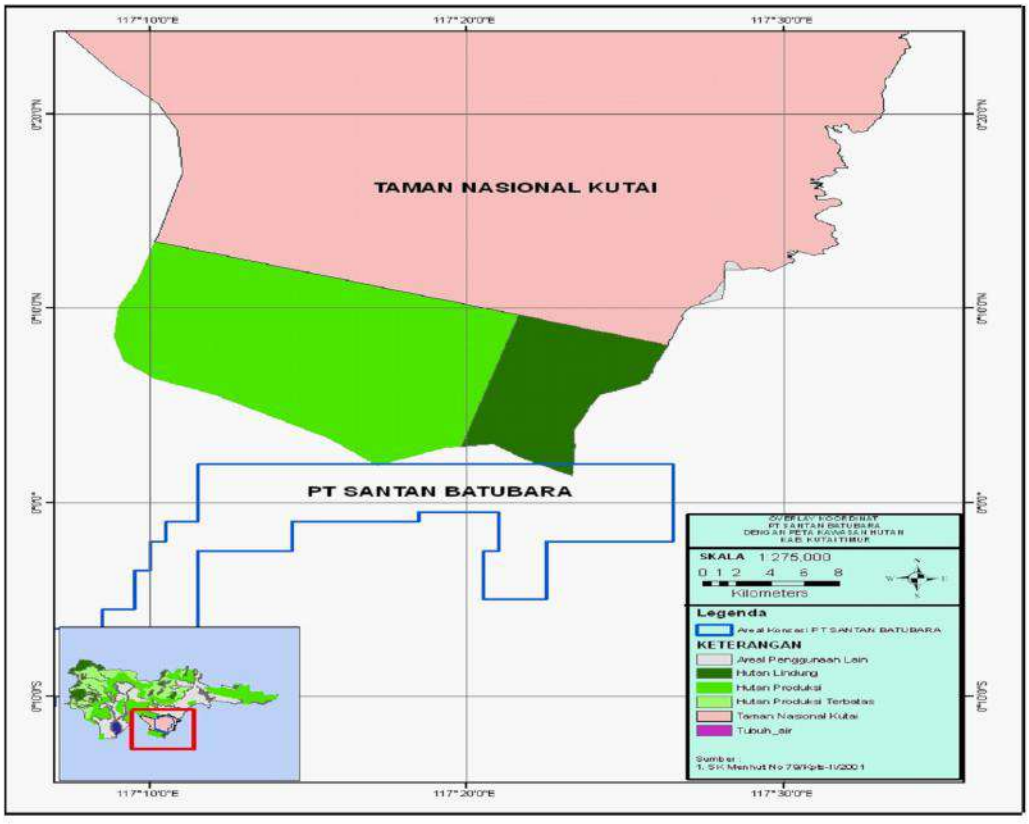

Gambar 14 : Lokasi Pertambangan PT Santan Batubara yang berada di Hutan Lindung

12.13 Hasil *overlay* KP yang seluruhnya maupun sebagian areal konsesinya berada dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dapat dilihat pada gambar –gambar berikut:

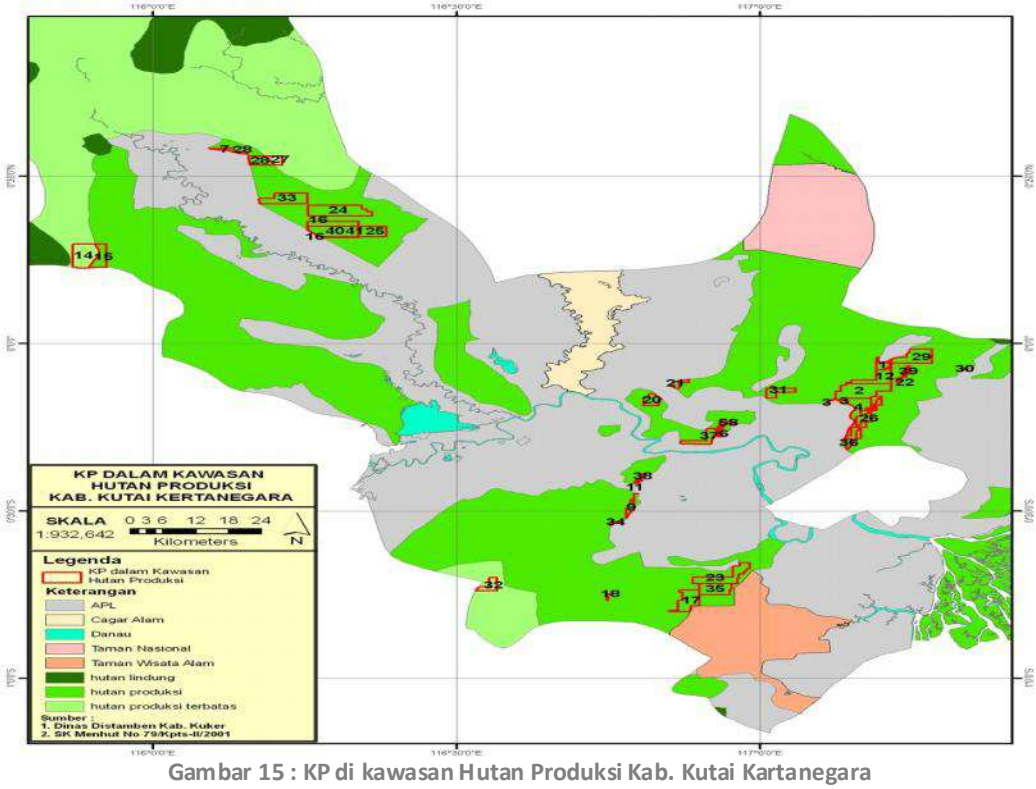

Gambar 15 : KP di kawasan Hutan Produksi Kab. Kutai Kartanegara

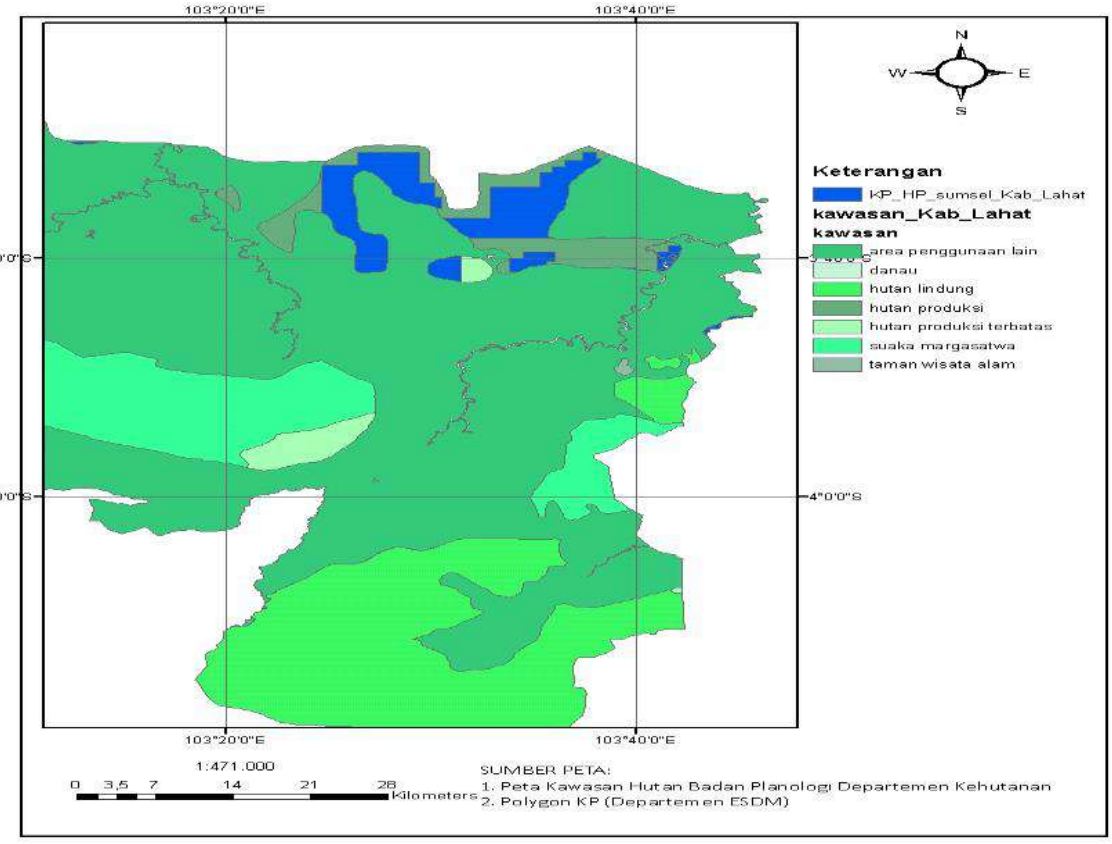

Gambar 16 : *Overlay* Areal Konsesi KP dengan Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lahat

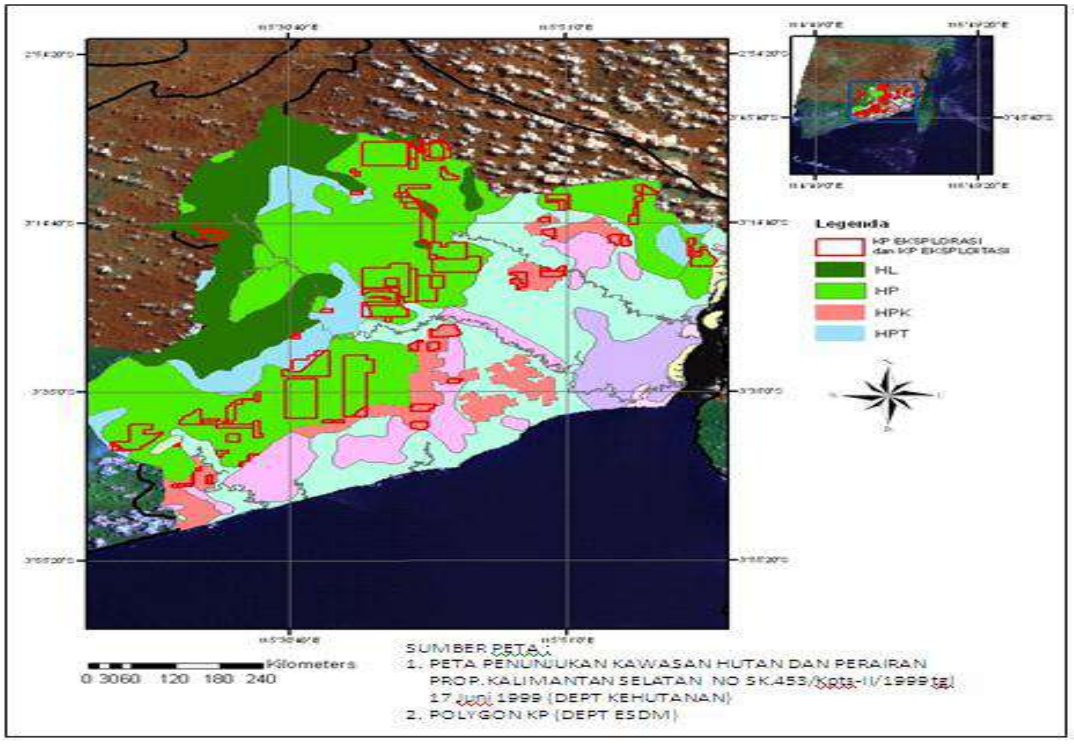

Gambar 17 : Lokasi KP eksplorasi dan eksploitasi (belum ada penambangan) di wilayah Kab. Tanah Bumbu yang berada di kawasan hutan

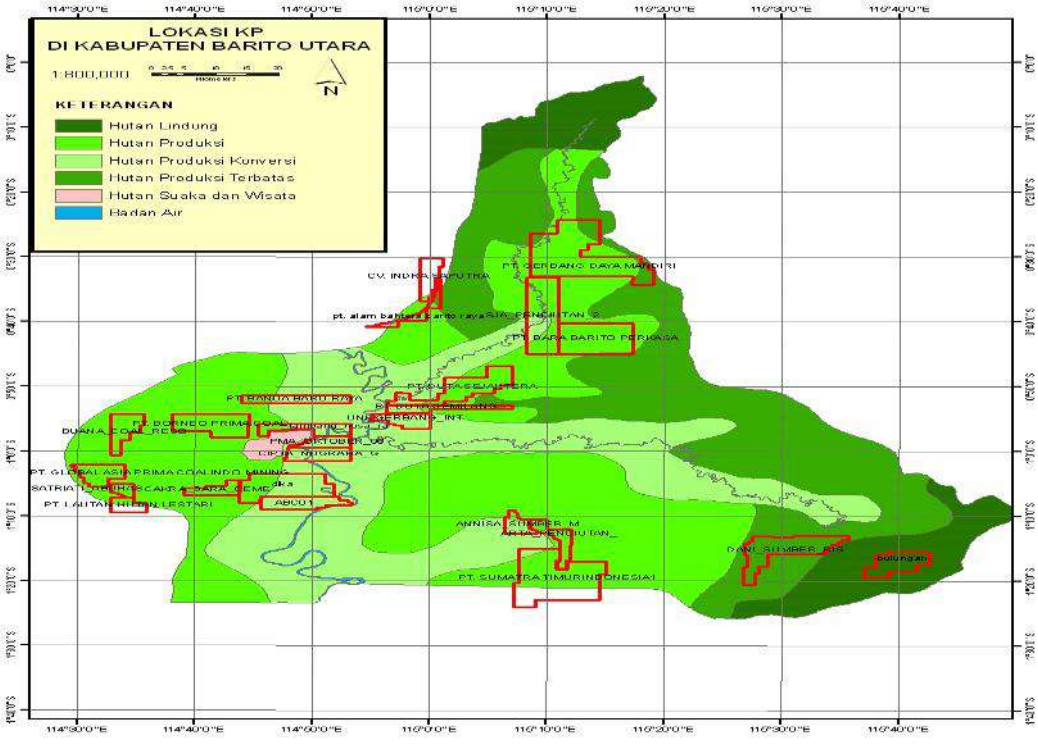

Gambar 18 : Lokasi KP Eksplorasi di Wilayah Kabupaten Barito Utara yang berada di Kawasan Hutan

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Aspek Perijinan

12.14 Kontraktor PKP2B PT BSL dan 34 Pemegang KP pada enam kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Tanah Bumbu, Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas serta PT BBK, anak perusahaan PT BA, melakukan kegiatan penambangan batubara di kawasan hutan tanpa ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Masalah ini mengakibatkan kerusakan lingkungan kawasan hutan serta berkurangnya luas kawasan hutan dan berkurangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan yang arealnya telah dipakai untuk penambangan batubara serta potensi kerugian negara berupa nilai tegakan kayu senilai Rp877,82 juta, PSDH senilai Rp87,74 juta, dan dana reboisasi (DR) senilai USD38.02 ribu yang belum dibayar.

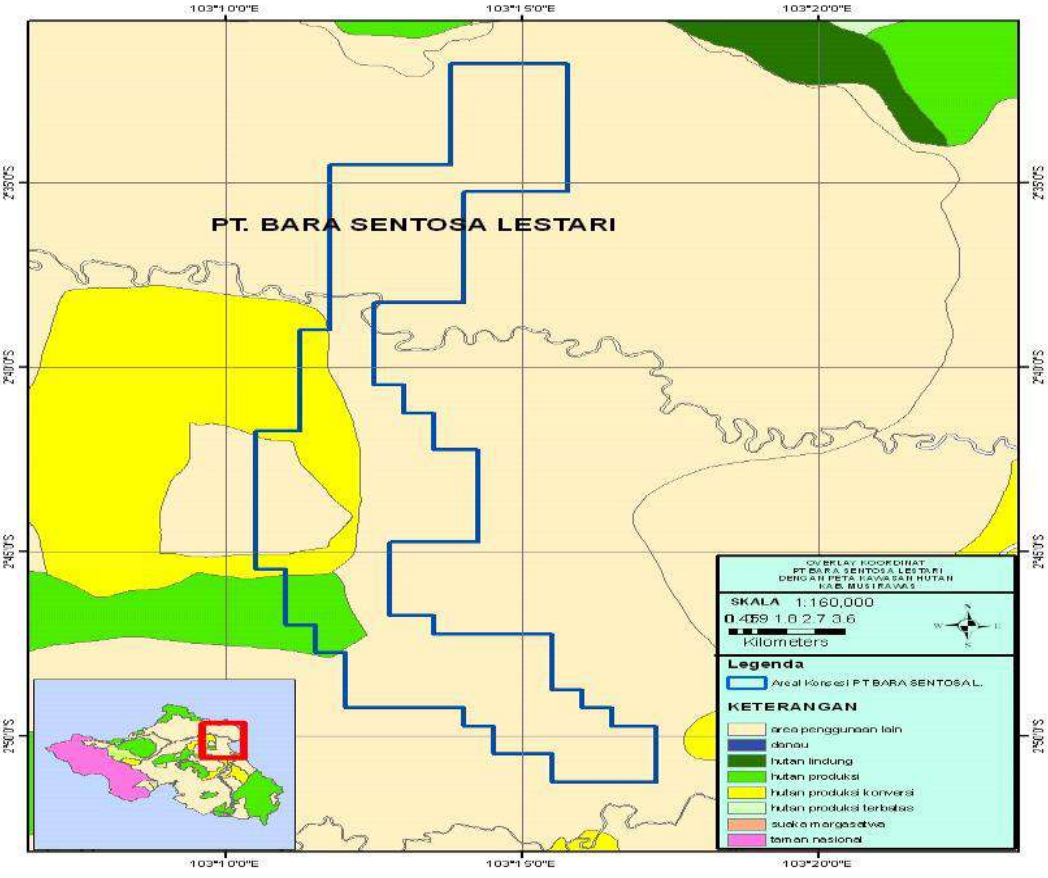

Gambar 19 : Lahan Konsesi PT Bara Sentosa Lestari di Kawasan Hutan

12.15 Negara berpotensi dirugikan dari ganti rugi tegakan yang belum dibayar senilai Rp584,47 juta serta berkurangnya luas kawasan hutan yang dijadikan areal penambangan batubara dan kerusakan hutan di sekelilingnya. Hal ini disebabkan karena PT BA belum memenuhi kewajiban menyediakan lahan kompensasi seluas 3.670 Ha dan pembayaran ganti rugi tegakan kayu terkait dengan ijin pinjam pakai kawasan hutan.

12.16 Bupati Barito Timur dan Kutai Timur dalam memberikan ijin KP batubara, ternyata lokasinya tumpang tindih dengan pemegang KP batubara lainnya dan dengan kawasan perkebunan. Sedangkan Bupati Barito Utara menerbitkan ijin KP batubara di luar kewenangan yang dimilikinya, yaitu areal penambangannya berada di luar wilayah Kabupaten Barito Utara. Masalah tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian berinvestasi bagi perusahaan serta berpotensi terjadinya konflik di antara pemegang KP di kemudian hari.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

12.17 Negara kurang menerima PNBP pada Tahun 2006 dan 2007 dari iuran tetap, royalti, DHPB dan denda keterlambatan pembayaran iuran tetap senilai Rp249,79 miliar dan USD46.87 juta dari Pemegang KP dan Kontraktor PKP2B, yang terdiri dari:

- Pemegang KP pada 28 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan kurang membayar iuran tetap senilai Rp22,45 miliar dan royalti senilai Rp225,05 miliar dan USD6.94 juta; dan
- 25 Kontraktor PKP2B di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah kurang membayar DHPB senilai Rp2,28 miliar dan USD39.92 juta dan tiga kontraktor PKP2B belum membayar denda keterlambatan pembayaran iuran tetap senilai USD6.54 ribu.

12.18 Negara kurang menerima DHPB termasuk bunga senilai Rp2,30 triliun dan USD728.68 juta karena 6 kontraktor PKP2B Generasi I sengaja menahan DHPB sebagai kompensasi dari PPN batubara yang tidak di-*reimburse.* Hal ini disebabkan pemerintah tidak membuat mekanisme *reimbursement* atas pajak sesuai yang diatur dalam perjanjian PKP2B.

Dana Bagi Hasil

12.19 DBH SDA Tahun 2006 dan 2007 senilai Rp9,69 miliar dan USD2.83 ribu belum diperhitungkan dalam penyaluran kepada daerah. Hal ini disebabkan Departemen ESDM, Departemen Keuangan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Nunukan dan Kota Tarakan tidak memiliki data yang akurat atas pembayaran PNBP SDA pertambangan umum di daerah tersebut sebagai bahan rekonsiliasi dan penyaluran DBH SDA pertambangan umum.

Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara

12.20 Enam puluh pemegang KP di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan tiga puluh pemegang KP di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan serta dua kontraktor PKP2B PT KJA dan PT MSJ belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi senilai USD3.18 juta dan Rp127,25 miliar, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan daerah atas terbebaninya keuangan pemerintah/daerah apabila Pemegang KP dan Kontraktor PKP2B dimaksud lalai tidak melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi di areal bekas tambangnya.

12.21 Pengelolaan tanah pucuk dan tanah penutup oleh 61 pemegang KP dan lima kontraktor PKP2B tidak sesuai ketentuan sehingga dapat mengakibatkan longsor dan erosi serta berkurangnya kesuburan tanah serta manfaat tanah pucuk sebagai penutup lahan bekas tambang dan sebagai tempat tumbuhnya tanaman vegetasi akan berkurang bahkan hilang. Demikian pula pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang batubara oleh 72 pemegang KP dan enam Kontraktor PKP2B tidak sesuai ketentuan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, berkurangnya kesuburan tanah dan kerugian yang membebani keuangan Pemerintah apabila pemegang ijin penambangan batubara lalai tidak melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi.

Gambar 20 : Penimbunan *top soil* pada PT Borneo Indobara yang belum dibuat sistem berjenjang/terasiring dan cover crop masih belum merata

12.22 Pengelolaan limbah B3 oleh 44 pemegang KP dan 11 kontraktor PKP2B, dan pengelolaan air asam tambang oleh 63 pemegang KP dan empat kontraktor PKP2B tidak sesuai ketentuan. Masalah tersebut mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang mengganggu kepentingan masyarakat di sekitar lahan berupa kontaminasi tanah, air tanah, badan air yang mengganggu ekosistem.

Gambar 21 : Ceceran Oli CV. PHI,Kab. Kutai Kartanegara

Gambar 22 : Kolam Oli KSU Wijaya Kusuma Kab. Kutai Kartanegara

BAB 13

Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

13.1 Dalam Semester II Tahun 2008, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pinjaman luar negeri (LN). Pemeriksaan dilakukan pada pengelola pinjaman LN Departemen Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan serta Pengguna Pinjaman LN yang terdiri dari sembilan Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) serta delapan BUMN yang mencakup 66 naskah pinjaman senilai Rp45,29 triliun (4,94%) dari populasi.

13.2 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah : 1) sistem pengendalian intern telah memadai; dan 2) pelaksanaan pinjaman LN telah sesuai dengan klausul-klausul dalam naskah perjanjian pinjaman.

13.3 Pinjaman LN merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, penarikan pinjaman LN dan prosentasenya terhadap APBN selama tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing senilai Rp26,84 triliun (5,27%), Rp29,67 triliun (4.45%), dan Rp34,07 triliun (4,5%). Sedangkan *outstanding* pinjaman LN pada periode tersebut dan prosentasenya terhadap PDB masing-masing senilai Rp578,73 triliun (20,86%), Rp556,21 triliun (16,66%), dan Rp595,69 triliun (15,05%). Data *outstanding* tersebut menunjukkan bahwa persentase pinjaman LN terhadap Produk Domestik Bruto mengalami penurunan. Namun demikian, dilihat dari nilai absolut penurunan belum terjadi secara konsisten.

13.4 Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan pinjaman LN menyimpulkan bahwa :

- Sistem pengendalian atas pengelolaan pinjaman LN yang berkaitan dengan pencatatan realisasi pinjaman, monitoring rekening khusus, dan pencatatan barang milik negara masih lemah. Sementara itu prosedur perencanaan dan penarikan pinjaman yang telah dirancang tidak berjalan secara efektif;
- Klausul mengenai biaya asuransi, biaya komitmen, dan biaya jasa bank penatausahaan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian memberatkan keuangan negara minimal senilai Rp36,38 miliar; dan
- Karena lemahnya perencanaan, koordinasi, dan monitoring mengakibatkan beberapa hasil proyek yang didanai dari pinjaman LN senilai Rp438,47 miliar tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan secara optimal, serta adanya tambahan biaya minimal senilai Rp2,02 triliun sehubungan keterlambatan pelaksanaan proyek.

13.5 Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- Sistem pencatatan pinjaman LN belum dapat menghasilkan informasi mengenai pinjaman LN secara andal sehingga tidak ada sumber informasi

mengenai posisi dan penarikan pinjaman LN yang dapat dipercaya sehingga dapat digunakan pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan;

- Pengarsipan dan pendokumentasian, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengevaluasian pinjaman LN tidak tertib sehingga evaluasi dan pengawasan atas pengelolaan pinjaman LN tidak dapat berjalan secara efektif;
- Karena ketidakmampuan pemerintah memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, terdapat penarikan pinjaman dari rekening khusus (reksus) maupun dana talangan pemerintah yang beresiko yang tidak mendapatkan penggantian dari *lender* minimal senilai Rp5,04 miliar dan USD4.23 juta;
- Per tanggal 26 September 2008, terdapat 61 rekening khusus dengan saldo Rp74,34 miliar yang belum ditutup walaupun *closing date* pinjaman telah lewat sehingga pemerintah harus menanggung beban bunga atas sisa dana di reksus tersebut walaupun tidak dimanfaatkan;
- Pengendalian atas barang/aset negara yang berasal dari dana pinjaman LN tidak memadai sehingga terdapat risiko kehilangan dan penyalahgunaan barang atau aset negara senilai Rp207,79 miliar;
- Proses perencanaan pada enam *loan agreement* (LA) tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan;
- Biaya asuransi dan biaya komitmen dari sisa plafon pinjaman dalam LA yang dipersyaratkan *lender* memberatkan keuangan negara dan tidak efisien;
- Biaya jasa Bank Penatausahaan yang dipersyaratkan dalam *Subsidiary Loan Agreement* minimal senilai Rp36,38 miliar mengurangi dana yang diterima pemerintah atas pelunasan penerusan pinjaman;
- Pelaksanaan 25 proyek yang didanai dari pinjaman LN terlambat diantaranya mengakibatkan tambahan beban negara minimal senilai Rp2,02 triliun;
- Terdapat hasil sembilan proyek yang didanai dari pinjaman LN senilai Rp438,47 miliar tidak dimanfaatkan sesuai tujuan semula;
- Pemanfaatan hasil enam proyek yang didanai pinjaman LN tidak optimal dan terdapat dua proyek yang berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
- Kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi pinjaman ADB No.1587-INO *Metro Medan Urban Development Project* tidak sesuai dengan LA; dan
- Beberapa penerima penerusan pinjaman tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pinjaman sesuai penerusan pinjaman.

BAB 14

Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan

14.1 BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Program Penjaminan Simpanan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui dan menilai: (1) sistem pengendalian internal (SPI) atas kegiatan program penjaminan; (2) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan (3) efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan program penjaminan.

14.2 Fungsi utama LPS adalah menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi penjaminan tersebut menggantikan fungsi Bank Indonesia untuk program penjaminan simpanan nasabah bank perkreditan rakyat (BPR) dan Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) untuk simpanan nasabah bank umum.

14.3 Sampai dengan 30 Juni 2008, LPS telah melakukan penjaminan simpanan nasabah atas 14 BPR yang dicabut izin usahanya dengan biaya penjaminan senilai Rp68,71 miliar.

14.4 Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- Pengujian suku bunga deposito nasabah PT BPR Tripillar Artajaya (dalam likuidasi/DL) senilai Rp7,90 miliar mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang sudah dinyatakan tidak berlaku, mengakibatkan pembayaran 60 rekening deposito nasabah PT BPR Tripillar Artha Jaya (DL) senilai Rp7,90 miliar tidak mempunyai dasar yang kuat;
- LPS belum melakukan proses likuidasi BPR Cimahi dan PD BPR Gunung Halu yang telah dicabut izin usahanya oleh BI mengakibatkan proses tindak lanjut pembubaran badan hukum bank yang dicabut izin usahanya terlambat;
- Pengaturan *set-off* atas simpanan yang terkait dengan pinjaman belum mencerminkan pengendalian yang baik, berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program penjaminan LPS;
- Penetapan honor tim likuidasi (TL) belum sepenuhnya sesuai ketentuan mengakibatkan biaya likuidasi untuk honor TL dan *success fee* masing-masing BDL belum dapat diyakini kewajarannya;
- Proses verifikasi dan likuidasi PT BPR Citraloka Dana Mandiri (DL) belum sepenuhnya sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan proses penyelesaian program penjaminan nasabah dan likuidasi PT BPR CDM (DL) berpotensi berlarut-larut dan beban klaim penjaminan yang harus ditanggung LPS bertambah besar;

- Proses likuidasi PD BPR Bungbulang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan proses likuidasi berjalan kurang optimal dan status dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan selama masa bank dalam pengawasan khusus belum jelas penyelesaiannya dalam konteks penyelesaian likuidasi; dan
- Proses likuidasi PT BPR Tripillar Arthajaya (DL) belum jelas penyelesaiannya, berpotensi menghambat proses likuidasi PT BPR Tripillar Arthajaya (DL).

BAB 15

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penunjang Pembinaan

15.1 Dana Penunjang Pembinaan (DPP) merupakan dana yang diperoleh dari bagian upah pungut/biaya pemungutan pajak daerah yang disalurkan atau ditransfer oleh masing-masing pemerintah daerah ke rekening yang dikelola/dimiliki oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Bagian upah pungut yang disalurkan ke Depdagri adalah biaya pemungutan untuk Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dengan besaran tarif yang bervariasi, yaitu antara 2,5% sampai dengan 6% dari jumlah biaya pemungutan pajak daerah. Pemungutan DPP tersebut dimulai sejak Tahun Anggaran 2001 sampai dengan saat ini.

15.2 Dalam Semester II Tahun 2008, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban DPP Tahun 2001 s.d. 2008 pada Depdagri. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai :

- Kebijakan pengelolaan DPP;
- Kecukupan bukti pertanggungjawaban penggunaan DPP; dan
- Efektivitas pengelolaan aset yang dihasilkan dari penggunaan DPP.

15.3 DPP yang diterima oleh Depdagri selama periode 2001 s.d 2008 (s.d. Agustus 2008) menurut catatan bendahara pengelola DPP adalah senilai Rp326,43 miliar. Dari dana tersebut telah digunakan senilai Rp255,99 miliar, dan masih terdapat saldo senilai Rp70,44 miliar.

15.4 BPK tidak meyakini kebenaran jumlah-jumlah tersebut, karena sistem pengendalian intern pengelolaan DPP sangat lemah seperti :

- Pencatatan dan pelaporan yang tidak tertib; dan
- Pengelolaan DPP dilakukan di luar mekanisme APBN, karena Depdagri beranggapan bahwa dana tersebut diterima dari pemda dan sudah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah penyetor dalam pertanggungjawaban APBD yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian

15.5 Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan ketentuan tentang penggunaan DPP **mengabaikan** pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat Nomor S-119/MK.07/2002 tanggal 19 April 2002 yang menyebutkan bahwa: (1) Alokasi biaya pemungutan pajak daerah kepada pusat untuk

membiayai fungsi pembinaan pada dasarnya kurang tepat mengingat fungsi tersebut telah dibiayai dari dana APBN; (2) dalam hal alokasi biaya pemungutan kepada pusat diperlukan maka penggunaannya diarahkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.

15.6 Penggunaan DPP dalam tahun 2008 (s.d Agustus 2008) senilai Rp13,19 miliar tidak didasarkan keputusan Mendagri mengenai alokasi penggunaan atau rencana anggaran yang akan dibiayai dari DPP. Rencana penerimaan dan penggunaan DPP dalam tahun 2008 tidak disahkan oleh Mendagri. Dengan demikian penggunaan DPP tahun tersebut tidak legal. Selain itu pejabat pengelola DPP tahun 2007 dan 2008 yaitu Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, juga tidak ditetapkan dengan SK Sekjen Depdagri, sehingga keputusan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara untuk menerima dan mengeluarkan DPP tidak mempunyai dasar hukum yang sah.

15.7 Penggunaan DPP senilai Rp104,40 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak wajar/patut, tidak sah, dan tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban serta terjadi penyalahgunaan). Jumlah tersebut antara lain digunakan untuk dana operasional atau dana taktis Mendagri dan pejabat Eselon I Depdagri sejak tahun 2001 s.d Agustus 2008 senilai Rp78,98 miliar. Pemberian dana taktis periode 2006 s.d. 2008 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena tidak ada keputusan Mendagri yang menetapkan pejabat mana yang berhak atas dana taktis dari DPP dan berapa jumlahnya. Sedangkan selebihnya digunakan untuk berbagai pengeluaran kepada pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

15.8 Terdapat penggunaan DPP senilai Rp57,66 miliar untuk pemberian dana talangan kepada satuan kerja dilingkungan Depdagri dan diantaranya senilai Rp9,36 miliar tidak dapat dikembalikan oleh satker penerima dana talangan.

BAB 16
Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

Obyek dan Tujuan Pemeriksaan

16.1 Dalam Semester II Tahun 2008, BPK menyelesaikan empat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan lima Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi Tahun 2007, yaitu:

- Pelaksanaan KKS Wilayah Kerja (WK) eks Pertamina pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina EP;
- Pelaksanaan KKS WK Jabung pada KKKS Petrochina International Jabung Limited (PIJL);
- Pelaksanaan KKS WK East Kalimantan pada KKKS Chevron Indonesia Company (CICo) dan KKS WK Makassar Strait pada KKKS Chevron Makasar Limited (CML); dan
- Pelaksanaan KKS WK Rokan pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

16.2 Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan bagi hasil dari pelaksanaan KKS, menilai kepatuhan KKKS terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta memberikan dukungan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007.

16.3 Dalam Semester II TA 2008, BPK juga melakukan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam rangka memenuhi permintaan DPR RI dengan Surat Ketua DPR RI Nomor TU.03/3307/DPR RI/IV/2008 tanggal 29 April 2008, yaitu:

- Pemeriksaan atas perhitungan kewajiban KKKS PT Pertamina (Persero) dan KKKS Pertamina EP sehubungan dengan koreksi alokasi biaya depresiasi yang diperhitungkan dalam *Cost Recovery Pertamina Petroleum Contract (PPC)* dan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina (KMGBP) periode 2003 s.d. 2007.
- Tujuan pemeriksaan adalah menentukan alokasi biaya depresiasi aset hulu Pertamina perolehan sebelum 17 September 2003 yang harus dikeluarkan dari *cost recovery* PPC dan KMGBP, menentukan nilai kewajiban PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP kepada Pemerintah sesuai perhitungan bagi hasil sehubungan koreksi alokasi biaya depresiasi dari *cost recovery* PPC dan KMGBP, dan mengidentifikasi pengaruh lainnya dari perhitungan kembali bagi hasil PPC dan KMGBP periode 2003 s.d 2007 serta merekomendasikan penyelesaian.

- Pemeriksaan atas transaksi pertukaran *swap* minyak mentah dengan gas periode 2004 s.d. 2007 antara KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) dengan KKKS Conoco Philllips Grissik Limited (CPGL). Tujuan pemeriksaan adalah menilai realisasi transaksi *swap* dan mengevaluasi praktek pembukuan transaksi *swap.*

Hasil Pemeriksaan

16.4 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern, yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan, perencanaan kegiatan dan struktur pengendalian tidak memadai. Kelemahan sistem pengendalian intern tersebut diantaranya mengakibatkan nilai bagian negara yang hilang karena perhitungan bagi hasil PSC Rokan pada PT CPI tidak mengakui adanya *lifting* atas minyak mentah yang dipertukarkan dan tidak adanya pengakuan *cost recovery* atas pemakaian gas yang diterima oleh PT CPI dari CPGL. Hal tersebut diungkapkan dari hasil evaluasi atas praktek pembukuan transaksi *swap* minyak mentah dengan gas periode 2004 s.d 2007 pada KKKS PT CPI dan KKKS CPGL.

16.5 Selain kelemahan sistem pengendalian intern, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak lima kasus senilai Rp14,58 triliun. Kasus-kasus tersebut dijelaskan dalam uraian berikut.

16.6 Satu kasus perhitungan kembali bagi hasil PPC dan KMGBP periode 2003 s.d. 2007 untuk mengurangi *cost recovery* periode tersebut seluruhnya senilai USD2.18 miliar mengakibatkan KKKS PT Pertamina (Persero) dan KKKS PT Pertamina EP mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tambahan bagian negara masing-masing senilai USD683.83 juta dan USD631.91 juta atau seluruhnya senilai USD1.31 miliar atau ekuivalen Rp14,40 triliun (kurs tengah transaksi per 31 Desember 2008 USD1=Rp10.950,00).

16.7 Empat kasus koreksi perhitungan bagi hasil pada pelaksanaan lima KKS minyak dan gas bumi senilai Rp174,49 miliar, mencakup pengurangan biaya-biaya yang tidak dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery*, pendapatan operasi dan nilai pengenaan denda yang belum diperhitungkan sebagai pengurang *cost recovery*, dan reklasifikasi. *Cost recovery* merupakan penggantian biaya operasi oleh pemerintah melalui BPMIGAS kepada kontraktor sesuai perjanjian, biasanya dalam bentuk hasil produksi.

16.8 Koreksi perhitungan bagi hasil tersebut diantaranya pada pelaksanaan KKS WK eks Pertamina Tahun 2007 pada KKKS Pertamina EP senilai US$10.21 juta atau ekuivalen Rp111,87 miliar (kurs tengah transaksi per 31 Desember 2008 USD1=Rp10.950,00). Koreksi tersebut merupakan koreksi atas pembebanan cost recovery yang mencakup biaya overhead kantor pusat PT Pertamina (Persero) eks tahun 2005 yang dibebankan di tahun 2007, pendapatan operasi yang belum diperhitungkan sebagai pengurang *cost recovery*, biaya denda pajak dan biaya-biaya lain yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasi yang tidak dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery*.

BAB 17
Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum

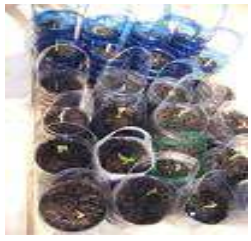

17.1 Dalam Semester II Tahun 2008, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) pada empat obyek pemeriksaan di lingkungan BUMN, yaitu PT Kereta Api (Persero), PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pos Indonesia. Dari empat obyek pemeriksaan tersebut, dua diantaranya yaitu Pemeriksaan PT Kereta Api (Persero) dan PT Pertani mencakup pemeriksaan di luar subsidi.

17.2 Pemeriksaan pada PT Kereta Api (Persero) merupakan pemeriksaan atas biaya perolehan aset, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyertaan modal pemerintah (PMN) serta pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU)/Public Service Obligation (PSO), Infrastructure Maintenance and Operation (IMO), dan Track Access Charges (TAC) di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Palembang. IMO adalah subsidi dari Pemerintah yang dilimpahkan ke PT Kereta Api selaku Badan Penyelenggara. Sedangkan TAC adalah biaya yang harus dibayar dan disetorkan Badan Penyelenggara (PT KA) kepada pemerintah sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atas penggunaan prasarana kereta api yang dimiliki pemerintah.

17.3 Pemeriksaan bertujuan untuk menyimpulkan ketepatan jumlah pembayaran dan pengendalian subsidi, menilai efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait biaya perolehan aset, pengendalian biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, penggunaan dana PMN dan pelaksanaan PSO, IMO dan TAC.

17.4 Pemeriksaan subsidi benih pada PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri (Persero) bertujuan menilai kewajaran volume penjualan dan harga pokok penjualan (HPP) benih bersertifikat produksi PT Pertani yang disalurkan selama tahun 2007 dan PT Sang Hyang Seri (Persero) yang disalurkan selama tahun 2006 serta memberikan keyakinan memadai bahwa perhitungan jumlah subsidi yang ditagihkan sesuai dengan ketentuan.

17.5 Pemeriksaan pada PT Pertani (Persero) selain pemeriksaan subsidi benih juga pemeriksaan atas KPU berupa bantuan langsung benih unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2007. Pemeriksaan BLBU pada PT Pertani (Persero) bertujuan menilai tingkat kewajaran volume benih yang disalurkan ke kelompok tani dan jumlah biaya pembinaan dan pendampingan BLBU TA 2007, memberikan keyakinan memadai bahwa BLBU telah disalurkan sesuai jumlah, kualitas dan waktu yang telah ditetapkan serta diterima pihak yang tepat.

17.6 Pemeriksaan pada PT Pos Indonesia atas pelaksanaan KPU bidang Pos TA 2006 bertujuan menilai kewajaran perhitungan pendapatan dan biaya pada Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK) yang ditunjuk/disubsidi oleh Pemerintah dan kewajaran besarnya dana KPU yang diterima oleh PT Pos Indonesia serta kepatuhan pelaksanaan KPU terhadap kriteria atau peraturan perundang-undangan pelaksanaan KPU.

Hasil Pemeriksaan

17.7 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern yaitu pencatatan tidak tertib dan tidak akurat, adanya mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan tidak sesuai mekanisme APBN serta adanya penyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau kegiatan intern organisasi yang diperiksa. Kasus tersebut diantaranya kelemahan pengendalian intern pada PT Kereta Api (Persero) yaitu pengendalian pengeluaran bahan dan suku cadang kereta dan kereta listrik di Balai Yasa Yogyakarta dan Balai Yasa Manggarai yang tidak memadai sehingga permintaan dan pengeluaran bahan dan suku cadang diragukan kebenarannya.

17.8 Selain itu hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi dan efektivitas seperti pada tabel berikut.

17.9 Hasil pemeriksaan berdasar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam tabel 16.

Tabel 16 : Kelompok Temuan Menurut Entitas PDTT atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

(dalam juta Rp)

Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*								
			Kerugian Negara/ Perusahaan		Potensi Kerugian Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Efektivitas	
	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
PT Kereta Api (Persero)	11	32.815	1	23	1	1.796	3	556	4	2	30.440
PT Pertani (Persero)	5	4.999	1	353	-	-	2	1.125	1	1	3.521
PT Sang Hyang Seri (Persero)	1	185	-	-	-	-	1	185	-	-	-
PT Pos Indonesia (Persero)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah	**18**	**37.999**	**2**	**376**	**1**	**1.796**	**6**	**1.866**	**6**	**3**	**33.961**

17.10 Dari tabel diatas, hasil pemeriksaan mengungkapkan temuan menurut entitas sebagai berikut:

- PT Kereta Api (Persero) mengungkapkan sebelas kasus senilai Rp32,81 miliar terdiri dari 1 kasus kerugian negara/perusahaan senilai Rp22,51 juta, 1 kasus potensi kerugian perusahaan senilai Rp1,79 miliar, 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp555,55 juta, 4 kasus administrasi, dan 2 kasus efektivitas senilai Rp30,44 miliar;

- PT Pertani (Persero) mengungkapkan lima kasus senilai Rp4,99 miliar terdiri dari 1 kasus kerugian negara/perusahaan senilai Rp352,94 juta, 2 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1,12 miliar, 1 kasus administrasi, dan 1 kasus efektivitas senilai Rp3,52 miliar;
- PT Sang Hyang Seri (Persero) mengungkapkan satu kasus kekurangan penerimaan senilai Rp185,24 juta; dan
- PT Pos Indonesia mengungkapkan satu kasus administrasi yaitu hasil pemeriksaan telah mengoreksi (mengurangi) defisit KPU yang berakibat adanya defisit pelaksanaan KPU yang sepenuhnya menjadi tanggungan PT Pos Indonesia.

17.11 Hasil pemeriksaan berdasar kelompok dan jenis temuan atas pelaksanaan subsidi dapat dijelaskan dalam tabel 17.

Tabel 17 : Kelompok dan Jenis Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/KPU

No	Rincian Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
A	**Kerugian Negara/Perusahaan**	**2**	**376**
1	Pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan	2	376
B	**Potensi Kerugian Negara/Perusahaan**	**1**	**1.796**
2	Piutang berpotensi tidak tertagih	1	1.796
C	**Kekurangan Penerimaan**	**6**	**1.866**
3	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima	4	698
4	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2	1.168
D	**Administrasi**	**6**	**-**
5	Pengelolaan Aset Tidak Sesuai Ketentuan	4	-
6	Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan	1	-
7	Koreksi defisit KPU	1	-
E	**Efektivitas**	**3**	**33.961**
8	Pengadaan tidak dimanfaatkan	2	30.440
9	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran	1	3.521
	Jumlah	**18**	**37.999**

17.12 Dari tabel diatas, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi, PSO, IMO dan TAC serta pemeriksaan di luar lingkup subsidi pada empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan adanya 18 kasus senilai Rp37,99 miliar. Kasus tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

17.13 Dua kasus kerugian negara/perusahaan senilai Rp375,45 juta terjadi karena pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan. Kasus tersebut diantaranya terjadi dalam penyaluran bantuan langsung benih unggul (BLBU) oleh PT Pertani. PT Pertani dalam memberikan honorarium biaya pembinaan dan pendampingan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp352,93 juta, sehingga kelebihan pembayaran tersebut harus disetor ke kas negara.

17.14 Satu kasus potensi kerugian perusahaan senilai Rp1,79 miliar terjadi pada PT Kereta Api karena adanya piutang kepada PT Bukit Asam (Persero) yang berpotensi tidak tertagih.

17.15 Enam kasus kekurangan penerimaan negara/perusahaan senilai Rp1,86 miliar terjadi karena adanya pendapatan maupun denda yang belum diterima serta adanya kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah. Kasus tersebut diantaranya:

- Pendapatan yang belum diterima dan denda keterlambatan yang belum ditagih terjadi pada PT Kereta Api yaitu adanya pendapatan sewa tanah sejak bulan Maret 2006 s.d. November 2007 senilai Rp322,02 juta dan penerimaan dari denda keterlambatan sewa tanah senilai Rp26,83 juta.
- Kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemerintah kepada PT Pertani senilai Rp982,25 juta terjadi karena PT Pertani telah mengajukan subsidi benih, *profit margin,* tambahan *profit margin* senilai Rp22,10 miliar sedangkan jumlah subsidi benih, *profit margin*, dan tambahan *profit margin* yang seharusnya diberikan senilai Rp21,12 miliar.

17.16 Enam kasus administrasi terjadi karena pengelolaan aset yang tidak sesuai ketentuan, pengadaan tidak sesuai ketentuan, dan adanya koreksi defisit KPU. Kasus tersebut diantaranya penyusunan Laporan Inventaris Tahunan terhadap kekayaan milik negara yang dikelola PT Kereta Api (Persero) tidak tertib dan terdapat aset milik negara yang belum tercatat minimal senilai Rp499,82 miliar, AUD$115.31 juta dan £20,27 juta atau ekuivalen Rp1,69 triliun (kurs tengah transaksi AUD$1=Rp7.561,53 dan £1=Rp15.885,18).

17.17 Tiga kasus ketidakefektifan senilai Rp33,96 miliar karena adanya pengadaan barang yang tidak dimanfaaatkan dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Kasus tersebut diantaranya di PT Kereta Api (Persero) per 31 Desember 2006 senilai Rp29,81 miliar tidak bermanfaat. Hal ini disebabkan perencanaan pengadaan persediaan tidak sesuai dengan kebutuhan PT Kereta Api.

BAB 18

Operasional Perusahaan Daerah Air Minum

Tujuan Pemeriksaan

18.1 BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional perusahaan daerah air minum dengan fokus pemeriksaan pada pendapatan, biaya dan investasi. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap 17 PDAM. Tujuan pemeriksaan terhadap operasional PDAM adalah untuk menilai apakah :

- informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- sistem pengendalian intern entitas, baik terhadap laporan keuangan maupun pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
- entitas yang diperiksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam pengelolaan biaya operasional telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

18.2 Hasil pemeriksaan atas operasional perusahaan daerah air minum (PDAM) mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) antara lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kelemahan SPI tersebut diantaranya pembebanan hutang *to be determined* (TBD) senilai Rp80,75 miliar pada Laporan Keuangan PT Palyja belum dilakukan validasi.

18.3 Selain itu hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/ perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, serta ketidakefektifan meliputi 214 temuan senilai Rp847,65 miliar dapat diklasifikasikan tabel 18.

Tabel 18 : Kelompok Temuan PDTT atas Operasional PDAM

Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:		
Kerugian Daerah/Perusahaan	28	65.228
Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	37	431.177
Kekurangan Penerimaan	28	256.444
Administrasi	39	-
Ketidakhematan	43	68.224
Ketidakefektifan	39	26.577
Jumlah Temuan Pemeriksaan	**214**	**847.650**

18.4 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan atas operasional PDAM sebagian besar merupakan kelompok temuan ketidakhematan sebanyak 43 kasus, ketidakefektifan, dan administrasi sebanyak 39 kasus. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada **lampiran 20** dan rincian per entitas dapat dilihat pada **lampiran 21.**

18.5 Penjelasan masing-masing kelompok temuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini.

Kerugian Daerah/Perusahaan

18.6 Kelompok temuan kerugian daerah/perusahaan meliputi permasalahan keterlambatan perusahaan dalam membayar kewajiban sehingga perusahaan harus menanggung denda, pengadaan barang/jasa fiktif, pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan dan kelebihan pembayaran.

18.7 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 28 kasus mengenai kerugian daerah/ perusahaan senilai Rp65,22 miliar, terdiri dari:

- 1 kasus pengadaan barang dan jasa fiktif senilai Rp16,90 juta;
- 15 kasus kelebihan pembayaran senilai Rp38,22 miliar;
- 4 kasus pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan senilai Rp335,04 juta;
- 4 kasus keterlambatan pembayaran kewajiban yang berakibat denda senilai Rp26,07 miliar; dan
- 4 kasus lain senilai Rp568,73 juta.

18.8 Kasus tersebut diantaranya :

- Pembayaran tunggakan hutang senilai Rp4,47 miliar kepada PT KTDP tidak tertib sehingga PDAM Minahasa dikenakan denda keterlambatan senilai Rp7,16 miliar;
- PDAM Kabupaten Minahasa belum melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Pemerintah Pusat yang telah jatuh tempo senilai Rp15,78 miliar sehingga dikenakan denda senilai Rp9,98 miliar; dan

- PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow belum melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Pemerintah Pusat yang telah jatuh tempo senilai Rp13,02 miliar sehingga dikenakan denda senilai Rp8,93 miliar.

Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan

18.9 Kelompok temuan potensi kerugian daerah/perusahaan meliputi permasalahan potensi kehilangan pendapatan air yang diantaranya berasal dari kebocoran air, pinjaman/piutang berpotensi tidak tertagih dan pemerintah berpotensi mengalami kerugian yang diakibatkan perusahaan tidak dapat melunasi pinjaman kepada pemerintah.

18.10 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 37 kasus mengenai potensi kerugian daerah/perusahaan senilai Rp431,17 miliar yang terdiri dari:

- 29 kasus potensi kehilangan pendapatan senilai Rp379,08 miliar;
- 2 kasus pinjaman berpotensi tidak tertagih senilai Rp48,64 juta; dan
- 6 kasus lain-lain senilai Rp3,44 juta.

18.11 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Tingkat kehilangan air pada PDAM Kota Surabaya dan PDAM Tirta Musi (Palembang) melebihi standar mengakibatkan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan masing-masing senilai Rp147,35 miliar dan Rp51,75 miliar; dan
- PT Palyja belum membayar selisih perhitungan kompensasi target pendapatan yang tidak tercapai senilai Rp71,12 miliar kepada PAM Jaya.

Kekurangan Penerimaan Daerah

18.12 Kelompok temuan kekurangan penerimaan meliputi permasalahan Penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan.

18.13 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 28 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp256,44 miliar terdiri dari yang antara lain adalah sebagai berikut.

- Pengelolaan piutang usaha pada PDAM Kota Bitung belum tertib dan terdapat tunggakan piutang langganan air belum tertagih per 30 Juni 2008 minimal senilai Rp12,95 miliar; dan
- Keterlambatan pembayaran rekening air pada PDAM Kabupaten Malang Tahun 2007 dan 2008 (s.d. bulan Agustus) tidak dipungut denda senilai Rp640,49 juta.

Administrasi

18.14 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan pertanggungjawaban keuangan tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah), pengelolaan aset perusahaan tidak tertib, pembentukan dana cadangan belum sesuai ketentuan dan adanya hutang perusahaan yang telah jatuh tempo.

18.15 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 39 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan masalah administrasi, terdiri dari :

- 7 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah);
- 11 kasus penyimpangan terhadap peraturan perudang-Undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN/Daerah;
- 3 kasus pembentukan cadangan piutang belum sesuai ketentuan;
- 1 kasus pemecahan kontrak; dan
- 17 kasus lainnya.

18.16 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Kewajiban pembayaran hutang PDAM Tirta Musi Palembang yang telah jatuh tempo senilai Rp193,46 miliar belum diselesaikan;
- Pengakuan aset hibah Pemerintah kepada PDAM Tirta Musi Palembang senilai Rp43,96 miliar belum dilengkapi dengan berita acara serah terima sehingga statusnya tidak jelas; dan
- Pembayaran kembali hutang PDAM Kota Bitung kepada Pemerintah senilai 31,07 miliar tidak berjalan lancar.

Ketidakhematan

18.17 Kelompok temuan ketidakhematan meliputi permasalahan pemborosan uang perusahaan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 43 kasus ketidakhematan senilai Rp68,22 miliar terdiri dari:

- 41 kasus pemborosan keuangan daerah/perusahaan senilai Rp56,64 miliar; dan
- 2 kasus penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya senilai Rp8,57 miliar.

18.18 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- Realisasi biaya tenaga kerja Tahun Buku 2007 di PDAM Kota Padang dan PDAM Kabupaten Malang melebihi batas yang diperkenankan masing-masing senilai Rp8,72 miliar dan Rp4,41 miliar; dan
- PDAM Kabupaten Malang belum dapat mengendalikan kebocoran air sehingga memboroskan biaya produksi senilai Rp2,75 miliar.

Ketidakefektifan

18.19 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan penggunaan anggaran/uang perusahaan yang tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat/konsumen yang tidak optimal.

18.20 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 39 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp26,57 miliar yang terdiri dari:

- 8 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2,54 miliar;
- 22 kasus pelayanan kepada masyarakat yang tidak optimal senilai Rp9,37 miliar;
- 4 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukan senilai Rp849,66 juta; dan
- 5 kasus lain-lain senilai Rp13,80 miliar.

18.21 Kasus tersebut diantaranya masalah cadangan dana meter untuk penggantian air pada PDAM Kota Bitung, PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow dan PDAM Kabupaten Minahasa masing-masing senilai Rp3,12 miliar, Rp2,28 miliar dan Rp1,43 miliar yang tidak dipergunakan semestinya.

Bab 19

Operasional Bank Pembangunan Daerah

Tujuan Pemeriksaan

19.1 BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional bank pembangunan daerah (BPD) dengan fokus pemeriksaan pendapatan, biaya, pengelolaan kredit dan investasi. Pemeriksaan dilakukan terhadap tujuh BPD dengan tujuan untuk menilai apakah :

- informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- sistem pengendalian intern entitas, baik terhadap laporan keuangan maupun pengamanan atas kekayaan, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
- entitas yang diperiksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam pengelolaan biaya operasional telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- memberikan simpulan apakah pengelolaan aktiva produktif telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip kehati-hatian.

Hasil Pemeriksaan

19.2 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya kelemahan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) meliputi permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kasus tersebut diantaranya titipan kas daerah senilai Rp50,58 miliar pada kewajiban segera lainnya BPD Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai ketentuan.

19.3 Selain itu hasil pemeriksaan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, administrasi dan ketidakefektifan, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 19 : Kelompok Temuan PDTT atas Operasional BPD

Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (Juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:		
Kerugian Daerah/Perusahaan	25	31.416
Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	22	447.235
Kekurangan Penerimaan	9	10.894
Administrasi	17	-
Ketidakefektifan	4	732
Jumlah Temuan Pemeriksaan	**77**	**490.277**

19.4 Berdasarkan tabel di atas dapat diungkapkan bahwa terdapat 77 kasus senilai Rp490,27 miliar. Rincian per jenis temuan dapat dilihat pada **lampiran 22** dan rincian per entitas dapat dilihat pada **lampiran 23**.

Kerugian Keuangan Daerah/Perusahaan

19.5 Kelompok temuan kerugian daerah/perusahaan meliputi permasalahan pengembalian pinjaman macet, spesifikasi barang/jasa yang diterima dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan kontrak dan pembebanan biaya tidak sesuai ketentuan.

19.6 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 25 kasus mengenai kerugian daerah/ perusahaan dengan nilai Rp31,41 miliar yang terdiri dari:

- 1 kasus spesifikasi barang dan jasa yang diterima tidak sesuai kontrak senilai Rp17,66 juta;
- 11 kasus Rp25,19 miliar;
- 6 kasus Rp3,34 miliar; dan
- 7 kasus Rp2,86 miliar.

19.7 Kasus tersebut diantaranya pemberian dan pengelolaan kredit modal kerja senilai Rp7,25 miliar yang diberikan PT Bank DKI kepada PT PMS tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat tunggakan pokok kredit, bunga kredit dan denda dengan total senilai Rp12,00 miliar macet.

Potensi Kerugian Keuangan Daerah/Perusahaan

19.8 Kelompok temuan potensi kerugian daerah/perusahaan meliputi permasalahan potensi kehilangan pendapatan dan piutang yang berpotensi tidak tertagih. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 22 kasus mengenai potensi kerugian daerah/ perusahaan senilai Rp447,23 miliar.

19.9 Kasus tersebut diantaranya:

- Pengelolaan kredit oleh PT Bank BPD Jabar Banten kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan plafond senilai Rp200 miliar tidak disertai monitoring yang baik.
- Pemberian kredit investasi oleh PT Bank DKI kepada PT ES senilai Rp116,56 miliar tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan PT Bank DKI.
- Pemberian kredit modal kerja oleh BPD Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Kabupaten Muna senilai Rp24,50 miliar tidak terjamin pelunasannya.

Kekurangan Penerimaan

19.10 Kelompok temuan kekurangan penerimaan meliputi permasalahan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke daerah/perusahaan.

19.11 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 9 kasus mengenai kekurangan penerimaan senilai Rp10,89 miliar yang terdiri dari:

- 6 kasus penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum atau tidak atau terlambat dipungut/ diterima/ disetor ke kas daerah senilai Rp10,61 miliar; dan
- 3 kasus lain-lain senilai Rp283,06 juta.

19.12 Kasus-kasus tersebut diantaranya:

- PT Bank DKI belum menyetorkan hasil penerimaan yang berasal dari kredit hapus buku Tahun 1999 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp9,04 miliar.
- PT Bank DKI kurang dan terlambat melengkapi persyaratan pengajuan klaim asuransi kepada beberapa perusahaan asuransi sehingga terdapat klaim yang belum dibayar senilai Rp726,52 juta.

Administrasi

19.13 Kelompok temuan administrasi meliputi permasalahan proses pemberian kredit tidak sesuai ketentuan, pengelolaan aset tidak tertib dan proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan.

19.14 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 17 kasus mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan masalah administrasi yang terdiri dari:

- 2 kasus proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan;
- 1 kasus pengelolaan aset tidak tertib;
- 13 kasus pemberian kredit tidak sesuai ketentuan; dan
- 1 kasus lainnya.

19.15 Kasus tersebut diantaranya:

- Pemberian kredit senilai Rp29,70 miliar kepada tiga grup debitur PT Bank Nagari Cabang Utama Padang dengan plafond di atas Rp5,00 miliar belum sesuai ketentuan; dan
- Pemberian kredit senilai Rp19,20 miliar kepada dua nasabah PT Bank Nagari Cabang Pekan baru tidak sesuai ketentuan.

Ketidakefektifan

19.16 Kelompok temuan ketidakefektifan meliputi permasalahan pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi yang antara lain berupa permasalahan aset perusahaan tidak produktif.

19.17 Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 4 kasus mengenai ketidakefektifan senilai Rp731,71 juta yang terdiri dari:

- 1 kasus pemanfaatan barang dan jasa yang tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp310,71 juta; dan
- 3 kasus lainnya.

19.18 Kasus tersebut diantaranya :

- Pengadaan mesin ATM pada BPD Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp310,71 juta tidak efektif; dan
- Pemberian kredit Peumakmu Nanggroe senilai Rp300 juta tidak sesuai ketentuan serta pengelolaan dan pemantauan kredit Peumakmu Nanggroe tidak optimal sehingga tidak mencapai tujuan dan sasaran serta belum mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bab 20
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

20.1 Selain tema-tema seperti diuraikan diatas, BPK juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 153 obyek pemeriksaan yang meliputi delapan obyek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 130 obyek pemeriksaan pada pemerintah daerah, delapan BUMN dan enam BUMD. Obyek pemeriksaan tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

20.2 Pemeriksaan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) type A-1 Tanjung Mas Semarang, KPBC type A-2 Jakarta, dan KPBC type A-3 Merak mengungkapkan temuan yang menonjol yaitu penagihan piutang senilai Rp23,15 miliar atas lima importir tidak efektif karena importir tidak diketemukan.

20.3 Pemeriksaan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, KPP Pratama Bekasi Selatan, KPP Pratama Tangerang Barat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan berkaitan dengan dokumen yang dapat diperiksa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

20.4 Pemeriksaan Pengelolaan Aset eks BPPN pada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengungkapkan temuan yang menonjol yaitu adanya skema restrukturisasi hutang Tirtamas Majutama dan pengelolaan *revenue account* oleh Tuban Petro belum optimal. Hal tersebut mengurangi potensi percepatan pelunasan MYB kepada PT PPA senilai Rp81,41 miliar dan senilai USD25 juta.

20.5 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun pada empat Kanwil Departemen Agama mengungkapkan temuan yang menonjol yaitu *block grant* TA 2007 senilai Rp1,53 miliar di lingkungan Kanwil Depag Provinsi Jambi diberikan kepada 12 lembaga yang tidak berhak atau tidak tepat sasaran.

20.6 Pemeriksaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada enam kabupaten di Provinsi Papua Barat mengungkapkan temuan yang menonjol yaitu penerimaan dana otonomi khusus senilai Rp33,87 miliar di Kabupaten Sorong tidak tepat rekening serta penggunaannya tidak sesuai program prioritas.

20.7 Pemeriksaan Manajemen Aset Tetap pada sembilan entitas provinsi/kabupaten/kota mengungkapkan adanya temuan 234 bidang tanah Pemerintah Kota tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Hal tersebut mengakibatkan rawan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau tuntutan hukum dari pihak lain.

20.8 Pemeriksaan Pendapatan Daerah pada 13 entitas provinsi/kabupaten/kota mengungkapkan adanya keterlambatan penyetoran penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ke kas daerah senilaiRp167,23 miliar.

20.9 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana BOS dan dana pendukung lainnya (DPL) pada 101 entitas provinsi/kabupaten/kota, dan Kanwil Departemen Agama merupakan pendukung laporan hasil pemeriksaan (LHP) gabungan atas Pengeloaan dan Pertanggungjawaban dana BOS dan DPL.

20.10 Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana usaha kesejahteraan sosial (UKS) di Jakarta mengungkapkan temuan yang menonjol yaitu pengelolaan terhadap dana UKS dari penyelenggara undian tidak tertib dan terdapat dana UKS senilai Rp3,71 miliar yang belum diterima Departemen Sosial dari beberapa penyelenggara undian.

20.11 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya di lingkungan BUMN meliputi delapan entitas yaitu PT Industri Kereta Api (Persero), PT Iglas (Persero), Perum Perhutani, PT Kertas Leces (Persero), dan PT Danareksa (Persero).

Temuan pemeriksaan yang menonjol terkait pemeriksaan tersebut di atas dijelaskan dalam uraian berikut.

- Kasus ketidakhematan pada PT Industri Kereta Api (INKA) senilai Rp59,61 miliar terjadi karena PT INKA (Persero) tidak cermat dalam pembuatan HPS dan penetapan harga penawaran serta pengendalian biaya proyek 50 unit Kereta Api Bangladesh.

- Kerugian negara/perusahaan pada PT IGLAS minimal senilai Rp13,98 miliar terjadi karena adanya indikasi kesengajaan Direksi PT IGLAS (Persero) memberikan keistimewaan pada PT Indopacking Gelora Langgeng Sukses (INDOGLAS) sebagai agen pemasaran tunggal dengan membuat kontrak kerjasama yang hanya menguntungkan INDOGLAS.

- Kasus kekurangan pendapatan pada Perum Perhutani senilai Rp8,20 miliar terjadi karena pengendalian Perum Perhutani atas pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan PT Setyamitra Bhaktipersada (PT SB) tidak memadai dan sampai tanggal jatuh tempo, PT SB belum melunasi sisa kewajiban senilai Rp8,20 miliar tersebut.

- Kasus potensi kerugian negara/perusahaan pada PT Danareksa (Persero) senilai Rp207,97 miliar terjadi karena pemberian hapus tagih (*haircut*) atas surat hutang PT Tridaya Esta (TDE) oleh Direksi Danareksa melanggar Anggaran Dasar, Amanat RUPS dan Pedoman Pengelolaan Risiko Perusahaan.

20.12 Operasional BUMD lainnya pada enam entitas meliputi PT Riau Airlines Provinsi Riau, PD hotel Swarna Dwipa Sumatera Selatan, PD Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol DKI Jakarta, PT Agronesia Provinsi Jawa Barat, dan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur. Temuan yang menonjol diantaranya adalah kerugian keuangan perusahaan pada PT Panca Wira Usaha (Jawa Timur) senilai Rp1,18 miliar karena adanya pembatalan Proyek Pengolahan Buah tropis.

20.13 Hasil pemeriksaan secara lengkap baik untuk masing-masing tema maupun untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya dapat dibaca pada masing-masing laporan hasil pemeriksan (LHP) dalam bentuk *softcopy* yang dikemas dalam bentuk *compact disk (CD)* atau dibaca pada laman *(website)* www.bpk.go.id.

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran, maka dalam IHPS dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang dilakukan sampai dengan akhir Semester I Tahun Anggaran (TA) 2008.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang diperiksa tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan. Misalnya, suatu temuan pemeriksaan memuat saran/rekomendasi mengenai penagihan atas kelebihan bayar atau denda yang belum dipungut dan hasil penagihan/ pemungutan harus disetor ke Kas Negara/Daerah, maka temuan pemeriksaan tersebut dinyatakan selesai jika entitas yang bersangkutan telah menyetor seluruh penagihan/pemungutannya ke Kas Negara/Daerah dan BPK telah menerima bukti setor tersebut. Sebaliknya, apabila bukti tindak lanjut tidak diterima dan/atau baru diterima sebagian, maka temuan pemeriksaan yang bersangkutan dinyatakan belum selesai ditindaklanjuti.

Pemerintah Pusat

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester II TA 2008 secara keseluruhan dari 85 kementerian/lembaga terdapat 9.013 temuan pemeriksaan senilai Rp233,76 triliun serta

sejumlah valuta asing (valas) dan 13.794 rekomendasi senilai Rp223,22 triliun serta sejumlah valas. Diantaranya sebanyak 7.062 rekomendasi senilai Rp52 triliun serta sejumlah valas telah ditindaklanjuti. Sebanyak 3.130 rekomendasi senilai Rp108,31 triliun serta sejumlah valas dalam proses ditindaklanjuti dan sisa sebanyak 3.602 rekomendasi senilai Rp62,91 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. Semester II TA 2008 disajikan dalam tabel 20. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada lampiran 24.

Tabel 20 : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga s.d Semester II Tahun 2008

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan			Rekomendasi			Status Penyelesaian Rekomendasi								
						Sudah Ditindaklanjuti			Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai		Jml	Nilai		Jml	Nilai		Jml	Nilai		Jml	Nilai	
9.013	RP	233.762.589	13.794	RP	223.229.529	7.062	RP	52.002.285	3.130	RP	108.312.059	3.602	RP	62.915.186
	USD	351.672,40		USD	351.152,40		USD	107.089,62		USD	182.401,82		USD	61.660,96
	AUD	1.580,70		AUD	1.580,70		AUD	898,69		AUD	645,49		AUD	36,52
	VND	32.580,00		VND	32.580,00		VND	32.580,00			-			-
	JPY	1.593.001,21		JPY	1.593.001,21		JPY	736.792,33		JPY	854.909,84		JPY	1.299,04
	EUR	33.919,00		EUR	33.919,00		EUR	2.269,00		EUR	31.450,00		EUR	200,00
	CAD	60,00		CAD	60,00		CAD	60,00			-			-
	£	1.351,89		£	1.351,89		£	1.006,10		£	310,00		£	35,79
	DKK	3.000,00		DKK	3.000,00		DKK	3.000,00			-			-
	SAR	69.754,13		SAR	69.754,13		SAR	25.031,32		SAR	39.306,40		SAR	5.416,40
	SGD	820,00		SGD	820,00		SGD	770,00		SGD	50,00			-
	Yuan	2.810,00		Yuan	2.400,00			-			-		Yuan	2.400,00

Dari tabel diatas, persentase nilai rekomendasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester II Tahun 2008 disajikan dalam grafik berikut.

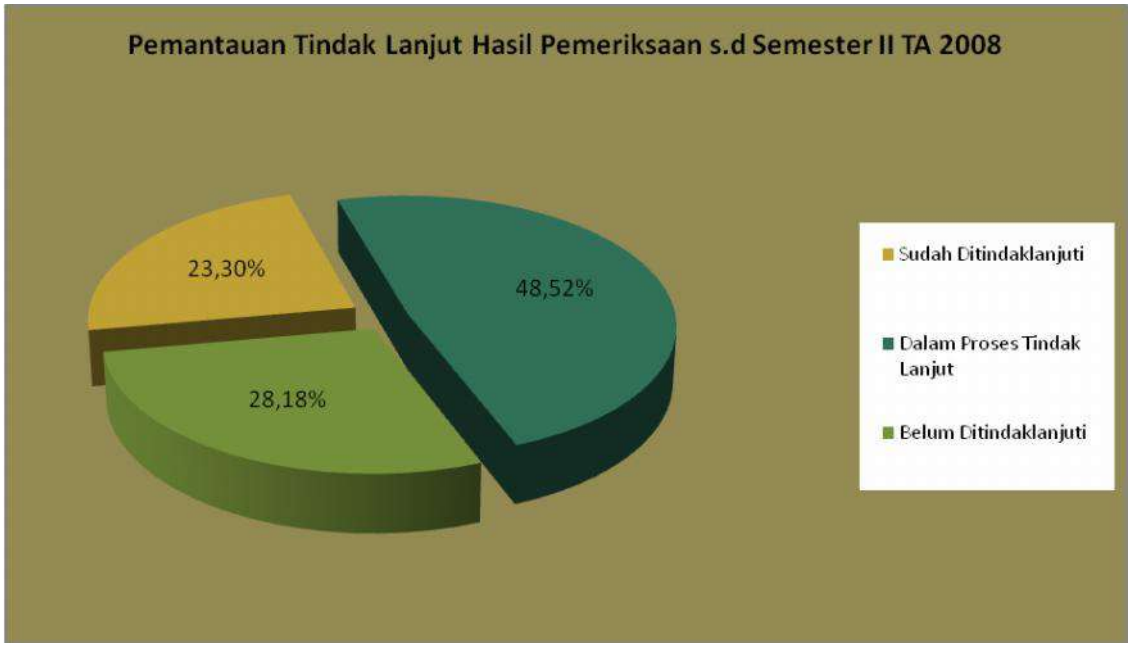

Grafik 3 Persentase Nilai Rekomendasi Tindak Lanjut Kementerian/Lembaga

Dari grafik pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan diatas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai saran/rekomendasi sebanyak 7.062 senilai Rp52 triliun atau 23,30%. Dalam proses tindak lanjut sebanyak 3.130 rekomendasi senilai Rp108,31 triliun atau 48,52%, dan sisanya sebanyak 3.602 rekomendasi senilai Rp62,91 triliun atau 28,18% belum ditindaklanjuti.

Sedangkan perbandingan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan antara tindak lanjut s.d. Semester I TA 2008 dengan tindak lanjut s.d. Semester II TA 2008 disajikan dalam grafik berikut.

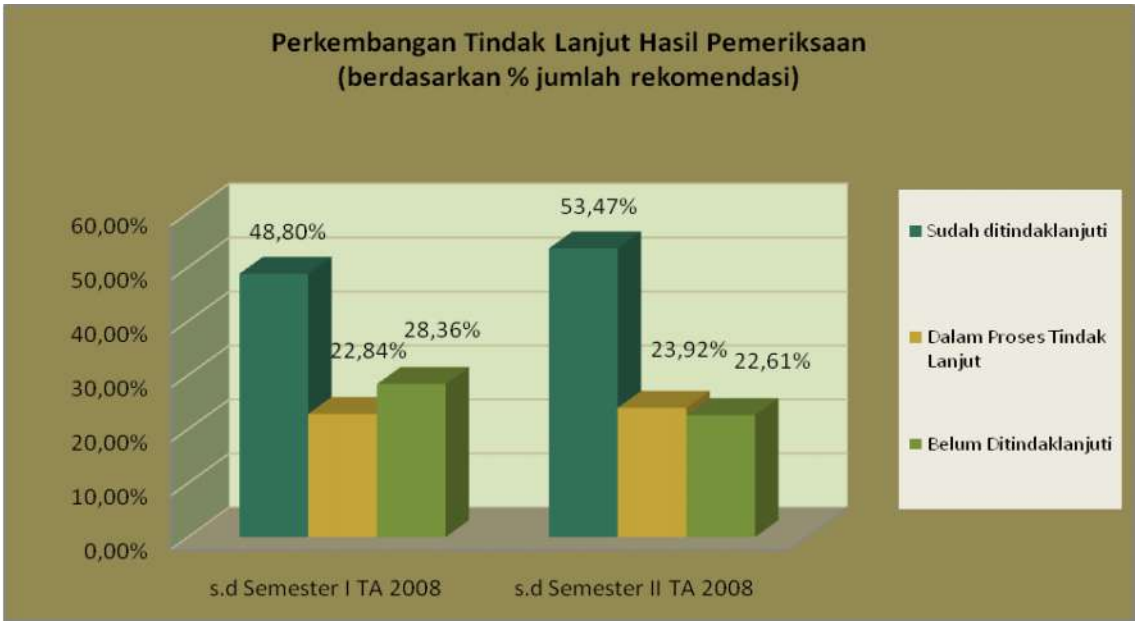

Grafik 4 Perbandingan Rekomendasi Tindak Lanjut Kementerian/Lembaga

Dari grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mengalami peningkatan dari 48,80% pada periode s.d. Semester I TA 2008 menjadi 53,47% pada periode s.d. Semester II TA 2008. Sedangkan rekomendasi dalam proses ditindaklanjuti juga mengalami peningkatan dari 22,84% pada periode s.d. Semester I TA 2008 menjadi 23,92% pada periode s.d. Semester II TA 2008. Di sisi lain rekomendasi yang belum ditindaklanjuti juga mengalami penurunan dari 28,36% pada periode s.d. Semester I TA 2008 menjadi 22,61% pada periode s.d. Semester II TA 2008.

Badan Usaha Milik Negara

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 94 BUMN mengungkapkan bahwa sampai dengan akhir Semester II TA 2008 terdapat 2.251 temuan pemeriksaan senilai Rp262,51 triliun serta sejumlah valas dan 2.954 rekomendasi senilai Rp125,77 triliun serta sejumlah valas. Diantaranya sebanyak 1.000 rekomendasi senilai Rp63,82 triliun serta sejumlah valas sudah ditindaklanjuti, 1.292 rekomendasi senilai Rp51,92 triliun serta sejumlah valas dalam proses tindaklanjut, dan sisanya 662

rekomendasi senilai Rp10,02 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. semester II TA 2008 disajikan dalam tabel 21. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan menurut entitas BUMN disajikan pada lampiran 25.

Tabel 21: Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BUMN s.d. Semester II Tahun 2008

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan			Rekomendasi/saran			Rekomendasi								
						Sudah Ditindaklanjuti			Dalam Proses Tindaklanjut			Belum Ditindaklanjuti		
Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai	
2.251	Rp	262.511.476	2.954	Rp	125.775.177	1.000	Rp	63.827.948	1.292	Rp	51.924.527	662	Rp	10.022.702
	USD	4.107.955,21		USD	2.675.778,94		USD	65.906,78		USD	1.092.515,97		USD	1.517.356,19
	JPY	324.489,20		JPY	24.489,20		JPY	24.214,92		JPY	274,28			-
	GBP	13.123,02		GBP	123,02		GBP	123,02			-			-
	DEM	60.101,91		DEM	60.101,91		DEM	1.135,00			-		DEM	58.966,91
	EUR	53.725,82		EUR	53.725,82			-		EUR	16,94		EUR	53.708,88
	SGD	836,15		SGD	836,15			-		SGD	836,15			-
	AUD	516,47		AUD	516,47			-		AUD	516,47			-
	CHF	0,03		CHF	0,03		CHF	0,03		CHF	0,00			-

Persentase status penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan pada BUMN s.d Semester II Tahun 2008 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

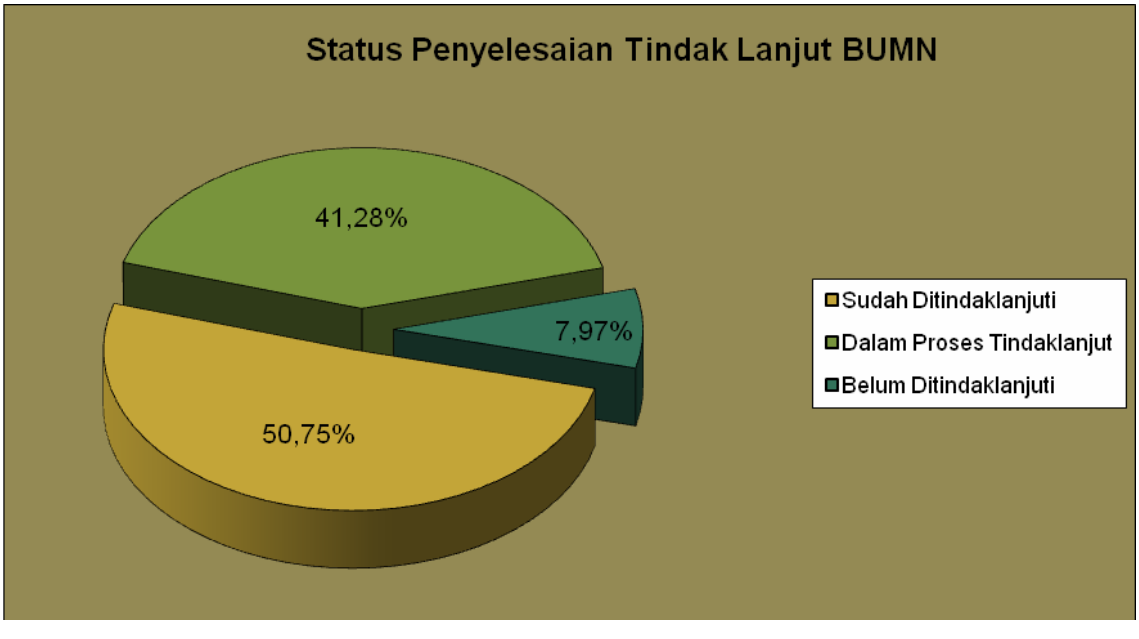

Grafik 5 Status Penyelesaian Tindak Lanjut pada BUMN s.d Semester II Tahun 2008

Dari grafik tindak lanjut hasil pemeriksaan diatas terlihat bahwa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1000 senilai Rp63,82 triliun atau 50,75%, dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.292 rekomendasi senilai Rp51,92 triliun atau 41,28%, dan sisanya sebanyak 662 rekomendasi senilai Rp10,02 triliun atau 7,97% belum ditindaklanjuti.

Perbandingan tindak lanjut s.d. Semester I Tahun 2008 dan pemantauan (*update balance*) s.d. Semester II TA 2008 secara keseluruhan dari 94 BUMN untuk persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, dalam proses tindak lanjut, dan belum ditindaklanjuti dapat dilihat pada grafik berikut.

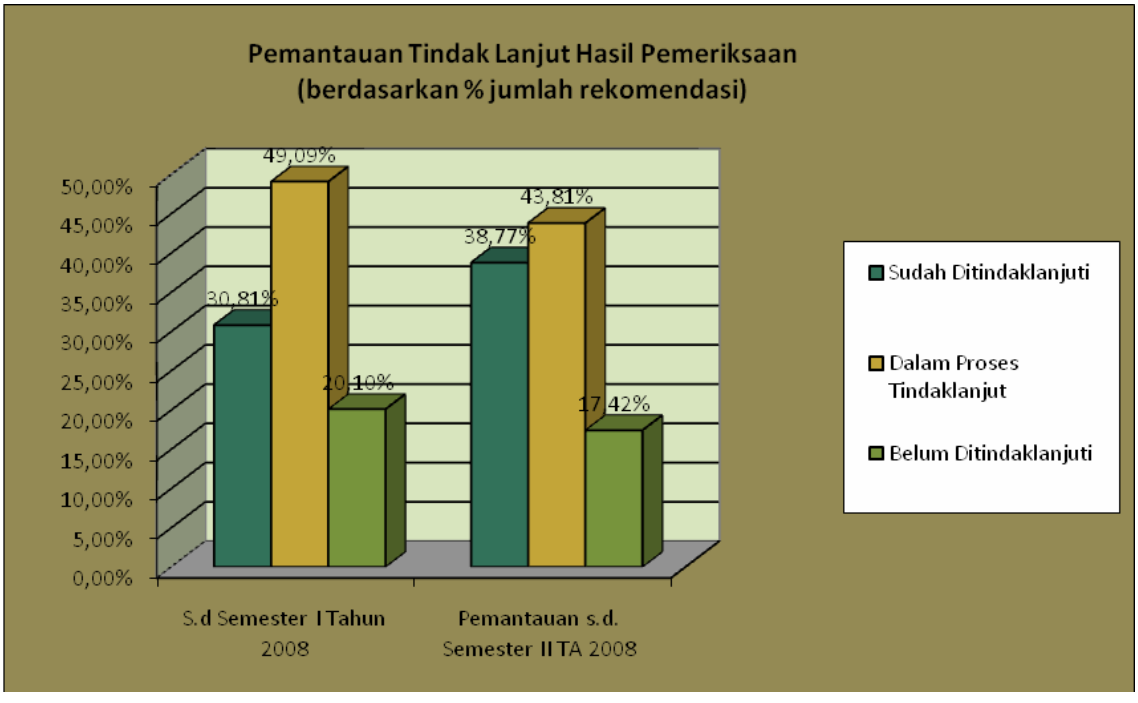

Grafik 6 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BUMN

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas BUMN s.d. Semester I Tahun 2008 mengungkapkan secara keseluruhan dari 94 BUMN terdapat 2.180 temuan pemeriksaan dengan 2.801 rekomendasi. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 863 atau 30,81%, dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.388 atau 49,09%, dan sisanya sebanyak 550 rekomendasi atau 20,10% belum ditindaklanjuti.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan periode s.d. Semester II Tahun 2008 (*update balance*) mengungkapkan bahwa secara keseluruhan dari 94 BUMN terdapat sebanyak 2.180 temuan pemeriksaan, dengan 2.801 rekomendasi. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 1.086 atau 38,77%, dalam proses tindaklanjut sebanyak 1.227 atau 43,81%, sisanya sebanyak 488 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau 17,42%.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester I Tahun 2008 yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 863 temuan dari 2.801 rekomendasi pada Semester II Tahun 2008 yang telah ditindaklanjuti mengalami peningkatan sebanyak 137 temuan, sehingga jumlah yang sudah ditindaklanjuti menjadi 1.000 temuan.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d Semester II Tahun 2008 persentase terbesar pada rekomendasi/saran yang telah ditindaklanjuti terdapat pada PT Bio Farma yaitu senilai Rp30,7 miliar atau 100% dari nilai rekomendasi/saran. Sedangkan persentase terkecil pada rekomendasi/saran yang telah ditindaklanjuti terdapat pada PT RNI yaitu senilai Rp323,59 juta atau 0,03% dari nilai rekomendasi/saran sebesar Rp1,01 triliun.

Perbandingan status penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester I Tahun 2008 dan Semester II Tahun 2008 pada BUMN dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

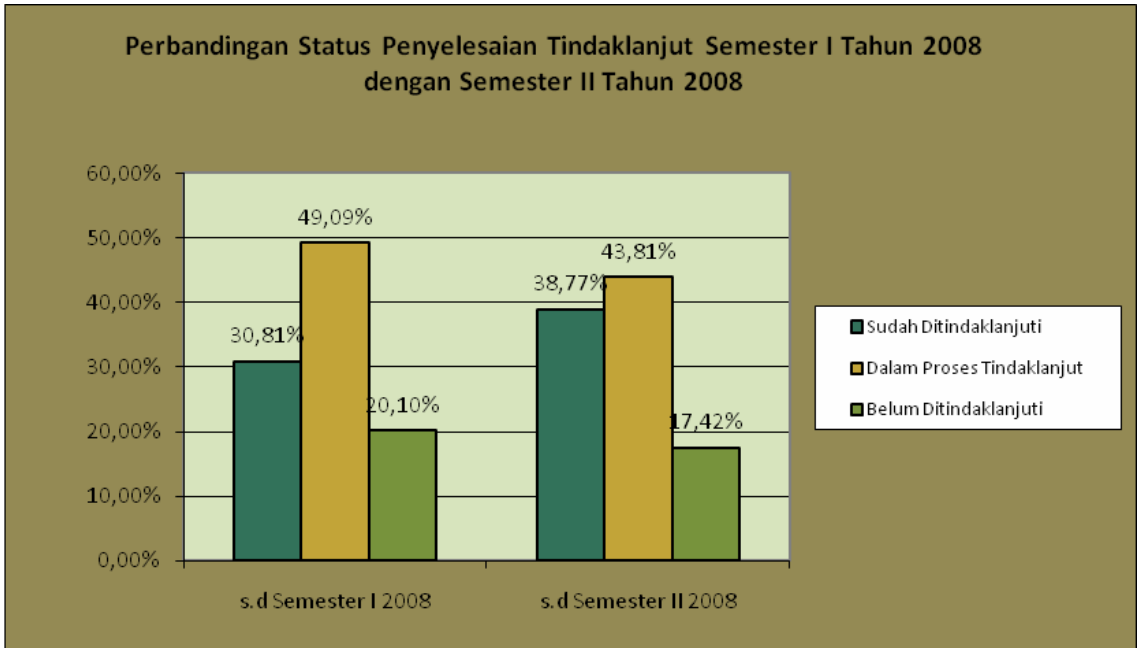

Grafik 7 Perbandingan Status Penyelesaian Tindak Lanjut pada BUMN

Dari grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mengalami peningkatan dari 30,81% pada periode s.d. Semester I TA 2008 menjadi 38,77% pada periode s.d. Semester II TA 2008. Sedangkan rekomendasi dalam proses ditindaklanjuti mengalami penurunan dari 49,09% pada pada periode s.d. Semester I TA 2008 menjadi 43,81% pada periode s.d. Semester II TA 2008. Di sisi lain rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami penurunan dari 20,10% pada periode s.d. Semester I TA 2008 menjadi 17,42% pada periode s.d. Semester II TA 2008.

Pemerintah Daerah

Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, di lingkungan Pemerintah Derah, mengungkapkan bahwa s.d. akhir Semester II TA 2008 secara keseluruhan dari 33 provinsi terdapat 42.049 temuan pemeriksaan senilai Rp521,29 triliun serta sejumlah valas dan 76.733 rekomendasi senilai Rp415,10 triliun serta sejumlah valas.

Diantaranya sebanyak 29.399 rekomendasi senilai Rp100,30 triliun telah ditindaklanjuti. Sebanyak 13.588 rekomendasi senilai Rp182,75 triliun dalam proses ditindaklanjuti dan sisa sebanyak 33.746 rekomendasi senilai Rp132,04 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti. Rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut s.d. semester II TA 2008 disajikan dalam tabel 22. Rincian hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah disajikan pada lampiran 26.

Tabel 22 : Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan s.d. Semester II Tahun 2008

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
				Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
42.049	Rp521.291.426	76.733	Rp415.105.643	29.399	Rp100.305.164	13.588	Rp182.751.695	33.746	Rp132.048.784
	USD 25.073		USD 25.073						USD 25.073

Dari tabel diatas, persentase nilai rekomendasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester II Tahun 2008 disajikan dalam grafik berikut.

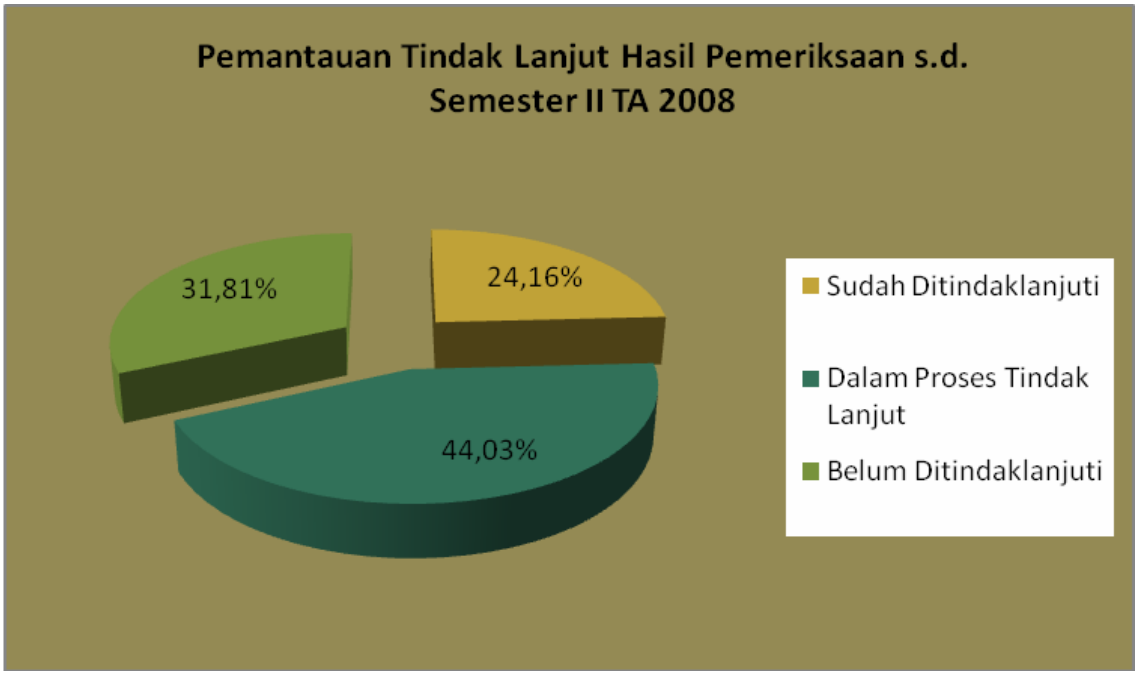

Grafik 8: Persentase Nilai Rekomendasi Tindak Lanjut di lingkungan Pemerintah Derah

Dari grafik tindak lanjut hasil pemeriksaan diatas terlihat bahwa rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 29.399 senilai Rp100,30 triliun atau 24,16%, dalam proses tindak lanjut sebanyak 13.588 rekomendasi senilai Rp182,75 triliun atau 44,03%, dan sisanya sebanyak 33.746 rekomendasi senilai Rp132,04 triliun atau 31,81% belum ditindaklanjuti.

Perbandingan tindak lanjut s.d. Semester I TA 2008 dan pemantauan (*update balance*) s.d. Semester II TA 2008 secara keseluruhan dari 33 provinsi untuk persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, dalam proses tindak lanjut, dan belum ditindaklanjuti dapat dilihat pada grafik berikut.

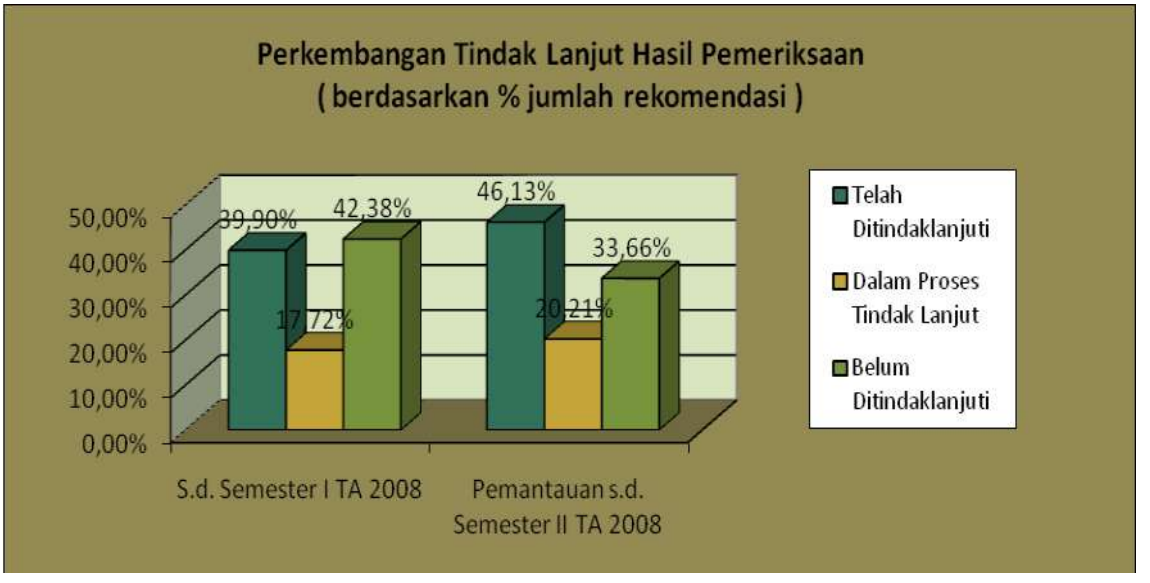

Grafik 9 Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

Dari grafik persentase perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mengalami peningkatan yaitu sebesar 39,90% pada periode s.d. semester I TA 2008 dan sebesar 46,13% pada periode pemantauan s.d. semester II TA 2008 (*update balance*) atau naik sebesar 6,23%. Persentase jumlah rekomendasi dalam proses tindak lanjut juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 17,72% pada periode s.d. semester I TA 2008 dan sebesar 20,21% pada periode pemantauan s.d. semester II TA 2008 (*update balance*) atau naik sebesar 2,49%. Persentase jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mengalami penurunan yaitu sebesar 42,38% pada periode s.d. semester I TA 2008 dan sebesar 33,66% pada periode pemantauan s.d. semester II TA 2008 (*update balance*) atau turun sebesar 8,72%.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan s.d. Semester I TA 2008 persentase terbesar pada jumlah rekomendasi/saran yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Provinsi Banten yaitu 1.491 rekomendasi dari 2.070 rekomendasi atau 72,03% senilai Rp2,89 triliun. Sedangkan persentase terkecil pada jumlah rekomendasi/saran yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 342 rekomendasi dari 3.174 rekomendasi atau 10,78% senilai Rp861,65 miliar.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (*update balance*) persentase terbesar pada jumlah rekomendasi/saran yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Provinsi Bangka Belitung yaitu 644 rekomendasi dari 839 rekomendasi atau 76,76% senilai Rp426,28 miliar. Sedangkan persentase terkecil pada jumlah rekomendasi/saran yang telah ditindaklanjuti terdapat pada Provinsi Papua yaitu yaitu 114 rekomendasi dari 855 rekomendasi atau 13,33% senilai Rp2,32 triliun.

Perbandingan persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti antara periode s.d. Semester I TA 2008 dengan periode pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (*update balance*) secara lengkap per provinsi dapat dilihat pada grafik berikut.

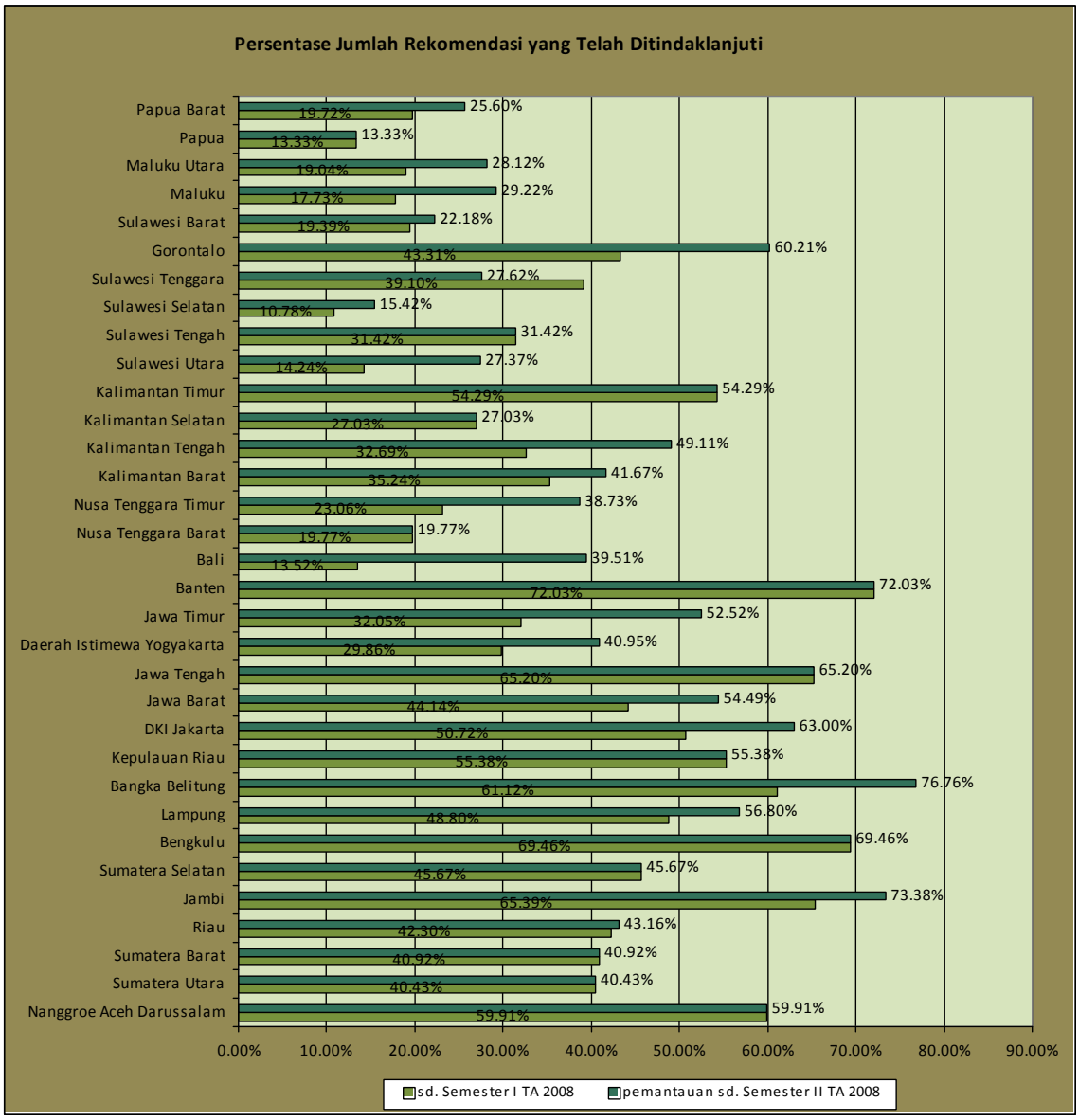

Grafik 10 Persentase Jumlah Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti pada Pemerintah Daerah

Sebagai contoh pada Provinsi Papua Barat, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada periode sampai dengan semester I TA 2008 adalah sebesar 19,72% (yaitu 71 rekomendasi dari 360 rekomendasi). Sedangkan pada periode pemantauan sampai dengan semester II TA 2008 (*update balance*) jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebesar 25,60 % (yaitu 159 rekomendasi dari 621 rekomendasi).

Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Kerugian/Pidana

Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada instansi yang berwenang. Dalam kurun waktu tahun 2003 s.d. 2008, hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang yaitu : Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan sebanyak 90 LHP, terdiri dari 210 kasus senilai Rp30,18 triliun dan USD470,31 juta. Sebanyak 36 kasus atau 17,14% telah diproses secara hukum senilai Rp22,74 triliun dan USD105,92 juta. Jumlah LHP, kasus dan nilai temuan serta proses hukum yang telah dilaksanakan dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 23 : Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Kerugian/Pidana

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Instansi Berwenang			Polri	Kejaksaan		KPK *)		JUMLAH	
Hasil Pemeriksaan	HP		9	49		32		90	
	Kasus		21	139		50		210	
	Nilai		20.220.446,31	6.214.569,96	USD208,72	3.754.642,36	USD261,59	30.189.658,64	USD470,31
Proses Hukum	Penyelidikan	Kasus	-	4		1		5	
		Nilai	-	76.022,27	USD37,21	121.229,87	USD26,38	197.252,14	USD63,59
	Penyidikan	Kasus	1	4		2		7	
		Nilai	21.323,42	2.455.994,41	USD26,35	115.144,64		2.592.462,47	USD26,35
	Penuntutan	Kasus	-	2		1		3	
		Nilai	-	199.757,91	USD12,75	11.468,42		211.226,32	USD12,75
	Vonis	Kasus	1	-		4		5	
		Nilai	-	-		121.020,61		121.020,61	
	Dihentikan	Kasus	1	-		-		1	
		Nilai	18.964.610,33	-		-		18.964.610,33	-
	Dilimpahkan	Kasus	-	14		1		15	
		Nilai	-	637.927,17	USD3,24	21.323,42		659.250,59	USD3,24
Jumlah		Kasus	3	24		9		36	
		Nilai	18.985.933,75	3.369.701,75	USD79,55	390.186,96	USD26,38	22.745.822,45	USD105,92

Dalam tahun 2008, LHP BPK yang mengandung unsur tindak pidana dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang terdiri dari 31 LHP sebanyak 40 kasus senilai Rp3,67 triliun dan USD26,37 juta. Adapun rinciannya sebagai berikut : laporan kepada Kepolisian RI sebanyak satu LHP dan kepada Kejaksaan sebanyak enam LHP terdiri dari tiga kasus senilai Rp84,42 miliar serta kepada KPK sebanyak 24 LHP terdiri dari 37 kasus senilai Rp3,59triliun dan USD26,37 juta. Pemeriksaan tersebut meliputi:

- pengelolaan keuangan pemerintah pusat sebanyak 14 kasus;
- pengelolaan keuangan pemerintah daerah 15 kasus;
- badan kerjasama proyek pengembangan lingkungan empat kasus;
- perhitungan kerugian negara empat kasus;
- pengelolaan biaya perkara satu kasus; dan
- pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan belanja sosial dua kasus.

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kepada BPK diberi kewenangan untuk memantau :

- penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain;
- pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD, lembaga atau badan lain yang ditetapkan oleh BPK; dan
- pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sasaran pemantauan oleh BPK meliputi:

- kepatuhan instansi dalam pembentukan dan kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) serta penyelesaian kerugian negara/daerah secara tepat waktu;
- pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh pemerintah;
- pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK dan pengadilan; dan
- pemantauan terhadap penanganan ganti kerugian negara/daerah yang belum dapat ditetapkan, baik dalam proses penetapan maupun indikasi kerugian negara/daerah yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang harus segera diproses penyelesaiannya oleh instansi yang bersangkutan.

Dokumen dan batas waktu Pemantauan

Pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah disusun berdasarkan data dan dokumen yang diproses dalam kurun waktu Semester II Tahun Anggaran 2008, yaitu bulan Juni sampai dengan Desember 2008.

Cakupan Pemantauan

Data kerugian negara/daerah meliputi 441 entitas atau 25,34% dari keseluruhan entitas sebanyak 1740. Entitas yang telah secara aktif menyampaikan laporan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah kepada BPK sebagai perwujudan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, Dephan (TNI AL), POLRI (Badan Reserse Kriminal), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi

Jambi, Kabupaten Sragen, Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Komunikasi dan Informatika, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Departemen Kehutanan.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sampai dengan Semester II Tahun 2008 (posisi 31 Januari 2009), hasil pemantauan menunjukkan penyelesaian kerugian negara/daerah sebanyak 30.431 kasus dengan tingkat penyelesaian sebesar 35% dari total nilai kerugian negara/daerah. Rincian penyelesaian kerugian negara/daerah tersebut adalah sebagai berikut.

Kerugian Negara pada Instansi Pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Instansi Pusat

Sampai dengan Semester II Tahun 2008 (posisi 31 Januari 2009), kerugian negara pada instansi pusat yang terpantau mencapai 4.229 kasus senilai Rp1,44 triliun dan sejumlah valas dengan tingkat penyelesaian sebesar 18,33%, dengan rincian disajikan pada tabel 24 berikut.

Tabel 24 : Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Uraian	Kerugian			Angsuran			Sisa			Capaian
		Kasus	Nilai		Kasus	Nilai		Kasus	Nilai		Kasus
1	Yang Telah Ditetapkan	1.070	Rp	700.244,43	303	Rp	137.457,10	900	Rp	423.858,93	28,32
			USD	1.459,75		USD	6,97		USD	1.452,77	
			AUD	1.159,79					AUD	1.159,79	
			CAD	39,60					CAD	39,60	
			EUR	153,29		EUR	106,73		EUR	46,55	
			DM	1.226,49					DM	1.226,49	
			¥	228.961,86					¥	228.961,86	
			DFLS	2.501,72					DFLS	2.501,72	
			FFr	5.027,69					FFr	5.027,69	
			GB£	199,15					GB£	199,15	
2	Dalam Proses Penetapan	1.643	Rp	644.472,32	459	Rp	39.968,93	1.199	Rp	604.988,77	
			USD	50.185,43		USD	985,43		USD	49.193,02	
			AUD	1.503,78		AUD	24,07		AUD	1.479,71	
			KsHs	2.000,00					KsHs	2.000,00	
			K	38,51		K	38,51				
			CAD	19,03		CAD	19,03				
			NZD	3,74		NZD	3,74				
			Pesos	215.212,60					Pesos	215.212,60	
			RM	10.661,26		RM	10.602,73		RM	58,53	
			DM	695,03					DM	695,03	
			¥	545.257,15					¥	545.257,15	
			DFLS	672,74					DFLS	672,74	
			FFr	32.290,96					FFr	32.290,96	
			NLG	182,97					NLG	182,97	
3	Indikasi Kerugian Negara/Daerah dari HP BPK dan APIP										
		1.516	Rp	96.317,13	13	Rp	18.619,06	1.506	Rp	77.698,07	
	TOTAL	4.229	Rp	1.441.033,88	775	Rp	196.045,10	3.605	Rp	1.106.545,78	
			USD	51.645,18		USD	992,41		USD	50.645,79	
			AUD	2.663,58		AUD	24,07		AUD	2.639,51	
			KsHs	2.000,00		KsHs			KsHs	2.000,00	
			K	38,51		K	38,51				
			CAD	58,63		CAD	19,03		CAD	39,60	
			NZD	3,74		NZD	3,74				
			Pesos	215.212,60		Pesos			Pesos	215.212,60	
			RM	10.661,26		RM	10.602,73		RM	58,53	
			EUR	153,29		EUR	106,73		EUR	46,55	
			DM	1.921,52		DM			DM	1.921,52	
			¥	774.219,01		¥			¥	774.219,01	
			DFLS	3.174,47		DFLS			DFLS	3.174,47	
			FFr	37.318,65		FFr			FFr	37.318,65	
			GB£	199,15		GB£			GB£	199,15	
			NLG	182,97		NLG			NLG	182,97	

BUMN

Sampai dengan Semester II Tahun 2008 (posisi 31 Januari 2009), kerugian negara pada BUMN yang terpantau mencapai 350 kasus senilai Rp97,04 miliar dan USD313.50 ribu dengan tingkat penyelesaian sebesar 3,71% dari total nilai kerugian negara pada BUMN dengan rincian pada tabel 25 berikut.

Tabel 25 : Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Uraian	Kerugian		Angsuran		Sisa		Capaian
		Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	%
1	Yang telah ditetapkan	56	3.071,30	6	206,12	50	2.865,18	10.71
2	Dalam Proses penetapan	295	93.975,10	7	28.399,86	288	65.575,24	2.38
			USD 313,50				USD 313,50	
3	Indikasi Kerugian Negara/Daerah dari HP BPK dan APIP*)	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		351	97.046,40	13	28.605,98	338	68.440,42	3.71
			USD 313,50				USD 313,50	

Tidak terdapat data kerugian negara pada BUMN dari HP BPK/APIP.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian terhadap penyelesaian ganti kerugian negara pada instansi pusat dan BUMN adalah :

- belum optimalnya tingkat kinerja TPKN/D dalam menyelesaikan ganti kerugian negara/ daerah,
- belum optimalnya pemahaman para pelaksana dalam menyelesaikan kerugian negara/ daerah,
- masih rendahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian kerugian negara,
- penyelesaian kerugian negara di luar mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, dan
- masih rendahnya data dan penyelesaian kerugian negara pada BUMN yaitu sebesar 3,71%.

Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sampai dengan Semester II Tahun 2008 (posisi 31 Januari 2009), kerugian daerah pada pemerintah daerah dan BUMD yang terpantau mencapai 25.852 kasus senilai Rp3,39 triliun dan USD449.225,99 dengan tingkat penyelesaian sebesar 37,83% s dari total kasus kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Data kerugian daerah pada pemerintah daerah disajikan pada tabel 26 berikut.

Tabel 26 : Penyelesaian Kerugian Negara pada Pemerintah Daerah dan BUMD

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Uraian	Kerugian		Angsuran		Sisa		Capaian
		Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	%
1	Yang telah ditetapkan	2,819	251.417,20	1,232	36.965,29	1,347	214.675,54	43.70
2	Dalam Proses penetapan	2,184	178.246,68	666	62.087,10	1,485	116.164,30	30.49
3	Indikasi Kerugian Negara/Daerah dari HP BPK dan APIP*)	20,849	2.964.336,84	7,883	461.643,72	12,554	2.494.413,96	37.81
			USD 449,22		USD 305,19		USD 144,03	
JUMLAH		25,852	Rp 3.394.000,73	9,781	Rp 560.696,11	15,386	Rp 2.825.253,81	37,83
			USD 449,22		USD 305,19		USD 144,03	

BUMD

Sampai dengan Semester II Tahun 2008 tidak terdapat data mengenai kerugian daerah dan penyelesaiannya baik yang sudah ditetapkan, sedang dalam proses maupun yang masih berupa indikasi kerugian daerah dari Hasil Pemeriksaan BPK/APIP.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian atas kerugian daerah pada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dan BUMD adalah sebagai berikut.

- Kurang dipatuhinya ketentuan untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sehingga penyelesaian kerugian daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal,
- Belum optimalnya data kerugian daerah antara lain pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (hanya 1 kabupaten) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (hanya 2 kabupaten),
- Penyelesaian kerugian negara/daerah di luar mekanisme tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah yang ditetapkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara,
- Belum terdapatnya data dan penyelesaian kerugian daerah pada BUMD.

Kerugian Negara/Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Sampai dengan Semester II Tahun 2008 belum terdapat data mengenai kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Permasalahan dan rekomendasi

Secara umum penyelesaian ganti kerugian negara/daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh hal-hal berikut.

- Rendahnya kinerja entitas dalam penyelesaian kerugian negara/daerah serta ketidakpatuhan instansi dalam pembentukan TPKN/D.

- Kurangnya pemahaman entitas atau TPKN/D dalam menyelesaikan kasus-kasus kerugian negara khususnya berkaitan dengan ketiadaan tersangka/ahli waris, proses pengembalian kerugian negara/daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan.

- Pimpinan instansi belum melaksanakan ketentuan tentang penyampaian laporan yang berkaitan dengan kerugian negara/daerah antara lain tidak melaporkan kasus kerugian negara/daerah kepada BPK dan perkembangan penyelesaiannya.

- Belum optimalnya koordinasi entitas atau TPKN/D dengan instansi terkait.

- Instansi belum mempunyai mekanisme internal tentang penyelesaian kerugian negara/daerah.

Berkenaan dengan beberapa kelemahan di atas, BPK telah merekomendasikan beberapa hal, dibawah ini.

- Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain serta pimpinan instansi segera menyusun mekanisme internal mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkungan instansinya.

- Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota memerintahkan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah segera membentuk TPKN/D bagi yang belum membentuk serta memerintahkan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah untuk mengevaluasi dan memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja TPKN/D.

- Pimpinan unit kerja dapat mematuhi kewajibannya untuk melaporkan kerugian negara kepada BPK dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah diketahuinya kerugian negara dan penyelesaian kerugian negara/daerah selambat-lambatnya enam puluh hari setelah diselesaikannya kerugian negara/daerah.

- TPKN/D melakukan peningkatan pemahaman tentang penyelesaian ganti kerugian negara/daerah serta secara konstruktif melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam proses penyelesaian kerugian negara/daerah, antara lain Kejaksaan, Inspektorat, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan.

Sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, penetapan/penilaian kerugian negara/daerah dilaksanakan oleh BPK terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan badan pengelola keuangan lainnya, oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain dan lembaga peradilan.

Eksekusi atas penyelesaian dan pengenaan kerugian negara/daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/daerah ditentukan oleh kesungguhan pemerintah dalam menyikapi kasus-kasus kerugian negara/daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara tersebut, BPK memantau penyelesaian ganti kerugian negara, yang hasilnya disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai kewenangannya.

Daftar Lampiran

IHPS II 2008

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
1	**Prov. NAD**							
	LKPD		**-**		**22**		**22**	
	1	Provinsi NAD		*	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Aceh Barat		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Aceh Barat Daya		*	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Aceh Besar		*	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Aceh Jaya		*	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Aceh Selatan		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Aceh Singkil		*	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Aceh Tamiang		*	1	TMP	1	TMP
	9	Kab. Aceh Tengah		*	1	WTP	1	WTP
	10	Kab. Aceh Tenggara		*	1	TMP	1	TMP
	11	Kab. Aceh Timur		*	1	TMP	1	TMP
	12	Kab. Aceh Utara		*	1	WDP	1	WDP
	13	Kab. Bener Meriah		*	1	WDP	1	WDP
	14	Kab. Bireuen		*	1	WDP	1	WDP
	15	Kab. Gayo Lues		*	1	WDP	1	WDP
	16	Kab. Nagan Raya		*	1	WDP	1	WDP
	17	Kab. Pidie		*	1	WDP	1	WDP
	18	Kab. Simeulue		*	1	WDP	1	WDP
	19	Kota Banda Aceh		*	1	WDP	1	WDP
	20	Kota Langsa		*	1	WDP	1	WDP
	21	Kota Lhokseumawe		*	1	WDP	1	WDP
	22	Kota Sabang		*	1	WDP	1	WDP
2	**Prov. Sumut**							
	LKPD		**7**		**20**		**27**	
	1	Prov. Sumatera Utara		*	1	TMP	1	TMP
	2	Kab. Asahan	1	TMP		*	1	TMP
	3	Kab. Dairi		*	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Deli Serdang	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Karo		*	1	TMP	1	TMP
	7	Kab. Labuhan Batu		*	1	TMP	1	TMP
	8	Kab. Langkat		*	1	TMP	1	TMP
	9	Kab. Mandailing Natal		*	1	TMP	1	TMP
	10	Kab. Nias		*	1	TMP	1	TMP
	11	Kab. Nias Selatan		*	1	TMP	1	TMP
	12	Kab. Pakpak Bharat		*	1	WDP	1	WDP
	13	Kab. Samosir	1	WDP		*	1	WDP
	14	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP		*	1	WDP
	15	Kab. Simalungun		*	1	TMP	1	TMP
	16	Kab. Tapanuli Selatan		*	1	WDP	1	WDP
	17	Kab. Tapanuli Tengah		*	1	WDP	1	WDP
	18	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP		*	1	TMP
	19	Kab. Toba Samosir		*	1	TMP	1	TMP
	20	Kota Binjai	1	WDP		*	1	WDP
	21	Kota Medan		*	1	TMP	1	TMP
	22	Kota Padangsidimpuan		*	1	TMP	1	TMP
	23	Kota Pematangsiantar		*	1	TMP	1	TMP
	24	Kota Sibolga		*	1	WDP	1	WDP
	25	Kota Tanjungbalai		*	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
	26	Kota Tebingtinggi		*	1	WDP	1	WDP
	27	Kab. Batubara			1	WDP	1	WDP
3	**Prov. Sumbar**							
	LKPD		**5**		**15**		**20**	
	1	Provinsi Sumatera Barat	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Agam		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Dharmasraya		*	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Kep. Mentawai		*	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Lima Puluh Kota		*	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Padang Pariaman		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Pasaman	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Pasaman Barat		*	1	TMP	1	TMP
	9	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP		*	1	WDP
	10	Kab. Sawahlunto/Sijunjung		*	1	TMP	1	TMP
	11	Kab. Solok	1	WDP		*	1	WDP
	12	Kab. Solok Selatan		*	1	TMP	1	TMP
	13	Kab. Tanah Datar		*	1	TMP	1	TMP
	14	Kota Bukittinggi		*	1	WDP	1	WDP
	15	Kota Padang		*	1	WDP	1	WDP
	16	Kota Padang Panjang		*	1	WDP	1	WDP
	17	Kota Pariaman	1	WDP		*	1	WDP
	18	Kota Payakumbuh		*	1	WDP	1	WDP
	19	Kota Sawahlunto		*	1	WDP	1	WDP
	20	Kota Solok		*	1	WDP	1	WDP
4	**Prov. Riau**							
	LKPD		**7**		**5**		**12**	
	1	Prov Riau	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab Bengkalis		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Indragiri Hilir		*	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Indragiri Hulu		*	1	TMP	1	TMP
	5	Kab. Kampar	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Kuantan Singingi		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Pelelawan	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Rokan Hilir	1	WDP		*	1	WDP
	9	Kab. Rokan Hulu	1	WDP		*	1	WDP
	10	Kab. Siak		*	1	WDP	1	WDP
	11	Kota Dumai	1	WDP		*	1	WDP
	12	Kota Pekanbaru	1	WDP		*	1	WDP
5	**Prov. Jambi**							
	LKPD		**2**		**9**		**11**	
	1	Provinsi Jambi	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Batanghari		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Bungo		*	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Kerinci		*	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Merangin		*	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Muaro Jambi		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Sarolangun		*	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Tanjung Jabung Barat		*	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Tanjung Jabung Timur		*	1	WDP	1	WDP
	10	Kab. Tebo	1	TMP		*	1	TMP
	11	Kota Jambi			1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
6	**Prov. Sumsel**							
	LKPD		**9**		**6**		**15**	
	1	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Banyuasin	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Lahat		*	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Muara Enim	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Musi Rawas		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Ogan Ilir		*	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Ogan Komering Ilir		*	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP		*	1	WDP
	10	Kab. OKU Selatan		*	1	WDP	1	WDP
	11	Kab. OKU Timur	1	WDP		*	1	WDP
	12	Kota Lubuk Linggau	1	WDP		*	1	WDP
	13	Kota Pagar Alam	1	WDP		*	1	WDP
	14	Kota Palembang		*	1	WDP	1	WDP
	15	Kota Prabumulih	1	WDP		*	1	WDP
7	**Prov. Bengkulu**							
	LKPD		**1**		**9**		**10**	
	1	Provinsi Bengkulu		*	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Bengkulu Selatan		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Bengkulu Utara		*	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Kaur		*	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Kepahiang		*	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Lebong		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Muko-Muko		*	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Rejang Lebong	1	WDP		*	1	WDP
	9	Kab. Seluma		*	1	WDP	1	WDP
	10	Kota Bengkulu		*	1	WDP	1	WDP
8	**Prov. Lampung**							
	LKPD		**11**				**11**	
	1	Provinsi Lampung	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Lampung Barat	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Lampung Selatan	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Lampung Tengah	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Lampung Timur	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Lampung Utara	1	WDP		*	1	WDP
	7	Kab. Tanggamus	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Tulang Bawang	1	WDP		*	1	WDP
	9	Kab. Way Kanan	1	WDP		*	1	WDP
	10	Kota Bandar Lampung	1	WDP		*	1	WDP
	11	Kota Metro	1	WDP		*	1	WDP
9	**Prov. Kep. Babel**							
	LKPD		**5**		**3**		**8**	
	1	Provinsi Bangka Belitung	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Bangka	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Bangka Barat	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Bangka Selatan		*	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Bangka Tengah		*	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Belitung	1	WDP		*	1	WDP
	7	Kab. Belitung Timur		*	1	WDP	1	WDP
	8	Kota Pangkal Pinang	1	WDP		*	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
10	**Prov. Kep. Riau**							
	LKPD		**3**		**4**		**7**	
	1	Provinsi Kepulauan Riau	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Bintan	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Karimun		*	1	WDP	1	WDP
	4	Kab. Lingga		*	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Natuna	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kota Batam		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kota Tanjungpinang		*	1	WDP	1	WDP
11	**Prov. DKI Jakarta**							
	LKPD		**1**		*		**1**	
	1	Provinsi DKI	1	TMP		*	1	TMP
12	**Prov. Jawa Barat**							
	LKPD		**26**		*		**26**	
	1	Provinsi Jawa Barat	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Bandung	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Bekasi	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Bogor	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Ciamis	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Cianjur	1	TMP		*	1	TMP
	7	Kab. Cirebon	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Garut	1	TMP		*	1	TMP
	9	Kab. Indramayu	1	TMP		*	1	TMP
	10	Kab. Karawang	1	TMP		*	1	TMP
	11	Kab. Kuningan	1	WDP		*	1	WDP
	12	Kab. Majalengka	1	WDP		*	1	WDP
	13	Kab. Purwakarta	1	WDP		*	1	WDP
	14	Kab. Subang	1	TMP		*	1	TMP
	15	Kab. Sukabumi	1	WDP		*	1	WDP
	16	Kab. Sumedang	1	WDP		*	1	WDP
	17	Kab. Tasikmalaya	1	WDP		*	1	WDP
	18	Kota Bandung	1	WDP		*	1	WDP
	19	Kota Banjar	1	WTP		*	1	WTP
	20	Kota Bekasi	1	WDP		*	1	WDP
	21	Kota Bogor	1	WDP		*	1	WDP
	22	Kota Cimahi	1	WDP		*	1	WDP
	23	Kota Cirebon	1	TMP		*	1	TMP
	24	Kota Depok	1	WDP		*	1	WDP
	25	Kota Sukabumi	1	WDP		*	1	WDP
	26	Kota Tasikmalaya	1	TMP		*	1	TMP
13	**Prov. Jawa Tengah**							
	LKPD		**30**		**6**		**36**	
	1	Prov. Jawa Tengah	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Banjarnegara	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Banyumas		*	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Batang	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Blora	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Boyolali	1	WDP		*	1	WDP
	7	Kab. Brebes		*	1	WDP	1	WDP
	8	Kab. Cilacap	1	WDP		*	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
	9	Kab. Demak	1	WDP		*	1	WDP
	10	Kab. Grobogan		*	1	WDP	1	WDP
	11	Kab. Jepara	1	WDP		*	1	WDP
	12	Kab. Karanganyar	1	WDP		*	1	WDP
	13	Kab. Kebumen		*	1	WDP	1	WDP
	14	Kab. Kendal	1	TMP		*	1	TMP
	15	Kab. Klaten	1	WDP		*	1	WDP
	16	Kab. Kudus	1	WDP		*	1	WDP
	17	Kab. Magelang	1	WDP		*	1	WDP
	18	Kab. Pati	1	WDP		*	1	WDP
	19	Kab. Pekalongan	1	WDP		*	1	WDP
	20	Kab. Pemalang	1	WDP		*	1	WDP
	21	Kab. Purbalingga	1	WDP		*	1	WDP
	22	Kab. Purworejo	1	TMP		*	1	TMP
	23	Kab. Rembang		*	1	WDP	1	WDP
	24	Kab. Semarang	1	WDP		*	1	WDP
	25	Kab. Sragen	1	WDP		*	1	WDP
	26	Kab. Sukoharjo	1	TMP		*	1	TMP
	27	Kab. Tegal	1	WDP		*	1	WDP
	28	Kab. Temanggung	1	WDP		*	1	WDP
	29	Kab. Wonogiri	1	WDP		*	1	WDP
	30	Kab. Wonosobo	1	WDP		*	1	WDP
	31	Kota Magelang	1	WDP		*	1	WDP
	32	Kota Pekalongan		*	1	WDP	1	WDP
	33	Kota Salatiga	1	WDP		*	1	WDP
	34	Kota Semarang	1	WDP		*	1	WDP
	35	Kota Surakarta	1	WDP		*	1	WDP
	36	Kota Tegal	1	WDP		*	1	WDP
14	**Prov. DI Yogyakarta**							
	LKPD		**6**		*		**6**	
	1	Prov. DIY	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Bantul	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Gunung Kidul	1	TW		*	1	TW
	4	Kab. Kulon Progo	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Sleman	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kota Yogyakarta	1	WDP		*	1	WDP
15	**Prov. Jawa Timur**							
	LKPD		**39**		*		**39**	
	1	Provinsi Jawa Timur	1	TW		*	1	TW
	2	Kab. Bangkalan	1	TW		*	1	TW
	3	Kab. Banyuwangi	1	TW		*	1	TW
	4	Kab. Blitar	1	TW		*	1	TW
	5	Kab. Bojonegoro	1	TW		*	1	TW
	6	Kab. Bondowoso	1	TW		*	1	TW
	7	Kab. Gresik	1	TW		*	1	TW
	8	Kab. Jember	1	TW		*	1	TW
	9	Kab. Jombang	1	WDP		*	1	WDP
	10	Kab. Kediri	1	TW		*	1	TW
	11	Kab. Lamongan	1	TW		*	1	TW
	12	Kab. Lumajang	1	TW		*	1	TW
	13	Kab. Madiun	1	TW		*	1	TW
	14	Kab. Magetan	1	TW		*	1	TW

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
	15	Kab. Malang	1	TW		*	1	TW
	16	Kab. Mojokerto	1	TW		*	1	TW
	17	Kab. Nganjuk	1	TW		*	1	TW
	18	Kab. Ngawi	1	TW		*	1	TW
	19	Kab. Pacitan	1	WDP		*	1	WDP
	20	Kab. Pamekasan	1	TW		*	1	TW
	21	Kab. Pasuruan	1	TW		*	1	TW
	22	Kab. Ponorogo	1	TW		*	1	TW
	23	Kab. Probolinggo	1	TW		*	1	TW
	24	Kab. Sampang	1	TW		*	1	TW
	25	Kab. Sidoarjo	1	TW		*	1	TW
	26	Kab. Situbondo	1	TW		*	1	TW
	27	Kab. Sumenep	1	TW		*	1	TW
	28	Kab. Trenggalek	1	TW		*	1	TW
	29	Kab. Tuban	1	TW		*	1	TW
	30	Kab. Tulungagung	1	TW		*	1	TW
	31	Kota Batu	1	TW		*	1	TW
	32	Kota Blitar	1	TW		*	1	TW
	33	Kota Kediri	1	TW		*	1	TW
	34	Kota Madiun	1	TW		*	1	TW
	35	Kota Malang	1	TW		*	1	TW
	36	Kota Mojokerto	1	TW		*	1	TW
	37	Kota Pasuruan	1	TW		*	1	TW
	38	Kota Probolinggo	1	TW		*	1	TW
	39	Kota Surabaya	1	TW		*	1	TW
16	**Prov. Banten**							
	LKPD		**7**		*		**7**	
	1	Provinsi Banten	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Lebak	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Pandeglang	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Serang	1	TMP		*	1	TMP
	5	Kab. Tangerang	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kota Cilegon	1	WDP		*	1	WDP
	7	Kota Tangerang	1	WTP		*	1	WTP
17	**Prov. Bali**					*		
	LKPD		**10**		*	*	**10**	
	1	Provinsi Bali	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Badung	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Bangli	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Buleleng	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Gianyar	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Jembrana	1	WDP		*	1	WDP
	7	Kab. Karangasem	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Klungkung	1	WDP		*	1	WDP
	9	Kab. Tabanan	1	WDP		*	1	WDP
	10	Kota Denpasar	1	WDP		*	1	WDP
18	**Prov. NTB**							
	LKPD		**9**		**1**		**10**	
	1	Prov. NTB	1	TMP		*	1	TMP
	2	Kab. Bima	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Dompu	1	TMP		*	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
	4	Kab. Lombak Barat	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Lombok Tengah	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Lombok Timur	1	WDP		*	1	WDP
	7	Kab. Sumbawa	1	TMP		*	1	TMP
	8	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP		*	1	WDP
	9	Kota Bima		*	1	TMP	1	TMP
	10	Kota Mataram	1	WDP		*	1	WDP
19	**Prov. NTT**							
	LKPD		**6**		**11**		**17**	
	1	Provinsi NTT	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Alor		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Belu	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Ende	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Flores Timur	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Kupang		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. Lembata	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Manggarai		*	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Manggarai Barat	1	TMP		*	1	TMP
	10	Kab. Ngada		*	1	WDP	1	WDP
	11	Kab. Rote Ndao		*	1	TMP	1	TMP
	12	Kab. Sikka		*	1	WDP	1	WDP
	13	Kab. Sumba Barat		*	1	WDP	1	WDP
	14	Kab. Sumba Timur		*	1	WDP	1	WDP
	15	Kab. Timor Tengah Selatan		*	1	WDP	1	WDP
	16	Kab. Timor Tengah Utara		*	1	WDP	1	WDP
	17	Kota Kupang		*	1	WDP	1	WDP
20	**Prov. Kalbar**							
	LKPD		**10**		**3**		**13**	
	1	Provinsi Kalbar		*	1	TMP	1	TMP
	2	Kab. Bengkayang	1	TMP		*	1	TMP
	3	Kab. Kapuas Hulu		*	1	TW	1	TW
	4	Kab. Ketapang	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Landak	1	TW		*	1	TW
	6	Kab. Melawi	1	TMP		*	1	TMP
	7	Kab. Pontianak	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Sambas	1	TMP		*	1	TMP
	9	Kab. Sanggau	1	WDP		*	1	WDP
	10	Kab. Sekadau		*	1	TMP	1	TMP
	11	Kab. Sintang	1	WDP		*	1	WDP
	12	Kota Pontianak	1	WDP		*	1	WDP
	13	Kota Singkawang	1	WDP		*	1	WDP
21	**Prov. Kalteng**							
	LKPD		**7**		**8**		**15**	
	1	Provinsi Kalteng	1	TW		*	1	TW
	2	Kab. Barito Selatan		*	1	TMP	1	TMP
	3	Kab. Barito Timur		*	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Barito Utara	1	TW		*	1	TW
	5	Kab. Gunung Mas		*	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Kapuas		*	1	TW	1	TW
	7	Kab. Katingan		*	1	TW	1	TW
	8	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP		*	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
	9	Kab. Kotawaringin Timur		*	1	TW	1	TW
	10	Kab. Lamandau	1	TW		*	1	TW
	11	Kab. Murung Raya		*	1	TMP	1	TMP
	12	Kab. Pulang Pisau	1	WDP		*	1	WDP
	13	Kab. Seruyan	1	TMP		*	1	TMP
	14	Kab. Sukamara		*	1	WDP	1	WDP
	15	Kota Palangkaraya	1	WDP		*	1	WDP
22	**Prov. Kalsel**							
	LKPD		**11**		**3**		**14**	
	1	Prov. Kalsel	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Balangan	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Banjar	1	TMP		*	1	TMP
	4	Kab. Barito Kuala	1	TW		*	1	TW
	5	Kab. HSS	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. HST		*	1	WDP	1	WDP
	7	Kab. HSU	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Kotabaru		*	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Tabalong	1	TW		*	1	TW
	10	Kab. Tanah Bumbu		*	1	TW	1	TW
	11	Kab. Tanah Laut	1	WDP		*	1	WDP
	12	Kab. Tapin	1	TW		*	1	TW
	13	Kota Banjarbaru	1	WDP		*	1	WDP
	14	Kota Banjarmasin	1	WDP		*	1	WDP
23	**Prov. Kaltim**							
	LKPD		**7**		**7**		**14**	
	1	Provinsi Kaltim		*	1	TW	1	TW
	2	Kab. Berau	1	TW		*	1	TW
	3	Kab. Bulungan	1	TW		*	1	TW
	4	Kab. Kutai Barat	1	TW		*	1	TW
	5	Kab. Kutai Kartanegara		*	1	TMP	1	TMP
	6	Kab. Kutai Timur		*	1	TMP	1	TMP
	7	Kab. Malinau	1	TMP		*	1	TMP
	8	Kab. Nunukan	1	TW		*	1	TW
	9	Kab. Paser	1	TW		*	1	TW
	10	Kab. Penajam Paser Utara		*	1	TMP	1	TMP
	11	Kota Balikpapan		*	1	TW	1	TW
	12	Kota Bontang	1	TW		*	1	TW
	13	Kota Samarinda		*	1	TMP	1	TMP
	14	Kota Tarakan		*	1	TMP	1	TMP
24	**Prov. Sulut**							
	LKPD		**10**		*		**10**	
	1	Provinsi Sulut	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Bolmong	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Kep Talaud	1	TMP		*	1	TMP
	4	Kab. Kep. Sangihe	1	TMP		*	1	TMP
	5	Kab. Minahasa	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP		*	1	TMP
	7	Kab. Minahasa Utara	1	TMP		*	1	TMP
	8	Kota Bitung	1	WDP		*	1	WDP
	9	Kota Manado	1	TMP		*	1	TMP
	10	Kota Tomohon	1	WDP		*	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
25	**Prov. Sulteng**							
	LKPD		**9**		**2**		**11**	
	1	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Banggai	1	WDP		*	1	WDP
	3	Kab. Banggai Kepulauan		*	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Buol		*	1	TMP	1	TMP
	5	Kab. Donggala	1	TMP		*	1	TMP
	6	Kab. Morowali	1	TMP		*	1	TMP
	7	Kab. Parigi Moutong	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Poso	1	WDP		*	1	WDP
	9	Kab. Tojo Una-Una	1	TMP		*	1	TMP
	10	Kab. Toli-Toli	1	WDP		*	1	WDP
	11	Kota Palu	1	WDP		*	1	WDP
26	**Prov. Sulsel**							
	LKPD		**9**		**15**		**24**	
	1	Prov. Sulsel		*	1	TMP	1	TMP
	2	Kab. Bantaeng		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Barru	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Bone	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Bulukumba		*	1	TMP	1	TMP
	6	Kab. Enrekang	1	WDP		*	1	WDP
	7	Kab. Gowa	1	WDP		*	1	WDP
	8	Kab. Jeneponto		*	1	WDP	1	WDP
	9	Kab. Luwu		*	1	WDP	1	WDP
	10	Kab. Luwu Timur		*	1	TMP	1	TMP
	11	Kab. Luwu Utara		*	1	WDP	1	WDP
	12	Kab. Maros		*	1	TMP	1	TMP
	13	Kab. Pangkajene Kepulauan		*	1	WDP	1	WDP
	14	Kab. Pinrang		*	1	WDP	1	WDP
	15	Kab. Selayar		*	1	WDP	1	WDP
	16	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP		*	1	WDP
	17	Kab. Sinjai	1	WDP		*	1	WDP
	18	Kab. Soppeng		*	1	WDP	1	WDP
	19	Kab. Takalar	1	WDP		*	1	WDP
	20	Kab. Tana Toraja		*	1	WDP	1	WDP
	21	Kab. Wajo	1	WDP		*	1	WDP
	22	Kota Makassar		*	1	WDP	1	WDP
	23	Kota Palopo		*	1	WDP	1	WDP
	24	Kota Pare-Pare	1	WDP		*	1	WDP
27	**Prov. Sultra**							
	LKPD		**10**		**1**		**11**	
	1	Provinsi Sultra	1	WDP		*	1	WDP
	2	Kab. Bombana	1	TMP		*	1	TMP
	3	Kab. Buton	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Kolaka	1	TMP		*	1	TMP
	5	Kab. Kolaka Utara	1	TMP		*	1	TMP
	6	Kab. Konawe	1	TMP		*	1	TMP
	7	Kab. Konawe Selatan		*	1	TW	1	TW
	8	Kab. Muna	1	WDP		*	1	WDP
	9	Kab. Wakatobi	1	TMP		*	1	TMP
	10	Kota Bau-Bau	1	WDP		*	1	WDP
	11	Kota Kendari	1	TMP		*	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
28	**Prov. Gorontalo**							
	LKPD		**6**		**1**		**7**	
	1	Provinsi Gorontalo	1	WTP		*	1	WTP
	2	Kab. Boalemo	1	TMP		*	1	TMP
	3	Kab. Bone Bolango	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Gorontalo	1	WDP		*	1	WDP
	5	Kab. Pohuwato	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kota Gorontalo	1	TMP		*	1	TMP
	7	Gorontalo Utara		*	1	WDP	1	WDP
29	**Prov. Sulbar**							
	LKPD		**1**		**5**		**6**	
	1	Prov. Sulawesi Barat		*	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Majene		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Mamasa		*	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Mamuju		*	1	WDP	1	WDP
	5	Kab. Mamuju Utara		*	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Polewali Mandar	1	WDP		*	1	WDP
30	**Prov. Maluku**							
	LKPD		**1**		**6**		**7**	
	1	Provinsi Maluku		*	1	TMP	1	TMP
	2	Kab. Buru		*	1	TMP	1	TMP
	3	Kab. Kepulauan Aru		*		**		**
	4	Kab. Maluku Tengah		*	1	TMP	1	TMP
	5	Kab. Maluku Tenggara		*	1	WDP	1	WDP
	6	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP		*	1	TMP
	7	Kab. SBB		*	1	TMP	1	TMP
	8	Kab. SBT		*		**		**
	9	Kota Ambon		*	1	WDP	1	WDP
31	**Prov. Maluku Utara**							
	LKPD		**5**		**4**		**9**	
	1	Provinsi Maluku Utara	1	TMP		*	1	TMP
	2	Kab. Halmahera Barat		*	1	WDP	1	WDP
	3	Kab. Halmahera Selatan	1	WDP		*	1	WDP
	4	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP		*	1	TMP
	5	Kab. Halmahera Timur	1	WDP		*	1	WDP
	6	Kab. Halmahera Utara		*	1	TMP	1	TMP
	7	Kab. Kepulauan Sula		*	1	TMP	1	TMP
	8	Kota Ternate		*	1	WDP	1	WDP
	9	Kota Tidore	1	WDP		*	1	WDP
32	**Prov. Papua**							
	LKPD		**2**		**18**		**20**	
	1	Prov. Papua		*	1	WDP	1	WDP
	2	Kab. Asmat		*	1	TMP	1	TMP
	3	Kab. Biak Numfor		*	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Boven Digoel		*	1	TMP	1	TMP
	5	Kab. Jayapura	1	TMP		*	1	TMP
	6	Kab. Jayawijaya		*	1	TMP	1	TMP
	7	Kab. Keerom		*	1	TMP	1	TMP
	8	Kab. Mappi		*	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Dilaporkan pada IHPS I 2008		Dilaporkan pada IHPS II 2008		Total	
	9	Kab. Merauke		*	1	TMP	1	TMP
	10	Kab. Mimika		*	1	TMP	1	TMP
	11	Kab. Nabire		*	1	TMP	1	TMP
	12	Kab. Paniai		*	1	TMP	1	TMP
	13	Kab. Pegunungan Bintang		*	1	TMP	1	TMP
	14	Kab. Puncak Jaya		*	1	TMP	1	TMP
	15	Kab. Sarmi		*	1	TMP	1	TMP
	16	Kab. Supiori		*	1	TMP	1	TMP
	17	Kab. Tolikara		*	1	TMP	1	TMP
	18	Kab. Waropen		*	1	TMP	1	TMP
	19	Kab. Yahukimo		*		**		**
	20	Kab. Yapen Waropen		*	1	TMP	1	TMP
	21	Kota Jayapura	1	TMP		*	1	TMP
33	**Prov. Papua Barat**							
	LKPD		**3**		**7**		**10**	
	1	Provinsi Papua Barat		*	1	TMP	1	TMP
	2	Kab. Fakfak		*	1	TMP	1	TMP
	3	Kab. Kaimana		*	1	TMP	1	TMP
	4	Kab. Manokwari	1	TMP		*	1	TMP
	5	Kab. Raja Ampat		*	1	TMP	1	TMP
	6	Kab. Sorong	1	TMP		*	1	TMP
	7	Kab. Sorong Selatan		*	1	TMP	1	TMP
	8	Kab. Teluk Bintuni		*	1	TMP	1	TMP
	9	Kab. Teluk Wondama		*	1	TMP	1	TMP
	10	Kota Sorong	1	WDP		*	1	WDP
			275		**191**		**466**	

Catatan

WTP = Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
WDP = Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
TW = Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)
TMP = Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*)
** = Pemerintah daerah yang belum menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2007 kepada BPK

Lampiran 2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007
(LHP Semester II Tahun 2008)

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatan:			
I	**Kerugian Daerah**	**556**	**310.860**	**3,13**
1	Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan	27	19.303	
2	Kelebihan Pembayaran (selain kurang volume)	156	102.590	
3	Pemahalan Harga (Mark Up)	25	17.862	
4	Pembayaran Honorarium atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda	36	7.958	
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sama dengan kontrak	22	8.404	
6	Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	202	107.764	
7	Pengembalian pinjaman kepada Bank Pemerintah macet atau pengembalian dana bergulir macet	3	8.867	
8	Kurang Volume	85	38.113	
II	**Potensi Kerugian Daerah**	**126**	**1.319.005**	**13,28**
9	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagain atau seluruhnya	13	31.063	
10	Pinjaman atau Dana Bergulir Berpotensi Tak Tertagih	29	54.108	
11	Pengunaan aset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan	26	21.123	
12	Pengelolaan rekening tidak tertib	58	1.212.711	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**629**	**2.200.620**	**22,15**
			5	USD
13	Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah tidak melalui mekanisme APBD	170	1.544.792	
14	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum,/Tidak Terlambat Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah	459	655.828	
			5	USD
IV	**Uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan**	**212**	**1.496.495**	**15,06**
15	Uang Persediaan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	34	101.421	
16	Uang belum dipertanggungjawabkan/terlambat	178	1.395.074	
V	**Administrasi**	**411**	**-**	**-**
17	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah)	314	-	
18	Penyertaan modal pemerintah daerah belum didukung bukti kepemilikan	36	-	
19	Kepemilikan aset tanah belum didukung dengan bukti	57	-	
20	Aset Tetap Yang Tidak Diketahui Keberadaannya	4	-	
VI	**Ketidakhematan/Pemborosan**	**227**	**205.119**	**2,06**
21	Pemborosan/ketidakhematan	173	156.922	
22	Pemberian bantuan kepada instansi vertikal	54	48.197	
VII	**Ketidakefektifan**	**475**	**2.486.309**	**25,03**
23	Pengadaan tdk dpt dimanfaatkan/anggaran tdk dpt drealisasikan	68	412.827	
24	Penggunaan anggaran Tidak Tepat Sasaran/Peruntukan	181	1.266.348	
25	Penggunaan Anggaran Tidak sesuai Ketentuan	226	807.135	
VIII	**Lain-lain**	**415**	**1.916.856**	**19,29**
	Jumlah	**3,051**	**9.935.265**	**100**
		USD	**5**	

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007
(LHP Semester II Tahun 2008)

Lampiran 3

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Provinsi NAD**	**294**	**3.094.334**	**20**	**8.284**	**7**	**689.047**	**92**	**362.390**	**26**	**296.870**	**30**	**-**	**17**	**23.383**	**83**	**987.664**	**19**	**726.695**
1	Provinsi NAD	17	1.569.495	-	-	2	686.952	6	101.526	-	-	1	-	-	-	6	61.665	2	719.352
2	Kab Aceh Barat Daya	10	45.135	-	-	-	-	3	8.702	1	841	-	-	-	-	6	35.592	-	-
3	Kab Aceh Besar	23	66.187	3	1.565	1	-	7	38.935	1	1.941	3	-	3	3.568	5	20.179	-	-
4	Kab Aceh Jaya	7	11.055	-	-	-	-	3	7.409	1	-	1	-	1	3.146	1	500	-	-
5	Kab Aceh Selatan	19	160.263	2	1.430	-	-	5	18.647	2	75	1	-	-	-	5	139.141	4	969
6	Kab Aceh Singkil	10	15.605	1	97	-	-	3	3.041	3	8.517	-	-	-	411	3	3.538	-	-
7	Kab Aceh Tamiang	16	77.584	-	-	-	-	6	40.132	1	2.030	1	-	1	1.299	6	34.124	1	-
8	Kab Aceh Tengah	10	30.220	2	55	-	-	-	9	2	26.105	-	-	-	-	5	4.050	1	-
9	Kab Aceh Tenggara	23	30.190	3	536	1	-	4	18.632	1	273	2	-	2	982	7	9.607	3	161
10	Kab Aceh Timur	12	242.399	1	105	-	-	3	6.635	2	231.866	2	-	-	-	3	3.793	1	-
11	Kab Aceh Barat	18	51.075	1	1.820	-	-	10	47.009	2	1.940	2	-	-	-	3	305	-	-
12	Kab Aceh Utara	11	46.073	1	2.000	-	-	2	8.804	1	2.764	1	-	1	423	5	32.082	-	-
13	Kab Bener Meriah	9	13.305	1	183	-	-	2	8.069	-	-	1	-	1	505	2	711	2	3.837
14	Kab Bireuen	11	30.238	-	-	-	-	1	2.303	4	17.625	1	-	-	-	5	10.310	-	-
15	Kab Gayo Lues	13	35.119	-	-	-	-	4	28.331	1	1.715	2	-	1	1.655	3	3.418	2	-
16	Kab Nagan Raya	15	13.835	1	43	-	-	6	1.817	1	-	1	-	2	1.171	4	10.804	-	-
17	Kab Pidie	15	7.236	2	360	1	-	5	4.994	1	569	2	-	-	-	4	1.313	-	-
18	Kab Simeulue	12	21.027	-	-	1	1.940	3	1.663	-	-	2	-	3	6.279	2	8.880	1	2.265
19	Kota Banda Aceh	9	4.599	1	26	-	-	6	4.273	-	-	1	-	-	-	1	299	-	-
20	Kota Langsa	13	7.184	1	63	1	155	2	1.288	2	610	1	-	1	3.540	3	1.418	2	111
21	Kota Lhokseumawe	9	5.723	-	-	-	-	4	5.319	-	-	4	-	1	405	-	-	-	-
22	Kota Sabang	12	610.789	-	-	-	-	7	4.854	-	-	1	-	-	-	4	605.935	-	-

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	**Provinsi Sumatera Utara**	**311**	**1.083.374**	**59**	**31.298**	**19**	**44.850**	**63**	**244.898**	**9**	**66.346**	**30**	**-**	**21**	**11.850**	**48**	**442.277**	**62**	**241.855**
		-	5	-		-		-	5	-		-		-		-			
23	Provinsi Sumatera Utara	17	65.555	3	2.461	1	296	2	38.672	-	-	1	-	-	-	5	16.206	5	7.920
24	Kab Batubara	4	456	2	414	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	1	-
25	Kab Dairi	18	12.962	7	962	-	-	-	-	1	3.915	3	-	3	831	3	7.114	1	140
26	Kab Karo	9	47.438	2	232	-	19.666	2	5.050	1	95	-	-	1	98	1	108	2	22.188
27	Kab Labuhanbatu	17	232.986	1	430	1	3.157	4	3.960	-	-	5	-	3	1.958	3	223.481	-	-
28	Kab Langkat	11	14.649	1	435	1	709	3	228	1	7.862	2	-	-	-	2	5.252	1	164
29	Kab Mandailing Natal	25	151.084	5	1.860	1	587	8	82.254	2	3.636	-	-	3	2.212	2	55.875	4	4.659
30	Kab Nias	8	18.342	1	197	-	-	1	187	2	12.406	1	-	-	-	2	3.159	1	2.394
31	Kab Nias Selatan	12	141.314	1	1.783	1	350	3	75.901	2	38.431	1	-	-	-	4	24.849	-	-
32	Kab Pakpak Bharat	12	3.947	4	662	-	-	1	1.158	-	-	2	-	-	-	3	2.127	2	-
33	Kab Simalungun	19	16.026	2	167	2	-	5	9.060	-	-	-	-	1	699	3	6.053	6	48
34	Kab Tapanuli Selatan	17	95.657	4	8.316	1	249	3	1.663	-	-	3	-	-	-	2	3.554	4	81.876
35	Kab Tapanuli Tengah	23	112.412	4	6.598	3	2.771	5	5.261	-	-	1	-	-	-	6	71.345	4	26.438
36	Kab Toba Samosir	15	63.523	2	636	3	909	3	4.566	-	-	1	-	-	-	2	3.155	4	54.259
37	Kota Medan	19	17.688	6	2.785	2	1.194	3	3.895	-	-	2	-	1	1.754	2	6.149	3	1.912
		USD	5	-	-	-	-	USD	5	-	-	-	-	-	-	-	-		-
38	Kota Padangsidimpuan	12	8.785	2	2.047	-	-	5	3.546	-	-	2	-	-	-	1	1.533	2	1.660
39	Kota Pematang Siantar	17	29.797	-	-	1	5.934	3	500	-	-	2	-	3	3.231	3	4.685	5	15.447
40	Kota Sibolga	19	20.191	5	760	1	9.028	5	676	-	-	-	-	1	66	-	-	7	9.660
41	Kota Tanjung Balai	14	6.522	2	27	-	-	3	4.028	-	-	1	-	3	449	2	2.019	3	-
42	Kota Tebing Tinggi	23	24.039	5	527	1	-	4	4.294	-	-	3	-	1	511	2	5.614	7	13.092

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	**Provinsi Sumatera Barat**	**309**	**695.249**	**36**	**11.894**	**14**	**40.349**	**70**	**127.242**	**35**	**274.795**	**42**	**-**	**31**	**36.514**	**48**	**103.362**	**33**	**101.093**
43	Kab Agam	22	36.611	1	105	-	-	9	20.002	1	130	5	-	2	470	3	15.843	1	61
44	Kab Dharmasraya	21	14.185	1	98	-	-	6	2.517	4	6.591	3	-	-	-	4	933	3	4.047
45	Kab Limapuluh kota	25	88.967	4	625	3	25.822	8	61.008	-	-	3	-	3	261	2	201	2	1.050
46	Kab Mentawai	24	106.214	-	6	1	-	4	5.316	5	93.058	4	-	2	3.580	4	4.093	4	161
47	Kab Padang Pariaman	22	46.396	4	364	3	9.159	3	4.161	2	4.558	1	-	-	-	5	27.643	4	510
48	Kab Pasaman Barat	20	9.227	4	585	-	-	9	5.097	1	114	4	-	1	21	1	3.322	-	89
49	Kab Sijunjung	21	5.357	5	507	-	-	2	1.433	2	539	5	-	1	829	3	2.015	3	35
50	Kab Solok Selatan	20	6.039	3	613	1	-	4	277	1	2.987	4	-	2	214	3	1.371	2	578
51	Kab Tanah Datar	22	176.399	2	17	1	-	4	1.669	3	90.831	2	-	5	916	2	6.671	3	76.294
52	Kota Bukittingi	22	21.491	4	4.735	-	-	5	2.729	2	3.647	2	-	4	2.758	5	7.622	-	-
53	Kota Padang	20	42.689	2	1.127	1	1.435	3	3.250	4	32.223	4	-	3	587	2	953	1	3.114
54	Kota Padang Panjang	12	13.357	-	-	-	-	2	514	1	300	1	-	1	289	3	1.950	4	10.303
55	Kota Payakumbuh	27	91.499	2	117	4	3.933	3	11.676	4	24.986	-	-	2	20.274	7	25.664	5	4.849
56	Kota Sawahlunto	15	18.511	1	2.281	-	-	3	974	1	6.578	4	-	3	5.804	3	2.873	-	-
57	Kota Solok	16	18.307	3	714	-	-	5	6.620	4	8.253	-	-	2	512	1	2.208	1	-
4	**Provinsi Riau**	**125**	**258.463**	**51**	**26.940**	**7**	**83.804**	**17**	**32.030**	**2**	**8.662**	**15**	**-**	**4**	**7.753**	**7**	**10.201**	**22**	**89.072**
58	Kab Bengkalis	16	11.663	3	74	2	1.582	2	1.258	1	8.427	5	-	-	-	-	-	3	321
59	Kab Indragiri Hulu	36	73.174	24	11.695	-	-	1	101	-	-	2	-	2	7.441	1	266	6	53.672
60	Kab Indragiri Hilir	25	29.886	6	1.862	3	2.486	5	17.243	-	-	3	-	-	-	1	616	7	7.680
61	Kab Kuantan Singingi	33	120.067	10	3.746	1	79.704	6	2.878	1	235	4	-	2	312	5	9.320	4	23.872
62	Kab Siak	15	23.673	8	9.564	1	32	3	10.550	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3.528

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	**Provinsi Jambi**	**202**	**238.853**	**49**	**18.900**	**6**	**11.719**	**35**	**55.366**	**12**	**25.983**	**35**	**-**	**5**	**5.076**	**19**	**34.751**	**41**	**87.058**
63	Kab Batang Hari	29	43.360	6	790	2	10.004	5	3.138	3	1.351	4	-	2	1.440	3	17.820	4	8.817
64	Kab Bungo	16	12.523	3	2.210	1	1.206	2	911	1	1.380	5	-	-	-	1	4.613	3	2.204
65	Kab Kerinci	20	19.428	3	1.238	-	-	7	11.812	1	5.322	6	-	-	-	1	125	2	931
66	Kab Merangin	20	28.819	1	292	-	-	5	10.555	1	4.486	4	-	1	107	3	1.616	5	11.762
67	Kab Muara Jambi	36	31.921	13	1.861	-	-	2	2.246	1	2.195	5	-	-	-	7	6.301	8	19.319
68	Kab Sarolangun	19	25.587	5	302	1	508	5	11.737	1	6.591	1	-	1	2.038	1	55	4	4.355
69	Kab Tanjung Jabung Barat	31	44.261	9	10.984	1	-	4	12.786	2	2.329	3	-	-	-	1	353	11	17.808
70	Kab Tanjung Jabung Timur	21	17.835	5	699	1	-	5	2.182	2	2.200	4	-	1	1.491	1	3.606	2	7.657
71	Kota Jambi	10	15.119	4	523	-	-	-	-	-	129	3	-	-	-	1	262	2	14.205
6	**Provinsi Sumatera Selatan**	**73**	**185.081**	**8**	**3.712**	**5**	**380**	**15**	**21.458**	**4**	**14.750**	**11**	**-**	**3**	**1.796**	**11**	**13.738**	**16**	**129.247**
72	Kab OKI	8	18.742	-	-	-	-	7	18.742	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
73	Kab Ogan Ilir	11	15.618	3	782	1	-	-	-	1	1.312	3	-	-	-	1	704	2	12.821
74	Kab Lahat	11	7.216	-	-	1	48	2	1.943	1	3.513	2	-	1	7	3	1.706	1	-
75	Kab OKU Selatan	23	8.189	5	2.930	2	332	5	738	1	1.264	3	-	-	-	1	54	6	2.871
76	Kab Musi Rawas	5	1.859	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1.615	2	244	1	-
77	Kota Palembang	15	133.457	-	-	1	-	1	35	1	8.662	2	-	1	175	4	11.030	5	113.555
7	**Provinsi Bengkulu**	**170**	**133.818**	**36**	**9.687**	**15**	**577**	**33**	**24.384**	**12**	**15.201**	**19**	**-**	**9**	**2.521**	**15**	**19.719**	**31**	**61.729**
78	Provinsi Bengkulu	19	23.893	2	449	1	-	1	3.207	2	381	3	-	1	244	2	3.897	7	15.716
79	Kab Bengkulu Selatan	16	2.794	4	479	1	-	4	1.252	1	136	2	-	-	-	2	599	2	327
80	Kab Bengkulu Utara	23	18.405	4	368	4	96	6	4.783	2	3.790	1	-	3	1.005	3	8.363	-	-
81	Kab Kaur	17	6.273	4	1.036	2	-	4	162	1	3.427	2	-	-	-	2	946	2	703

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
82	Kab Kepahyang	27	38.685	3	285	2	6	4	7.715	1	2.112	6	-	3	408	2	1.975	6	26.184
83	Kab Lebong	21	5.324	8	1.185	1	-	5	766	1	65	2	-	-	-	-	-	4	3.307
84	Kab Muko-Muko	14	11.117	7	4.789	1	-	2	2.099	1	2.419	1	-	1	520	-	-	1	1.290
85	Kab Seluma	23	18.747	4	1.096	1	-	5	1.307	2	1.403	2	-	1	344	3	3.678	5	10.919
86	Kota Bengkulu	10	8.580	-	-	2	475	2	3.093	1	1.468	-	-	-	-	1	262	4	3.282
8	**Provinsi Bangka Belitung**	**34**	**34.889**	**2**	**15**	**1**	**-**	**12**	**30.011**	**2**	**1.184**	**2**	**-**	**1**	**81**	**5**	**3.414**	**9**	**183**
87	Kab Bangka Tengah	12	2.723	1	5	-	-	4	666	1	960	-	-	1	81	2	994	3	18
88	Kab Bangka Selatan	6	23.430	-	-	-	-	5	23.430	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
89	Kab Belitung Timur	16	8.735	1	11	1	-	3	5.915	1	225	1	-	-	-	3	2.420	6	165
9	**Provinsi Kep. Riau**	**54**	**182.686**	**9**	**680**	**1**	**175**	**14**	**42.047**	**6**	**71.666**	**10**	**-**	**2**	**219**	**12**	**67.900**	**-**	**-**
90	Kab Karimun	15	17.423	3	487	-	-	5	10.071	1	5.714	3	-	-	-	3	1.149	-	-
91	Kab Lingga	14	58.083	4	91	-	-	3	257	2	56.699	2	-	1	36	2	1.000	-	-
92	Kota Tanjungpinang	14	33.747	1	57	-	-	3	10.023	2	5.508	3	-	-	-	5	18.159	-	-
93	Kota Batam	11	73.434	1	44	1	175	3	21.695	1	3.744	2	-	1	183	2	47.592	-	-
10	**Provinsi Jawa Tengah**	**69**	**186.884**	**4**	**5.209**	**8**	**73.369**	**18**	**42.506**	**3**	**2.681**	**5**	**-**	**5**	**1.193**	**8**	**31.232**	**18**	**30.695**
94	Kab Banyumas	11	102.146	1	4.548	2	69.417	1	756	-	-	-	-	-	-	3	25.913	4	1.513
95	Kab Brebes	9	11.250	-	-	-	-	4	8.620	1	1.300	1	-	2	961	-	18	1	350
96	Kab Grobogan	14	19.373	2	151	2	3.723	3	7.275	-	-	1	-	1	-	2	2.607	3	5.617
97	Kab Kebumen	6	17.838	-	-	-	-	5	17.360	-	-	-	-	-	-	-	-	1	478
98	Kab Rembang	19	14.669	1	510	2	22	3	312	1	399	1	-	1	232	3	2.693	7	10.500
99	Kota Pekalongan	10	21.608	-	-	2	208	2	8.182	1	981	2	-	1	-	-	-	2	12.237

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	**Provinsi NTB**	**21**	**64.653**	**2**	**108**	**-**	**-**	**11**	**18.110**	**1**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**656**	**5**	**45.279**
100	Kota Bima	21	64.653	2	108	-	-	11	18.110	1	500	-	-	-	-	2	656	5	45.279
12	**Provinsi NTT**	**104**	**176.949**	**20**	**4.730**	**2**	**3.892**	**23**	**49.515**	**17**	**95.675**	**15**	**-**	**4**	**678**	**22**	**22.327**	**1**	**130**
101	Kab Alor	16	19.230	3	277	-	-	2	213	3	14.475	1	-	1	20	6	4.245	-	-
102	Kab Kupang	5	10.656	1	459	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	10.196	-	-
103	Kab Manggarai	5	4.804	-	-	-	-	3	4.804	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
104	Kab Ngada	7	1.613	2	960	-	-	3	326	-	-	1	-	-	-	1	327	-	-
105	Kab Rote Ndao	9	6.185	3	925	1	3.892	2	594	1	643	1	-	-	-	-	-	1	130
106	Kab Sikka	10	10.109	2	1.165	-	-	3	1.932	2	6.059	1	-	-	-	2	953	-	-
107	Kab Sumba Barat	6	3.946	1	10	1	-	-	-	1	3.840	2	-	1	96	-	-	-	-
108	Kab Sumba Timur	11	52.636	-	-	-	-	4	37.123	3	14.869	2	-	-	-	2	644	-	-
109	Kab Timor Tengah Selatan	11	29.501	3	151	-	-	-	-	3	25.825	1	-	1	141	3	3.383	-	-
110	Kab Timor Tengah Utara	13	13.188	4	774	-	-	3	849	2	9.544	1	-	-	-	3	2.020	-	-
111	Kota Kupang	11	25.082	1	8	-	-	3	3.674	2	20.419	2	-	1	421	2	559	-	-
13	**Provinsi Kalimantan Barat**	**70**	**189.189**	**11**	**64.132**	**3**	**6.020**	**4**	**10.260**	**5**	**36.063**	**12**	**-**	**14**	**16.786**	**16**	**51.485**	**5**	**4.445**
112	Provinsi Kalimantan Barat	25	82.425	3	652	1	4.097	1	8.978	3	29.766	4	-	6	13.997	4	24.063	3	873
113	Kab Kapuas Hulu	30	95.266	3	62.315	1	1.100	3	1.282	1	6.214	6	-	7	2.492	9	21.863	-	-
114	Kab Sekadau	15	11.498	5	1.164	1	823	-	-	1	83	2	-	1	297	3	5.559	2	3.572
14	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**148**	**192.010**	**31**	**9.882**	**3**	**2.898**	**22**	**15.944**	**9**	**12.306**	**21**	**-**	**10**	**3.221**	**23**	**92.545**	**29**	**55.214**
115	Kab Barito Selatan	22	23.858	9	4.120	1	2.507	5	11.461	1	2.906	1	-	3	1.861	1	1.003	1	-
116	Kab Barito Timur	17	20.511	-	-	-	-	3	1.224	1	3.100	3	-	-	-	6	15.890	4	298
117	Kab Gunung Mas	16	26.912	3	1.023	-	-	1	163	3	4.402	3	-	1	322	2	20.888	3	115

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
118	Kab Kapuas	20	2.065	7	1.206	-	-	-	-	1	68	1	-	3	191	-	-	8	600
119	Kab Katingan	15	28.352	1	1.045	-	-	2	1.176	1	488	4	-	1	744	4	24.899	2	-
120	Kab Kotawaringin Timur	12	65.173	2	403	-	-	4	1.437	-	-	2	-	-	-	3	10.067	1	53.267
121	Kab Murung Raya	26	15.123	6	1.846	2	391	2	186	1	445	4	-	1	32	2	11.288	8	935
122	Kab Sukamara	20	10.016	3	239	-	-	5	298	1	897	3	-	1	71	5	8.510	2	-
15	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**45**	**155.807**	**6**	**1.883**	**1**	**29**	**11**	**11.632**	**5**	**60.076**	**2**	**-**	**3**	**4.561**	**7**	**12.007**	**10**	**65.620**
123	Kab Hulu Sungai Tengah	6	6.973	-	-	1	29	1	69	-	-	-	-	-	-	2	2.275	2	4.600
124	Kab Kotabaru	14	48.056	2	487	-	-	6	10.891	1	3.634	1	-	-	-	1	807	3	32.237
125	Kab Tanah Bumbu	25	100.778	4	1.395	-	-	4	672	4	56.442	1	-	3	4.561	4	8.925	5	28.783
16	**Provinsi Kalimantan Timur**	**90**	**900.016**	**8**	**13.302**	**3**	**206.736**	**20**	**185.618**	**9**	**118.564**	**13**	**-**	**6**	**5.800**	**21**	**349.707**	**10**	**20.289**
126	Provinsi Kalimantan Timur	10	454.801	-	-	2	180.448	4	145.428	1	1.915	-	-	1	825	1	123.390	1	2.795
127	Kab Kutai Kartanegara	16	55.625	1	20	-	-	3	12.563	1	19.719	2	-	2	3.391	4	18.000	3	1.933
128	Kab Kutai Timur	15	48.105	4	8.840	1	26.288	2	2.979	-	-	6	-	-	-	-	-	2	9.999
129	Kab Penajam Paser Utara	15	42.780	2	4.027	-	-	2	249	2	8.129	1	-	1	67	7	30.309	-	-
130	Kota Balikpapan	11	119.728	1	350	-	-	2	20.301	2	847	2	-	-	-	4	98.231	-	-
131	Kota Samarinda	13	170.755	-	65	-	-	3	2.637	3	87.955	2	-	-	320	5	79.778	-	-
132	Kota Tarakan	10	8.221	-	-	-	-	4	1.462	-	-	-	-	2	1.197	-	-	4	5.562
17	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**30**	**249.624**	**2**	**481**	**-**	**-**	**10**	**151.023**	**3**	**24.282**	**5**	**-**	**1**	**311**	**2**	**25.089**	**7**	**48.437**
133	Kab Banggai Kepulauan	16	79.816	2	481	-	-	4	73.530	2	2.059	4	-	1	311	1	60	2	3.375
134	Kab Buol	14	169.808	-	-	-	-	6	77.494	1	22.223	1	-	-	-	1	25.029	5	45.062

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**316**	**340.926**	**66**	**33.887**	**13**	**60.614**	**56**	**55.741**	**10**	**24.515**	**48**	**-**	**38**	**28.781**	**49**	**49.039**	**36**	**88.348**
135	Provinsi Sulawesi Selatan	33	67.156	4	1.792	2	11.774	5	15.024	-	-	6	-	5	4.175	5	8.652	6	25.739
136	Kab Bantaeng	10	1.682	4	563	-	-	3	806	-	-	-	-	2	243	1	70	-	-
137	Kab Bulukumba	22	10.726	4	376	1	3.853	4	4.424	1	1.121	7	-	1	132	2	821	2	-
138	Kab Jeneponto	25	22.968	5	3.601	2	3.390	2	153	-	-	4	-	2	829	6	3.594	4	11.401
139	Kab Luwu	31	14.663	12	4.874	1	-	4	4.617	1	20	3	-	2	683	5	3.557	3	913
140	Kab Luwu Timur	25	33.044	7	2.252	-	-	5	9.829	1	11.483	2	-	3	3.653	4	2.763	3	3.064
141	Kab Luwu Utara	32	8.216	3	342	1	313	6	725	2	1.038	8	-	3	684	4	2.088	5	3.028
142	Kab Maros	27	82.630	9	3.187	1	9.606	4	6.446	-	-	1	-	3	5.157	5	20.028	4	38.205
143	Kab Pangkep	15	27.340	2	630	2	21.110	1	1.680	1	82	3	-	3	3.681	3	157	-	-
144	Kab Pinrang	21	8.477	1	14	-	-	4	357	1	2.676	2	-	4	478	4	263	5	4.690
145	Kab Selayar	24	19.400	6	9.556	1	653	6	804	1	1.939	4	-	2	2.435	4	4.013	-	-
146	Kab Soppeng	9	3.118	1	429	-	-	2	827	-	-	1	-	3	1.861	1	-	1	-
147	Kab Tana Toraja	14	22.323	2	4.336	2	9.915	4	5.811	-	-	2	-	-	-	2	954	2	1.308
148	Kota Makassar	17	11.644	1	314	-	-	3	1.168	1	4.192	5	-	4	4.091	2	1.880	1	-
149	Kota Palopo	11	7.538	5	1.622	-	-	3	3.073	1	1.965	-	-	1	680	1	199	-	-
19	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**18**	**20.887**	**3**	**414**	**-**	**-**	**4**	**6.214**	**3**	**9.365**	**-**	**-**	**3**	**609**	**4**	**4.259**	**1**	**25**
150	Kab Kowane Selatan	18	20.887	3	414	-	-	4	6.214	3	9.365	-	-	3	609	4	4.259	1	25
20	**Provinsi Gorontalo**	**6**	**1.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**1.239**
151	Kab Gorontalo Utara	6	1.239	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1.239
21	**Provinsi Sulawesi Barat**	**117**	**126.335**	**24**	**5.424**	**4**	**26.709**	**22**	**46.463**	**7**	**15.000**	**17**	**-**	**16**	**15.564**	**10**	**3.562**	**17**	**13.613**
152	Provinsi Sulawesi Barat	39	86.617	6	787	4	26.709	5	33.000	3	10.533	7	-	7	12.784	2	2.433	5	371

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
153	Kab Majene	16	13.340	5	1.279	-	-	2	2.306	-	-	1	-	4	1.800	-	-	4	7.955
154	Kab Mamasa	26	7.488	6	2.219	-	-	5	2.802	2	875	3	-	2	386	4	918	4	288
155	Kab Mamuju	14	2.017	3	202	-	-	4	1.122	1	283	-	-	1	291	3	112	2	7
156	Kab Mamuju Utara	22	16.874	4	937	-	-	6	7.233	1	3.309	6	-	2	304	1	100	2	4.991
22	**Provinsi Maluku**	**87**	**74.416**	**16**	**2.004**	**5**	**37.956**	**13**	**4.741**	**4**	**2.883**	**24**	**-**	**6**	**3.773**	**12**	**12.615**	**7**	**10.445**
157	Provinsi Maluku	7	4.201	1	9	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1.750	2	2.442	-	-
158	Kab Buru	30	11.764	5	533	2	128	3	898	1	-	8	-	4	1.923	4	608	3	7.674
159	Kab Maluku Tengah	12	6.729	4	160	1	184	-	-	-	-	3	-	1	100	2	6.134	1	150
160	Kab Maluku Tenggara	19	12.399	2	735	1	5	6	2.777	1	2.870	4	-	-	-	4	3.430	1	2.582
161	Kab Seram Bagian Barat	8	38.032	1	28	1	37.639	3	365	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
162	Kota Ambon	11	1.291	3	539	-	-	1	700	1	13	4	-	-	-	-	-	2	38
23	**Provinsi Maluku Utara**	**88**	**154.647**	**21**	**9.458**	**2**	**-**	**15**	**11.114**	**8**	**29.634**	**11**	**-**	**7**	**5.164**	**14**	**24.923**	**10**	**74.355**
163	Kab Halmahera Barat	14	10.834	3	2.187	1	-	4	1.467	-	-	4	-	-	-	2	7.180	-	-
164	Kab Halmahera Utara	28	47.815	7	4.611	-	-	6	7.325	4	14.926	1	-	2	557	6	3.899	2	16.498
165	Kab Sula	19	80.614	5	495	1	-	1	841	2	13.911	2	-	1	1.931	3	7.583	4	55.855
166	Kota Ternate	27	15.384	6	2.165	-	-	4	1.482	2	797	4	-	4	2.677	3	6.261	4	2.003
24	**Provinsi Papua**	**177**	**987.156**	**65**	**44.717**	**4**	**2.688**	**35**	**572.755**	**13**	**259.130**	**23**	**-**	**11**	**17.998**	**14**	**77.228**	**12**	**12.640**
167	Provinsi Papua	18	27.976	5	11.661	2	2.557	2	900	2	12.306	4	-	-	-	1	551	2	-
168	Kab Asmat	15	6.345	6	2.548	-	-	2	1.792	-	-	1	-	1	396	1	1.609	4	-
169	Kab Biak Numfor	14	50.281	2	74	-	-	1	20.161	1	16.625	1	-	1	600	5	180	3	12.640
170	Kab Boven Digoel	11	408.779	2	986	-	-	5	394.046	1	-	-	-	-	-	1	13.748	2	-
171	Kab Jayawijaya	12	25.405	2	1.208	-	-	3	23.331	1	866	4	-	1	-	-	-	1	-

(dalam juta rupiah)
(dalam ribu valas)

No	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan*															
				Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain	
		Jumlah	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
172	Kab Keerom	8	8.067	2	720	-	-	2	166	1	876	2	-	-	-	1	6.306	-	-
173	Kab Mappi	8	138.757	1	181	-	-	5	66.353	1	72.223	1	-	-	-	-	-	-	-
174	Kab Merauke	9	8.800	2	7.571	1	-	3	600	1	628	2	-	-	-	-	-	-	-
175	Kab Mimika	5	12.099	1	24	-	-	2	11.295	-	-	-	-	1	779	1	-	-	-
176	Kab Nabire	6	20.104	1	222	1	131	1	1.205	1	9.181	1	-	1	9.365	-	-	-	-
177	Kab Pania	16	8.835	8	4.515	-	-	2	2.113	-	26	4	-	2	2.181	-	-	-	-
178	Kab Peg. Bintang	2	39.267	-	-	-	-	1	8.641	1	30.626	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Kab Puncak Jaya	4	6.782	2	2.362	-	-	1	3.187	-	-	-	-	1	1.233	-	-	-	-
180	Kab Sarmi	7	21.473	1	1.686	-	-	2	389	1	7.339	1	-	1	1.948	1	10.111	-	-
181	Kab Supiori	5	46.302	1	1.579	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	44.723	-	-
182	Kab Tolikara	9	108.324	5	2.389	-	-	-	-	1	104.439	1	-	2	1.496	-	-	-	-
183	Kab Waropen	18	43.794	16	5.798	-	-	2	37.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Kab Yapen Waropen	10	5.767	8	1.192	-	-	1	582	1	3.993	-	-	-	-	-	-	-	-
25	**Provinsi Papua Barat**	**93**	**207.779**	**7**	**3.819**	**3**	**27.194**	**14**	**79.156**	**6**	**30.367**	**21**	**-**	**10**	**11.485**	**23**	**46.609**	**9**	**9.149**
185	Provinsi Papua Barat	13	34.703	-	-	-	-	4	18.193	-	-	5	-	-	-	4	16.510	-	-
186	Kab Bintuni	15	57.566	2	3.056	1	156	3	49.963	-	-	2	-	3	1.298	3	3.093	1	-
187	Kab Fakfak	15	32.264	-	-	1	19.610	-	-	2	4.080	3	-	1	373	4	4.255	4	3.946
188	Kab Kaimana	11	7.317	1	73	-	-	1	5.688	2	36	2	-	3	1.034	1	485	1	-
189	Kab Raja Ampat	11	12.006	3	474	-	-	2	1.190	-	-	3	-	2	2.157	1	8.185	-	-
190	Kab Sorong Selatan	14	18.610	1	217	1	7.428	2	2.659	1	46	3	-	-	-	5	3.855	1	4.405
191	Kab Wondama	14	45.314	-	-	-	-	2	1.462	1	26.206	3	-	1	6.622	5	10.226	2	798
JUMLAH		**3.051**	**9.935.265**	**556**	**310.860**	**126**	**1.319.005**	**629**	**2.200.620**	**212**	**1.496.495**	**411**	**-**	**227**	**205.119**	**475**	**2.486.309**	**415**	**1.916.856**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
Pemeriksaan Kinerja atas Rumah Sakit Umum Daerah

No	Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
	Kerugian Daerah	**5**	**297**	**0.46**
1	Kelebihan pembayaran	5	297	
	Potensi Kerugian Daerah	**3**	**451**	**0.70**
2	Hasil pengadaan barang/jasa tidak/kurang sesuai dengan kontrak	3	451	
	Kekurangan Penerimaan	**23**	**14.758**	**22,91**
3	Penerimaan negara/daerah/perusahaan/denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima /disetor ke kas negara/daerah	23	14.758	
	Administrasi	**6**	**-**	**-**
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	6	-	
	Ketidakhematan	**23**	**2.180**	**3,38**
5	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	-	
6	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	14	-	
7	Pemborosan keuangan negara/perusahaan	8	2.180	
	Ketidakefektifan	**276**	**46.690**	**72,49**
8	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	12	13.827	
9	Barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan	17	31.388	
10	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	9	1.476	
11	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	14	-	
12	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	156	-	
13	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik	68	-	
14	**Lain-lain**	**24**	**31**	**0,05**
	Jumlah	**360**	**64.407**	**100,00**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 5

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja atas Rumah Sakit Umum Daerah

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*															Keterangan
				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Adminis-trasi	Ekonomis		Efisiensi		Efektifitas		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	**Provinsi Sumatera Utara**	**10**	**10.515**	**2**	**171**	**-**	**-**	**3**	**1.478**	**-**	**1**	**514**	**-**	**-**	**4**	**8.351**	**-**		
	RSUD Dr. Djasemen Saragih Pematangsiantar	10	10.515	2	171	-	-	3	1.478	-	1	514	-	-	4	8.351	-		
2	**Provinsi Riau**	**26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**		**-**	**-**	**23**	**-**	**2**		
	RSUD Arifin Achmad Pekan-baru	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	14	-	**2**		
	RSUD Kota Dumai	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	9	-	-		
3	**Provinsi Jambi**	**38**	**10.866**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**206**	**1**	**-**		**-**	**-**	**30**	**10.661**	**5**		
	RSUD Muara Bungo	19	2.110	-	-	-	-	2	206	1	-		-	-	14	1.905	**2**		
	RSUD Raden Mattaher	19	8.756	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	16	8.756	**3**		
4	**Provinsi Sumatera Selatan**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**		**-**	**-**	**4**	**-**	**1**		
	RSUD Lahat	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2		-	-	4	-	**1**		
5	**Provinsi Bengkulu**	**10**	**1.305**	**1**	**99**	**-**	**-**	**1**	**16**	**-**	**2**	**1.191**	**-**	**-**	**5**	**-**	**1**		
	RSUD Dr. M Yunus	10	1.305	1	99	-	-	1	16	-	2	1.191	-	-	5	-	**1**		
6	**Provinsi Lampung**	**12**	**886**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**22**	**-**	**1**		**-**	**-**	**10**	**864**	**-**		
	RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	5		-		
	RSUD Jendral A. Yani Kota Metro	7	886	-	-	-	-	1	22	-	1		-	-	5	864	-		

No	Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*															Keterangan
				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Adminis-trasi	Ekonomis		Efisiensi		Efektifitas		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
7	**Provinsi Kepulauan Riau**	**12**	**3.731**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**499**	**1**	**1**		**-**	**-**	**6**	**3.232**	**-**		
	RSUD Tanjung Pinang	12	3.731	-	-	-	-	4	499	1	1		-	-	6	3.232	-		
8	**Provinsi DIY**	**11**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**		**-**	**-**	**10**		**-**		
	RSUD Wonosari Gunung Kidul	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	10		-		
9	**Provinsi Jawa Timur**	**103**	**13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**		**-**	**-**	**92**		**6**	**13**	
	RSUD Dr. Hartoyo Lumajang	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	13		**1**		
	RSUD Blambangan Banyu-wangi	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	13		**1**		
	RSUD Genteng Banyuwangi	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	11		**1**		
	RSUD Pare Kediri	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	12		**1**		
	RSUD Kabupaten Bojonegoro	15	-	-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	12		**-**		
	RSUD Kabupaten Madiun	15	13	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	12		**2**	**13**	
	RSUD Kabupaten Pamekasan	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	9		**-**		
	RSUD Kabupaten Sidoarjo	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	10		**-**		
10	**Provinsi Banten**	**13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**13**		**-**		
	RSUD Kabupaten Tangerang	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	13		**-**		
			-																
11	**Provinsi Bali**	**13**	**2.926**	**-**	**-**		**-**	**2**	**1.778**	**-**	**-**		**-**	**-**	**7**	**1.130**	**4**	**18**	
	RSUD Wangaya Kota Denpasar	13	2.926	-	-		-	2	1.778	-	-		-	-	7	1.130	**4**	**18**	

No	Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*															Keterangan
				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Adminis-trasi	Ekonomis		Efisiensi		Efektifitas		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
12	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**8**	**20.322**	**-**	**-**	**1**	**162**	**1**	**5.343**	**-**	**-**		**-**	**-**	**5**	**14.817**	**1**		
	RSUD Dr. Johannes Kupang	8	20.322	-	-	1	162	1	5.343	-	-		-	-	5	14.817	**1**		
13	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**16**	**1.539**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**227**	**-**	**3**	**50**	**-**	**-**	**10**	**1.262**			
	RSUD dr. Doris Sylvanus	16	1.539	-	-	-	-	3	227	-	3	50	-	-	10	1.262			
							-												
14	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**4**	**3.134**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**2**		**-**	**-**	**2**	**3.134**			
	RSUD Ulin Banjarmasin	4	3.134	-	-		-		-	-	2		-	-	2	3.134			
15	**Provinsi Kalimantan Timur**	**8**	**1.619**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**8**	**1.619**	**-**		
	RSUD Dr Abdur Rivai Berau	8	1.619	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	8	1.619	**-**		
16	**Provinsi Sulawesi Utara**	**10**	**71**	**-**	**-**		**-**	**1**	**15**	**-**	**2**	**56**	**-**	**-**	**7**				
	RSUD Dr Sam Ratulangi Minahasa	10	71	-	-		-	1	15	-	2	56	-	-	7				
17	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**14**	**5.535**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**5.013**	**-**	**1**	**176**	**-**	**-**	**12**	**346**	**-**		
	RSUD Kendari	14	5.535	-	-	-	-	1	5.013	-	1	176	-	-	12	346	**-**		
18	**Provinsi Maluku**	**9**	**199**	**1**	**26**	**1**	**130**	**1**	**43**	**-**	**-**		**-**	**-**	**3**		**3**		
	RSUD Dr M. Haulusy	9	199	1	26	1	130	1	43	-	-		-	-	3		**3**		
19	**Provinsi Maluku Utara**	**11**	**109**	**1**	**1**		**-**	**1**	**107**	**-**	**3**		**-**	**-**	**6**				
	RSUD Dr Hasan Boeosirie	11	109	1	1		-	1	107	-	3		-	-	6				

No	Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*															Keterangan
				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Adminis-trasi	Ekonomis		Efisiensi		Efektifitas		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
20	**Provinsi Papua**	**20**	**1.446**	**-**	**-**	**1**	**159**	**2**	**11**	**1**	**-**		**-**	**-**	**16**	**1.276**	**-**		
	RSUD Wamena	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	12		**-**		
	RSUD Abepura	8	1.446	-	-	1	159	2	11	1	-		-	-	4	1.276	**-**		
					-														
21	**Provinsi Papua Barat**	**5**	**192**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**192**	**-**	**-**	**3**		**1**		
	RSUD Manokwari	5	192	-	-	-	-	-	-	-	1	192	-	-	3		**1**		
	Jumlah	360	64.407	5	297	3	451	23	14.758	6	23	2.180	-	-	276	46.690	**24**	**31**	

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 6

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Kesehatan

No	Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
	Kerugian Daerah	**4**	**166**	**0.76**
1	Kelebihan pembayaran	4	166	
	Potensi Kerugian Daerah	**2**	**68**	**0.31**
2	Hasil pengadaan barang/jasa tidak/kurang sesuai dengan kontrak	2	68	
	Kekurangan Penerimaan	**4**	**254**	**1,17**
3	Penerimaan negara/ daerah/denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima /disetor ke kas negara/daerah	4	254	
	Administrasi	**7**	**-**	-
4	Bukti pertanggjawaban tidak lengkap/sah	2	-	
5	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	5	-	
	Ketidakhematan	**9**	**3.670**	**16,82**
6	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	3	-	
7	Pemborosan keuangan negara/perusahaan	6	3.670	
	Ketidakefektifan	**97**	**16.221**	**74,34**
8	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan	10	995	
9	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	11	3.466	
10	Barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan	11	4.082	
11	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	7	2.000	
12	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	12	5.654	
13	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	30	24	
14	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik	16	-	
15	**Lain-lain**	**6**	**1.442**	**6,61**
	Jumlah	**129**	**21.819**	**100,00**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 7

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Kesehatan

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*															Ket
				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Admin-istrasi	Ekonomis		Efisiensi		Efektifitas		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	**Provinsi Nanggro Aceh Darussalam**	**16**	**632**	**-**		**-**		**-**		**1**	**-**		**-**	**-**	**15**	**632**	**-**		
	Pengelolaan obat pada Dinas Kesehatan dan Kesejahter-aan Sosial Kota Sabang	16	632	-		-		-		1	-		-	-	15	632	-		
			-													-			
2	**Provinsi Sumatera Barat**	**36**	**7.047**	**1**	**23**	**1**	**37**	**3**	**202**	**3**	**-**		**-**	**-**	**28**	**6.785**	**-**		
	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	16	207	1	23	1	37	1	24	-	-		-	-	13	123	-		
	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar	20	6.839	-		-		2	177	3	-		-	-	15	6.662	-		
			-													-			
3	**Provinsi DKI Jakarta**	**18**	**-**	**-**		**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**18**	**-**	**-**		
	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin	18	-	-		-		-		-	-		-	-	18	-	-		
			-													-			
4	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**9**	**-**	**-**						**-**	**-**		**-**	**-**	**6**	**-**	**3**		
	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan NTB	9	-	-						-	-		-	-	6	-	3		
			-													-			
5	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**7**	**6.374**	**-**		**-**				**1**	**2**	**1.876**	**-**	**-**	**3**	**4.466**	**1**	**32**	
	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan NTT	7	6.374	-		-				1	2	1.876	-	-	3	4.466	1	32	
			-									-				-			
6	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**9**	**2.687**	**-**						**1**	**2**	**966**	**-**	**-**	**6**	**1.721**			
	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	9	2.687	-						1	2	966	-	-	6	1.721			
			-									-				-			
7	**Provinsi Kalimantan Barat**	**21**	**3.345**	**3**	**143**	**-**				**-**	**1**	**602**	**-**	**-**	**15**	**1.191**	**2**	**1.410**	
	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang	21	3.345	3	143	-				-	1	602	-	-	15	1.191	2	1.410	

No	Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*															Ket
				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Admin-istrasi	Ekonomis		Efisiensi		Efektifitas		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
			-									-				-			
8	**Provinsi Sulawesi Barat**	**13**	**1.735**	**-**		**1**	**30**	**1**	**53**	**1**	**4**	**226**	**-**	**-**	**6**	**1.426**			
	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar	13	1.735	-		1	30	1	53	1	4	226	-	-	6	1.426			
			-									-				-			
	Jumlah	**129**	**21.819**	**4**	**166**	**2**	**68**	**4**	**254**	**7**	**9**	**3.670**	**-**	**-**	**97**	**16.221**	**6**	**1.442**	

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 8

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Pendidikan

No	Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
	Kerugian Daerah	**2**	**169**	**1,04**
1	Kelebihan pembayaran	2	169	
	Potensi Kerugian Daerah	**1**	**47**	**0,29**
2	Hasil pengadaan barang/jasa tidak/kurang sesuai dengan kontrak	1	47	
	Kekurangan Penerimaan	**1**	**19**	**0,11**
3	Penerimaan negara/ daerah/denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima /disetor ke kas negara/daerah	1	19	
	Administrasi	**4**	**-**	-
4	Bukti pertanggjawaban tidak lengkap/sah	2	-	
5	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	2	-	
	Ketidakefektifan	**33**	**15.628**	**96,40**
6	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan	7	5.289	
7	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	225	
8	Barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan	1	602	
9	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	2	1.698	
10	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	11	6.819	
11	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	8	233	
12	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik	2	763	
13	**Lain-lain**	**2**	**350**	**2,16**
	Jumlah	**43**	**16.212**	**100,00**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 9

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja atas Dinas Pendidikan

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*															Keterangan
				Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Adminis-trasi	Ekonomis		Efisiensi		Efektifitas		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	**Provinsi Sumatera Utara**	**19**	**2.812**	**1**	**28**	**-**	**-**	**1**	**19**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13**	**2.415**	**1**	**350**	
	Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar	9	593	-	-	-	-	1	19	2	-	-	-	-	5	224	1	**350**	
	Dinas Pemerintah Kota Padangsidimpuan	10	2.220	1	28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	2.191	-		
			-													-			
2	**Provinsi Kalimantan Barat**	**18**	**11.875**	**1**	**140**	**1**	**47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**11.688**	**1**	**-**	
	Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas	18	11.875	1	140	1	47	-	-	-	-	-	-	-	15	11.688	1	**-**	
			-													-			
3	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**6**	**1.525**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**1.525**	**-**	**-**	
	Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala	6	1.525	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	1.525	-	**-**	
			-													-			
	Jumlah	**43**	**16.212**	**2**	**169**	**1**	**47**	**1**	**19**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33**	**15.628**	**2**	**350**	

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
Pemeriksaan Kinerja atas Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - NIAS

No	Kelompok Temuan	Jml Kasus	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
	Kerugian Negara	**6**	**816**	**-**
1	Kelebihan Pembayaran	5	733	
2	Kurang Volume	1	83	
	Potensi Kerugian Negara	**1**	**1.998**	**1**
3	Hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai kontrak	1	1.998	
	Kekurangan Penerimaan	**6**	**2.611**	**1**
4	Penerimaan negara/daerah / denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima /disetor ke Kas Negara	6	2.611	
	Administrasi	**8**	**-**	**-**
5	Bukti pertanggungjawaban tidaklengkap/ tidak sah:	1	-	
6	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	2	-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang - undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa.	1	-	
8	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	-	
	Ketidakefektifan	**16**	**347.270**	**97**
9	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	16.240	
10	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	1.119	
11	Barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan	7	141.733	
12	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	6	188.179	
13	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-	
	Lain-lain	**1**	**6.233**	**2**
14	Pekerjaan melebihi plafon anggaran RKA/KL	1	6.233	
	Jumlah	**38**	**358.927**	**100**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 11

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja atas Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - NIAS

(dalam juta rupiah)

No	Nama Entitas	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*															Keterangan
				Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Adminis-trasi	Ekonomis		Efisien		Efektifitas		Lain-lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	Bidang Perumahan dan Pemukiman	11	311.459	3	614										8	310.846			
2	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	13	33.496					2	1.179	7					3	26.084	1	6.233	
3	Bidang Pendidikan dan kesehatan	4	9.504					1	528	1					2	8.976			
4	Bidang Transportasi Udara	10	4.468	3	202	1	1.998	3	904						2	1.364	1	-	
	Jumlah	**38**	**358.927**	**6**	**816**	**1**	**1.998**	**6**	**2.611**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15**	**347.270**	**2**	**6.233**	

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 12

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
PDTT atas Belanja Pemerintah Pusat

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
I	**Kerugian Negara**	**118**	**24.818**	**0,46**
1	Kelebihan pembayaran	90	14.499	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	4	2.193	
3	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	1	67	
4	Kurang Volume	18	6.268	
5	Belanja/Pengadaan Barang/Jasa Fiktif	2	486	
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	1.282	
7	Perjalanan Dinas Ganda	1	24	
II	**Potensi Kerugian Negara**	**8**	**8.427**	**0,16**
1	Jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak ada atau tidak disesuaikan dengan adendum	1	-	
2	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	6.484	
3	Aset Dikuasai Pihak Lain	1	183	
4	Hasil Pengadaan barang/jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak/ketentuan	5	1.760	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**48**	**203.357**	**3,75**
1	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas negara	48	203.357	
IV	**Uang yang Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan**	**13**	**80.937**	**1,49**
1	Penggunaan Uang Muka/belanja yang belum/tidak dipertanggungjawabkan	10	7.166	
2	Pencairan Uang untuk Pekerjaan yang Belum Selesai pada Akhir Tahun	3	73.771	
V	**Administrasi**	**114**	**-**	**-**
1	Penyimpangan terhadap peraturan Per-Uuan bid. Pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	8	-	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah)	43	-	
3	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3	-	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	24	-	
5	Pelaksanaan Lelang secara Proforma	2	-	
6	Pencacatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	18	-	
7	Penyimpangan Terhadap Peraturan PerUUan bidang teknis tertentu/ketentuan intern organisasi yang diperiksa	1	-	
8	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	-	
9	Struktur Pengendalian yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	-	
10	Perencanaan Kegiatan tidak memadai	1	-	
11	Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan serta penggunaan penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	-	
12	Pekerjaan Dilaksanakan Mendahului Kontrak	1	-	
13	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal	8	-	
VI	**Ketidakhematan/Pemborosan**	**38**	**141.461**	**2,61**
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	31	22.252	
2	Penetapan Kualitas/kuantitas barang/jasa tidak sesuai standar	2	656	

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
3	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	5	118.553	
VII	**Ketidakefektifan**	**31**	**611.257**	**11,28**
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	6	8.283	
2	Barang yang dibeli tidak/belum dapat dimanfaatkan	10	210.773	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi penca-paian tujuan organisasi	6	274.030	
4	Penggunaan Anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6	118.171	
5	Pelayanan Kepada Masyarakat Tidak Optimal	3	-	
VIII	**Lain-lain**	**6**	**4.348.007**	**80,25**
	Jumlah	**376**	**5.418.264**	**100,00**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 13

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Belanja Pemerintah Pusat

(dalam juta rupiah)

No	Entitas	Jml LHP	Total		Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :																Keterangan
					Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Peneri-maan		Uang yang Belum/Ti-dak Dipertanggung-jawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	Departemen Luar Negeri	10	45	4.590	7	753	-	-	-	-	-	-	35	-	2	1.140	1	2.698	-	-	
2	Departemen Perhubungan	5	60	14.986	31	5.164	2	6.484	7	398	-	-	11	-	7	516	2	2.423	-	-	
3	Komisi Pemilihan Umum	1	7	1.270	3	604	-	-	-	-	-	-	3	-	1	666	-	-	-	-	
4	Badan Meteorologi dan Geofisika	1	7	4.017	3	150	-	-	1	415	-	-	1	-	1	192	1	3.260	-	-	
5	Kejaksaan Agung	2	15	6.240	4	121	4	183	1	18	-	-	4	-	1	656	1	5.262	-	-	
6	Departemen Hukum dan HAM	6	39	131.700	20	2.289	-	-	9	117.467	-	-	7	-	2	140	1	11.804	-	-	
7	TNI AL	3	15	3.502	3	1.159	-	-	4	349	-	-	4	-	1	5	3	1.990	-	-	
8	TNI AD	8	66	97.027	13	2.871	2	1.760	9	3.777	11	80.298	21	-	8	8.313	1	9	1	-	Tingkat Penyerapan Anggaran TA 2007 rendah
9	TNI AU	2	13	6.226	2	1.622	-	-	2	47	-	-	5	-	2	1.789	2	2.769	-	-	
10	Mabes TNI	1	10	4.505.369	1	131	-	-	1	12	-	-	2	-	2	3.911	2	153.309	2	4.348.007	Hutang beras pada perum bulog belum dibayar sebe-sar Rp1.389.192.816 dan Hutang Dephan atas BMP Pertamina meningkat men-jadi Rp4.346.617.369.500,77
11	BKKBN	1	6	137.432	-	-	-	-	2	113	-	-	-	-	2	114.604	2	22.715	-	-	
12	TVRI	1	8	32.994	2	842	-	-	2	319	-	-	1	-	1	1.739	2	30.094	-	-	
13	BPPT	1	6	187	4	160	-	-	-	-	1	27	1	-	-	-	-	-	-	-	
14	Bakorsurtanal	1	9	1.651	7	1.463	-	-	1	149	-	-	-	-	1	39	-	-	-	-	
15	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	8	468	3	97	-	-	1	9	-	-	1	-	1	26	2	336	-	-	
16	MPR RI	1	5	274	2	149	-	-	1	5	-	-	-	-	2	120	-	-	-	-	
17	DPD RI	1	5	226	2	31	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	193	-	-	
18	Menko Kesra	1	10	207.646	3	2.253	-	-	1	170	1	612	2	-	-	-	3	204.610	-	-	
19	Kementerian Pemu-da dan Olahraga	1	6	43.956	2	300	-	-	1	42.000	-	-	-	-	2	1.278	1	378	-	-	
20	Badan Pertanahan Nasional	1	10	1.178	1	12	-	-	1	1.166	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	

No	Entitas	Jml LHP	Total		Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :																Keterangan
					Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Peneri-maan		Uang yang Belum/Ti-dak Dipertanggung-jawabkan		Administrasi		Ketidakhematan/ Pemborosan		Ketidakefektifan		lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
21	**Departemen Kesehatan**	1	9	193.918	2	1.383	-	-	1	36.569	-	-	3	-	1	6.329	1	149.637	1	-	Sesuai dengan SK Menteri Kesehatan, keanggotaan tim evaluasi harga obat melibatkan 3 produsen obat sehingga hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan
22	**Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)**	1	11	23.408	3	3.263	-	-	2	374	-	-	1	-	-	-	3	19.771	2	-	Amdal pembangunan Pelabuhan Internasional Hub Teluk Sabang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga doku-men KA-ANDAL yang sudah dinilai oleh komisi penilai AMDAL Prov tidak valid serta Kegiatan reklamasi di kawasan industri terpadu Balohan tidak sesuai AMDAL, serta kewajiban pemantauan dan pengelolaan lingkungan tidak dilaksanakan, sehingga berpotensi kerusakan lingkungan.
23	**Departemen Perdagangan**	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	**52**	**376**	**5.418.264**	**118**	**24.818**	**8**	**8.427**	**48**	**203.357**	**13**	**80.937**	**114**	**-**	**38**	**141.461**	**31**	**611.257**	**6**	**4.348.007**	

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Keterangan :
Diantara temuan-temuan tersebut beberapa telah ditindaklanjuti dengan penyetoran utang ke kas negara, yaitu :

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

a. Kekurangan Volume senilai Rp728,54 juta telah ditindaklanjuti sesuai bukti setor senilai Rp50,79 juta
b. Pemborosan keuangan senilai Rp139,63 juta telah ditindaklanjuti sesuai bukti setor senilai Rp91,89 juta
c. Penerimaan yang belum/terlambat dipungut/disetor senilai Rp117,46 miliar telah ditindaklanjuti sesuai bukti setor senilai Rp542,60 juta
d. Kelebihan pembayaran senilai Rp1,35 miliar telah ditindaklanjuti sesuai bukti setor senilai Rp281,47 juta

TNI AD

- Kekurangan volume senilai Rp601,12 juta telah ditindaklanjuti senilai Rp388,51 juta sesuai bukti foto
- Penerimaan yang belum/terlambat dipungut/disetor senilai Rp3,77 miliar telah ditindaklanjuti sesuai bukti setor senilai Rp67,18 juta

TNI AL

- Penerimaan yang belum/terlambat dipungut/disetor senilai Rp348,79 juta telah ditindaklanjuti sesuai bukti setor senilai Rp51,46 juta

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
PDTT atas Belanja Pemerintah Daerah dan Pilkada

No	Rincian Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:			
I	**Kerugian Daerah**	**756**	**253.185**	**20,61**
1	Kelebihan Pembayaran (selain kurang volume)	206	52.555	
2	Kurang Volume	338	99.554	
3	Pemahalan Harga (Mark Up)	34	6.835	
4	Spesifikasi Barang/Jasa Yang Diterima Tidak Sama Dengan Kontrak, kerugian daerah	57	27.257	
5	Pembebanan/Pekerjaan Tidak sesuai ketentuan, kerugian daerah	121	66.984	
II	**Potensi Kerugian Daerah**	**44**	**17.095**	**1,39**
6	Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai/kurang dari kontrak namun pembayaran belum seluruhnya, potensi kerugian daerah	44	17.095	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**350**	**74.865**	**6,09**
7	Penerimaan Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak atau Terlambat Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Daerah	350	74.865	
IV	**Uang yang Belum/tidak Dipertanggungjawabkan**	**67**	**125.809**	**10,24**
8	Penggunaan uang muka/belanja yang belum/tidak dipertanggungjawabkan	67	125.809	
V	**Administrasi**	**191**	**-**	**-**
9	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau sah)	47	-	
10	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian)	129	-	
11	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN/Daerah	15	-	
VI	**Ketidakhematan/Pemborosan**	**160**	**53.784**	**4,38**
12	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	160	53.784	
VII	**Ketidakefektifan**	**72**	**306.789**	**24,97**
13	Penggunaan Anggaran tidak Tepat Sasaran/ Tidak Sesuai Peruntukkan	38	47.993	
14	Barang yg dibeli tidak dapat dimanfaatkan	34	258.796	
VIII	**Lain-lain**	**229**	**396.901**	**32,31**
	Jumlah	**1.869**	**1.228.428**	**100,00**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 15

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Belanja Pemerintah Daerah dan Pilkada

(dalam juta rupiah)

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
BELANJA DAERAH																					
1	**Provinsi Sumatera Utara**	**4**	**44**	**21.959**	**21**	**12.139**	**3**	**423**	**8**	**2.146**	**1**	**83**	**3**	**-**	**4**	**85**	**2**	**6.348**	**2**	**735**	
1	Kota Binjai	1	10	4.015	6	3.872	-	-	1	144	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
2	Kab. Tapanuli Tengah	1	8	2.916	3	1.370	1	187	2	1.290	-	-	-	-	2	69	-	-	-	-	
3	Kab. Simalungun	1	11	1.909	4	635	2	236	1	302	-	-	2	-	-	-	-	-	2	735	
4	Kab. Asahan	1	15	13.118	8	6.262	-	-	4	410	1	83	-	-	1	16	1	6.348	-	-	
2	**Provinsi Sumatera Barat**	**6**	**95**	**71.339**	**30**	**3.571**	**2**	**221**	**18**	**1.696**	**4**	**15.338**	**8**	**-**	**11**	**13.762**	**7**	**2.637**	**15**	**34.114**	
1	Prov. Sumbar	1	21	15.315	9	874	1	114	3	731	-	-	3	-	2	11.634	-	-	3	1.962	
2	Kab. Solok	1	13	2.832	2	366	-	-	3	55	1	635	-	-	-	-	4	1.632	3	144	
3	Kab. Pesisir Selatan	1	21	18.027	5	250	-	-	4	575	3	14.703	1	-	3	1.080	-	-	5	1.418	
4	Kab. Pasaman	1	6	30.549	2	741	-	-	1	99	-	-	1	-	-	-	-	-	2	29.708	
5	Kab. Limapuluh Kota	1	17	3.039	8	766	-	-	4	95	-	-	1	-	2	459	1	844	1	875	
6	Kota Padang	1	17	1.577	4	573	1	107	3	140	-	-	2	-	4	588	2	162	1	6	
3	**Provinsi Riau**	**3**	**27**	**29.346**	**20**	**14.372**	**1**	**2.793**	**3**	**207**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**11.974**	
1	Dinas Kimpraswil Tahun 2006 dan diluncurkan Tahun 2007 di Kabupaten Bengkalis	1	15	15.167	12	7.715	1	2.793	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.651	
2	Dinas Kimpraswil Tahun 2008 Kabupaten Bengkalis	1	11	13.440	7	5.918	-	-	2	199	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.323	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggung-jawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
3	Pemeriksaan Ulang atas Pekerjaan Timbunan Tanah Pada Pembangungan Jalan Dalu Dalu - Mahato - Simpang Manggala yang dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) di Kabupaten Bengkalis	1	1	739	1	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Provinsi Jambi**	**7**	**69**	**40.340**	**24**	**18.419**	**1**	**543**	**16**	**8.840**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1.177**	**1**	**33**	**24**	**11.327**	
1	Kab. Batanghari	1	20	3.044	11	1.497	-	-	2	152	-	-	-	-	2	1.099	-	-	5	296	
2	Kab. Kerinci	1	2	1.374	1	295	-	-	1	1.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Merangin	1	12	14.209	2	6.405	-	-	4	1.567	-	-	-	-	1	77	1	33	4	6.127	
4	Kab. Sarolangun	1	8	1.294	3	344	-	-	2	110	-	-	-	-	-	-	-	-	3	839	
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	14	6.991	4	2.039	1	543	3	1.872	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.538	
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	7	9.174	1	4.941	-	-	1	3.046	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.186	
7	Kab. Tebo	1	6	4.254	2	2.897	-	-	3	1.014	-	-	-	-	-	-	-	-	1	343	
5	**Provinsi Sumatera Selatan**	**5**	**45**	**15.894**	**25**	**6.337**	**1**	**16**	**9**	**778**	**-**	**-**	**1**	**-**	**2**	**167**	**1**	**2.501**	**6**	**6.095**	
1	Kab. OKU Selatan	1	16	3.169	10	2.840	-	-	3	192	-	-	-	-	1	138	-	-	2	-	
2	Kab. OKU	1	7	6.810	1	602	1	16	1	97	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.095	
3	Kab. Banyuasin	1	8	848	6	520	-	-	2	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kota Lubuk Linggau	1	6	3.034	1	444	-	-	2	59	-	-	1	-	1	29	1	2.501	-	-	
5	Kota Palembang	1	8	2.033	7	1.930	-	-	1	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Provinsi Bengkulu**	**2**	**16**	**29.764**	**6**	**5.392**	**-**	**-**	**4**	**1.880**	**1**	**1.659**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**4**	**20.833**	
1	Kab. Seluma	1	4	1.274	1	687	-	-	1	39	-	-	-	-	-	-	1	-	1	548	
2	Prov. Bengkulu	1	12	28.490	5	4.706	-	-	3	1.841	1	1.659	-	-	-	-	-	-	3	20.285	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
7	**Provinsi Lampung**	**9**	**44**	**31.319**	**17**	**15.432**	**7**	**987**	**7**	**548**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**2**	**5.818**	**9**	**8.534**	
1	Kota Bandar Lampung	1	6	13.010	3	9.953	1	271	-	-	-	-	-	-	-	-	1	318	1	2.469	
2	Kab. Lampung Utara	1	6	6.198	2	511	1	23	1	20	-	-	-	-	-	-	1	5.500	1	145	
3	Kab. Lampung Selatan	1	5	787	2	660	1	23	1	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74	
4	Kab. Lampung Barat	1	3	275	1	274	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kab. Lampung Timur	1	6	5.282	1	1.154	2	312	1	169	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.647	
6	Kab. Lampung Tengah	1	4	2.585	2	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.915	
7	Kab. Tanggamus	1	6	969	3	755	1	126	1	88	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kab. Tulang Bawang	1	5	1.186	2	624	1	232	1	115	-	-	-	-	-	-	-	-	1	215	
9	Kab. Way Kanan	1	3	1.025	1	832	-	-	1	124	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69	
8	**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**	**2**	**13**	**3.095**	**5**	**1.170**	**1**	**474**	**3**	**322**	**1**	**157**	**-**	**-**	**2**	**330**	**-**	**-**	**1**	**642**	
1	Kab. Bangka Tengah	1	9	2.453	3	896	1	474	2	247	1	157	-	-	1	37	-	-	1	642	
2	Kab. Belitung Timur	1	4	642	2	274	-	-	1	75	-	-	-	-	1	293	-	-	-	-	
9	**Provinsi Kepulauan Riau**	**1**	**12**	**385**	**4**	**153**	**-**	**-**	**2**	**17**	**-**	**-**	**3**	**-**	**2**	**173**	**1**	**42**	**-**	**-**	
1	Kab. Bintan	1	12	385	4	153	-	-	2	17	-	-	3	-	2	173	1	42	-	-	
10	**Provinsi DKI Jakarta**	**7**	**88**	**67.652**	**42**	**14.050**	**1**	**579**	**12**	**1.232**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19**	**932**	**1**	**11.265**	**13**	**39.593**	
1	Dinas Penerangan Jalan Umum & Sarana Jaringan Utilitas	1	3	1.197	1	27	1	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	591	
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	11	15.181	5	574	-	-	1	5	-	-	-	-	3	221	1	11.265	1	3.116	
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat	1	23	802	8	230	-	-	-	-	-	-	-	-	15	571	-	-	-	-	
4	Dinas & Subdinas Tata Kota	1	13	682	5	654	-	-	6	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
5	Dinas Kebersihan & Subdinas Kebersihan Kota Administrasi Jakpus, Jakut, Jaktim, Jaksel, Jakbar & Kab. Administrasi Kep. Seribu	1	17	38.241	12	11.975	-	-	2	996	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25.271	
6	Badan Kesatuan Bangsa & Biro Administrasi Perekonomian	1	10	1.919	6	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.634	
7	Badan Kepegawaian Daerah dan UPT Pusbinroh	1	11	9.630	5	303	-	-	3	204	-	-	-	-	1	140	-	-	2	8.982	
11	**Provinsi Jawa Timur**	**26**	**316**	**20.839**	**166**	**6.844**	**-**	**-**	**73**	**3.188**	**-**	**-**	**35**	**-**	**22**	**3.296**	**4**	**9**	**16**	**7.502**	
1	Kota Batu	1	12	653	5	206	-	-	3	38	-	-	1	-	1	400	2	9	-	-	
2	Kab. Tulungagung	1	14	140	7	3	-	-	5	-	-	-	1	-	1	137	-	-	-	-	
3	Kab. Sidoarjo	1	12	221	7	89	-	-	5	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kab. Banyuwangi	1	17	3.962	11	3.065	-	-	4	897	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
5	Kab. Bangkalan	1	13	409	10	302	-	-	2	56	-	-	-	-	1	51	-	-	-	-	
6	Kota Pasuruan	1	12	1.425	8	28	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1.397	-	-	-	-	
7	Kota Mojokerto	1	12	2.067	8	705	-	-	2	54	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1.307	
8	Kota Kediri	1	13	120	6	19	-	-	4	101	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
9	Kota Blitar	1	15	953	8	290	-	-	5	278	-	-	-	-	2	385	-	-	-	-	
10	Kab. Tuban	1	7	943	1	-	-	-	4	922	-	-	1	-	1	21	-	-	-	-	
11	Kab. Malang	1	9	158	6	144	-	-	1	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
12	Kab. Ngawi	1	11	749	5	66	-	-	2	11	-	-	-	-	2	85	-	-	2	587	
13	Kab. Sumenep	1	6	255	4	96	-	-	2	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Kota Surabaya	1	23	270	12	-	-	-	8	15	-	-	-	-	1	8	-	-	2	246	
15	Kab. Blitar	1	9	248	4	80	-	-	1	24	-	-	1	-	2	143	-	-	1	-	
16	Kab. Bondowoso	1	15	84	4	-	-	-	4	-	-	-	2	-	2	84	1	-	2	-	
17	Kab. Sampang	1	8	1.149	3	1.019	-	-	3	131	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
18	Kab. Lamongan	1	8	85	4	71	-	-	1	14	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggung-jawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
19	Kab. Gresik	1	9	143	5	-	-	-	2	45	-	-	1	-	1	98	-	-	-	-	
20	Kab. Pacitan	1	13	66	7	66	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kab. Jember	1	18	130	8	-	-	-	5	74	-	-	3	-	2	56	-	-	-	-	
22	Kab. Magetan	1	13	3.501	8	250	-	-	2	132	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3.119	
23	Kab. Mojokerto	1	17	1.582	9	264	-	-	2	63	-	-	3	-	1	45	-	-	2	1.210	
24	Kab. Probolinggo	1	17	475	7	18	-	-	3	16	-	-	4	-	2	334	-	-	1	107	
25	Kab. Trenggalek	1	4	1.000	2	63	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	926	
26	Kab. Situbondo	1	9	51	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51	1	-	-	-	
12	**Provinsi Banten**	**4**	**46**	**23.367**	**23**	**3.483**	**5**	**1.547**	**4**	**512**	**4**	**604**	**-**	**-**	**6**	**903**	**3**	**16.135**	**1**	**184**	
1	Prov. Banten	1	8	17.358	-	-	5	1.223	1	6	-	-	-	-	-	-	2	16.129	-	-	
2	Kab. Serang	1	13	1.136	8	501	-	-	2	272	1	148	-	-	1	31	-	-	1	184	
3	Kab. Tangerang	1	18	3.587	9	2.136	-	-	1	137	2	436	-	-	5	872	1	5	-	-	
4	Kab. Pandeglang	1	7	1.287	6	846	-	324	-	96	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	**Provinsi Bali**	**4**	**33**	**14.164**	**17**	**3.763**	**1**	**1.313**	**4**	**500**	**2**	**1.201**	**3**	**-**	**2**	**586**	**3**	**4.951**	**1**	**1.851**	
1	Prov. Bali	1	7	3.034	4	1.472	1	1.313	1	175		-		-	1	74	-	-		-	
2	Kab. Jembrana	1	10	1.656	6	1.367		-	1	179		-	2	-		-	1	109		-	
3	Kab. Buleleng	1	8	7.269	3	690	-	-	1	113	1	1.198	1	-	1	512	1	4.756	-	-	
4	Kota Denpasar	1	8	2.206	4	234	-	-	1	33	1	2	-	-	-	-	1	86	1	1.851	
14	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**2**	**15**	**11.452**	**3**	**798**	**-**	**-**	**2**	**244**	**3**	**1.983**	**1**	**-**	**2**	**695**	**2**	**156**	**2**	**7.575**	
1	Kota Bima	1	10	11.213	2	763	-	-	1	214	2	1.969	1	-	1	686	2	156	1	7.426	
2	Kab. Lombok Timur	1	5	239	1	36	-	-	1	30	1	14	-	-	1	10	-	-	1	149	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggung-jawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
15	**Provinsi Kalimantan Barat**	**7**	**140**	**104.025**	**63**	**18.539**	**5**	**3.794**	**22**	**7.147**	**14**	**19.944**	**19**	**-**	**4**	**7.881**	**4**	**20.022**	**9**	**26.697**	
1	Prov. Kalbar	1	24	2.125	8	737	-	-	4	753	1	253	9	-	2	382	-	-	-	-	
2	Kab. Bengkayang (Pem. Lanjutan)	1	8	9.656	1	130	-	-	-	-	7	9.526	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kab. Ketapang	1	16	30.043	10	3.215	-	-	1	196	-	5.631	2	-	1	7.341	1	13.079	1	580	
4	Kab. Sekadau	1	41	10.727	16	3.013	-	-	12	1.944	4	2.653	5	-	1	141	2	2.975	1	-	
5	Kab. Sintang	1	13	5.047	7	1.035	-	-	1	5	1	39	3	-	-	-	1	3.968	-	-	
6	Kab. Bengkayang	1	15	3.733	9	738	3	2.313	1	191	-	-	-	-	-	17	-	-	2	474	
7	Kab. Melawi	1	23	42.694	12	9.671	2	1.481	3	4.058	1	1.841	-	-	-	-	-	-	5	25.643	
16	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**4**	**45**	**8.599**	**21**	**6.950**	**-**	**-**	**10**	**660**	**-**	**-**	**4**	**-**	**4**	**843**	**-**	**-**	**6**	**147**	
1	Kab. Barito Selatan	1	14	1.586	6	909	-	-	5	469	-	-	1	-	1	60	-	-	1	147	
2	Kab. Barito Timur	1	14	2.588	6	1.978	-	-	4	137	-	-	1	-	2	473	-	-	1	-	
3	Kab. Kotawaringin Timur	1	7	394	4	341	-	-	1	54	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
4	Kab. Kapuas	1	10	4.031	5	3.722	-	-	-	-	-	-	1	-	1	309	-	-	3	-	
17	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**5**	**66**	**14.683**	**22**	**1.587**	**3**	**207**	**18**	**836**	**1**	**613**	**4**	**-**	**5**	**623**	**4**	**2.221**	**9**	**8.596**	
1	Kab. Barito Kuala	1	19	2.173	12	1.136	-	-	3	77	-	-	-	-	1	75	1	801	2	84	
2	Kab. Hulu Sungai Utara	1	12	577	4	87	-	-	4	213	-	-	3	-	-	-	-	-	1	276	
3	Kab. Tapin	1	13	1.865	3	350	-	-	4	456	-	-		-	3	411	2	359	1	288	
4	Kab. Tanah Laut	1	9	6.886	3	13	2	175	-	-	-	-	1	-	1	137	1	1.061	1	5.501	
5	Kab. Tanah Bumbu	1	13	3.182	-	-	1	32	7	90	1	613	-	-	-	-	-	-	4	2.447	
18	**Provinsi Kalimantan Timur**	**3**	**51**	**353.387**	**16**	**50.438**	**4**	**1.812**	**11**	**24.481**	**-**	**-**	**6**	**-**	**3**	**1.894**	**3**	**217.168**	**8**	**57.594**	
1	Kab. Kutai Kartanegara	1	27	304.105	8	35.518	-	-	7	23.277	-	-	5	-	1	556	2	210.862	4	33.891	
2	Kab. Kutai Timur	1	20	19.438	8	14.920	4	1.812	4	1.204	-	-	1	-	2	1.338	-	-	1	165	
3	Bansos Daerah Kab. Kutai Timur	1	4	29.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.306	3	23.538	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggung-jawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
19	**Provinsi Sulawesi Utara**	**3**	**25**	**5.414**	**7**	**1.192**	**1**	**739**	**6**	**1.340**	**1**	**1.261**	**2**	**-**	**2**	**272**	**3**	**473**	**3**	**137**	
1	Prov. Sulawesi Utara	1	8	2.021	2	293	1	739	3	857	-	-	-	-	-	-	2	133	-	-	
2	Kab. Minahasa Selatan	1	8	2.107	3	496	-	-	2	338	1	1.261	-	-		-	-	-	2	12	
3	Kota Bitung	1	9	1.285	2	402	-	-	1	146	-	-	2	-	2	272	1	340	1	125	
20	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**3**	**38**	**14.524**	**10**	**2.239**	**-**	**-**	**3**	**171**	**6**	**4.489**	**6**	**-**	**7**	**2.235**	**4**	**5.189**	**2**	**200**	
1	Kab. Tojo Una-una	1	17	2.206	5	106	-	-	1	32	3	1.749	3	-	3	302	1	18	1	-	
2	Kab. Morowali	1	14	11.294	3	1.935	-	-	1	104	2	2.510	3	-	1	1.374	3	5.172	1	200	
3	Kab. Toli-toli	1	7	1.024	2	198	-	-	1	36	1	230	-	-	3	560	-	-	-	-	
21	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**6**	**123**	**183.481**	**50**	**17.328**	**2**	**391**	**15**	**4.902**	**13**	**49.011**	**3**	**-**	**8**	**1.893**	**12**	**5.094**	**20**	**104.860**	
1	Prov. Sulawesi Tenggara	1	15	44.368	6	1.028	-	-	2	1.303	4	38.494	1	-	-	-	-	-	2	3.542	
2	Kota Bau-Bau	1	13	11.305	2	60	-	-	1	8	3	990	-	-	1	246	2	248	4	9.752	
3	Kab. Buton	1	18	93.374	4	951	1	51	1	23	1	205	1	-	1	68	4	3.379	5	88.696	
4	Kab. Kolaka	1	19	7.184	9	1.569	1	340	3	616	1	1.037	-	-	1	418	2	539	2	2.666	
5	Kab. Muna	1	21	17.380	4	10.546	-	-	3	2.543	1	3.625	1	-	3	201	3	423	6	42	
6	Kota Kendari	1	37	9.869	25	3.174	-	-	5	409	3	4.660	-	-	2	960	1	505	1	162	
22	**Provinsi Gorontalo**	**2**	**37**	**36.374**	**11**	**10.558**	**-**	**-**	**5**	**375**	**3**	**6.421**	**3**	**-**	**4**	**1.144**	**6**	**2.267**	**5**	**15.609**	
1	Dinas PU Prov.Gorontalo	1	12	4.374	2	562	-	-	2	311	-	-	2	-	3	1.131	1	61	2	2.309	
2	Kota Gorontalo	1	25	32.000	9	9.996	-	-	3	64	3	6.421	1	-	1	13	5	2.206	3	13.300	
23	**Provinsi Maluku**	**3**	**21**	**7.569**	**6**	**991**	**2**	**292**	**5**	**666**	**1**	**4.493**	**3**	**-**	**1**	**27**	**-**	**-**	**3**	**1.099**	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	8	1.882	2	462	1	182	2	139	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1.099	
2	Kab. Kepulauan Aru	1	7	5.199	2	385	-	-	1	321	1	4.493	2	-	-	-	-	-	1	-	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
3	Kota Ambon	1	6	489	2	145	1	110	2	207	-	-	-	-	1	27	-	-	-	-	
24	**Provinsi Maluku Utara**	**6**	**147**	**51.349**	**61**	**20.205**	**4**	**966**	**45**	**4.789**	**2**	**522**	**3**	**-**	**20**	**11.862**	**4**	**1.384**	**8**	**11.622**	
1	Prov. Maluku Utara	1	35	16.825	15	4.124	-	-	10	471	-	-	-	-	8	2.075	1	460	1	9.695	
2	Kab. Halmahera Tengah	1	8	2.040	1	619	1	109	5	314	-	-	-	-	-	-	-	-	1	998	
3	Kab. Halmahera Utara	1	24	13.268	14	5.749	1	573	3	244	-	-	-	-	5	6.665	-	-	1	36	
4	Kab. Sula	1	31	13.182	7	8.865	1	250	15	3.046	-	-	3	-	1	47	3	924	1	50	
5	Kota Tidore Kepulauan	1	25	4.067	10	313	1	34	7	299	2	522	-	-	2	2.446	-	-	3	453	
6	Kota Ternate	1	24	1.968	14	535	-	-	5	414	-	-	-	-	4	628	-	-	1	391	
	Jumlah Belanja	124	1,556	1.160.320	670	235.953	44	17.095	305	67.478	57	107.778	109	-	133	50.781	68	303.714	170	377.522	
	BELANJA PILKADA																				
1	**Provinsi Sumatera Utara**	**1**	**10**	**7.281**	**5**	**688**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**6.219**	**1**	**-**	**1**	**127**	**-**	**-**	**2**	**247**	
1	Prov. Sumatera Utara	1	10	7.281	5	688	-	-	-	-	1	6.219	1	-	1	127	-	-	2	247	
2	**Provinsi Sumatera Selatan**	**6**	**59**	**26.492**	**23**	**12.777**	**-**	**-**	**10**	**2.502**	**-**	**-**	**16**	**-**	**4**	**620**	**-**	**-**	**6**	**10.594**	
1	Kab. Muara Enim	1	8	101	2	92	-	-	2	9	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	
2	Kota Lubuk Linggau	1	5	588	1	588	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	
3	Kota Prabumulih	1	9	643	3	592	-	-	2	18	-	-	3	-	1	33	-	-	-	-	
4	Kota Palembang	1	7	411	4	357	-	-	1	22	-	-	1	-	1	32	-	-	-	-	
5	Kota Pagar Alam	1	19	19.189	7	10.676	-	-	3	431	-	-	5	-	2	555	-	-	2	7.527	
6	Kab. Banyuasin	1	11	5.560	6	471	-	-	2	2.022	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3.067	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggung-jawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
3	**Provinsi Jawa Barat**	**5**	**53**	**8.669**	**11**	**321**	**-**	**-**	**7**	**574**	**1**	**1.091**	**14**	**-**	**3**	**223**	**-**	**-**	**17**	**6.460**	
1	Prov. Jawa Barat	1	14	4.121	4	72	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6	4.049	
2	Kota Cirebon	1	8	1.528	3	189	-	-	1	149	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1.189	
3	Kab. Sumedang	1	2	11	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kota Tasikmalaya	1	11	407	-	-	-	-	3	17	-	-	2	-	3	223	-	-	3	167	
5	Kab. Purwakarta	1	18	2.603	2	49	-	-	3	408	1	1.091	7	-	-	-	-	-	5	1.055	
4	**Provinsi Jawa Timur**	**4**	**52**	**15.551**	**12**	**153**	**-**	**-**	**10**	**4.000**	**6**	**10.451**	**14**	**-**	**4**	**60**	**-**	**-**	**6**	**886**	
1	Kab. Bondowoso	1	14	4.827	2	-	-	-	3	3.941	-	-	4	-	1	3	-	-	4	883	
2	Kab. Jombang	1	12	146	6	136	-	-	2	7	-	-	3	-	-	-	-	-	1	3	
3	Kab. Lumajang	1	13	9.851	3	16	-	-	1	53	4	9.782	4	-	-	-	-	-	1	-	
4	Kota Malang	1	13	726	1	-	-	-	4	-	2	670	3	-	3	57	-	-	-	-	
5	**Provinsi Banten**	**1**	**13**	**81**	**5**	**65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**1**	**14**	**-**	**-**	**5**	**2**	
1	Kab. Tangerang	1	13	81	5	65	-	-	-	-	-	-	2	-	1	14	-	-	5	2	
6	**Provinsi Bali**	**1**	**19**	**1.276**	**1**	**-**	**-**	**-**	**3**	**8**	**-**	**-**	**4**	**-**	**4**	**548**	**-**	**-**	**7**	**720**	
1	Kab. Gianyar	1	19	1.276	1	-	-	-	3	8	-	-	4	-	4	548	-	-	7	720	
7	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**1**	**19**	**596**	**6**	**170**	**-**	**-**	**3**	**37**	**1**	**265**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**124**	
1	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	19	596	6	170	-	-	3	37	1	265	3	-	-	-	-	-	6	124	
8	**Provinsi Nusa tenggara Timur**	**1**	**11**	**123**	**2**	**21**	**-**	**-**	**3**	**46**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**56**	
1	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	11	123	2	21	-	-	3	46	-	-	5	-	-	-	-	-	1	56	

No	Obyek Pemeriksaan	Jml LHP	Total		*Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:*																Ket
					Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Uang yang Belum/tidak Dipertanggungjawabkan		Administrasi		Ketidakhematan /Pemborosan		Ketidakefektifan		Lain-lain		
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
9	**Prov Kalimantan Barat**	**2**	**41**	**725**	**11**	**249**	**-**	**-**	**4**	**57**	**-**	**-**	**13**	**-**	**5**	**181**	**2**	**208**	**6**	**30**	
1	Prov. Kalbar	1	30	638	10	235	-	-	4	57	-	-	8	-	2	108	2	208	4	29	
2	Kota Singkawang	1	11	87	1	14	-	-	-	-	-	-	5	-	3	72	-	-	2	1	
10	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**1**	**23**	**2.876**	**5**	**1.400**	**-**	**-**	**4**	**136**	**-**	**-**	**8**	**-**	**3**	**1.095**	**1**	**206**	**2**	**39**	
1	Prov. Sulawesi Selatan	1	23	2.876	5	1.400	-	-	4	136	-	-	8	-	3	1.095	1	206	2	39	
11	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**1**	**13**	**4.439**	**5**	**1.388**	**-**	**-**	**1**	**26**	**1**	**5**	**2**	**-**	**2**	**136**	**1**	**2.662**	**1**	**220**	
1	Prov. Sulawesi Tenggara	1	13	4.439	5	1.388	-	-	1	26	1	5	2	-	2	136	1	2.662	1	220	
	Jumlah Pilkada	24	313	68.109	86	17.232	-	-	45	7.388	10	18.032	82	-	27	3.003	4	3.076	59	19.379	
Jumlah Belanja dan Pilkada		**148**	**1.869**	**1.228.428**	**756**	**253.185**	**44**	**17.095**	**350**	**74.865**	**67**	**125.809**	**191**	**-**	**160**	**53.784**	**72**	**306.789**	**229**	**396.901**	**-**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 16

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
PDTT atas Manajemen Hutan dan Pembangunan HTI

(dalam juta rupiah)

No.	Klasifikasi Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	%
Manajemen Hutan				
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:				
I	**Kerugian Negara/Daerah**	**1**	**300**	**0,09**
1	Kekurangan volume (kelebihan pembayaran)	1	300	
II	**Kekurangan Penerimaan**	**34**	**164.902**	**51,61**
	USD		25.668	
2	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	30	39.245	
	USD		1.965	
3	Piutang PNBP Berpotensi tidak tertagih (Macet)	4	125.657	
	USD		23.703	
III	**Administrasi**	**7**	**-**	**-**
1	Pelaksanaan lelang secara proforma	1	-	
2	Kelemahan design sistem/kebijakan yang tidak konsisten dan /atau bertentangan dengan kebijakan yang lain	6	-	
IV	**Indikasi Tindak Pidana**	**11**	**64.541**	**20,20**
			502	
4	Indikasi Tindak Pidana Korupsi	1	1.998	
5	Indikasi Tindak Pidana Kehutanan	10	62.543	
			502	
V	**Kerusakan Lingkungan**	**5**	**-**	**-**
VI	**Lain-lain**	**12**	**-**	**-**
	Sub Jumlah (a)	**70**	**229.743**	**71,91**
	USD		**26.170**	
Pembangunan HTI				
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:				
I	**Kekurangan Penerimaan**	**1**	**89.759**	**28,09**
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	1	89.759	
II	**Lain-lain**	**3**	**-**	**-**
	Sub Jumlah (b)	**4**	**89.759**	**28,09**
	Jumlah (a+b)	**74**	**319.503**	**100,00**
	USD		**26.170**	

*) persentase hanya dari nilai rupiah
**) Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 17

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Manajemen Hutan dan Pembangunan HTI

(dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LHP	*Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:*													
			Total Temuan		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		Indikasi Tindak Pidana		Kerusakan Ling-kungan		Lain-lain	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Manajemen Hutan																
1	Manajemen Hutan di DKI dan Bogor	1	13	2.922	1	300	3	2.622	4	-	-	-	-	-	5	-
2	Manajemen Hutan di Kalimantan Tengah	1	12	41.903	-	-	6	41.903	-	-	2	-	1	-	3	-
				6.131				6.131								
3	Manajemen Hutan di Kalimantan Timur	1	10	6.261	-	-	7	6.261	1	-	-	-	-	-	2	-
	USD			724				724								
4	Manajemen Hutan di Kalimantan Barat	1	16	72.851	-	-	9	48.457	-	-	5	24.394	-	-	2	-
	USD			10.127				10.033				95				
5	Manajemen Hutan di Riau	1	19	105.806	-	-	9	65.659	2	-	4	40.147	4	-	-	-
	USD			9.188				8.781				407				
Jumlah (a)		**5**	**70**	**229.743**	**1**	**300**	**34**	**164.902**	**7**	**-**	**11**	**64.541**	**5**	**-**	**12**	**-**
USD				**26.170**		**-**		**25.668**		**-**		**502**		**-**		**-**
Pembangunan HTI																
6	Pembangunan HTI	1	4	89.759	-	-	1	89.759	-	-	-	-	-	-	3	-
Jumlah (b)		**1**	**4**	**89.759**	**-**	**-**	**1**	**89.759**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**
Jumlah (a+b)		**6**	**74**	**319.503**	**1**	**300**	**35**	**254.661**	**7**	**-**	**11**	**64.541**	**5**	**-**	**15**	**-**
	USD			**26.170**		**-**		**25.668**		**-**		**502**		**-**		**-**

*) Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 18

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
PDTT atas Pengelolaan Pertambangan

(dalam juta rupiah)

No.	Klasifikasi Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta rupiah) (ribu USD)	%
	Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
	I. Kelemahan SPI	**86**	**-**	**-**
1	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4	-	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/ Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	11	-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa	57	-	
4	Entitas tidak memiliki SOP yang formal	11	-	
5	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal	2	-	
6	Struktur Pengendalian yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	-	
	II. Indikasi Tindak Pidana	**9**	**966**	**0,04**
	USD		**38,03**	
1	Indikasi Tindak Pidana Kehutanan	8	966	
	USD		38,03	
2	Indikasi Tindak Pidana Khusus Lainnya	1	-	
	III. Kekurangan Penerimaan	**42**	**2.555.253**	**94,85**
	USD		**775.578,58**	
1	Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima /disetor ke Kas Negara/ Daerah	42	2.555.253	
	USD		775.578,58	
	V. Potensi Kerugian Negara	**9**	**127.839**	**4,75**
	USD		**3.183,50**	
1	Jaminan Pelaksanaan pekerjaan tidak ada atau tidak disesuaikan dengan adendum	9	127.839	
	USD		3.183,50	
	IV. Lain-lain	**10**	**9.814**	**0,36**
	VI. Kerusakan Lingkungan	**56**		
			-	-
1	Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan	56		
			-	
	Jumlah	**212**	**2.693.871**	**100**
	USD		**778.800,11**	

*) Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Pengelolaan Pertambangan Batubara

Lampiran 19

(dalam juta rupiah dan ribu USD)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LHP	*Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:*													
			Total Temuan		Kelemahan SPI		Indikasi Tindak Pidana		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Negara		Lain-lain		Kerusakan Lingkungan	
			jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai
Provinsi Kalimantan Selatan		**8**	**52**	**215.686**	**14**	**-**	**1**	**-**	**13**	**146.019**	**2**	**69.667**	**3**	**-**	**19**	**-**
1	Kab Tapin	1	10	11.419	1	-	-	-	2	11.419	1	-	2	-	4	-
2	Kab Tanah Bumbu	1	14	60.212	5	-	1	-	3	60.212	-	-	1	-	4	-
3	Kab Tanah Laut	1	8	99.294	2	-	-	-	2	29.627	1	69.667	-	-	3	-
4	Kab Tabalong	1	1	168	-	-	-	-	1	168	-	-	-	-	-	-
5	Kab Kotabaru	1	6	3.746	1	-	-	-	2	3.746	-	-	-	-	3	-
6	Kab Hulu Sungai Selatan	1	3	96	1	-	-	-	1	96	-	-	-	-	1	-
7	Kab Banjar	1	9	40.747	4	-	-	-	1	40.747	-	-	-	-	4	-
8	Kab Balangan	1	1	4	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Tengah		**8**	**52**	**18.291**	**22**	**-**	**3**	**-**	**12**	**18.291**	**4**	**-**	**1**	**-**	**10**	**-**
9	Kab. Barito Utara	1	14	12.704	6	-	1	-	3	12.704	1	-	-	-	3	-
10	Kab. Barito Selatan	1	4	512	1	-	-	-	1	512	1	-	1	-	-	-
11	Kab. Barito Timur	1	14	4.541	5	-	1	-	2	4.541	1	-	-	-	5	-
12	Kab. Gunung Mas	1	10	249	4	-	1	-	2	249	1	-	-	-	2	-
13	Kab. Kapuas	1	2	107	1	-	-	-	1	107	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Kotawaringin Barat	1	2	76	1	-	-	-	1	76	-	-	-	-	-	-
15	Prov. Kalimantan Tengah	1	2	99	1	-	-	-	1	99	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Seruyan	1	4	3	3	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Provinsi Kalimantan Timur		**8**	**54**	**66.223**	**26**	**-**	**2**	**-**	**9**	**13.295**	**1**	**52.860**	**3**	**69**	**13**	**-**
				USD 5.849,49		-		-		USD 5.849,49		-		-		-
17	Kota Tarakan	1	2	5	-	-	-	-	1	5	-	-	1	-	-	-
18	Kab. Kutai Kartanegara	1	10	59.103	3	-	-	-	1	6.244	1	52.860	-	-	5	-
				USD 2.250,34		-		-		USD 2.250,34		-		-		-
19	Kota Samarinda	1	2	386	1	-	-	-	1	386	-	-	-	-	-	-
				USD 329,99		-		-		USD 329,99		-		-		-

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LHP	*Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:*													
			Total Temuan		Kelemahan SPI		Indikasi Tindak Pidana		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Negara		Lain-lain		Kerusakan Lingkungan	
			jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai
20	Kab. Paser	1	9	1.158	3	-	-	-	1	1.158	-	-	-	-	5	-
21	Kab. Nunukan	1	5	8	3	-	-	-	1	8	-	-	1	-	-	-
22	Kab. Kutai Timur	1	11	3.428	8	-	2	-	1	3.428	-	-	-	-	-	-
23	Kab. Kutai Barat	1	3	142	2	-	-	-	1	142	-	-	-	-	-	-
24	Kab. Berau	1	12	1.994	6	-	-	-	2	1.925	-	-	1	69	3	-
				USD 3.269,16		-		-		USD 3.269,16		-		-		-
Provinsi Sumatera Selatan		**5**	**41**	**16.965**	**21**	**-**	**2**	**966**	**5**	**6.254**	**-**	**-**	**3**	**9.745**	**10**	**-**
				USD 38,03		**-**		**USD 38,03**		**$0,00**		**-**		**USD 0,00**		**-**
25	Kab Lahat	1	10	973	7	-	1	966	1	8	-	-	-	-	2	-
				38		-		USD 38,03								
26	Kab Muara Enim	1	9	9.428	5	-	-	-	1	772	-	-	1	8.655	2	-
27	Kab Musi Banyuasin	1	10	3.924	3	-	1	-	1	2.903	-	-	1	1.021	4	-
28	Kab Musi Rawas	1	8	2.548	5	-	1	-	1	2.548	-	-	-	-	1	-
29	Kab Ogan Komering Ulu	1	4	92	1	-	-	-	1	24	-	-	1	69	1	-
Jumlah (a)		**29**	**199**	**317.165**	**83**	**-**	**8**	**966**	**39**	**183.859**	**7**	**122.526**	**10**	**9.814**	**52**	**-**
USD				**5.887,52**		**-**		**38,03**		**5.849,49**		**-**		**-**		**-**
Dep ESDM dan Kontraktor PKP2B		**1**	**12**	**2.312.468**	**3**	**-**	**1**	**-**	**3**	**2.307.740**	**1**	**4.728**	**-**	**-**	**4**	**-**
				USD 771.796,92		**-**		**-**		**USD 768.613,42**		**USD 3.183,50**		**USD 0,00**		**-**
Jumlah (b)		**1**	**12**	**2.312.468**	**3**	**-**	**1**	**-**	**3**	**2.307.740**	**1**	**4.728**	**-**	**-**	**4**	**-**
USD				**771.796,92**		**-**		**-**		**768.613,42**		**3.183,50**		**-**		**-**

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LHP	*Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:*													
			Total Temuan		Kelemahan SPI		Indikasi Tindak Pidana		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Negara		Lain-lain		Kerusakan Lingkungan	
			jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai	jml kasus	Nilai
Temuan di Luar Parsial																
1	Pemegang Kuasa Pertambangan kurang Membayar Iuran Tetap dan Royalti		-	63.654	-	-	-	-	-	63.654	-	-	-	-	-	-
				USD 1.115,67		-		-		USD 1.115,67		-		-		-
2	PT Bukit Asam Melakukan Kegiatan Eksploitasi Batubara di Kawasan Hutan Menyalahi Ketentuan		1	584	-	-	-	-	-	-	1	584	-	-	-	-
Jumlah (c)			**1**	**64.238**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.654**	**1**	**584**	**-**	**-**	**-**	**-**
USD				**1.115,67**		**-**		**-**		**1.115,67**		**-**		**-**		**-**
Jumlah (a+b+c)		**30**	**212**	**2.693.871**	**86**	**-**	**9**	**966**	**42**	**2.555.253**	**9**	**127.839**	**10**	**9.814**	**56**	**-**
USD				**778.800,11**		**-**		**38,03**		**775.578,58**		**3.183,50**		**-**		**-**

*) Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 20

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
PDTT atas Operasional PDAM

Klasifikasi Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
Kerugian Daerah/Perusahaan			
Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1	17	-
Kelebihan pembayaran	15	38.229	4,51
Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	335	0,04
Keterlambatan pemebayaran kewajiban yang berakibat denda	4	26.078	3,08
Lain-lain Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan	4	569	0,07
Sub Total	**28**	**65.228**	**7,70**
			-
Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan			**-**
Potensi kehilangan pendapatan	29	379.085	44,72
Pinjaman berpotensi tidak tertagih	2	48.642	5,74
Lain-Lain Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	6	3.449	0,41
Sub Total	**37**	**431.177**	**50,87**
			-
Kekurangan Penerimaan			**-**
Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	28	256.444	30
			-
Administrasi			**-**
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah)	7	-	-
Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN/Daerah	11	-	-
Pembentukan cadangan piutang belum sesuai ketentuan	3	-	-
Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	-	-
Lain-lain Administrasi	17	-	-
Sub Total	**39**	**-**	**-**
			-
Ketidakhematan dan Inefisiensi			**-**
Pemborosan keuangan negara/perusahaan	41	59.650	7,04
Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya	2	8.575	1,01
Sub Total	**43**	**68.224**	**8,05**
			-
Ketidakefektifan			**-**
Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempenga-ruhi pencapaian tujuan organisasi	8	2.548	0,30
Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	22	9.374	1,11
Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	4	850	0,10
lain-lain ketidakefektifan	**5**	**13.806**	**1,63**
Sub Total	**39**	**26.577**	**3,14**
Total	**214**	**847.650**	**100,00**

*) Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 21

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional PDAM

(dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :*										
				Kerugian Daerah/ Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Adminis-trasi	Ketidakhematan dan Inefisiensi		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	PDAM Kota Padang Sumatera Barat	15	48.632	4	827	2	6.484	1	253	5	3	41.068	-	-
2	PDAM Tirta Musi Sumatera Selatan	16	63.422	5	2.211	2	52.191	2	32	3	1	8.575	3	413
3	PAM Jaya DKI Jakarta	13	390.177	1	34.039	4	117.376	2	238.762	5	1	-	-	-
4	PDAM Kabupaten Bogor Jawa Barat	7	13.408	1	85	-	-	3	655	1	-	-	2	12.668
5	PDAM Kota Surabaya Jawa Timur	10	147.921	-	-	3	147.667	3	173	1	1	19	2	62
6	PDAM Kota Madiun Jawa Timur	8	2.452	-	-	1	3	-	5	1	4	2.444	2	-
7	PDAM Kota Kediri Jawa Timur	12	2.922	-	-	1	92	3	133	2	3	1.864	3	832
8	PDAM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur	17	1.195	-	-	1	13	3	451	4	3	231	6	500
9	PDAM Kabupaten Malang Jawa Timur	18	12.523	4	1.556	1	435	3	1.721	1	8	7.813	1	998
10	PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang	8	3.170	1	4	3	1.118	-	-	1	1	521	2	1.526
11	PDAM Bandarmasih	9	31.288	1	12	1	30.377	-	-	1	1	49	5	850
12	PDAM Palangkaraya	9	620	-	-	4	559	-	-	2	2	61	1	-
13	PDAM Kab. Bolaang Mongondow	11	20.849	2	8.931	1	8.136	1	118	1	2	916	4	2.748
14	PDAM Kab. Minahasa	13	22.079	2	17.147	2	2.706	1	23	2	3	704	3	1.499
15	PDAM Kota Bitung	13	23.321	-	-	2	5.295	2	13.365	2	4	1.540	3	3.121
16	PDAM Kab. Kolaka	18	4.289	4	121	4	3.332	2	354	5	3	482	-	-
17	PDAM Kota Kendari	17	59.382	3	294	5	55.390	2	399	2	3	1.938	2	1.361
	Jumlah	**214**	**847.650**	**28**	**65.228**	**37**	**431.177**	**28**	**256.444**	**39**	**43**	**68.224**	**39**	**26.577**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 22

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan
PDTT atas Operasional BPD

Klasifikasi Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	%
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
Kerugian Daerah/Perusahaan			
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	18	-
Pengembalian pinjaman macet	11	25.191	5,14
Pembebanan biaya tidak sesuai atau melebihi ketentuan	6	3.340	0,68
lain-Lain Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	7	2.867	0,58
Sub Total	**25**	**31.416**	**6,41**
			-
Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan			**-**
Potensi kehilangan pendapatan	5	4.461	0,91
Piutang berpotensi tidak tertagih	12	215.973	44,05
Lain-Lain Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	5	226.802	46,26
Sub Total	**22**	**447.235**	**91,22**
			-
Kekurangan Penerimaan			**-**
Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak atau terlambat dipungut/diterima/disetor ke kas Negara/Daerah	6	10.611	2,16
Lain-lain Kekurangan Penerimaan	3	283	0,06
Sub Total	**9**	**10.894**	**2,22**
			-
Administrasi			**-**
Proses Pengadaan Barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian)	2	-	-
Pengelolaan aset tidak tertib	1	-	-
Pemberian kredit tidak sesuai ketentuan	13	-	-
Lain-lain Administrasi	1	-	-
Sub Total	**17**	**-**	**-**
			-
Ketidakefektifan			**-**
Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	311	0,06
lain-lain ketidakefektifan	3	421	0,09
Sub Total	**4**	**732**	**0,15**
Total Temuan	**77**	**490.277**	**100,00**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 23

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT atas Operasional BPD

(dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Total		*Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :*								
				Kerugian Negara/ Daerah/ Perusa-haan		Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Peneri-maan		Administrasi	Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	PT Bank BPD Provinsi Nanggro Aceh Darusalam	11	17.589	1	474	4	16.263	4	552	-	2	300
2	PT Bank BPD Nagari Sumatera Barat	16	20.279	-	-	3	20.279	-	-	13	-	-
3	PT Bank DKI Jakarta	12	148.770	7	16.168	2	122.759	3	9.842	-	-	-
4	PT Bank BPD Provinsi Jabar Banten	13	208.627	9	8.506	1	200.000	1	-	1	1	121
5	BPD Provinsi Nusa Tenggara Barat	4	8.892	2	1.135	2	7.757	-	-	-	-	-
6	BPD Provinsi Sulawesi Tenggara	18	83.210	5	2.223	10	80.177	1	500	1	1	311
7	BPD Provinsi Sulawesi Selatan	3	2.910	1	2.910	-	-	-	-	2	-	-
	Jumlah	**77**	**490.277**	**25**	**31.416**	**22**	**447.235**	**9**	**10.894**	**17**	**4**	**732**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

Lampiran 24

DAFTAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	**Departemen Pertahanan**	s.d. Semester I TA 2008	56	3.486.701	138	3.486.701	73	1.838.051	32	698.082	33	950.568
				USD 1.501,50		USD 1.501,50		USD 1.501,50		-		-
				AUD 798,69		AUD 798,69		AUD 798,69		-		-
		Updated Semester I TA 2008	56	3.486.701	138	3.486.701	73	1.838.051	32	698.082	33	950.568
				USD 1.501,50		USD 1.501,50		USD 1.501,50		-		-
				AUD 798,69		AUD 798,69		AUD 798,69		-		-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-		-		-		-		-
				-		-		-		-		-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**56**	**3.486.701**	**138**	**3.486.701**	**73**	**1.838.051**	**32**	**698.082**	**33**	**950.568**
				USD 1.501,50		**USD 1.501,50**		**USD 1.501,50**		**-**		**-**
				AUD 798,69		**AUD 798,69**		**AUD 798,69**		**-**		**-**
2	**Mabes TNI**	s.d. Semester I TA 2008	36	681.245	79	681.245	71	681.245	8	-	-	-
		Updated Semester I TA 2008	36	681.245	79	681.245	71	681.245	8	-	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**36**	**681.245**	**79**	**681.245**	**71**	**681.245**	**8**	**-**	**-**	**-**
3	**TNI AD**	s.d. Semester I TA 2008	146	311.803	288	311.803	271	290.412	17	21.391	-	-
		Updated Semester I TA 2008	146	311.803	288	311.803	271	290.412	17	21.391	-	-
		Semester II TA 2008	57	152.657	139	152.657	42	17.283	2	-	95	135.374
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**203**	**464.459**	**427**	**464.459**	**313**	**307.695**	**19**	**21.391**	**95**	**135.374**
4	**TNI AU**	s.d. Semester I TA 2008	51	110.652	117	110.652	117	110.652	-	-	-	-
		Updated Semester I TA 2008	51	110.652	117	110.652	117	110.652	-	-	-	-
		Semester II TA 2008	12	29.076	36	29.076	32	27.035	-	-	4	2.041
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**63**	**139.727**	**153**	**139.727**	**149**	**137.687**	**-**	**-**	**4**	**2.041**
5	**TNI AL**	s.d. Semester I TA 2008	34	36.099	65	36.099	19	6.727	6	18.711	40	10.661
		Updated Semester I TA 2008	34	36.099	65	36.099	19	6.727	6	18.711	40	10.661
		Semester II TA 2008	21	224.260	31	224.260	-	-	-	-	31	224.260
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**55**	**260.358**	**96**	**260.358**	**19**	**6.727**	**6**	**18.711**	**71**	**234.921**
6	**Departemen Luar Negeri**	s.d. Semester I TA 2008	441	2.353.675	513	2.353.675	240	567.239	127	1.232.721	146	553.715
				USD 16.670,00		USD 16.670,00		USD 6.190,00		USD 10.480,00		-
				AUD 190,00		AUD 190,00		-		AUD 90,00		-
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		-		VND 32.580,00		-

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
				JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		-		-
				EUR 859,00		EUR 859,00		EUR 770,00		EUR 92,00		-
				CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 60,00		-		-
		Updated Semester I TA 2008	441	2.353.675	513	2.353.675	403	2.290.877	110	62.797	-	-
				USD 16.670,00		USD 16.670,00		USD 14.070,00		USD 2.600,00		-
				AUD 190,00		AUD 190,00		AUD 100,00		AUD 90,00		-
				VND 32.580,00		VND 32.580,00		VND 32.580,00		-		-
				JPY 2.280,00		JPY 2.280,00		JPY 1.480,00		JPY 800,00		-
				EUR 859,00		EUR 859,00		EUR 859,00		-		-
				CAD 60,00		CAD 60,00		CAD 60,00		-		-
				SGD 820,00		SGD 820,00		SGD 770,00		SGD 50,00		-
		Semester II TA 2008	64	152.218	70	141.903	16	7.870	-	-	54	134.032
				USD 1.890,00		USD 1.370,00		USD 590,00		-		USD 780,00
				-		-		-		-		-
				-		-		-		-		-
				-		-		-		-		-
				EUR 260,00		EUR 260,00		EUR 60,00		-		EUR 200,00
				-		-		-		-		-
				-		-		-		-		-
				YUN 2.810,00		YUN 2.400,00		-		-		YUN 2.400,00
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**505**	**2.505.893**	**583**	**2.495.577**	**419**	**2.298.748**	**110**	**62.797**	**54**	**134.032**
				USD 18.560,00		**USD 18.040,00**		**USD 14.660,00**		**USD 2.600,00**		**USD 780,00**
				AUD 190,00		**AUD 190,00**		**AUD 100,00**		**AUD 90,00**		**-**
				VND 32.580,00		**VND 32.580,00**		**VND 32.580,00**		**-**		**-**
				JPY 2.280,00		**JPY 2.280,00**		**JPY 1.480,00**		**JPY 800,00**		**-**
				EUR 1.119,00		**EUR 1.119,00**		**EUR 919,00**		**-**		**EUR 200,00**
				CAD 60,00		**CAD 60,00**		**CAD 60,00**		**-**		**-**
				SGD 820,00		**SGD 820,00**		**SGD 770,00**		**SGD 50,00**		**-**
				YUN 2.810,00		**YUN 2.400,00**		**-**		**-**		**YUN 2.400,00**
7	**Departemen Komunikasi dan Informatika**	s.d. Semester I TA 2008	143	2.826.169	219	2.826.169	210	601.322	33	2.224.847	-	-
		Updated Semester I TA 2008	143	2.826.169	243	2.826.169	210	601.322	33	2.224.847	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**143**	**2.826.169**	**243**	**2.826.169**	**210**	**601.322**	**33**	**2.224.847**	**-**	**-**
8	**Dewan Ketahanan Nasional**	s.d. Semester I TA 2008	10	2.446	25	2.446	-	-	-	-	25	2.446
		Updated Semester I TA 2008	10	2.446	25	2.446	-	-	-	-	25	2.446
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**10**	**2.446**	**25**	**2.446**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**2.446**
9	**Badan Intelijen Negara**	s.d. Semester I TA 2008	5	65	5	65	-	-	-	-	5	65
		Updated Semester I TA 2008	5	65	5	65	-	-	-	-	5	65
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 Lampiran 24

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**5**	**65**	**5**	**65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**65**
10	**Lembaga Sandi Negara**	s.d. Semester I TA 2008	12	-	14	-	9	-	-	-	5	-
		Updated Semester I TA 2008	12	-	14	-	9	-	-	-	5	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**12**	**-**	**14**	**-**	**9**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**
11	**Lembaga Ketahanan Nasional**	s.d. Semester I TA 2008	13	9.816	32	9.816	-	-	-	-	32	9.816
		Updated Semester I TA 2008	13	9.816	32	9.816	-	-	-	-	32	9.816
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**13**	**9.816**	**32**	**9.816**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32**	**9.816**
12	**Departemen Dalam Negeri**	s.d. Semester I TA 2008	216	4.503.635	292	4.503.635	194	190.819	48	37.768	50	4.275.049
		Updated Semester I TA 2008	216	4.503.635	292	4.503.635	194	190.819	53	47.500	45	4.265.317
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**216**	**4.503.635**	**292**	**4.503.635**	**194**	**190.819**	**53**	**47.500**	**45**	**4.265.317**
13	**Kementerian Negara PAN**	s.d. Semester I TA 2008	41	135.448	68	257	57	209	4	-	7	48
		Updated Semester I TA 2008	41	135.448	68	257	57	209	4	-	7	48
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**41**	**135.448**	**68**	**257**	**57**	**209**	**4**	**-**	**7**	**48**
14	**Sekretariat Negara**	s.d. Semester I TA 2008	126	1.468.330	149	1.468.330	91	99.273	48	1.338.183	10	30.874
		Updated Semester I TA 2008	126	1.468.330	149	1.468.330	91	99.273	48	1.338.183	10	30.874
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**126**	**1.468.330**	**149**	**1.468.330**	**91**	**99.273**	**48**	**1.338.183**	**10**	**30.874**
15	**Gelora Bung Karno**	s.d. Semester I TA 2008	34	4.450.300	35	62.291	18	11.707	16	50.584	1	-
				USD 86,40		USD 86,40		-		USD 86,40		-
		Updated Semester I TA 2008	34	4.450.300	35	62.291	18	11.707	16	50.584	1	-
				USD 86,40		USD 86,40		-		USD 86,40		-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**34**	**4.450.300**	**35**	**62.291**	**18**	**11.707**	**16**	**50.584**	**1**	**-**
				USD 86,40		USD 86,40		-		USD 86,40		-
16	**Badan Pengelola Komplek Kemayoran**	s.d. Semester I TA 2008	69	949.534	206	949.534	26	1.700	91	393.999	89	553.835

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Updated Semester I TA 2008	69	949.534	206	949.534	26	1.700	91	393.999	89	553.835
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**69**	**949.534**	**206**	**949.534**	**26**	**1.700**	**91**	**393.999**	**89**	**553.835**
17	**Taman Mini Indonesia Indah**	s.d. Semester I TA 2008	4	750	4	750	-	-	-	-	4	750
		Updated Semester I TA 2008	4	750	7	750	3	155	3	485	1	111
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**4**	**750**	**7**	**750**	**3**	**155**	**3**	**485**	**1**	**111**
18	**Badan Kepegawaian Negara**	s.d. Semester I TA 2008	18	11.249	23	11.249	14	6.084	2	-	7	5.165
		Updated Semester I TA 2008	18	11.249	23	11.249	14	6.084	2	-	7	5.165
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**18**	**11.249**	**23**	**11.249**	**14**	**6.084**	**2**	**-**	**7**	**5.165**
19	**Badan Pertanahan Nasional**	s.d. Semester I TA 2008	55	2.297.106	101	2.297.106	26	163.106	18	-	57	2.134.000
		Updated Semester I TA 2008	55	2.297.106	101	2.297.106	26	163.106	18	-	57	2.134.000
		Semester II TA 2008	10	1.178	19	1.178	-	-	-	-	19	1.178
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**65**	**2.298.284**	**120**	**2.298.284**	**26**	**163.106**	**18**	**-**	**76**	**2.135.178**
20	**Lembaga Administrasi Negara**	s.d. Semester I TA 2008	1	1.274	1	1.274	-	-	-	-	1	1.274
		Updated Semester I TA 2008	1	1.274	1	1.274	-	-	-	-	1	1.274
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**1**	**1.274**	**1**	**1.274**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1.274**
21	**Arsip Nasional Republik Indonesia**	s.d. Semester I TA 2008	5	4.033	5	4.033	-	-	-	-	5	4.033
		Updated Semester I TA 2008	5	4.033	5	4.033	-	-	-	-	5	4.033
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**5**	**4.033**	**5**	**4.033**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**4.033**
22	**KPU**	s.d. Semester I TA 2008	421	59.533	592	59.533	275	15.467	191	36.736	126	7.330
		Updated Semester I TA 2008	421	59.533	592	59.533	275	15.467	191	36.736	126	7.330
		Semester II TA 2008	7	15.174	7	15.174	7	15.174	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**428**	**74.708**	**599**	**74.708**	**282,00**	**30.641**	**191**	**36.736**	**126**	**7.330**
23	**Kementerian Koordinator Polhukam**	s.d. Semester I TA 2008	7	1.800	9	1.800	-	-	-	-	9	1.800

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Updated Semester I TA 2008	7	1.800	9	1.800	-	-	-	-	9	1.800
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**7**	**1.800**	**9**	**1.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**1.800**
24	**Departemen Hukum dan HAM**	s.d. Semester I TA 2008	99	908.371	113	7.576	50	5.679	32	330	31	1.568
		Updated Semester I TA 2008	99	908.371	113	7.576	50	5.679	32	330	31	1.568
		Semester II TA 2008	36	135.400	58	135.400	30	22.346	-	-	28	113.054
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**135**	**1.043.771**	**171**	**142.976**	**80**	**28.025**	**32**	**330**	**59**	**114.622**
25	**Kejaksaan Agung**	s.d. Semester I TA 2008	236	35.399.138	236	35.399.138	22	381.967	44	17.843.053	170	17.174.118
				USD 5,50		USD 5,50						USD 5,50
		Updated Semester I TA 2008	236	35.399.138	236	35.399.138	22	381.967	44	17.843.053	170	17.174.118
				USD 5,50		USD 5,50						USD 5,50
		Semester II TA 2008	30	93.651	30	93.651	-	-	-	-	30	93.651
				USD 5,00		USD 5,00						USD 5,00
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**266**	**35.492.789**	**266**	**35.492.789**	**22**	**381.967**	**44**	**17.843.053**	**200**	**17.267.770**
				USD 10,50		**USD 10,50**		**-**		**-**		**USD 10,50**
26	**Kepolisian Republik Indonesia**	s.d. Semester I TA 2008	251	1.086.679	443	782.947	131	55.059	68	23.890	244	703.998
			21	USD 27.560,00	25	USD 27.560,00	18	USD 7.570,00	7	USD 1.030,00	-	USD 18.960,00
				£920,00		£920,00		£610,00		£310,00		-
		Updated Semester I TA 2008	251	1.086.679	443	782.947	131	55.059	68	23.890	244	703.998
			21	USD 27.560,00	25	USD 27.560,00	18	USD 7.570,00	7	USD 1.030,00	-	USD 18.960,00
				£920,00		£920,00		£610,00		£310,00		-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**251**	**1.086.679**	**443**	**782.947**	**131**	**55.059**	**68**	**23.890**	**244**	**703.998**
			21	**USD 27.560,00**	**25**	**USD 27.560,00**	**18**	**USD 7.570,00**	**7**	**USD 1.030,00**	**-**	**USD 18.960,00**
				£920,00		**£920,00**		**£610,00**		**£310,00**		**-**
27	**Komisi Pemberantasan Korupsi**	s.d. Semester I TA 2008	10	38.491	17	5.229	4	280	4	4.449	9	500
		Updated Semester I TA 2008	10	38.491	17	5.229	4	280	4	4.449	9	500
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**10**	**38.491**	**17**	**5.229**	**4**	**280**	**4**	**4.449**	**9**	**500**
28	**Komisi Yudisial**	s.d. Semester I TA 2008	6	1.263	6	1.263	6	1.263	-	-	-	-
		Updated Semester I TA 2008	7	1.263	7	1.263	7	1.263	-	-	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**7**	**1.263**	**7**	**1.263**	**7**	**1.263**	**-**	**-**	**-**	**-**

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
29	**Komite Nasional HAM**	s.d. Semester I TA 2008	13	5.610	14	27	4	-	5	-	5	27
		Updated Semester I TA 2008	13	5.610	14	27	4	-	5	-	5	27
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**13**	**5.610**	**14**	**27**	**4**	**-**	**5**	**-**	**5**	**27**
30	**Mahkamah Agung**	s.d. Semester I TA 2008	63	166.607	81	166.607	11	1.532	8	35.169	62	129.906
		Updated Semester I TA 2008	64	166.607	81	166.607	24	10.548	36	40.608	21	115.451
		Semester II TA 2008	4	472.218	8	472.218	1	883	3	540	4	470.795
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**68**	**638.825**	**89**	**638.825**	**25**	**11.432**	**39**	**41.148**	**25**	**586.246**
31	**Mahkamah Konstitusi**	s.d. Semester I TA 2008	14	1.319	14	1.319	14	1.319	-	-	-	-
		Updated Semester I TA 2008	14	1.319	14	1.319	14	1.319	-	-	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**14**	**1.319**	**14**	**1.319**	**14**	**1.319**	**-**	**-**	**-**	**-**
32	**Setjen Majelis Permusy-awaratan Rakyat**	s.d. Semester I TA 2008	41	577.086	38	577.086	33	61.040	2	281.823	3	234.223
		Updated Semester I TA 2008	41	577.086	38	577.086	37	577.086	1	-	-	-
		Semester II TA 2008	4	250	8	250	7	220	1	30	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**45**	**577.336**	**46**	**577.336**	**44**	**577.306**	**2**	**30**	**-**	**-**
33	**Setjen Dewan Perwakilan Rakyat**	s.d. Semester I TA 2008	43	27.080	32	27.080	15	15.069	16	10.875	1	1.136
		Updated Semester I TA 2008	43	27.080	32	27.080	15	15.069	16	10.875	1	1.136
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**43**	**27.080**	**32**	**27.080**	**15**	**15.069**	**16**	**10.875**	**1**	**1.136**
34	**Setjen Dewan Perwakilan Daerah**	s.d. Semester I TA 2008	4	21.187	4	21.187	2	21.105	-	-	2	83
		Updated Semester I TA 2008	4	21.187	4	21.187	4	21.187	-	-	-	-
		Semester II TA 2008	4	226	5	226	4	33	1	193	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**8**	**21.413**	**9**	**21.413**	**8**	**21.220**	**1**	**193**	**-**	**-**
35	**PPATK**	s.d. Semester I TA 2008	6	7.764	6	7.764	1	-	1	-	4	7.764
		Updated Semester I TA 2008	6	7.764	6	7.764	1	-	1	-	4	7.764
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**6**	**7.764**	**6**	**7.764**	**1**	**-**	**1**	**-**	**4**	**7.764**

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
36	**Departemen Pertanian**	s.d. Semester I TA 2008	98	1.339.251	170	1.339.251	53	574.578	43	432.857	74	331.816
		Updated Semester I TA 2008	98	1.339.251	170	1.339.251	55	574.578	60	725.799	55	38.874
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**98**	**1.339.251**	**170**	**1.339.251**	**55**	**574.578**	**60**	**725.799**	**55**	**38.874**
37	**Departemen Kehutanan**	s.d. Semester I TA 2008	283	15.234.347	444	15.234.347	120	2.094.646	265	13.124.331	59	15.370
				USD 74.113,05		USD 74.113,05		USD 10.007,11		USD 62.702,22		USD 1.403,72
		Updated Semester I TA 2008	283	15.234.347	444	15.234.347	120	2.094.646	265	13.124.331	59	15.370
				USD 74.113,05		USD 74.113,05		USD 10.007,11		USD 62.702,22		USD 1.403,72
		Semester II TA 2008	74	319.503	110	319.503	-	-	-	-	110	319.503
				USD 26.169,50		USD 26.169,50		-		-		USD 26.169,50
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**357**	**15.553.849**	**554**	**15.553.849**	**120**	**2.094.646**	**265**	**13.124.331**	**169**	**334.873**
				USD 100.282,55		**USD 100.282,55**		**USD 10.007,11**		**USD 62.702,22**		**USD 27.573,22**
38	**Departemen Kelautan dan Perikanan**	s.d. Semester I TA 2008	52	943.210	86	943.210	21	99.618	30	407.508	35	436.084
				AUD 555,49		AUD 555,49		-		-		AUD 555,49
		Updated Semester I TA 2008	52	943.210	86	943.210	23	102.070	51	820.683	12	20.458
				AUD 555,49		AUD 555,49		-		AUD 555,49		-
		Semester II TA 2008	27	60.746	45	60.746	-	-	-	-	45	60.746
				JPY 1.299,04		JPY 1.299,04		-		-		JPY 1.299,04
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**79**	**1.003.956**	**131**	**1.003.956**	**23**	**102.070**	**51**	**820.683**	**57**	**81.204**
				AUD 555,49		**AUD 555,49**		**-**		**AUD 555,49**		**-**
				JPY 1.299,04		**JPY 1.299,04**		**-**		**-**		**JPY 1.299,04**
39	**Departemen Pekerjaan Umum**	s.d. Semester I TA 2008	179	8.527.270	271	8.527.270	162	7.371.100	74	1.155.760	35	410
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58		-		-
				£396,10		£396,10		£396,10		-		-
		Updated Semester I TA 2008	179	8.527.270	271	8.527.270	162	7.371.100	74	1.155.760	35	410
				USD 202,58		USD 202,58		USD 202,58		-		-
				£396,10		£396,10		£396,10		-		-
		Semester II TA 2008	9	1.520	16	1.520	-	-	-	-	16	1.520
				-		-		-		-		-
				£35,79		£35,79		-		-		£35,79
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**188**	**8.528.790**	**287**	**8.528.790**	**162**	**7.371.100**	**74**	**1.155.760**	**51**	**1.930**
				USD 202,58		**USD 202,58**		**USD 202,58**		**-**		**-**
				£431,89		**£431,89**		**£396,10**		**-**		**£35,79**
40	**Departemen Perhubungan**	s.d. Semester I TA 2008	231	12.258.530	383	12.258.530	253	1.596.148	15	258.292	115	10.404.090
		Updated Semester I TA 2008	231	12.258.530	383	12.258.530	290	3.898.834	75	8.253.056	18	106.640
		Semester II TA 2008	58	29.794	90	27.887	35	17.118	-	-	55	10.769

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**289**	**12.288.323**	**473**	**12.286.416**	**325**	**3.915.952**	**75**	**8.253.056**	**73**	**117.408**
41	**Kementerian Perumahan Rakyat**	s.d. Semester I TA 2008	12	144.143	15	5.288	15	5.288	-	-	-	-
		Updated Semester I TA 2008	12	144.143	15	5.288	15	5.288	-	-	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**12**	**144.143**	**15**	**5.288**	**15**	**5.288**	**-**	**-**	**-**	**-**
42	**Kementerian Negara PDT**	s.d. Semester I TA 2008	17	121.142	34	121.142	4	8.153	2	448	28	112.541
		Updated Semester I TA 2008	23	121.142	40	121.142	7	8.201	2	448	31	112.493
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**23**	**121.142**	**40**	**121.142**	**7**	**8.201**	**2**	**448**	**31**	**112.493**
43	**Bapetarum**	s.d. Semester I TA 2008	5	59.200	8	59.200	4	58.710	4	53.330	-	-
		Updated Semester I TA 2008	5	59.200	8	59.200	4	5.870	4	53.330	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**5**	**59.200**	**8**	**59.200**	**4**	**5.870**	**4**	**53.330**	**-**	**-**
44	**BMG**	s.d. Semester I TA 2008	11	7.169	15	7.169	-	-	-	-	15	7.169
		Updated Semester I TA 2008	11	7.169	15	7.169	1	1.971	14	5.198	-	-
		Semester II TA 2008	7	756	9	756	9	756	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**18**	**7.925**	**24**	**7.925**	**10**	**2.727**	**14**	**5.198**	**-**	**-**
45	**Departemen Perindustrian**	s.d. Semester I TA 2008	85	218.226	109	218.226	61	116.905	41	99.327	7	1.994
		Updated Semester I TA 2008	85	218.226	109	218.226	61	116.905	41	99.327	7	1.994
		Semester II TA 2008	7	-	15	-	-	-	-	-	15	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**92**	**218.226**	**124**	**218.226**	**61**	**116.905**	**41**	**99.327**	**22**	**1.994**
46	**Departemen Perdagangan**	s.d. Semester I TA 2008	46	39.563	59	39.563	21	18.748	28	6.397	10	14.418
		Updated Semester I TA 2008	46	39.563	59	39.563	21	18.748	28	6.397	10	14.418
		Semester II TA 2008	6	50.801	6	50.801	-	-	-	-	6	50.801
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**52**	**90.364**	**65**	**90.364**	**21**	**18.748**	**28**	**6.397**	**16**	**65.219**
47	**Kementerian Negara Koperasi dan UKM**	s.d. Semester I TA 2008	42	2.037.973	55	2.037.973	14	2.031.067	26	4.019	15	2.887
		Updated Semester I TA 2008	42	2.037.973	55	2.037.973	14	2.031.067	26	4.019	15	2.887
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**42**	**2.037.973**	**55**	**2.037.973**	**14**	**2.031.067**	**26**	**4.019**	**15**	**2.887**
48	**Kementerian Negara BUMN**	s.d. Semester I TA 2008	61	1.632.021	62	1.632.021	24	879.430	35	752.591	3	-
				USD 1.164,18		USD 1.164,18		-		USD 1.164,18		-
		Updated Semester I TA 2008	61	1.632.021	62	1.632.021	24	879.430	35	752.591	3	-
				USD 1.164,18		USD 1.164,18		-		USD 1.164,18		-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**61**	**1.632.021**	**62**	**1.632.021**	**24**	**879.430**	**35**	**752.591**	**3**	**-**
				USD 1.164,18		**USD 1.164,18**				**USD 1.164,18**		**-**
49	**Badan Koordinasi Penanaman Modal**	s.d. Semester I TA 2008	13	858	15	858	9	345	6	513	-	-
		Updated Semester I TA 2008	13	858	15	858	9	345	6	513	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**13**	**858**	**15**	**858**	**9**	**345**	**6**	**513**	**-**	**-**
50	**Badan Standardisasi Nasional**	s.d. Semester I TA 2008	7	5.377	7	5.377	2	20	2	4.840	3	518
		Updated Semester I TA 2008	7	5.377	7	5.377	2	20	2	4.840	3	518
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**7**	**5.377**	**7**	**5.377**	**2**	**20**	**2**	**4.840**	**3**	**518**
51	**Departemen ESDM**	s.d. Semester I TA 2008	143	26.160.706	167	26.160.706	71	3.642.337	80	22.516.846	16	1.523
				USD 91.252,51		USD 91.252,51		USD 51.587,56		USD 39.664,95		-
		Updated Semester I TA 2008	143	26.160.706	167	26.160.706	71	3.642.337	80	22.516.846	16	1.523
				USD 91.252,51		USD 91.252,51		USD 51.587,56		USD 39.664,95		-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**143**	**26.160.706**	**167**	**26.160.706**	**71**	**3.642.337**	**80**	**22.516.846**	**16**	**1.523**
				USD 91.252,51		**USD 91.252,51**		**USD 51.587,56**		**USD 39.664,95**		**-**
52	**Kemeneg Lingkungan Hidup**	s.d. Semester I TA 2008	43	36.133	56	36.133	39	36.133	-	-	17	-
				USD 7.060,83		USD 7.060,83		USD 7.060,83		-		-
				DKK 3.000,00		DKK 3.000,00		DKK 3.000,00		-		-
		Updated Semester I TA 2008	43	36.133	56	36.133	39	36.133	-	-	17	-
				USD 7.060,83		USD 7.060,83		USD 7.060,83		-		-
				DKK 3.000,00		DKK 3.000,00		DKK 3.000,00		-		-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**43**	**36.133**	**56**	**36.133**	**39**	**36.133**	**-**	**-**	**17**	**-**
				USD 7.060,83		**USD 7.060,83**		**USD 7.060,83**		**-**		**-**
				DKK 3.000,00		**DKK 3.000,00**		**DKK 3.000,00**		**-**		**-**

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
53	**Kementerian Negara Ristek**	s.d. Semester I TA 2008	17	1.267.260	20	1.267.260	10	11.358	10	1.255.903	-	-
		Updated Semester I TA 2008	17	1.267.260	20	1.267.260	10	11.358	10	1.255.903	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**17**	**1.267.260**	**20**	**1.267.260**	**10**	**11.358**	**10**	**1.255.903**	**-**	**-**
54	**BPPT**	s.d. Semester I TA 2008	49	1.952.285	64	1.952.285	39	13.813	25	1.938.374	-	98
				USD 506,73		506,73				USD 506,73		-
		Updated Semester I TA 2008	49	1.952.285	64	1.952.285	39	13.813	25	1.938.374	-	98
				USD 506,73		USD 506,73				USD 506,73		-
		Semester II TA 2008	5	2.232	11	2.232	2	69	-	-	9	2.163
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**54**	**1.955.024**	**75**	**1.955.024**	**41**	**13.882**	**25**	**1.938.881**	**9**	**2.261**
				USD 506,73		**USD 506,73**		**-**		**USD 506,73**		**-**
55	**Lembaga Ilmu Pengeta-huan Indonesia**	s.d. Semester I TA 2008	23	815.407	23	815.407	2	1.131	21	814.276	-	-
			1	USD 369,65	1	USD 369,65	-	-	1	369,65	-	-
		Updated Semester I TA 2008	23	815.407	23	815.407	2	1.131	21	814.276	-	-
			1	USD 369,65	1	USD 369,65	-	-	1	USD 369,65	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**23**	**815.407**	**23**	**815.407**	**2**	**1.131**	**21**	**814.276**	**-**	**-**
			1	**USD 369,65**	**1**	**USD 369,65**	**-**	**-**	**1**	**USD 369,65**	**-**	**-**
56	**Badan Tenaga Nuklir Nasional**	s.d. Semester I TA 2008	13	678.263	16	678.263	9	9.572	7	668.690	-	-
		Updated Semester I TA 2008	13	678.263	16	678.263	9	9.572	7	668.690	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**13**	**678.263**	**16**	**678.263**	**9**	**9.572**	**7**	**668.690**	**-**	**-**
57	**Badan Pengawas Tenaga Nuklir**	s.d. Semester I TA 2008	14	29.539	21	29.539	18	790	3	28.749	-	-
		Updated Semester I TA 2008	14	29.539	21	29.539	18	790	3	28.749	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**14**	**29.539**	**21**	**29.539**	**18**	**790**	**3**	**28.749**	**-**	**-**
58	**Bakorsurtanal**	s.d. Semester I TA 2008	20	590.977	25	590.977	19	387.757	6	203.220	-	-
		Updated Semester I TA 2008	20	590.977	25	590.977	19	387.757	6	203.220	-	-
		Semester II TA 2008	8	1.651	8	1.651	-	-	8	1.651	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**28**	**592.627**	**33**	**592.627**	**19**	**387.757**	**14**	**204.870**	**-**	**-**
59	**LAPAN**	s.d. Semester I TA 2008	28	329.216	47	329.300	32	12.427	10	308.027	5	8.846

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Updated Semester I TA 2008	28	329.216	47	329.300	32	12.427	10	308.027	5	8.846
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**28**	**329.216**	**47**	**329.300**	**32**	**12.427**	**10**	**308.027**	**5**	**8.846**
60	**BPS**	s.d. Semester I TA 2008	25	414.196	24	414.196	-	-	16	8.067	8	406.130
		Updated Semester I TA 2008	25	414.196	24	414.196	-	-	16	8.067	8	406.130
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**25**	**414.196**	**24**	**414.196**	**-**	**-**	**16**	**8.067**	**8**	**406.130**
61	**Departemen Agama**	s.d. Semester I TA 2008	211	9.477.084	384	9.477.084	150	701.767	156	1.291.361	78	7.483.956
				USD 14.903,54		USD 14.903,54		USD 14.500,04		USD 403,50		-
				SAR 69.754,13		SAR 69.754,13		SAR 25.031,32		SAR 39.306,40		SAR 5.416,40
				JPY 118.797,51		JPY 118.797,51		-		JPY 118.797,51		-
		Updated Semester I TA 2008	211	9.477.084	384	9.477.084	150	701.767	157	1.291.361	77	7.483.956
				USD 14.903,54		USD 14.903,54		USD 14.500,04		USD 403,50		-
				SAR 69.754,13		SAR 69.754,13		SAR 25.031,32		SAR 39.306,40		SAR 5.416,40
				JPY 118.797,51		JPY 118.797,51		-		JPY 118.797,51		-
		Semester II TA 2008	36	13.139	80	13.139	8	1.915	4	521	68	10.704
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**247**	**9.490.223**	**464**	**9.490.223**	**158**	**703.681**	**161**	**1.291.882**	**145**	**7.494.660**
				USD 14.903,54		**USD 14.903,54**		**14.500,04**		**USD 403,50**		**-**
				SAR 69.754,13		**SAR 69.754,13**		**SAR 25.031,32**		**SAR 39.306,40**		**SAR 5.416,40**
				JPY 118.797,51		**JPY 118.797,51**		**-**		**JPY 118.797,51**		**-**
62	**Kementerian Koordinator Kesra**	s.d. Semester I TA 2008	32	159.439	40	159.439	21	114.919	6	19.644	13	24.876
		Updated Semester I TA 2008	33	144.366	41	144.366	32	121.412	7	20.689	2	2.265
		Semester II TA 2008	9	217.645	10	217.645	-	-	-	-	10	217.645
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**42**	**362.011**	**51**	**362.011**	**32**	**121.412**	**7**	**20.689**	**12**	**219.910**
63	**Departemen Sosial**	s.d. Semester I TA 2008	120	2.496.885	230	2.496.885	174	2.115.955	29	76.619	27	304.311
		Updated Semester I TA 2008	123	2.706.212	235	2.706.212	193	2.172.054	42	534.158	-	-
		Semester II TA 2008	13	43.350	17	43.350	-	-	-	-	17	43.350
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**136**	**2.749.563**	**252**	**2.749.563**	**193**	**2.172.054**	**42**	**534.158**	**17**	**43.350**
64	**Kemeneg Pemberdayaan Perempuan**	s.d. Semester I TA 2008	24	8.809	29	8.809	16	1.056	5	7.111	8	642
		Updated Semester I TA 2008	24	8.809	29	8.809	16	1.056	5	7.111	8	642
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**24**	**8.809**	**29**	**8.809**	**16**	**1.056**	**5**	**7.111**	**8**	**642**
65	**Bakornas PB**	s.d. Semester I TA 2008	18	27.612	30	27.612	7	4.340	4	16.415	19	6.856

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Updated Semester I TA 2008	30	5.712.804	38	5.712.804	22	13.137	8	14.475	8	5.685.192
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**30**	**5.712.804**	**38**	**5.712.804**	**22**	**13.137**	**8**	**14.475**	**8**	**5.685.192**
66	**Departemen Kesehatan**	s.d. Semester I TA 2008	1148	36.738.930	2003	36.738.930	1100	9.546.955	283	4.110.019	620	23.081.956
				USD 48.160,68		USD 48.160,68		USD 0,00		USD 29.294,80		USD 18.865,88
				EUR 2.700,00		EUR 2.700,00		EUR 1.350,00		EUR 1.350,00		-
				JPY 1.470.624,66		JPY 1.470.624,66		JPY 735.312,33		JPY 735.312,33		-
		Updated Semester I TA 2008	1149	37.014.684	2009	37.014.684	1247	8.934.096	268	14.207.834	494	13.872.754
				USD 48.160,68		USD 48.160,68		USD 0,00		USD 48.160,68		-
				EUR 2.700,00		EUR 2.700,00		EUR 1.350,00		EUR 1.350,00		-
				JPY 1.470.624,66		JPY 1.470.624,66		JPY 735.312,33		JPY 735.312,33		-
				AUD 36,52		AUD 36,52		AUD 0,00		AUD 0,00		AUD 36,52
		Semester II TA 2008	25	215.359	55	215.359	16	-	7	27,87	32	215.331
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**1.174**	**37.230.043**	**2.064**	**37.230.043**	**1.263**	**8.934.096**	**275**	**14.207.862**	**526**	**14.088.085**
				USD 48.160,68		**USD 48.160,68**		**-**		**USD 48.160,68**		**-**
				EUR 2.700,00		**EUR 2.700,00**		**EUR 1.350,00**		**EUR 1.350,00**		**-**
				JPY 1.470.624,66		**JPY 1.470.624,66**		**JPY 735.312,33**		**JPY 735.312,33**		**-**
				AUD 36,52		**AUD 36,52**		**-**		**-**		**AUD 36,52**
67	**Departemen Nakertrans**	s.d. Semester I TA 2008	485	1.794.072	485	1.794.072	297	660.356	54	350.685	134	783.031
				USD 6.355,18		USD 6.355,18				USD 713,51		USD 5.641,67
		Updated Semester I TA 2008	485	1.794.072	485	1.794.072	297	660.356	54	350.685	134	783.031
				USD 6.355,18		USD 6.355,18				USD 713,51		USD 5.641,67
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**485**	**1.794.072**	**485**	**1.794.072**	**297**	**660.356**	**54**	**350.685**	**134**	**783.031**
				USD 6.355,18		**USD 6.355,18**				**USD 713,51**		**USD 5.641,67**
68	**BKKBN**	s.d. Semester I TA 2008	43	333.649	43	333.649	27	81.672	12	242.209	4	9.768
		Updated Semester I TA 2008	43	333.649	43	333.649	27	81.672	12	242.209	4	9.768
		Semester II TA 2008	6	139.044	6	139.044	4	138.932	2	113	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**49**	**472.693**	**49**	**472.693**	**31**	**220.603**	**14**	**242.322**	**4**	**9.768**
69	**Badan Pengawas Obat dan Makanan**	s.d. Semester I TA 2008	105	67.726	166	67.726	88	27.939	30	30.035	48	9.752
				EUR 29.600,00		EUR 29.600,00		-		EUR 29.600,00		-
		Updated Semester I TA 2008	105	67.726	166	67.726	93	27.939	43	38.298	30	1.489
				EUR 29.600,00		EUR 29.600,00		-		EUR 29.600,00		-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**105**	**67.726**	**166**	**67.726**	**93**	**27.939**	**43**	**38.298**	**30**	**1.489**
				EUR 29.600,00		**EUR 29.600,00**		**-**		**EUR 29.600,00**		**-**

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
70	**Badan Narkotika Nasional**	s.d. Semester I TA 2008	40	24.162	48	19.229	9	2.610	6	2.425	33	14.194
		Updated Semester I TA 2008	40	24.162	48	19.229	9	2.610	6	2.425	33	14.194
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**40**	**24.162**	**48**	**19.229**	**9**	**2.610**	**6**	**2.425**	**33**	**14.194**
71	**Departemen Pendidikan Nasional**	s.d. Semester I TA 2008	949	10.367.449	1.741	5.776.077	820	4.217.251	297	235.436	624	1.323.390
				USD 8.695,57		USD 8.695,57		-		-		USD 8.695,57
		Updated Semester I TA 2008	949	10.386.638	1.741	5.776.077	1.002	4.181.856	270	1.095.987	469	498.234
				USD 8.695,57		USD 8.695,57		-		-		USD 8.695,57
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**949**	**10.386.638**	**1.741**	**5.776.077**	**1.002**	**4.181.856**	**270**	**1.095.987**	**469**	**498.234**
				USD 8.695,57		**USD 8.695,57**						**USD 8.695,57**
72	**Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata**	s.d. Semester I TA 2008	158	2.349.651	251	2.349.651	187	565.784	1	460.472	63	1.323.395
		Updated Semester I TA 2008	154	2.345.225	232	2.345.225	180	567.237	21	1.759.267	31	18.722
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**154**	**2.345.225**	**232**	**2.345.225**	**180**	**567.237**	**21**	**1.759.267**	**31**	**18.722**
73	**Kementerian Pemuda dan Olahraga**	s.d. Semester I TA 2008	5	134.215	-	-	-	-	-	-	-	-
		Updated Semester I TA 2008	13	7.127	19	7.127	7	1.106	10	1.080	2	4.941
		Semester II TA 2008	8	44.766	8	44.766	-	-	-	-	8	44.766
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**21**	**51.893**	**27**	**51.893**	**7**	**1.106**	**10**	**1.080**	**10**	**49.706**
74	**TVRI**	s.d. Semester I TA 2008	19	253.575	32	253.575	29	26.238	3	227.338	-	-
		Updated Semester I TA 2008	19	253.575	32	253.575	29	26.238	3	227.338	-	-
		Semester II TA 2008	10	85.107	10	85.107	-	-	-	-	10	85.107
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**29**	**338.682**	**42**	**338.682**	**29**	**26.238**	**3**	**227.338**	**10**	**85.107**
75	**Perpustakaan Nasional**	s.d. Semester I TA 2008	20	135.238	33	135.238	-	-	33	135.238	-	-
		Updated Semester I TA 2008	17	127.495	27	127.495	-	-	24	127.012	3	482
				EUR 500,00		EUR 500,00				EUR 500,00		
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**17**	**127.995**	**27**	**127.995**	**-**	**-**	**24**	**127.512**	**3**	**482**
				EUR 500,00		**EUR 500,00**				**EUR 500,00**		
76	**Kementerian Negara Perekonomian**	s.d. Semester I TA 2008	10	32.015	10	32.015	6	767	4	31.248	-	-

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Updated Semester I TA 2008	10	32.015	10	32.015	6	767	4	31.248	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**10**	**32.015**	**10**	**32.015**	**6**	**767**	**4**	**31.248**	**-**	**-**
77	**Departemen Keuangan**	s.d. Semester I TA 2008	349	9.789.464	415	9.789.464	82	704.587	283	9.084.877	50	-
		Updated Semester I TA 2008	349	9.789.464	415	9.789.464	82	704.587	283	9.084.877	50	-
		Semester II TA 2008	16	2.624.177	25	2.624.177	-	-	25	2.624.177	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**365**	**12.413.641**	**440**	**12.413.641**	**82**	**704.587**	**308**	**11.709.054**	**50**	**-**
78	**Bappenas**	s.d. Semester I TA 2008	8	38.972	11	38.972	3	-	4	-	4	38.972
		Updated Semester I TA 2008	8	38.972	11	38.972	3	-	4	-	4	38.972
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**8**	**38.972**	**11**	**38.972**	**3**	**-**	**4**	**-**	**4**	**38.972**
79	**BRR NAD-Nias**	s.d Smt II TA 2007	250	6.315.457	476	6.315.457	137	547.974	88	663.042	251	5.104.441
		Updated Semester I TA 2008	250	6.315.457	476	6.315.457	137	547.974	88	663.042	251	5.104.441
		Semester II TA 2008	46	439.010	46	439.010	-	-	-	-	46	439.010
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**296**	**6.754.467**	**522**	**6.754.467**	**137**	**547.974**	**88**	**663.042**	**297**	**5.543.451**
80	**Badan Pemeriksa Keuangan**	s.d. Semester I TA 2008	23	66.455	26	66.455	24	65.253	1	1.202	1	-
		Updated Semester I TA 2008	23	66.455	26	66.455	24	65.253	1	1.202	1	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**23**	**66.455**	**26**	**66.455**	**24**	**65.253**	**1**	**1.202**	**1**	**-**
81	**BPKP**	s.d. Semester I TA 2008	7	579.341	7	579.341	5	9.381	2	569.960	-	-
		Updated Semester I TA 2008	8	1.212	8	1.212	3	141	5	1.071	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**8**	**1.212**	**8**	**1.212**	**3**	**141**	**5**	**1.071**	**-**	**-**
82	**Star SDP**	s.d. Semester I TA 2008	7	7.741	11	7.741	-	-	-	-	11	7.741
		Updated Semester I TA 2008	7	7.741	11	7.741	-	-	-	-	11	7.741
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**7**	**7.741**	**11**	**7.741**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**7.741**
83	**Bank Indonesia**	s.d. Semester I TA 2008	34	4.220.826	52	4.220.826	19	3.896.051	33	324.774	-	-

No.	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian Rekomendasi					
							Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Updated Semester I TA 2008	34	4.220.826	52	4.220.826	19	3.896.051	33	324.774	-	-
		Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**34**	**4.220.826**	**52**	**4.220.826**	**19**	**3.896.051**	**33**	**324.774**	**-**	**-**
84	**Lembaga Penjamin Simpanan**	s.d. Semester I TA 2008	14	335	20	335	15	335	5	-	-	-
		Updated Semester I TA 2008	14	335	20	335	15	335	5	-	-	-
		Semester II TA 2008	11	9.710	11	9.710	-	-	10	9.710	1	-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**25**	**10.045**	**31**	**10.045**	**15**	**335**	**15**	**9.710**	**1**	**-**
85	**PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)**	s.d. Semester I TA 2008	5	443.353	4	443.353	1	443.353	3	-	-	-
		Updated Semester I TA 2008	5	443.353	4	443.353	1	443.353	3	-	-	-
		Semester II TA 2008	4	82.985	4	82.985	-	-	4	82.985	-	-
				USD 25.000,00		USD 25.000,00		-		USD 25.000,00		-
		Jumlah s.d. Semester II 2008	**9**	**526.338**	**8**	**526.338**	**1**	**443.353**	**7**	**82.985**	**-**	**-**
				USD 25.000,00		**USD 25.000,00**		**-**		**USD 25.000,00**		**-**
	Jumlah		**9.013**	**Rp233.762.589**	**13.794**	**Rp223.229.529**	**7.062**	**Rp52.002.285**	**3.130**	**Rp108.312.059**	**3.602**	**Rp62.915.186**
				USD 351.672,40		**USD 351.152,40**		**USD 107.089,62**		**USD 182.401,82**	**-**	**USD 61.660,96**
				AUD 1.580,70		**AUD 1.580,70**		**AUD 898,69**		**AUD 645,49**		**AUD 36,52**
				VND 32.580,00		**VND 32.580,00**		**VND 32.580,00**		**-**		**-**
				JPY 1.593.001,21		**JPY 1.593.001,21**		**JPY 736.792,33**		**JPY 854.909,84**		**JPY 1.299,04**
				EUR 33.919,00		**EUR 33.919,00**		**EUR 2.269,00**		**EUR 31.450,00**		**EUR 200,00**
				CAD 60,00		**CAD 60,00**		**60,00**		**-**		**-**
				£1.351,89		**£1.351,89**		**1.006,10**		**£310,00**		**£35,79**
				DKK 3.000,00		**DKK 3.000,00**		**DKK 3.000,00**		**-**		**-**
				SAR 69.754,13		**SAR 69.754,13**		**SAR 25.031,32**		**SAR 39.306,40**		**SAR 5.416,40**
				SGD 820,00		**SGD 820,00**		**770,00**		**SGD 50,00**		**-**
				YUN 2.810,00		**YUN 2.400,00**		**-**		**-**		**YUN 2.400,00**

* Perbedaan total jumlah dalam tabel dengan narasi dikarenakan perhitungan menggunakan excel

DAFTAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BUMN

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	**PT PLN (Persero)**										
	s.d Semester I TA 2008	131	74.185.207	151	74.185.207	34	22.261.968	36	22.537.963	81	29.385.276
			JPY 24.489,20		JPY 24.489,20		JPY 24.214,92		JPY 274,28	-	-
			USD 0,40		USD 0,40		USD 0,09		USD 0,31	-	-
			EUR 16,94	-	EUR 16,94	-	-	-	-	-	EUR 16,94
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	131	74.185.207	151	74.185.207	41	34.581.360	69	39.551.085	41	52.763
			JPY 24.489,20		JPY 24.489,20		JPY 24.214,92		JPY 274,28	-	-
			USD 0,40		USD 0,40		USD 0,09		USD 0,31	-	-
			EUR 16,94		EUR 16,94		-		EUR 16,94	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	131	74.185.207	151	74.185.207	41	34.581.360	69	39.551.085	41	52.763
			JPY 24.489,20		JPY 24.489,20		JPY 24.214,92		JPY 274,28	-	-
			USD 0,40		USD 0,40		USD 0,09		USD 0,31	-	-
			EUR 16,94		EUR 16,94		-		EUR 16,94	-	-
2	**PT Indonesia Power (IP)**										
	s.d Semester I TA 2008	9	7.093	9	7.093	9	7.093	-	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	7.093	9	7.093	9	7.093	-	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	9	7.093	9	7.093	9	7.093	-	-	-	-
3	**PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)**										
	s.d Semester I TA 2008	21	23.692	21	23.692	12	13.948	9	9.744	-	-
			GBP 0,02		GBP 0,02		GBP 0,02		-	-	-
			USD 0,26		USD 0,26		USD 0,02		USD 0,24	-	-
			CHF 0,03		CHF 0,03		CHF 0,03		-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	21	23.692	21	23.692	12	13.948	9	9.744	-	-
			GBP 0,02		GBP 0,02		GBP 0,02		-	-	-
			USD 0,26		USD 0,26		USD 0,02		USD 0,24	-	-
			CHF 0,03		CHF 0,03		CHF 0,03		-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	21	23.692	21	23.692	12	13.948	9	9.744	-	-
			GBP 0,02		GBP 0,02		GBP 0,02		-	-	-
			USD 0,26		USD 0,26		USD 0,02		USD 0,24	-	-
			CHF 0,03		CHF 0,03		CHF 0,03		-	-	-
4	**PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam**										
	s.d Semester I TA 2008	12	119.601	12	119.601	-	-	12	119.601	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	12	119.601	12	119.601	-	-	12	119.601	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	12	119.601	12	119.601	-	-	12	119.601	-	-
5	**PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan**										
	s.d Semester I TA 2008	6	18.983	12	18.983	-	-	11	18.983	1	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	6	18.983	12	18.983	3	-	8	18.983	1	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	6	18.983	12	18.983	3	-	8	18.983	1	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
6	**PT PLN Enjiniring**										
	s.d Semester I TA 2008	10	9.154	15	9.154	-	-	15	9.154	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	10	9.154	15	9.154	5	2.047	10	7.107	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	10	9.154	15	9.154	5	2.047	10	7.107	-	-
7	**PT ICON+**										
	s.d Semester I TA 2008	9	241	15	241	-	-	15	241	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	241	15	241	8	58	7	184	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	9	241	15	241	8	58	7	184	-	-
8	**PT BA Tbk**										
	s.d Semester I TA 2008	17	3.365	28	3.365	-	-	27	3.365	1	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	17	3.365	28	3.365	10	70	17	3.294	1	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	17	3.365	28	3.365	10	70	17	3.294	1	-
9	**PT PGN Tbk**										
	s.d Semester I TA 2008	25	46.095	30	46.095	10	283	7	32.006	13	13.807
			USD 13,36		USD 13,36		-		-		USD 13,36
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	25	46.095	30	46.095	10	283	7	32.006	13	13.807
			USD 13,36	-	USD 13,36	-	-	-	-	-	USD 13,36
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	25	46.095	30	46.095	10	283	7	32.006	13	13.807
			USD 13,36	-	USD 13,36	-	-	-	-	-	USD 13,36
10	**PT Antam (Persero)**										
	s.d Semester I TA 2008	12	19.231	19	9.071	9	3.390	8	2.799	2	2.882
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	12	19.231	19	9.071	9	3.390	8	2.799	2	2.882
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	12	19.231	19	9.071	9	3.390	8	2.799	2	2.882
11	**PT Pertamina (Persero)**										
	s.d Semester I TA 2008	74	7.772.907	86	7.772.907	84	142.613	2	7.630.294	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	74	7.772.907	86	7.772.907	86	7.772.907	-	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	**Perum Damri**										
	S.d. Semester I TA 2008	23	18.061	23	18.061	7	7.922	7	8.575	9	1.564
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	23	18.061	23	18.061	7	7.922	7	8.575	9	1.564
	Periode Semester II TA 2008	5	23.444	5	23.444	-	-	-	-	5	23.444
	S.d. Semester II TA 2008	28	41.506	28	41.506	7	7.922	7	8.575	14	25.008
13	**Perum PPD**										
	S.d. Semester I TA 2008	18	53.799	18	53.799	-	-	-	-	18	53.799
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	18	53.799	18	53.799	-	-	-	-	18	53.799
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	S.d. Semester II TA 2008	18	53.799	18	53.799	-	-	-	-	18	53.799
14	**PT Angkasa Pura I**										
	S.d. Semester I TA 2008	28	1.604.523	28	1.604.523	14	396.692	14	1.207.830	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	28	1.604.523	28	1.604.523	14	396.692	14	1.207.830	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	28	1.604.523	28	1.604.523	14	396.692	14	1.207.830	-	-
15	**PT Angkasa Pura II**										
	S.d. Semester I TA 2008	23	421.839	23	421.839	17	72.607	6	349.233	-	-
			USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		-		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	23	421.839	23	421.839	17	72.607	6	349.233	-	-
			USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		-		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	23	421.839	23	421.839	17	72.607	6	349.233	-	-
			USD 1.166,20		USD 1.166,20		USD 1.166,20		-		-
16	**PT ASDP**										
	S.d. Semester I TA 2008	18	17.747	18	17.747	10	8.812	-	-	8	8.935
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	18	17.747	18	17.747	10	8.812	-	-	8	8.935
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	18	17.747	18	17.747	10	8.812	-	-	8	8.935
17	**PT Djakarta Lloyd**										
	S.d. Semester I TA 2008	21	693.293	21	693.293	5	669.490	2	5.865	14	17.938
			USD 51.320,00		USD 51.320,00		-		-		USD 51.320,00
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	21	693.293	21	693.293	5	669.490	2	5.865	14	17.938
			USD 51.320,00		USD 51.320,00		-		-		USD 51.320,00
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	21	693.293	21	693.293	5	669.490	2	5.865	14	17.938
			USD 51.320,00		USD 51.320,00		-		-		USD 51.320,00
18	**PT Garuda Indonesia**										
	S.d. Semester I TA 2008	17	496.767	17	496.767	1	-	16	496.767	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	17	496.767	17	496.767	1	-	16	496.767	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	17	496.767	17	496.767	1	-	16	496.767	-	-
19	**PT Kereta Api**										
	S.d. Semester I TA 2008	64	2.070.142	64	2.070.142	10	59.861	10	750.595	44	1.259.686
			USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		-		USD 32,90
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	64	2.070.142	64	2.070.142	10	59.861	10	750.595	44	1.259.686
			USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		-		USD 32,90
	Periode Semester II TA 2008	10	548.673	10	2.476	-	-	-	-	10	2.476
	S.d. Semester II TA 2008	74	2.618.815	74	2.072.618	10	59.861	10	750.595	54	1.262.162
			USD 35,19		USD 35,19		USD 2,29		-		USD 32,90

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
20	**PT Merpati Nusantara Airlines**										
	S.d. Semester I TA 2008	32	41.179	32	41.179	10	3.571	9	7.195	13	30.413
			USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28
			AUD 516,47		AUD 516,47		-		AUD 516,47		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	32	41.179	32	41.179	10	3.571	9	7.195	13	30.413
			USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28
			AUD 516,47		AUD 516,47		-		AUD 516,47		
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	32	41.179	32	41.179	10	3.571	9	7.195	13	30.413
			USD 7.881,44		USD 7.881,44		USD 92,44		USD 3.293,72		USD 4.495,28
			AUD 516,47		AUD 516,47		-		AUD 516,47		-
21	**PT Pelayaran Bahtera Adhiguna**										
	S.d. Semester I TA 2008	9	16.281	9	16.281	-	-	9	16.281	-	-
			USD 43,87		USD 43,87		-		USD 43,87		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	16.281	9	16.281	-	-	9	16.281	-	-
			USD 43,87	-	USD 43,87		-		USD 43,87		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	9	16.281	9	16.281	-	-	9	16.281	-	-
			USD 43,87		USD 43,87		-		USD 43,87		-
22	**PT Pelindo I**										
	S.d. Semester I TA 2008	6	77.549	6	77.549	5	77.486	1	63	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	6	77.549	6	77.549	5	77.486	1	63	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	6	77.549	6	77.549	5	77.486	1	63	-	-
23	**PT Pelindo II**										
	S.d. Semester I TA 2008	6	22.913	6	22.913	-	-	6	22.913	-	-
			USD 1.344,03		USD 1.344,03		-		USD 1.344,03		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	6	22.913	6	22.913	-	-	6	22.913	-	-
			USD 1.344,03		USD 1.344,03		-		USD 1.344,03		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	6	22.913	6	22.913	-	-	6	22.913	-	-
			USD 1.344,03		USD 1.344,03		-		USD 1.344,03		-
24	**PT Pelindo III**										
	S.d. Semester I TA 2008	37	126.992	37	126.992	20	16.623	17	110.369	-	-
			USD 561,06		USD 561,06		-		USD 561,06		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	37	126.992	37	126.992	20	16.623	17	110.369	-	-
			USD 561,06		USD 561,06		-		USD 561,06		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	37	126.992	37	126.992	20	16.623	17	110.369	-	-
			USD 561,06		USD 561,06		-		USD 561,06		-
25	**PT Pelni**										
	S.d. Semester I TA 2008	34	494.280	34	494.280	7	76.099	9	12.006	18	406.174
			USD 273,87		USD 273,87		-		-		USD 273,87
			DEM 58.966,91		DEM 58.966,91		-		-		DEM 58.966,91
			EUR 38.841,66		EUR 38.841,66		-		-		EUR 38.841,66

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	34	494.280	34	494.280	7	76.099	9	12.006	18	406.174
			USD 273,87		USD 273,87		-		-		USD 273,87
			DEM 58.966,91		DEM 58.966,91		-		-		DEM 58.966,91
			EUR 38.841,66		EUR 38.841,66		-		-		EUR 38.841,66
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	34	494.280	34	494.280	7	76.099	9	12.006	18	406.174
			USD 273,87		USD 273,87		-		-		USD 273,87
			DEM 58.966,91		DEM 58.966,91		-		-		DEM 58.966,91
			EUR 38.841,66		EUR 38.841,66		-		-		EUR 38.841,66
26	**PT Rukindo**										
	S.d. Semester I TA 2008	21	92.902	21	92.902	11	68.047	10	24.855	-	-
			USD 341,70		USD 341,70		USD 341,70		-		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	21	92.902	21	92.902	11	68.047	10	24.855	-	-
			USD 341,70		USD 341,70		USD 341,70		-		-
	Periode Semester II TA 2008	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	21	92.902	21	92.902	11	68.047	10	24.855	-	-
			USD 341,70		USD 341,70		USD 341,70		-		-
27	**PT Hutama Karya**										
	S.d. Semester I TA 2008	25	408.342	25	408.342		-	25	408.342	-	-
			USD 17.022,50		USD 17.022,50		-		USD 17.022,50		-
			SGD 836,15		SGD 836,15		-		SGD 836,15		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	25	408.342	25	408.342	1	1.761	24	406.581	-	-
			USD 17.022,50		USD 17.022,50		-		USD 17.022,50		-
			SGD 836,15		SGD 836,15		-		SGD 836,15		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	25	408.342	25	408.342	1	1.761	24	406.581	-	-
			USD 17.022,50		USD 17.022,50		-		USD 17.022,50		-
			SGD 836,15		SGD 836,15		-		SGD 836,15		-
28	**PT KBN**										
	S.d. Semester I TA 2008	9	44.624	9	44.624	2	101	7	44.523	-	-
			USD 86,74		USD 86,74		-		USD 86,74		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	44.624	9	44.624	2	101	7	44.523	-	-
			USD 86,74		USD 86,74		-		USD 86,74		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	9	44.624	9	44.624	2	101	7	44.523	-	-
			USD 86,74		USD 86,74		-		USD 86,74		-
29	**PT KIM**										
	S.d. Semester I TA 2008	9	7.368	9	7.368	-	-	9	7.368	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	7.368	9	7.368	1	696	8	6.672	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	9	7.368	9	7.368	1	696	8	6.672	-	-
30	**PT KIMA**										
	S.d. Semester I TA 2008	6	1.461	6	1.461	-	-	-	-	6	1.461
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	6	1.461	6	1.461	4	999	2	461	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	6	1.461	6	1.461	4	999	2	461	-	-
31	**PT Nindya Karya**										
	S.d. Semester I TA 2008	8	13.931	8	13.931	-	-	-	-	8	13.931
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	8	13.931	8	13.931	7	10.888	1	3.043	-	0
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	8	13.931	8	13.931	7	10.888	1	3.043	-	0
32	**Perum PFN**										
	S.d. Semester I TA 2008	8	1.461	8	1.461	-	-	-	-	8	1.461
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	8	1.461	8	1.461	-	-	-	-	8	1.461
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	8	1.461	8	1.461	-	-	-	-	8	1.461
33	**PT PP**										
	S.d. Semester I TA 2008	22	480.247	22	480.247	-	-	22	480.247	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	22	480.247	22	480.247	9	48.566	13	431.680	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	22	480.247	22	480.247	9	48.566	13	431.680	-	-
34	**PT Telkom**										
	S.d. Semester I TA 2008	11	20.832	11	20.832	3	5.920	5	14.048	3	864
			USD 130.879,54		USD 130.879,54		USD 20,14		USD 598,65		USD 130.260,75
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	11	20.832	11	20.832	7	8.355	2	12.477	2	0
			USD 130.879,54		USD 130.879,54		USD 618,79		-		USD 130.260,75
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	11	20.832	11	20.832	7	8.355	2	12.477	2	-
			USD 130.879,54		USD 130.879,54		USD 618,79		-		USD 130.260,75
35	**PT Waskita Karya**										
	S.d. Semester I TA 2008	7	15.179	7	15.179	-	-	-	-	7	15.179
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	7	15.179	7	15.179	-	-	-	-	7	15.179
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	7	15.179	7	15.179	-	-	-	-	7	15.179
36	**PT Barata Indonesia**										
	S.d. Semester I TA 2008	11	60.189	11	57.585	2	3.817	9	53.768	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	11	60.189	11	57.585	5	50.748	6	6.837	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	11	60.189	11	57.585	5	50.748	6	6.837	-	-
37	**PT Bio Farma**										**-**
	S.d. Semester I TA 2008	9	38.568	9	30.709	7	253	2	30.456	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	38.568	9	30.709	9	30.709	-	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	9	38.568	9	30.709	9	30.709	-	-	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
38	**PT Dahana**										
	S.d. Semester I TA 2008	52	565.578	52	555.020	5	90.746	16	460.561	31	3.713
			USD 2.259.963,56		USD 2.259.963,56		USD 834,10		USD 942.683,80		USD 1.316.445,66
			EUR 14.867,22		EUR 14.867,22		-		-		EUR 14.867,22
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	52	565.578	52	555.020	5	90.746	16	460.561	31	3.713
			USD 2.259.963,56		USD 2.259.963,56		USD 834,10		USD 942.683,80		USD 1.316.445,66
			EUR 14.867,22		EUR 14.867,22		-		-		EUR 14.867,22
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	52	565.578	52	555.020	5	90.746	16	460.561	31	3.713
			USD 2.259.963,56		USD 2.259.963,56		USD 834,10		USD 942.683,80		USD 1.316.445,66
			EUR 14.867,22		EUR 14.867,22		-		-		EUR 14.867,22
39	**PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari**										
	S.d. Semester I TA 2008	16	1.295.383	16	25.614	-	-	16	25.614	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	16	1.295.383	16	25.614	-	-	16	25.614	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	16	1.295.383	16	25.614	-	-	16	25.614	-	-
40	**PT DPS**										
	S.d. Semester I TA 2008	19	82.223	19	22.052	-	-	-	-	19	22.052
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	19	82.223	19	22.052	-	-	-	-	19	22.052
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	19	82.223	19	22.052	-	-	-	-	19	22.052
41	**PT IGLAS**										
	S.d. Semester I TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	11	27.691	11	22.143	-	-	-	-	11	22.143
	S.d. Semester II TA 2008	11	27.691	11	22.143	-	-	-	-	11	22.143
42	**PT Indofarma**										
	S.d. Semester I TA 2008	18	20.988	18	7.270	-	-	-	-	18	7.270
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	18	20.988	18	7.270	-	-	7	5.021	11	2.250
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	18	20.988	18	7.270	-	-	7	5.021	11	2.250
43	**PT Industri Sandang Nusantara**										
	S.d. Semester I TA 2008	13	28.305	13	25.704	-	-		-	13	25.704
			USD 624,31		USD 58,17		-				USD 58,17
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	13	28.305	13	25.704	-	-	13	25.704	-	-
			USD 624,31		USD 58,17		-		USD 58,17		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	13	28.305	13	25.704	-	-	13	25.704	-	-
			USD 624,31		USD 58,17		-		USD 58,17		-
44	**PT INKA**										
	S.d. Semester I TA 2008	8	659.852	8	659.852	3	146.595	5	513.257	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	8	659.852	8	659.852	3	146.595	5	513.257	-	-
	Periode Semester II TA 2008	5	56.532	5	-	-	-	-	-	5	-
			USD 30.316,00		-		-		-		-
	S.d. Semester II TA 2008	13	716.384	13	659.852	3	146.595	5	513.257	5	-
			USD 30.316,00		-	-	-	-	-		-
45	**PT INTI**										**-**
	S.d. Semester I TA 2008	20	619.521	20	530.765	5	240	15	530.525	-	-
			USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	20	619.521	20	530.765	5	240	15	530.525	-	-
			USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	20	619.521	20	530.765	5	240	15	530.525	-	-
			USD 367,35		USD 367,35		USD 2,00		USD 365,35		-
46	**PT Kimia Farma**										**-**
	S.d. Semester I TA 2008	17	10.963	17	6.413	8	2.026	9	4.387	-	-
			USD 4.162,55		USD 4.162,55		-		USD 4.162,55		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	17	10.963	17	6.413	8	2.026	9	4.387	-	-
			USD 4.162,55		USD 4.162,55		-		USD 4.162,55		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	17	10.963	17	6.413	8	2.026	9	4.387	-	-
			USD 4.162,55		USD 4.162,55		-		USD 4.162,55		-
47	**PT Krakatau Steel**										**-**
	S.d. Semester I TA 2008	53	1.301.519	53	1.300.778	47	1.023.941	6	276.837	-	-
			USD 177,28		USD 177,28		USD 116,00		USD 61,28		-
			GBP 123,00		GBP 123,00		GBP 123,00		-		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	53	1.301.519	53	1.300.778	47	1.023.941	6	276.837	-	-
			USD 177,28		USD 177,28		USD 116,00		USD 61,28		-
			GBP 123,00		GBP 123,00		GBP 123,00		-		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	53	1.301.519	53	1.300.778	47	1.023.941	6	276.837	-	-
			USD 177,28		USD 177,28		USD 116,00		USD 61,28		-
			GBP 123,00		GBP 123,00		GBP 123,00		-	-	-
48	**PT LEN Indusri**										**-**
	S.d. Semester I TA 2008	8	11.090	8	11.000	6	10.540	2	459	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	8	11.090	8	11.000	6	10.540	2	459	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	8	11.090	8	11.000	6	10.540	2	459	-	-
49	**PT PAL**										
	S.d. Semester I TA 2008	45	645.975	45	544.211	16	133.808	12	83.007	17	327.397
			USD 77.370,64		USD 75.854,53		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
			DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		-		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	45	645.975	45	544.211	16	133.808	12	83.007	17	327.397
			USD 77.370,64		USD 75.854,53		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
			DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		-		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	S.d. Semester II TA 2008	45	645.975	45	544.211	16	133.808	12	83.007	17	327.397
			USD 77.370,64		USD 75.854,53		USD 60.434,69		USD 15.309,80		USD 110,04
			DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		DEM 1.135,00		-		-
50	**PT Pindad**										
	S.d. Semester I TA 2008	10	329.522	10	317.917	1	516	9	317.401	-	-
			USD 136.885,00		-		-		-		-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	10	329.522	10	317.917	1	516	9	317.401	-	-
			USD 136.885,00		-		-		-		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	10	329.522	10	317.917	1	516	9	317.401	-	-
			USD 136.885,00		-		-		-		-
51	**PT Semen Baturaja**										**-**
	S.d. Semester I TA 2008	20	70.366	19	45.885	13	38.018	6	7.867	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	20	70.366	19	45.885	18	38.018	1	7.867	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	20	70.366	19	45.885	18	38.018	1	7.867	-	-
52	**PT Semen Kupang**										
	S.d. Semester I TA 2008	9	26.685	9	26.685	-	-	-	-	9	26.685
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	26.685	9	26.685	-	-	-	-	9	26.685
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d. Semester II TA 2008	9	26.685	9	26.685	-	-	-	-	9	26.685
53	**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX**										
	S.d. Semester I TA 2008	11	98.059	18	98.059	-	-	16	97.890	2	169
			USD 131,22	-	USD 131,22	-	-	-	USD 131,22	-	-
	Pemantauan s.d. Smt I TA 2008	11	98.059	18	98.059	-	-	16	97.890	2	169
		-	USD 131,22	-	USD 131,22	-	-	-	USD 131,22	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	11	98.059	18	98.059	-	-	16	97.890	2	169
		-	USD 131,22	-	USD 131,22	-	-	-	USD 131,22	-	-
54	**PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV**										
	S.d. Semester I TA 2008	8	141.798	15	141.798	-	-	-	-	15	141.798
	Pemantauan s.d. Smt I TA 2008	8	141.798	15	141.798	-	-	-	-	15	141.798
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	8	141.798	15	141.798	-	-	-	-	15	141.798
55	**PT RNI**										
	s.d Semester I TA 2008	25	1.019.005	51	1.019.005	1	324	50	1.018.682	-	-
			USD 17.728,04		USD 17.728,04				USD 17.728,04		
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	25	1.019.005	51	1.019.005	1	324	50	1.018.682		
			USD 17.728,04		USD 17.728,04				USD 17.728,04		
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	25	1.019.005	51	1.019.005	1	324	50	1.018.682	-	-
			USD 17.728,04		USD 17.728,04				USD 17.728,04		

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
56	**PT Inhutani II**										
	s.d Semester I TA 2008	10	59.643	10	59.643	-	-	-	-	10	59.643
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	10	59.643	10	59.643	-	-	-	-	10	59.643
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II 2008	10	59.643	10	59.643	-	-	-	-	10	59.643
57	**PT Pertani**										
	s.d Semester I TA 2008	1	1.250	1	1.250	-	-	-	-	1	1.250
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	1	1.250	1	1.250	-	-	-	-	1	1.250
	Periode Semester II TA 2008	7	8.349	16	8.349	-	-	-	-	16	8.349
	s.d. Semester II 2008	8	9.599	17	9.599	-	-	-	-	17	9.599
58	**PT SHS**										
	s.d Semester I TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	1	185	1	185	-	-	1	185	-	-
	s.d. Semester II 2008	1	185	1	185	-	-	1	185	-	-
59	**PT Pupuk Kujang**										
	s.d Semester I TA 2008	7	7.427	8	7.427	3	7.035	5	392	-	-
			USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25				
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	7	7.427	8	7.427	3	7.035	5	392	-	-
			USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25				
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	7	7.427	8	7.427	3	7.035	5	392	-	-
			USD 778,25		USD 778,25		USD 778,25				
60	**PT Petrokimia Gresik**										
	s.d Semester I TA 2008	6	29.588	6	29.588	5	23.896	1	5.692	-	-
			USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 1.520,21				
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	6	29.588	6	29.588	5	23.896	1	5.692	-	-
			USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 1.520,21				
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	6	29.588	6	29.588	5	23.896	1	5.692	-	-
			USD 1.520,21		USD 1.520,21		USD 1.520,21				
61	**PT Pupuk Kaltim**										
	s.d Semester I TA 2008	4	12.056	4	12.056	1	12.056	3	-	-	-
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	4	12.056	4	12.056	1	12.056	3	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	4	12.056	4	12.056	1	12.056	3	-	-	-
62	**PT Pusri**										
	s.d Semester I TA 2008	3	92.380	3	92.380	1	-	2	92.380	-	-
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	3	92.380	3	92.380	1	-	-	92.380	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	3	92.380	3	92.380	1	-	2	92.380	-	-
63	**PT Balai Pustaka**										
	s.d Semester I TA 2008	14	108.132	19	127.778	2	8.909	17	118.868	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	14	108.132	19	127.778	2	8.909	17	118.868	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	14	108.132	19	127.778	2	8.909	17	118.868	-	-
64	**Perum Peruri**										
	s.d Semester I TA 2008	36	277.945	36	278.009	12	82.983	24	195.025	-	-
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	36	277.945	36	278.009	20	228.540	16	49.469	-	-
	Periode Semester II TA 2008	11	932.885	17	6.328	-	-	-	-	17	6.328
	S.d Semester II TA 2008	47	1.210.830	53	284.336	20	228.540	16	49.469	17	6.328
65	**Kertas Leces**										
	s.d Semester I TA 2008	8	7.181	10	4.882	-	-	10	4.882	-	-
			USD 13.933,72		USD 13.933,72				USD 13.933,72		
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	8	7.181	10	4.882	3	4.837	7	45	-	-
			USD 13.933,72		USD 13.933,72				USD 13.933,72		
	Periode Semester II TA 2008	6	258.194	8	13.166	-	-	-	-	8	13.166
	S.d Semester II TA 2008	14	265.375	18	18.048	3	4.837	7	45	8	13.166
			USD 13.933,72		USD 13.933,72				USD 13.933,72		
66	**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**										
	s.d. Semester I TA 2008	63	72.676.259	88	26.046.747	77	25.817.850	11	228.897	-	-
			USD 95.107,20								
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	63	72.676.259	88	26.046.747	78	25.817.850	10	228.897	-	-
			USD 95.107,20								
	Periode Semester II TA 2008	30	12.899.236	76	-	-	-	-	-	76	-
	s.d. Semester II TA 2008	93	85.575.495	164	26.046.747	78	25.817.850	10	228.897	76	-
			USD 95.107,20								
67	**PT Bank Syariah Mandiri**										
	s.d. Semester I TA 2008	33	840.165	99	6.306	52	-	47	6.306	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	33	840.165	99	6.306	80	-	19	6.306	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	33	840.165	99	6.306	80	-	19	6.306	-	-
68	**PT Mandiri Sekuritas**										
	s.d. Semester I TA 2008	12	275.423	15	-	9	-	6	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	12	275.423	15	-	9	-	6	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	12	275.423	15	-	9	-	6	-	-	-
69	**DP BMS**										
	s.d. Semester I TA 2008	10	47.915	14	-	-	-	14	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	10	47.915	14	-	-	-	14	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	10	47.915	14	-	-	-	14	-	-	-
70	**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**										
	s.d. Semester I TA 2008	125	20.314.246	206	1.200.479	-	-	206	1.200.479	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
			USD 390.775,90		USD 4.000,00				USD 4.000,00		
			GBP 13.000,00								
			JPY 300.000,00								
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	125	20.314.246	206	1.200.479	-	-	206	1.200.479	-	-
			USD 390.775,90		USD 4.000,00				USD 4.000,00		
			GBP 13.000,00								
			JPY 300.000,00								
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	125	20.314.246	206	1.200.479	-	-	206	1.200.479	-	-
			USD 390.775,90		USD 4.000,00				USD 4.000,00		
			GBP 13.000,00								
			JPY 300.000,00								
71	**DP BNI**										
	s.d. Semester I TA 2008	10	225.709	10	3.392	2	3.392	8	-	-	-
			USD 27.977,60								
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	10	225.709	10	3.392	2	3.392	8	-	-	-
			USD 27.977,60								
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	10	225.709	10	3.392	2	3.392	8	-	-	-
			USD 27.977,60								
72	**PT BNI Multifinance**										
	s.d. Semester I TA 2008	12	170.713	23	-	15	-	8	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	12	170.713	23	-	22	-	1	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	12	170.713	23	-	22	-	1	-	-	-
73	**PT BNI Cabang London**										
	s.d. Semester I TA 2008	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	20	-	2	-	-	-	2	-	-	-
74	**PT BNI Securities**										
	s.d. Semester I TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	12	54.537	18	18.458	-	-	18	18.458	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	12	54.537	18	18.458	-	-	18	18.458	-	-
75	**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**										
	s.d. Semester I TA 2008	78	5.854.815	189	81.323	68	-	121	81.323	-	-
			USD 692.380,68								
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	78	5.854.815	189	81.323	72	-	117	81.323	-	-
			USD 692.380,68								
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	s.d. Semester II TA 2008	78	5.854.815	189	81.323	72	-	117	81.323	-	-
			USD 692.380,68								
76	**Dana Pensiun BRI**										
	s.d. Semester I TA 2008	10	171.946	14	-	-	-	14	-	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	10	171.946	14	-	3	-	11	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	10	171.946	14	-	3	-	11	-	-	-
77	**PT Bank Tabungan Negara (Persero)**										
	s.d. Semester I TA 2008	59	637.796	116	64.661	-	-	116	64.661	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	59	637.796	116	64.661	71	-	45	64.661	-	-
	Periode Semester II TA 2008	14	74.755	18	-	-	-	-	-	18	-
	s.d. Semester II TA 2008	73	712.552	134	64.661	71	-	45	64.661	18	-
78	**PT Bank Ekspor Indo-nesia (Persero)**										
	s.d. Semester I TA 2008	15	1.157.667	18	-	3	-	15	-	-	-
			USD 58.495,54								
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	15	1.157.667	18	-	3	-	15	-	-	-
			USD 58.495,54								
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	s.d. Semester II TA 2008	15	1.157.667	18	-	3	-	15	-	-	-
			USD 58.495,54								
79	**Askes**										
	S.d. Semester I TA 2008	15	10.146	15	-	15	-	-	-	-	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	15	10.146	15	-	15	-	-	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	15	10.146	15	-	15	-	-	-	-	-
80	**Taspen**										
	S.d. Semester I TA 2008	78	27.093.293	151	-	63	-	88	-	-	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	78	27.093.293	151	-	63	-	88	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	78	27.093.293	151	-	63	-	88	-	-	-
81	**PT Jamsostek**										
	S.d. Semester I TA 2008	65	1.958.365	65	-	58	-	7	-	-	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	65	1.958.365	65	-	58	-	7	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	65	1.958.365	65	-	58	-	7	-	-	-
82	**PT Asabri**										
	S.d. Semester I TA 2008	16	153.332	16	-	12	-	4	-	-	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	16	153.332	16	-	12	-	4	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	16	153.332	16	-	12	-	4	-	-	-

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
83	**PT ASEI-ADTT**										
	S.d. Semester I TA 2008	8	29.743	8	-	2	-	6	-	-	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	8	29.743	8	-	4	-	4	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	8	29.743	8	-	4	-	4	-	-	-
84	**PT Askrindo-ADTT**										
	S.d. Semester I TA 2008	18	512.967	18	-	3	-	15	-	-	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	18	512.967	18	-	5	-	13	-		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	18	512.967	18	-	5	-	13	-	-	-
85	**PT Jiwasraya**										
	S.d. Semester I TA 2008	31	1.314.875	31	-	3	-	27	-	1	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	31	1.314.875	31	-	3	-	27	-	1	-
	Periode Semester II TA 2008	28	64.803	46	64.803	-	-	46	64.803	-	-
	S.d Semester II TA 2008	59	1.379.678	77	64.803	3	-	73	64.803	1	-
86	**PT Jasa Raharja**										
	S.d. Semester I TA 2008	14	193.990	14	-	8	-	6	-	-	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	14	193.990	14	-	9	-	5	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	14	193.990	14	-	9	-	5	-	-	-
87	**PT Jasindo**										
	S.d. Semester I TA 2008	23	345.924	33	-	26	-	7	-	-	-
	Pemantauan s.d. Smt II TA 2008	23	345.924	33	-	26	-	7	-	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	23	345.924	33	-	26	-	7	-	-	-
88	**PT Permodalan Nasional Madani**										
	s.d Semester I TA 2008	21	78.747	47	71.247	-	-	47	71.247	-	-
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	21	71.247	47	71.247	22	12.753	25	58.494	-	-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	21	71.247	47	71.247	22	12.753	25	58.494	-	-
89	**PT Bahana PUI**										
	s.d Semester I TA 2008	17	2.842.022	18	2.839.280	4	-	13	2.834.563	1	4.717
			USD 58,84								
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	17	2.839.280	18	2.839.280	4	33.842	13	2.800.721	1	4.717
			USD 58.588,40		USD 58.588,40		-		USD 58.588,40		-
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	17	2.839.280	18	2.839.280	4	33.842	13	2.800.721	1	4.717
			USD 58.588,40		USD 58.588,40		-		USD 58.588,40	-	-
90	**Perum Pegadaian**										
	s.d Semester I TA 2008	5	3.112.641	8	3.112.641	-	-	-	-	8	3.112.641
	Pemantauan s.d Smt II TA 2008	5	3.112.641	8	3.112.641	-	-	-	-	8	3.112.641

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi/saran		Rekomendasi					
						Sudah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindaklanjut		Belum Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
	Periode Semester II TA 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S.d Semester II TA 2008	5	3.112.641	8	3.112.641	-	-	-	-	8	3.112.641
91	**Perum Bulog**										
	s.d Semester I TA 2008	138	14.849.295	168	1.154.954	8	-	19	67.010	141	1.087.944
			USD 16.929,03		USD 14.841,31		-		USD 13.141,17		USD 1.700,14
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	138	14.849.295	168	1.154.954	8	-	19	67.010	141	1.087.944
			USD 16.929,03		USD 14.841,31		-		USD 13.141,17		USD 1.700,14
	Periode Semester II TA 2008										
	s.d. Semester II 2008	138	14.849.295	168	1.154.954	8	-	19	67.010	141	1.087.944
			USD 16.929,03		USD 14.841,31		-		USD 13.141,17		USD 1.700,14
92	**PT Pos Indonesia**										
	s.d Semester I TA 2008	9	30.464	11	17.666	-	-	3	-	8	17.666
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	30.464	11	17.666		-	3	-	8	17.666
	Periode Semester II TA 2008										
	s.d. Semester II 2008	9	30.464	11	17.666	-	-	3	-	8	17.666
93	**PT Surveyor Indonesia**										
	s.d Semester I TA 2008	9	56.474	21	39.311	17	9.802	4	29.509	-	-
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	9	56.474	21	39.311	17	9.802	4	29.509	-	-
	Periode Semester II TA 2008										
	s.d. Semester II 2008	9	56.474	21	39.311	17	9.802	4	29.509	-	-
94	**PT Perusahaan Perdagangan Indonesia**										
	s.d Semester I TA 2008	17	209.294	15	161.629	-	-	-	-	15	161.629
			USD 12.772,57		USD 12.704,19						USD 12.704,19
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2008	17	209.294	15	161.629	-	-	-	-	15	161.629
			USD 12.772,57		USD 12.704,19						USD 12.704,19
	Periode Semester II TA 2008										
	s.d. Semester II 2008	17	209.294	15	161.629	-	-	-	-	15	161.629
			USD 12.772,57		USD 12.704,19						USD 12.704,19
	Jumlah	**2.251**	**Rp262.511.476**	**2.954**	**Rp125.775.177**	**1.000**	**Rp63.827.948**	**1.292**	**Rp51.924.527**	**662**	**Rp10.022.701**
			USD 4.107.955,21		**USD 2.675.778,94**		**USD 65.906,78**		**USD 1.092.515,97**		**USD 1.517.356,19**
			JPY 324.489,20		**JPY 24.489,20**		**JPY 24.214,92**		**JPY 274,28**		
			GBP 13.123,02		**GBP 123,02**		**GBP 123,02**				
			DEM 60.101,91		**DEM 60.101,91**		**DEM 1.135,00**		**DEM 0,00**		**DEM 58.966,91**
			EUR 53.725,82		**EUR 53.725,82**		**EUR 0,00**		**EUR 16,94**		**EUR 53.708,88**
			SGD 836,15		**SGD 836,15**		**SGD 0,00**		**SGD 836,15**		**SGD 0,00**
			AUD 516,47		**AUD 516,47**		**AUD 0,00**		**AUD 516,47**		**AUD 0,00**
			CHF 0,03		**CHF 0,03**		**CHF 0,03**		**CHF 0,00**		**CHF 0,00**

Lampiran 26

DAFTAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH DAERAH

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Keterangan	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian					
							Telah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	S.d. Semester I TA 2008	1.416	18.578.996	3.028	4.494.385	1.814	3.613.007	651	702.094	563	179.284
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.416	18.578.996	3.028	4.494.385	1.814	3.613.007	651	702.094	563	179.284
		Semester II TA 2008	370	1.754.309	740	265.685	238	7.440	157	132.620	345	125.624
		Jumlah	**1.786**	**20.333.305**	**3.768**	**4.760.070**	**2.052**	**3.620.447**	**808**	**834.714**	**908**	**304.909**
2	**Provinsi Sumatera Utara**	S.d. Semester I TA 2008	2.109	12.867.588	3.804	12.867.588	1.538	3.016.811	848	4.275.842	1.418	5.574.936
				USD 18.896		USD 18.896						USD 18.896
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	2.109	12.867.588	3.804	12.867.588	1.538	3.016.811	848	4.275.842	1.418	5.574.936
				USD 18.896		USD 18.896						USD 18.896
		Semester II TA 2008	564	19.642.475	1.152	19.642.475	-	-	1	41	1.151	19.642.434
				USD 5.077		USD 5.077						USD 5.077
		Jumlah	**2.673**	**32.510.063**	**4.956**	**32.510.063**	**1.538**	**3.016.811**	**849**	**4.275.882**	**2.569**	**25.217.370**
				USD 23.973		USD 23.973						USD 23.973
3	**Provinsi Sumatera Barat**	S.d. Semester I TA 2008	1.228	4.169.625	2.253	3.825.997	922	860.622	288	558.606	1.043	2.406.769
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.228	4.169.625	2.253	3.825.997	922	860.622	288	558.606	1.043	2.406.769
		Semester II TA 2008	586	7.100.582	1.419	6.491.137	218	2.745.381	100	40.424	1.101	3.705.331
		Jumlah	**1.814**	**11.270.207**	**3.672**	**10.317.133**	**1.140**	**3.606.003**	**388**	**599.030**	**2.144**	**6.112.100**
4	**Provinsi Riau**	S.d. Semester I TA 2008	1.034	10.081.394	2.222	10.048.610	940	6.720.440	351	885.308	931	2.442.862
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.034	5.600.884	2.243	5.171.468	968	2.102.880	386	956.235	889	2.112.353
		Semester II TA 2008	231	2.003.284	581	477.555	106	281.081	36	36.464	439	160.010
		Jumlah	**1.265**	**7.604.167**	**2.824**	**5.649.024**	**1.074**	**2.383.962**	**422**	**992.699**	**1.328**	**2.272.363**
5	**Provinsi Jambi**	S.d. Semester I TA 2008	846	5.698.184	1.771	4.638.543	1.158	2.957.816	319	244.645	294	1.436.082
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	846	5.698.184	1.773	4.640.100	1.301	2.998.081	400	1.270.776	72	371.243
		Semester II TA 2008	340	1.101.165	898	171.789	230	32.769	178	65.802	490	73.219
		Jumlah	**1.186**	**6.799.349**	**2.671**	**4.811.889**	**1.531**	**3.030.850**	**578**	**1.336.578**	**562**	**444.462**

No	Entitas	Keterangan	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian					
							Telah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
6	**Provinsi Sumatera Selatan**	S.d. Semester I TA 2008	1.353	13.415.330	1.546	13.032.964	706	6.976.059	683	5.381.305	157	675.600
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.353	13.415.330	1.546	13.032.964	706	6.976.059	683	5.381.305	157	675.600
		Semester II TA 2008	191	747.018	404	24.107	23	28	7	2.002	374	22.077
		Jumlah	**1.544**	**14.162.348**	**1.950**	**13.057.071**	**729**	**6.976.086**	**690**	**5.383.307**	**531**	**697.677**
7	**Provinsi Bengkulu**	S.d. Semester I TA 2008	578	2.350.948	1.192	215.144	828	166.103	229	43.199	135	5.841
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	578	2.350.948	1.192	215.144	828	166.103	229	43.199	135	5.841
		Semester II TA 2008	236	343.410	521	62.419	39	7.257	10	492	472	54.670
		Jumlah	**814**	**2.694.358**	**1.713**	**277.563**	**867**	**173.360**	**239**	**43.691**	**607**	**60.511**
8	**Provinsi Lampung**	S.d. Semester I TA 2008	756	17.880.237	1.463	17.880.237	714	8.376.894	239	4.472.271	510	5.031.073
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	756	17.880.237	1.463	17.880.237	831	8.971.677	261	5.510.300	371	3.398.260
		Semester II TA 2008	52	33.333	153	33.333	17	879	6	444	130	32.009
		Jumlah	**808**	**17.913.570**	**1.616**	**17.913.570**	**848**	**8.972.556**	**267**	**5.510.745**	**501**	**3.430.269**
9	**Provinsi Bangka Belitung**	S.d. Semester I TA 2008	486	1.874.829	926	1.551.495	566	1.255.830	150	145.376	210	150.289
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	439	1.250.264	839	554.676	644	426.282	165	86.031	30	42.363
		Semester II TA 2008	76	120.381	149	3.705	46	392	10	91	93	3.222
		Jumlah	**515**	**1.370.645**	**988**	**558.381**	**690**	**426.674**	**175**	**86.122**	**123**	**45.586**
10	**Provinsi Kepulauan Riau**	S.d. Semester I TA 2008	494	1.378.061	809	839.082	448	553.653	184	147.477	177	137.952
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	494	1.378.061	809	839.082	448	553.653	184	147.477	177	137.952
		Semester II TA 2008	109	283.894	93	51.848	47	2.074	41	47.063	5	2.711
		Jumlah	**603**	**1.661.955**	**902**	**890.930**	**495**	**555.727**	**225**	**194.539**	**182**	**140.663**
11	**Provinsi DKI Jakarta**	S.d. Semester I TA 2008	873	94.059.788	1.735	94.059.087	880	1.169.900	247	83.731.246	608	9.157.941
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	873	94.059.788	1.735	94.059.087	1.093	4.686.700	301	85.622.590	341	3.749.797
		Semester II TA 2008	271	1.341.951	519	1.038.371	18	2.545	23	879	478	1.034.947
		Jumlah	**1.144**	**95.401.739**	**2.254**	**95.097.458**	**1.111**	**4.689.245**	**324**	**85.623.469**	**819**	**4.784.743**

No	Entitas	Keterangan	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian					
							Telah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
12	**Provinsi Jawa Barat**	S.d. Semester I TA 2008	2.120	39.238.342	3.219	36.696.136	1.421	4.590.233	390	2.217.861	1.408	29.888.043
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	2.120	39.238.342	3.219	36.696.136	1.754	14.665.826	491	12.411.541	974	9.618.769
		Semester II TA 2008	279	1.645.146	449	103.689	9	328	5	261	435	103.100
				USD 1.100		USD 1.100						USD 1.100
		Jumlah	**2.399**	**40.883.488**	**3.668**	**36.799.825**	**1.763**	**14.666.154**	**496**	**12.411.802**	**1.409**	**9.721.869**
				USD 1.100		USD 1.100						USD 1.100
13	**Provinsi Jawa Tengah**	S.d. Semester I TA 2008	2.150	17.808.870	3.741	4.970.163	2.439	2.547.720	1.015	2.297.286	287	125.157
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	2.150	17.808.870	3.741	4.970.163	2.439	2.547.720	1.015	2.297.286	287	125.157
		Semester II TA 2008	186	36.907.804	424	1.191.442	88	1.129.962	60	6.290	276	55.191
		Jumlah	**2.336**	**54.716.674**	**4.165**	**6.161.605**	**2.527**	**3.677.681**	**1.075**	**2.303.576**	**563**	**180.347**
14	**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**	S.d. Semester I TA 2008	488	3.653.656	854	120.473	255	36.433	184	67.541	415	16.498
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	504	5.552.926	867	114.511	355	13.172	341	90.895	171	10.444
		Semester II TA 2008	53	26.778	53	2.116	2	723	-	-	51	1.393
		Jumlah	**557**	**5.579.704**	**920**	**116.627**	**357**	**13.895**	**341**	**90.895**	**222**	**11.838**
15	**Provinsi Jawa Timur**	S.d. Semester I TA 2008	3.739	27.334.552	5.797	27.334.552	1.858	8.875.664	810	1.558.871	3.129	16.900.016
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	2.981	15.694.730	4.777	15.694.730	2.509	5.529.661	786	1.476.922	1.482	8.688.147
		Semester II TA 2008	609	279.423	1.026	110.582	17	2.249	19	126	990	108.207
		Jumlah	**3.590**	**15.974.153**	**5.803**	**15.805.312**	**2.526**	**5.531.910**	**805**	**1.477.048**	**2.472**	**8.796.354**
16	**Provinsi Banten**	S.d. Semester I TA 2008	1.248	6.488.282	2.070	6.488.282	1.491	2.893.481	437	3.460.785	142	134.016
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.248	6.488.282	2.070	6.488.282	1.491	2.893.481	437	3.460.785	142	134.016
		Semester II TA 2008	114	108.631	223	108.721	2	215	-	-	221	108.507
		Jumlah	**1.362**	**6.596.913**	**2.293**	**6.597.003**	**1.493**	**2.893.695**	**437**	**3.460.785**	**363**	**242.522**
17	**Provinsi Bali**	S.d. Semester I TA 2008	708	2.060.825	1.228	2.060.825	166	152.849	233	351.530	829	1.556.446
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	775	2.617.198	1.349	2.617.198	533	969.050	316	966.686	500	681.463
		Semester II TA 2008	78	405.539	216	405.539	42	8.022	29	80.303	145	317.214
		Jumlah	**853**	**3.022.738**	**1.565**	**3.022.738**	**575**	**977.071**	**345**	**1.046.989**	**645**	**998.677**

No	Entitas	Keterangan	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian					
							Telah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
18	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	S.d. Semester I TA 2008	639	8.457.659	1.062	8.457.659	210	565.989	119	166.058	733	7.725.612
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	639	7.976.158	1.062	7.976.188	210	565.989	119	166.058	733	7.244.141
		Semester II TA 2008	77	954.306	183	28.147	-	-	-	-	183	28.147
		Jumlah	**716**	**8.930.464**	**1.245**	**8.004.335**	**210**	**565.989**	**119**	**166.058**	**916**	**7.272.288**
19	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	S.d. Semester I TA 2008	1.026	2.582.810	1.730	2.582.810	399	859.713	-	-	1.331	1.723.097
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.026	2.582.810	1.730	2.582.810	670	1.404.808	-	-	1.060	1.178.002
		Semester II TA 2008	241	1.129.080	510	1.129.080	-	-	228	263.908	282	865.172
		Jumlah	**1.267**	**3.711.891**	**2.240**	**3.711.891**	**670**	**1.404.808**	**228**	**263.908**	**1.342**	**2.043.174**
20	**Provinsi Kalimantan Barat**	S.d. Semester I TA 2008	1.054	9.292.392	1.816	2.047.129	640	280.018	317	367.293	859	1.399.818
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.054	9.166.576	1.836	2.371.568	765	288.607	486	422.203	585	1.660.758
		Semester II TA 2008	283	1.124.351	662	256.363	23	371	84	30.892	555	225.101
		Jumlah	**1.337**	**10.290.927**	**2.498**	**2.627.931**	**788**	**288.977**	**570**	**453.095**	**1.140**	**1.885.859**
21	**Provinsi Kalimantan Tengah**	S.d. Semester I TA 2008	1.426	3.312.208	2.469	3.312.208	807	525.962	487	781.322	1.175	2.004.924
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.373	2.748.099	2.462	2.748.099	1.209	1.279.982	539	626.517	714	841.600
		Semester II TA 2008	300	361.298	643	361.298	107	76.097	72	73.924	464	211.277
		Jumlah	**1.673**	**3.109.397**	**3.105**	**3.109.397**	**1.316**	**1.356.079**	**611**	**700.441**	**1.178**	**1.052.877**
22	**Provinsi Kalimantan Selatan**	S.d. Semester I TA 2008	1.555	4.881.534	2.586	4.276.290	699	1.576.372	333	316.551	1.554	2.383.366
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.555	4.881.534	2.586	4.276.290	699	1.576.372	333	316.551	1.554	2.383.366
		Semester II TA 2008	198	1.348.211	363	15.703	-	-	-	-	363	15.703
		Jumlah	**1.753**	**6.229.745**	**2.949**	**4.291.993**	**699**	**1.576.372**	**333**	**316.551**	**1.917**	**2.399.069**
23	**Provinsi Kalimantan Timur**	S.d. Semester I TA 2008	1.171	63.004.088	2.065	63.004.088	1.121	24.155.649	661	34.347.765	283	4.500.674
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.171	63.004.088	2.065	63.004.088	1.121	24.155.649	661	34.347.765	283	4.500.674
		Semester II TA 2008	263	26.295.621	531	26.295.621	56	1.102.970	114	15.620.570	361	9.572.081
		Jumlah	**1.434**	**89.299.710**	**2.596**	**89.299.710**	**1.177**	**25.258.619**	**775**	**49.968.335**	**644**	**14.072.755**

No	Entitas	Keterangan	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian					
							Telah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
24	**Provinsi Sulawesi Utara**	S.d. Semester I TA 2008	738	1.132.047	1.699	174.434	242	12.140	247	17.850	1.210	144.444
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	904	1.120.058	1.659	157.259	454	19.586	289	12.667	916	125.005
		Semester II TA 2008	70	74.097	136	4.376	0	0	0	0	136	4.376
		Jumlah	**974**	**1.194.155**	**1.795**	**161.634**	**454**	**19.586**	**289**	**12.667**	**1.052**	**129.381**
25	**Provinsi Sulawesi Tengah**	S.d. Semester I TA 2008	658	963.601	1.308	519.567	411	74.128	212	150.278	685	295.161
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	658	963.601	1.308	519.567	411	74.128	212	150.278	685	295.161
		Semester II TA 2008	124	966.929	252	160.796	23	28.548	46	62.040	183	70.208
		Jumlah	**782**	**1.930.530**	**1.560**	**680.363**	**434**	**102.676**	**258**	**212.319**	**868**	**365.369**
26	**Provinsi Sulawesi Selatan**	S.d. Semester I TA 2008	1.810	6.619.984	3.174	6.619.984	342	861.657	84	56.297	2.748	5.702.030
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	1.805	9.930.608	3.261	2.733.256	503	245.880	706	222.097	2.052	2.265.279
		Semester II TA 2008	484	983.401	1.032	1.234.304	138	31.108	72	15.648	822	1.187.548
		Jumlah	**2.289**	**10.914.009**	**4.293**	**3.967.560**	**641**	**276.988**	**778**	**237.746**	**2.874**	**3.452.827**
27	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	S.d. Semester I TA 2008	845	5.808.590	1.289	5.808.590	504	355.995	472	2.479.816	313	2.972.779
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	297	1.750.996	822	1.750.996	227	88.059	157	109.336	438	1.553.600
		Semester II TA 2008	304	428.275	584	428.275	-	-	-	-	584	428.275
		Jumlah	**601**	**2.179.271**	**1.406**	**2.179.271**	**227**	**88.059**	**157**	**109.336**	**1.022**	**1.981.876**
28	**Provinsi Gorontalo**	S.d. Semester I TA 2008	293	339.858	568	123.327	246	18.716	12	5.077	310	99.534
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	293	339.858	568	123.327	342	19.310	147	11.632	79	92.385
		Semester II TA 2008	90	73.653	193	29.243	-	-	-	-	193	29.243
		Jumlah	**383**	**413.511**	**761**	**152.570**	**342**	**19.310**	**147**	**11.632**	**272**	**121.628**
29	**Provinsi Sulawesi Barat**	S.d. Semester I TA 2008	412	948.128	789	948.128	153	81.415	212	399.860	424	466.853
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	412	948.128	789	948.128	175	301.372	234	211.274	380	435.482
		Semester II TA 2008	175	2.016.050	402	2.016.050	78	64.542	92	1.453.662	232	497.847
		Jumlah	**587**	**2.964.178**	**1.191**	**2.964.178**	**253**	**365.914**	**326**	**1.664.935**	**612**	**933.329**

No	Entitas	Keterangan	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian					
							Telah Ditindaklanjuti		Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
30	**Provinsi Maluku**	S.d. Semester I TA 2008	422	6.396.766	818	6.396.766	145	137.597	101	626.080	572	5.633.090
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	425	6.421.623	818	6.421.623	239	301.643	174	1.137.843	405	4.982.137
		Semester II TA 2008	170	6.180.545	436	6.180.545	43	473.885	22	4.145	371	5.702.515
		Jumlah	**595**	**12.602.168**	**1.254**	**12.602.168**	**282**	**775.528**	**196**	**1.141.988**	**776**	**10.684.652**
31	**Provinsi Maluku Utara**	S.d. Semester I TA 2008	564	1.111.966	1.003	1.036.748	191	142.153	87	61.107	725	833.488
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	549	999.120	1.035	984.209	291	141.709	93	57.849	651	784.652
		Semester II TA 2008	289	539.774	554	539.774	26	836	9	290	519	538.648
		Jumlah	**838**	**1.538.895**	**1.589**	**1.523.984**	**317**	**142.545**	**102**	**58.139**	**1.170**	**1.323.300**
32	**Provinsi Papua**	S.d. Semester I TA 2008	611	13.361.146	855	13.361.146	114	2.321.423	145	1.282.868	596	9.756.856
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	611	13.361.146	855	13.361.146	114	2.321.423	145	1.282.868	596	9.756.856
		Semester II TA 2008	248	4.781.972	392	2.777.260	-	-	1	786	391	2.776.474
		Jumlah	**859**	**18.143.118**	**1.247**	**16.138.406**	**114**	**2.321.423**	**146**	**1.283.654**	**987**	**12.533.330**
33	**Provinsi Papua Barat**	S.d. Semester I TA 2008	291	2.579.955	360	2.579.955	71	173.014	108	489.955	181	1.916.987
		Pemantauan s.d. Semester II TA 2008 (update balance)	412	4.263.820	621	4.263.820	159	530.254	89	479.017	373	3.254.549
		Semester II TA 2008	300	5.080.260	655	5.080.260	-	-	-	-	655	5.080.260
		Jumlah	**712**	**9.344.080**	**1.276**	**9.344.080**	**159**	**530.254**	**89**	**479.017**	**1.028**	**8.334.809**
	TOTAL		**42.049**	**Rp521.291.426**	**76.733**	**Rp415.105.733**	**29.399**	**Rp100.305.254**	**13.588**	**Rp182.751.695**	**33.746**	**Rp132.048.784**
				USD 25.073		**USD 25.073**						**USD 25.073**

DAFTAR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2008

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
			APBN			
1	1	1	**Mabes TNI**	1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada Badan Pembekalan TNI (Babek) TNI di Jakarta dan Surabaya.	PDTT
2	1	2	**TNI AL**	1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pd Diskesal di Jakarta dan Surabaya.	PDTT
	2	3		1	Pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal TA 2006 pd Dislitbangal di Jakarta.	PDTT
	3	4		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada Lantamal IV Tanjung Pinang.	PDTT
3	1	5	**TNI AD**	1	Pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal TA 2006 pada Dithubad di Jakarta dan Bandung.	PDTT
	2	6		1	Pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal pada Mabes TNI AD.	PDTT
	3	7		1	Pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal pada Puspenerbad di Jakarta dan Semarang.	PDTT
	4	8		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada Ditpalad di Jakarta dan Bandung.	PDTT
	5	9		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada Secapa di Bandung.	PDTT
	6	10		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA`2006 & 2007 pada Seskoad di Bandung.	PDTT
	7	11		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada Disinfolahtad di Jakarta	PDTT
	8	12		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada Kodam VII/Wirabuana di Makasar, Palu dan Manado.	PDTT
4	1	13	**TNI AU**	1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada Staf Personil TNI AU di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Makassar.	PDTT
	2	14		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada Kodikau Jakarta, Bandung, Jogyakarta dan Solo.	PDTT
5	1	15	**Depkumham**	1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 pada Setjen Depkumham di Jakarta, Medan dan Surabaya.	PDTT
	2	16		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 & 2008 pada Kanwil Depkumham Papua.	PDTT
	3	17		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 & 2008 pada Kanwil Depkumham Lampung.	PDTT
	4	18		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 & 2008 pada Kanwil Depkumham Sumsel.	PDTT
	5	19		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 & 2008 pada Kanwil Depkumham Papua Barat.	PDTT
	6	20		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 & 2008 dan Pembinaan kemandirian ketrampilan narapidana serta kerjasama dengan PT Holcim pada Ditjen Pemasayarakatan Depkumham.	PDTT
6	1	21	**Kejaksaan Agung**	1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 & 2008 pada Kejati dan Kejari Sumut.	PDTT
	2	22		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 & 2008 pada Kejati dan Kejari Sulsel	PDTT
7	1	23	**Departemen Luar Negeri**	1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Buenos Aires, di Argentina	PDTT
	2	24		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Brasilia, di Brasil.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	3	25		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada kantor perwalikan RI di Santiago, Chile.	PDTT
	4	26		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KJRI San Fransisco, di USA.	PDTT
	5	27		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KJRI Los Angeles, di USA.	PDTT
	6	28		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Beijing, di China.	PDTT
	7	29		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KJRI Hongkong, di China.	PDTT
	8	30		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KJRI Guangzhou, di China.	PDTT
	9	31		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KJRI Denhaag, di Belanda.	PDTT
	10	32		1	Belanja dan PNBP TA 2007 & 2008 pada KBRI Berlin, di Jerman.	PDTT
8	1	33	**Departemen Perhubungan**	1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada kantor pusat Ditjen Perhubungan Udara, Dit. Keselamatan Penerbangan, Dit. Teknik Bandara, dan Dit. Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan dan Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan di Jakarta dan Banten.	PDTT
	2	34		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan pada satker bandara Hasanuddin dan bandara Tampa Padang TA 2007 & 2008 di Makassar dan Mamuju.	PDTT
	3	35		1	Sekolah Tinggi Transportasi Darat, Pusdiklat Aparatur, dan Balitbang pada Dephub di Jakarta, Bogor, dan Bekasi.	PDTT
	4	36		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2007 & 2008 pada satker bandara Muara Bungo dan bandara Silampari di Jambi dan Sumsel.	PDTT
	5	37		1	Pelaksanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada satker bandara Mutiara, bandara Wolter Monginsidi, dan bandara Andi Jemma di Palu, Kendari, dan Masamba.	PDTT
9		38	**KPU**	1	Pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan pilkada langsung pada KPUD dan panitia pengawas provinsi DKI Jakarta serta instansi terkait TA 2007 di Jakarta.	PDTT
10		39	**BMG**	1	Pelaksaanaan anggaran kegiatan TA 2006 & 2007 pada BMG di Jakarta dan Surabaya.	PDTT
11	1	40	**Depkeu (Bea Cukai)**	1	Pemeriksaan atas pelayanan kepabeanan dan cukai pada KPBC type A-1 Tanjung Emas Semarang, KPPBC type A a-2 Jakarta, KPBC type A-3 Merak.	PDTT
	2	41	**Depkeu (Pajak)**	1	Pemeriksaan atas penerimaan pajak pada KPP pratama Jakarta Pulogadung, KPP pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, KPP pratama Bekasi Selatan, KPP pratama Tangerang Barat di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.	PDTT
	3	42		1	Pengelolaan pinjaman luar negeri pada Depkeu, Bappenas, dan 9 (sembilan) kementerian/lembaga.	PDTT
12		43	**LPS**	1	Pemeriksaan atas program penjaminan pada Lembaga Penjamin Simpanan di Jakarta.	PDTT
13		44	**PPA**	1	Pemeriksaan atas pengelolaan aset eks BPPN di PT. PPA.	PDTT
14		45	**Departemen Perindustrian**	1	Efektifitas pelayanan jasa pengujian bahan dan kalibrasi teknik pada B4T Departemen Perindustrian.	Pem. Kinerja

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
15		46	**Departemen Perdagangan**	1	Pendapatan dan belanja TA 2006, 2007, dan semester I 2008 pada kantor dagang dan ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dan Jakarta.	PDTT
16		47	**DPD**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan TA 2007 dan 2008	PDTT
17		48	**MPR**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan TA 2007 dan 2008	PDTT
18		49	**Departemen Sosial**	1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana UKS di Jakarta.	PDTT
19		50	**Menko Kesra**	1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanggulangan pasca bencana TA 2007.	PDTT
20		51	**Menpora**	1	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, peningkatan sarana dan prasarana OR di Jakarta dan Samarinda.	PDTT
21		52	**BPN**	1	Pelayanan pertanahan dan pengelolaan keuangan tahun 2007 dan 2008 di Jakarta dan Jabar.	PDTT
22		53	**BPPT**	1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2007 dan 2008 pada Satuan Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta.	PDTT
23		54	**BKKBN**	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja TA 2008 pada Sekretariat Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta, Surabaya dan Madan.	PDTT
24		55	**Bakorsurtanal**	1	Pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2007 dan 2008 pada satker Deputi bidang pemetaan dasar dan Deputi bidang infrastruktur data spasial Bakosurtanal di Cibinong.	PDTT
25	1	56	**Depnakertrans**	1	Pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pengelolaan dana/pungutan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut pada Depnakertrans, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Dinas atau Kantor Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Serang dan Kuala Lumpur.	Pem. Kinerja
	2	57		1	Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jawa Timur dan Prov. Kalimantan Selatan serta instansi terkait ditingkat kabupaten/kota di Surabaya dan Banjarmasin.	PDTT
26		58	**LPP-TVRI**	1	Pengelolaan pendapatan, pengadaan barang/jasa dan pembayaran hutang TA 2007 dan semester I 2008 pada LPP TVRI di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandar Lampung, dan Padang.	PDTT
27		59	**Departemen Pekerjaan Umum**	1	Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Instansi Terkait di Jakarta, Semarang, Surakarta, dan Surabaya.	Pem. Kinerja

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
		60		1	Kegiatan Pengadaan Material Jembatan Rangka Baja Tahap III (Prefabricated Steel Truss Bridge Material Phase III) Yang Dibiayai Dari Pinjaman Pemerintah Spanyol Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (Snvt) Pengadaan Peralatan/Bahan Jalan Dan Jembatan Sub Direktorat Bahan Dan Peralatan Jalan Dan Jembatan Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Di Jakarta.	Pem. Kinerja
28	1	61	**Departemen Kehutanan**	1	Manajemen Hutan Yang Terkait Dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan Dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Pada Departemen Kehutanan Dan Instansi Terkait Lainnya Di DKI Jakarta Dan Bogor.	PDTT
	2	62		1	Manajemen Hutan Yang Terkait Dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan Dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (Upt), Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi Kalimantan Tengah.	PDTT
	3	63		1	Manajemen Hutan Yang Terkait Dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan Dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (Upt), Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi Kalimantan Timur.	PDTT
	4	64		1	Manajemen Hutan Yang Terkait Dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan Dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (Upt), Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi Kalimantan Barat.	PDTT
	5	65		1	Manajemen Hutan Yang Terkait Dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan Dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (Upt), Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi Riau.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	6	66		1	Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Pada PT Inhutani V Dan Departemen Kehutanan Termasuk Dinas Kehutanan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Serta Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta Dan Lampung.	PDTT
29	1	67	**Departemen ESDM**	1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 pada Departemen ESDM, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Prov. Sumsel, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kontraktor PKP2B dan Pemegang Kuasa Pertambangan di Jakarta, Palembang, Banjarmasin, Palangkaraya dan Samarinda.	PDTT
	2	68		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Provinsi Kalteng.	PDTT
	3	69		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Barito Selatan.	PDTT
	4	70		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Barito Timur.	PDTT
	5	71		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Barito Utara.	PDTT
	6	72		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Gunung Mas.	PDTT
	7	73		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Kapuas.	PDTT
	8	74		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kota Waringin Barat.	PDTT
	9	75		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Surayan.	PDTT
	10	76		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kota Samarinda.	PDTT
	11	77		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Kutai Timur.	PDTT
	12	78		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Berau.	PDTT
	13	79		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Kutai Barat.	PDTT
	14	80		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kota Tarakan.	PDTT
	15	81		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Nunukan.	PDTT
	16	82		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Paser.	PDTT
	17	83		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Kutai Kertanegara.	PDTT
	18	84		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Tanah Bumbu.	PDTT
	19	85		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	20	86		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kota Baru.	PDTT
	21	87		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Tapin.	PDTT
	22	88		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Balangan.	PDTT
	23	89		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Tabalong.	PDTT
	24	90		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Banjar.	PDTT
	25	91		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Tanah Laut.	PDTT
	26	92		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Lahat.	PDTT
	27	93		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Muara Enim.	PDTT
	28	94		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin.	PDTT
	29	95		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu.	PDTT
	30	96		1	Pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 Pemerintah Kab. Musi Rawas.	PDTT
30		97	**Departemen Kelautan dan Perikanan**	1	Kinerja pengelolaan Pelabuhan di Jakarta, Pekalongan dan Tegal Tahun 2005 s.d. 2008.	Pem. Kinerja
31	1	98	**Departemen Dalam Negeri**	1	Kinerja pemekaran daerah Tahun 1999 s.d. 2007 pada Depdagri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.	Pem. Kinerja
	2	99		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penunjang Pembinaan Tahun 2001 s.d. 2008 pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta	PDTT
32	1	100	**Departemen Agama**	1	Laporan Keuangan BPIH Tahun 2007.	Pem. Keuangan
	2	101		1	Laporan Keuangan Dana Abadi Umat Tahun 2006	Pem. Keuangan
	3	102		1	Laporan Keuangan Dana Abadi Umat Tahun 2007	Pem. Keuangan
	4	103		1	Kinerja penyelenggaraan haji Tahun 2007.	Pem. Kinerja
	5	104		1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Bidang Kesehatan Tahun 1428 H/2007 M pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP & PL) Departemen Kesehatan	Pem. Kinerja
	6	105		1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan program wajar dikdas 9 tahun TA 2007 dan 2008 pada kanwil Depag Prov. Kalbar di Pontianak.	PDTT
	7	106		1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan program wajar dikdas 9 tahun TA 2007 dan 2008 pada kanwil Depag Prov. Kalsel di Banjarmasin.	PDTT
	8	107		1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan program wajar dikdas 9 tahun TA 2007 dan 2008 pada kanwil Depag Prov. Jambi di Jambi.	PDTT
	9	108		1	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan program wajar dikdas 9 tahun TA 2007 dan 2008 pada kanwil Depag Prov. Sulsel di Makassar.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
33	1	109	**BRR NAD dan Nias**	1	Laporan Keuangan Konsolidasi ETESP PMO-BRR Nias Tahun 2007	Pem. Keuangan
	2	110		1	Kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dan pemukiman bantuan luar negeri TA 2006 dan 2007 pada BRR NAD-Nias.	Pem. Kinerja
	3	111		1	Pemeriksaan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi bidang agama, sosial, dan budaya TA 2006 dan 2007 pada BRR NAD-Nias.	Pem. Kinerja
	4	112		1	Pemeriksaan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan dan kesehatan TA 2006 dan 2007 pada BRR NAD-Nias di Kab. Nias dan Nias Selatan.	Pem. Kinerja
	5	113		1	Pemeriksaan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi transportasi udara TA 2006 dan 2007 pada BRR NAD-Nias.	Pem. Kinerja
34		114	**Departemen Pendidikan Nasional**	1	Dana bantuan operasional sekolah dan dana pendidikan dasar lainnya TA 2007 dan 2008 (semester I).	PDTT
35	1	115	**Departemen Kesehatan**	1	Pelayanan farmasi TA 2007 dan semester I TA 2008 pada BLU RSUP Persahabatan.	Pem. Kinerja
	2	116		1	Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan TA 2006-2008 pada Departemen Kesehatan.	PDTT
Jumlah APBN				**116**		
			APBD/BUMD			
1			**Prov. NAD**			
	1	1		1	LKPD Tahun 2007 Prov. NAD.	Pem. Keuangan
	2	2		1	LKPD Tahun 2007 Kota Banda Aceh.	Pem. Keuangan
	3	3		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Besar.	Pem. Keuangan
	4	4		1	LKPD Tahun 2007 Kota Sabang.	Pem. Keuangan
	5	5		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Pidie.	Pem. Keuangan
	6	6		1	LKPD Tahun 2007 Kota Lhokseumawe.	Pem. Keuangan
	7	7		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Bireun.	Pem. Keuangan
	8	8		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Barat.	Pem. Keuangan
	9	9		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Simeulue.	Pem. Keuangan
	10	10		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Jaya.	Pem. Keuangan
	11	11		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Nagan Raya.	Pem. Keuangan
	12	12		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Barat Daya.	Pem. Keuangan
	13	13		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Selatan.	Pem. Keuangan
	14	14		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Singkil.	Pem. Keuangan
	15	15		1	LKPD Tahun 2007 Kota Langsat.	Pem. Keuangan
	16	16		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Timur.	Pem. Keuangan
	17	17		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Utara.	Pem. Keuangan
	18	18		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Tengah.	Pem. Keuangan
	19	19		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Bener Meriah.	Pem. Keuangan
	20	20		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Gayo Lues.	Pem. Keuangan
	21	21		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Aceh Tenggara.	Pem. Keuangan
	22	22		1	LKPD Tahun 2007 , 2006 Kab. Aceh Tamiang.	Pem. Keuangan
	23	23		1	Pengelolaan obat Tahun anggaran 2007 dan 2008 Pada Dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial Kota sabang Di Sabang.	Pem. kinerja
	24	24		1	Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pt Bank BPD Aceh Tahun Buku 2007 Dan 2008 Di Banda Aceh.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	25	25		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi NAD.	PDTT
	26	26		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Aceh Tenggara.	PDTT
2			**Prov. Sumut**			
	1	27		1	LKPD Tahun 2007 Prov. Sumatera Utara.	Pem. Keuangan
	2	28		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Pakpak Barat.	Pem. Keuangan
	3	29		1	LKPD Tahun 2007 Kota Sibolga.	Pem. Keuangan
	4	30		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Mandailing Natal.	Pem. Keuangan
	5	31		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Nias.	Pem. Keuangan
	6	32		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Dairi.	Pem. Keuangan
	7	33		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Batubara.	Pem. Keuangan
	8	34		1	LKPD Tahun 2007 Kota Medan.	Pem. Keuangan
	9	35		1	LKPD Tahun 2007 Kota Pematang Siantar.	Pem. Keuangan
	10	36		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Langkat.	Pem. Keuangan
	11	37		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Simalungun.	Pem. Keuangan
	12	38		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Karo.	Pem. Keuangan
	13	39		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Labuhan Batu.	Pem. Keuangan
	14	40		1	LKPD Tahun 2007 Kab.Tapanuli Tengah.	Pem. Keuangan
	15	41		1	LKPD Tahun 2007 Kota Padang Sidempuan.	Pem. Keuangan
	16	42		1	LKPD Tahun 2007 Kab.Tapanuli Selatan.	Pem. Keuangan
	17	43		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Nias Selatan.	Pem. Keuangan
	18	44		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Toba Samosir.	Pem. Keuangan
	19	45		1	LKPD Tahun 2007 Kota Tanjungbalai.	Pem. Keuangan
	20	46		1	LKPD Tahun 2007 Kota Tebing Tinggi.	Pem. Keuangan
	21	47		1	Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Djasamen Saragih.	Pem. kinerja
	22	48		1	Pelayanan Pendidikan Kota Pematang Siantar.	Pem. kinerja
	23	49		1	pelayanan Pendidikan Kota Padang Sidempuan.	Pem. kinerja
	24	50		1	Belanja daerah TA 2008 Pemerintah Kota Binjai.	PDTT
	25	51		1	Pelaksanaan Belanja daerah TA 2007 Dan 2008 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Asahan Di Kisaran.	PDTT
	26	52		1	Pelaksanaan Belanja daerah TA 2007 Dan 2008 Pada Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tapanuli Tengah.	PDTT
	27	53		1	Pelaksanaan Belanja daerah TA 2007 Dan 2008 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas pekerjaan Umum Pengairan, Dinas perkotaan Permukiman Pengembangan Wilayah Dan Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kab. Simalungun Di Pematang Raya.	PDTT
	28	54		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Prov. Sumut.	PDTT
	29	55		1	Dana Bos dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Pemerintah Prov. Sumut.	PDTT
	30	56		1	Dana Bos dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Pemerintah Kota Medan.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	31	57		1	Dana Bos dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Deli Serdang.	PDTT
	32	58		1	Dana Bos dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Pemerintah Kab. Simalungun.	PDTT
3			**Prov. Sumbar**			
	1	59		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Sijunjung.	Pem. Keuangan
	2	60		1	LKPD Tahun 2007 Kota Sawahlunto.	Pem. Keuangan
	3	61		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Dharmasraya.	Pem. Keuangan
	4	62		1	LKPD Tahun 2007 Kota Padang.	Pem. Keuangan
	5	63		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Padang Pariaman.	Pem. Keuangan
	6	64		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Pasaman Barat.	Pem. Keuangan
	7	65		1	LKPD Tahun 2007 Kota Padang Panjang.	Pem. Keuangan
	8	66		1	LKPD Tahun 2007 Kota Solok.	Pem. Keuangan
	9	67		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Solok Selatan.	Pem. Keuangan
	10	68		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Kep. Mentawai.	Pem. Keuangan
	11	69		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Agam.	Pem. Keuangan
	12	70		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Lima Puluhkota.	Pem. Keuangan
	13	71		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Tanah Datar.	Pem. Keuangan
	14	72		1	LKPD Tahun 2007 Kota Bukit Tinggi.	Pem. Keuangan
	15	73		1	LKPD Tahun 2007 Kota Payahkumbuh.	Pem. Keuangan
	16	74		1	pelayanan Kesehatan Kota Payahkumbuh.	Pem. kinerja
	17	75		1	pelayanan kesehatan Kab. Tanah Datar.	Pem. kinerja
	18	76		1	Belanja Daerah Tahun 2008 Prov. Sumbar.	PDTT
	19	77		1	Belanja Daerah Tahun 2008 Kab. Solok.	PDTT
	20	78		1	Belanja Daerah Tahun 2008 Kota Padang.	PDTT
	21	79		1	Belanja Daerah Tahun 2008 Kab. Pesisir Selatan.	PDTT
	22	80		1	Belanja Daerah Tahun 2008 Kab. Pasaman.	PDTT
	23	81		1	Belanja Daerah Tahun 2008 Kab. Lima Puluhkota.	PDTT
	24	82		1	Pendapatan Kota Padang.	PDTT
	25	83		1	Operasional PT Bank Nagari.	PDTT
	26	84		1	Operasional PDAM Kota Padang.	PDTT
	27	85		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Sumbar.	PDTT
	28	86		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Agam.	PDTT
	29	87		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Lima Puluhkota.	PDTT
4			**Prov. Sumsel**			
	1	88		1	LKPD Tahun 2007 Kota Palembang.	Pem. Keuangan
	2	89		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Musi Rawas.	Pem. Keuangan
	3	90		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Ogan Komering Ilir.	Pem. Keuangan
	4	91		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan.	Pem. Keuangan
	5	92		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Lahat.	Pem. Keuangan
	6	93		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Ogan Ilir.	Pem. Keuangan
	7	94		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Lahat.	Pem. kinerja
	8	95		1	Belanja Daerah TA 2008 Kota Palembang	PDTT
	9	96		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	10	97		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Ogan Komering Ulu.	PDTT
	11	98		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Banyuasin.	PDTT
	12	99		1	Belanja Daerah TA 2008 Kota Lubuk Linggau.	PDTT
	13	100		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada TA 2008 Kota Lubuk Linggau.	PDTT
	14	101		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada TA 2008 Kota Pagar Alam.	PDTT
	15	102		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada TA 2008 Kota Prabumulih.	PDTT
	16	103		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada TA 2008 Kab. Muara Enim.	PDTT
	17	104		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada TA 2008 Kota Palembang.	PDTT
	18	105		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada TA 2008 Kab. Banyuasin.	PDTT
	19	106		1	Operasional PDAM Tirta Musi.	PDTT
	20	107		1	Operasional PD Hotel Swarna Dwipa.	PDTT
	21	108		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Sumsel.	PDTT
	22	109		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Musi Rawas.	PDTT
	23	110		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Musi Banyuasin.	PDTT
5			**Prov. Bangka Belitung**			
	1	111		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Bangka Selatan.	Pem. Keuangan
	2	112		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Belitung Timur.	Pem. Keuangan
	3	113		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Bangka Tengah.	Pem. Keuangan
	4	114		1	Belanja Daerah Kab. Bangka Tengah.	PDTT
	5	115		1	Belanja Daerah Kab. Belitung Timur.	PDTT
	6	116		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Bangka Belitung.	PDTT
	7	117		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Bangka.	PDTT
6			**Prov. Bengkulu**			
	1	118		1	LKPD Tahun 2007 Prov. Bengkulu.	Pem. Keuangan
	2	119		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Bengkulu Selatan.	Pem. Keuangan
	3	120		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Bengkulu Utara.	Pem. Keuangan
	4	121		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Kaur.	Pem. Keuangan
	5	122		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Kepahyang.	Pem. Keuangan
	6	123		1	LKPD Tahun 2007 Kota Bengkulu.	Pem. Keuangan
	7	124		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Lebong.	Pem. Keuangan
	8	125		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Muko-muko.	Pem. Keuangan
	9	126		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Seluma.	Pem. Keuangan
	10	127		1	Pelayanan Kesehatan RSUD DR M Yunus Bengkulu.	Pem. kinerja
		128		1	Belanja Daerah Prov. Bengkulu	PDTT
	11	129		1	Belanja Daerah Kab. Seluma.	PDTT
	12	130		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Bengkulu.	PDTT
	13	131		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Bengkulu Utara.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
7			**Prov. Jambi**			
	1	132		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Bungo.	Pem. Keuangan
	2	133		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Kerinci.	Pem. Keuangan
	3	134		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Merangin.	Pem. Keuangan
	4	135		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Muaro Jambi.	Pem. Keuangan
	5	136		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Sarolangon.	Pem. Keuangan
	6	137		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Tanjung Jabung Barat.	Pem. Keuangan
	7	138		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Tanjung Jabung Timur.	Pem. Keuangan
	8	139		1	LKPD Tahun 2007 Kota Jambi.	Pem. Keuangan
	9	140		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Batang Hari.	Pem. Keuangan
	10	141		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Bungo.	Pem. kinerja
	11	142		1	Pelayanan kesehatan RSUD Raden Mattaher.	Pem. kinerja
	12	143		1	Belanja Daerah Kab. Batang Hari.	PDTT
	13	144		1	Belanja Daerah Kab. Tebo.	PDTT
	14	145		1	Belanja Daerah Kab. Kerinci.	PDTT
	15	146		1	Belanja Daerah Kab. Merangin.	PDTT
	16	147		1	Belanja Daerah Kab. Sarolangun.	PDTT
	17	148		1	Belanja Daerah Khusus Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas pendidikan, Dan Dinas kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur TA 2008 Di Muara Sabak.	PDTT
	18	149		1	Belanja Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.	PDTT
	19	150		1	Pendapatan Daerah Prov. Jambi.	PDTT
	20	151		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Jambi.	PDTT
	21	152		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Jambi.	PDTT
	22	153		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Muaro Jambi.	PDTT
8			**Prov. Lampung**			
	1	154		1	Pelayanan kesehatan RSUD A. Moeloek.	Pem. kinerja
	2	155		1	Pelayanan kesehatan RSUD Jend A. Yani.	Pem. kinerja
	3	156		1	Belanja Daerah Kab. Lampung Barat.	PDTT
	4	157		1	Belanja Daerah Kab. Tulang Bawang.	PDTT
	5	158		1	Belanja Daerah Kab. Lampung Utara.	PDTT
	6	159		1	Belanja Daerah Kab. Lampung Selatan.	PDTT
	7	160		1	Belanja Daerah Kab. Way Kanan.	PDTT
	8	161		1	Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.	PDTT
	9	162		1	Belanja Daerah Kab. Lampung Timur.	PDTT
	10	163		1	Belanja Daerah Kab. Lampung Tengah.	PDTT
	11	164		1	Belanja Daerah Kab. Tanggamus.	PDTT
	12	165		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Lampung.	PDTT
	13	166		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Bandar Lampung.	PDTT
	14	167		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Lampung Tengah.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
9			**Prov. Riau**			
	1	168		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Indragiri Hulu.	Pem. Keuangan
	2	169		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Kuantan Singingi.	Pem. Keuangan
	3	170		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Siak.	Pem. Keuangan
	4	171		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Indragiri Hilir.	Pem. Keuangan
	5	172		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Bengkalis.	Pem. Keuangan
	6	173		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Arifin Achmad.	Pem. kinerja
	7	174		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Dumai.	Pem. kinerja
	8	175		1	Belanja Tahun 2007 Kab. Bengkalis.	PDTT
	9	176		1	Belanja Tahun 2008 Kab. Bengkalis.	PDTT
	10	177		1	Pemeriksaan Ulang atas Pekerjaan Timbunan Tanah pada Pembangunan Jalan Dalu-Dalumahato-Sim-pang Manggala Tahun 2008 Prov. Riau.	PDTT
	11	178		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Riau.	PDTT
	12	179		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Rokan Hilir.	PDTT
	13	180		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Rokan Hulu.	PDTT
	14	181		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Kuantan Singingi.	PDTT
	15	182		1	Operasional PT Riau Air Line (RAL).	PDTT
10			**Prov. Kepri**			
	1	183		1	LKPD Tahun 2007 Kota Batam.	Pem. Keuangan
	2	184		1	LKPD Tahun 2007 Kota Tanjung Pinang.	Pem. Keuangan
	3	185		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Karimun.	Pem. Keuangan
	4	186		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Lingga.	Pem. Keuangan
	5	187		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Tanjung Pinang.	Pem. kinerja
	6	188		1	Belanja Modal Tahun 2007 & 2008 Kab. Bintan.	PDTT
	7	189		1	Pendapatan Daerah Pemkot Batam.	PDTT
	8	190		1	Pendapatan Badan Otorita Batam.	PDTT
	9	191		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Kepri.	PDTT
	10	192		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Tanjung Pinang.	PDTT
	11	193		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Lingga.	PDTT
11			**Prov DKI Jakarta**			
	1	194		1	Operasional Bus Way Dishub. Prov. DKI & BLU.	Pem. kinerja
	2	195		1	Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta	Pem. kinerja
	3	196		1	Belanja Daerah Badan Kesbang DKI.	PDTT
	4	197		1	Belanja Daerah Dinas PJU & SJU.	PDTT
	5	198		1	Belanja Daerah Dinas Tata Kota.	PDTT
	6	199		1	Belanja Daerah BKD.	PDTT
	7	200		1	Belanja Daerah Dinas UKM.	PDTT
	8	201		1	Belanja Daerah Dinas Kebersihan.	PDTT
	9	202		1	Belanja Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat.	PDTT
	10	203		1	Pengelolaan Aset Prov. DKI.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	11	204		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. DKI (Dinas Penddk).	PDTT
	12	205		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. DKI (Kanwil Depag).	PDTT
	13	206		1	Pendapatan Pajak Hotel Dipenda DKI.	PDTT
	14	207		1	Operasional PD Sarana Jaya.	PDTT
	15	208		1	Operasional PT Pemb. Jaya Ancol.	PDTT
	16	209		1	Operasional RSUD Pasar Rebo.	PDTT
	17	210		1	Operasional PT Bank DKI.	PDTT
	18	211		1	Operasional PDAM Jaya di Jakarta.	PDTT
	19	212		1	Operasional Taman Marga Satwa Ragunan.	PDTT
12			**Prov. Banten**			
	1	213		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Tangerang.	Pem. kinerja
	2	214		1	Belanja Daerah Prov. Banten.	PDTT
	3	215		1	Belanja Daerah Kab. Serang.	PDTT
	4	216		1	Belanja Daerah Kab. Tangerang.	PDTT
	5	217		1	Belanja Daerah Kab. Pandeglang.	PDTT
	6	218		1	Pilkada Kab. Tangerang.	PDTT
	7	219		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Banten.	PDTT
	8	220		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Banten (Kanwil Depag).	PDTT
	9	221		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Lebak.	PDTT
	10	222		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Serang.	PDTT
	11	223		1	Pendapatan Daerah TA 2008 dan Pengelolaan Aset (Fasos-Fasum dan Kerjasama Pihak Ketiga) Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2008 di Tigaraksa.	PDTT
	12	224		1	Operasional PDAM Kota Tangerang.	PDTT
13			**Prov. Jabar**			
	1	225		1	Pendapatan daerah Prov. Jabar.	PDTT
	2	226		1	Pendapatan daerah Kota Tasikmalaya.	PDTT
	3	227		1	Pendapatan daerah Kota Cirebon.	PDTT
	4	228		1	Pendapatan daerah Kota Bekasi.	PDTT
	5	229		1	Pilkada Prov. Jabar.	PDTT
	6	230		1	Pilkada Kota Tasikmalaya.	PDTT
	7	231		1	Pilkada Kota Cirebon.	PDTT
	8	232		1	Pilkada Kab. Sumedang.	PDTT
	9	233		1	Pilkada Kab. Purwakarta.	PDTT
	10	234		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Jabar (Dinas Penddk).	PDTT
	11	235		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Jabar (Kanwil Depag).	PDTT
	12	236		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Cianjur.	PDTT
	13	237		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Sukabumi.	PDTT
	14	238		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Tasikmalaya.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	15	239		1	Operasional PDAM Kab. Bogor.	PDTT
	16	240		1	Operasional PT Agronesia.	PDTT
	17	241		1	Operasional PT Bank Jabar Kab. Bogor.	PDTT
14			**Prov. Jateng**			
	1	242		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Grobogan.	Pem. Keuangan
	2	243		1	LKPD Tahun 2007 Kota Pekalongan.	Pem. Keuangan
	3	244		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Banyumas.	Pem. Keuangan
	4	245		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Kebumen.	Pem. Keuangan
	5	246		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Brebes.	Pem. Keuangan
	6	247		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Rembang.	Pem. Keuangan
	7	248		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Jateng.	PDTT
	8	249		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Magelang.	PDTT
	9	250		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Wonogiri.	PDTT
	10	251		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Semarang.	PDTT
	11	252		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Pati.	PDTT
	12	253		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kan-wil Dep. Agama.	PDTT
15			**Prov. DIY**			
	1	254		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Gunung Kidul.	Pem. kinerja
	2	255		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. DIY.	PDTT
	3	256		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Bantul.	PDTT
	4	257		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Gunung Kidul.	PDTT
	5	258		1	Dana BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kan-wil Dep. Agama.	PDTT
16			**Prov. Jatim**			
	1	259		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Sidoardjo.	Pem. kinerja
	2	260		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Pamekasan.	Pem. kinerja
	3	261		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Madiun.	Pem. kinerja
	4	262		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Bojonegoro.	Pem. kinerja
	5	263		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Kediri.	Pem. kinerja
	6	264		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Banyuwangi.	Pem. kinerja
	7	265		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Lumajang.	Pem. kinerja
	8	266		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Bangkalan.	PDTT
	9	267		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Banyuwangi.	PDTT
	10	268		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Blitar.	PDTT
	11	269		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Gresik.	PDTT
	12	270		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Bondowoso.	PDTT
	13	271		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Jember.	PDTT
	14	272		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Lamongan.	PDTT
	15	273		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Magetan.	PDTT
	16	274		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Malang.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	17	275		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Ngawi.	PDTT
	18	276		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Mojokerto.	PDTT
	19	277		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Pacitan.	PDTT
	20	278		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Probolinggo.	PDTT
	21	279		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Trenggalek.	PDTT
	22	280		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Tuban.	PDTT
	23	281		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Tulungagung.	PDTT
	24	282		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Sampang.	PDTT
	25	283		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Sidoarjo.	PDTT
	26	284		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Situbondo.	PDTT
	27	285		1	Belanja Daerah TA 2008 Kab. Sumenep.	PDTT
	28	286		1	Belanja Daerah TA 2008 Kota Batu.	PDTT
	29	287		1	Belanja Daerah TA 2008 Kota Blitar.	PDTT
	30	288		1	Belanja Daerah TA 2008 Kota Kediri.	PDTT
	31	289		1	Belanja Daerah TA 2008 Kota Mojokerto.	PDTT
	32	290		1	Belanja Daerah TA 2008 Kota Pasuruan.	PDTT
	33	291		1	Belanja Daerah TA 2008 Kota Surabaya.	PDTT
	34	292		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Kab. Bondowoso TA 2008.	PDTT
	35	293		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Kab. Jombang TA 2008.	PDTT
	36	294		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Kab. Lumajang TA 2008.	PDTT
	37	295		1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Kota Malang TA 2008.	PDTT
	38	296		1	Operasional PDAM Kab. Malang.	PDTT
	39	297		1	Operasional PDAM Kab. Pasuruan.	PDTT
	40	298		1	Operasional PDAM Kota Kediri.	PDTT
	41	299		1	Operasional PDAM Kota Madiun.	PDTT
	42	300		1	Operasional PDAM Kota Surabaya.	PDTT
	43	301		1	Operasional PT Panca Wira Usaha.	PDTT
	44	302		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Dinas Budpar Prov. Jatim.	PDTT
	45	303		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kanwil Dep. Agama Prov. Jatim.	PDTT
	46	304		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Lamongan.	PDTT
	47	305		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Malang.	PDTT
	48	306		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Pasuruan.	PDTT
	49	307		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Ponorogo.	PDTT
17			**Prov. Bali**			
	1	308		1	Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Wangaya Kota Denpasar.	Pem. kinerja
	2	309		1	Belanja Daerah Provinsi Bali.	PDTT
	3	310		1	Belanja Daerah Kota Denpasar.	PDTT
	4	311		1	Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.	PDTT
	5	312		1	Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	6	313		1	Pilkada Kabupaten. Gianyar.	PDTT
	7	314		1	Manajemen Aset Provinsi Bali.	PDTT
	8	315		1	Manajemen Aset Kabupaten Klungkung.	PDTT
	9	316		1	Manajemen Aset Kabupaten Karangasem.	PDTT
	10	317		1	Manajemen Aset Kabupaten Gianyar.	PDTT
	11	318		1	Manajemen Aset Kota Denpasar.	PDTT
	12	319		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Bali.	PDTT
	13	320		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Badung.	PDTT
	14	321		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Buleleng.	PDTT
18			**Prov. NTB**			
	1	322		1	LKPD Tahun 2007 Kota Bima.	Pem. Keuangan
	2	323		1	Dinas Kesehatan Provinsi NTB.	Pem. kinerja
	3	324		1	Operasional Bank Pembangunan Daerah Provinsi NTB.	PDTT
	4	325		1	Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.	PDTT
	5	326		1	Belanja Daerah Kota Bima.	PDTT
	6	327		1	Pilkada Provinsi NTB.	PDTT
	7	328		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi NTB.	PDTT
	8	329		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Lombok Tengah.	PDTT
19			**Prov. NTT**			
	1	330		1	LKPD Tahun 2007 Kota Kupang.	Pem. Keuangan
	2	331		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Kupang.	Pem. Keuangan
	3	332		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Sumba Timur.	Pem. Keuangan
	4	333		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Alor.	Pem. Keuangan
	5	334		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Rote Ndao.	Pem. Keuangan
	6	335		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Timor Tengah Selatan.	Pem. Keuangan
	7	336		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Timor Tengah Utara.	Pem. Keuangan
	8	337		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Sikka.	Pem. Keuangan
	9	338		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Ngada.	Pem. Keuangan
	10	339		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Sumba Barat.	Pem. Keuangan
	11	340		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Manggarai.	Pem. Keuangan
	12	341		1	Program Bidang Dinas Kesehatan Provinsi NTT.	Pem. kinerja
	13	342		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Provinsi NTT.	Pem. kinerja
	14	343		1	Pendapatan Daerah Provinsi NTT.	PDTT
	15	344		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.	PDTT
	16	345		1	Pilkada Provinsi NTT.	PDTT
	17	346		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi NTT.	PDTT
	18	347		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Kupang.	PDTT
	19	348		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Timor Tengah Selatan.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
20			**Prov. Kalbar**			
	1	349		1	LKPD Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Barat.	Pem. Keuangan
	2	350		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Kapuas Hulu.	Pem. Keuangan
	3	351		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Sekadau.	Pem. Keuangan
	4	352		1	Pelayanan Pendidikan Kabupaten Sambas.	Pem. kinerja
	5	353		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang.	Pem. kinerja
	6	354		1	Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Kabupaten Bengkayang	PDTT
	7	355		1	Belanja Daerah Infrastruktur PU & Dinas Terkait Provinsi Kalimantan Barat.	PDTT
	8	356		1	Belanja Daerah Infrastruktur Jalan & Jembatan Kabupaten Ketapang.	PDTT
	9	357		1	Belanja Daerah Infrastruktur Dinas Kimpraswil Hubtel & Instansi terkait Lainnya Kabupaten Sekadau.	PDTT
	10	358		1	Belanja Daerah Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Sintang.	PDTT
	11	359		1	Belanja Daerah Infrastruktur Dinas PU & Instansi terkait Kabupaten Melawi.	PDTT
	12	360		1	Belanja Daerah Infrastruktur Dinas PU & Instansi terkait Kabupaten Bengkayang.	PDTT
	13	361		1	Pilkada Provinsi Kalimantan Barat.	PDTT
	14	362		1	Pilkada Kota Singkawang.	PDTT
	15	363		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Kalimantan Barat.	PDTT
	16	364		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Pontianak.	PDTT
	17	365		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Pontianak.	PDTT
21			**Prov. Kaltim**			
	1	366		1	LKPD Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Timur.	Pem. Keuangan
	2	367		1	LKPD Tahun 2007 Kota Samarinda.	Pem. Keuangan
	3	368		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Kutai Kertanegara.	Pem. Keuangan
	4	369		1	LKPD Tahun 2007 Kota Balikpapan.	Pem. Keuangan
	5	370		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Panajam Paser Utara.	Pem. Keuangan
	6	371		1	LKPD Tahun 2007 Kota Tarakan.	Pem. Keuangan
	7	372		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Kutai Timur.	Pem. Keuangan
	8	373		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Rivai Abdul Tanjung Redeb Kabupaten Berau.	Pem. kinerja
	9	374		1	Operasional PDAM Kota Tarakan.	Pem. kinerja
	10	375		1	Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara.	PDTT
	11	376		1	Belanja Daerah Kab Kutai Timur.	PDTT
	12	377		1	Belanja Bantuan Sosial (Belanja Tak Terduga) Kabupaten Kutai Timur.	PDTT
	13	378		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Kalimantan Timur.	PDTT
	14	379		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Samarinda.	PDTT
	15	380		1	BOS dan dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Kutai Kertanegara.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
22			**Prov. Kalsel**			
	1	381		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Tanah Bumbu.	Pem. Keuangan
	2	382		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Pem. Keuangan
	3	383		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Kotabaru.	Pem. Keuangan
	4	384		1	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Banjar.	Pem. kinerja
	5	385		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin.	Pem. kinerja
	6	386		1	Pengelolaan Aset Kabupaten Balangan .	PDTT
	7	387		1	Pengelolaan Aset Kota Banjarbaru.	PDTT
	8	388		1	Operasional PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.	PDTT
	9	389		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Kalimantan Selatan.	PDTT
	10	390		1	BOS dan Dana pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Banjar.	PDTT
	11	391		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	PDTT
	12	392		1	Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.	PDTT
	13	393		1	Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala .	PDTT
	14	394		1	Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.	PDTT
	15	395		1	Belanja Daerah Kabupaten Tapin.	PDTT
	16	396		1	Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.	PDTT
23			**Prov. Kalteng**			
	1	397		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Kotawaringin Timur.	Pem. Keuangan
	2	398		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Sukamara.	Pem. Keuangan
	3	399		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Katingan.	Pem. Keuangan
	4	400		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Kapuas.	Pem. Keuangan
	5	401		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Gunung Mas.	Pem. Keuangan
	6	402		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Barito Timur.	Pem. Keuangan
	7	403		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Barito Selatan.	Pem. Keuangan
	8	404		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Murung Raya.	Pem. Keuangan
	9	405		1	Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. Doris Sylvanus.	Pem. kinerja
	10	406		1	Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.	PDTT
	11	407		1	Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.	PDTT
	12	408		1	Kegiatan Infrastruktur Kabupaten Kotawaringin Timur.	PDTT
	13	409		1	Kegiatan Peningkatan Jalan Anjir & Pembangunan Mess Kabupaten Kapuas.	PDTT
	14	410		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Kalimantan Tengah.	PDTT
	15	411		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Palangkaraya.	PDTT
	16	412		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Pulang Pisau.	PDTT
	17	413		1	Operasional PDAM Kota Palangkaraya.	PDTT
24			**Prov. Sulsel**			
	1	414		1	LKPD Tahun 2007 Provinsi Sulawesi Selatan.	Pem. Keuangan
	2	415		1	LKPD Tahun 2007 Kota Makassar.	Pem. Keuangan
	3	416		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.	Pem. Keuangan
	4	417		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Pinrang.	Pem. Keuangan

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	5	418		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Luwu.	Pem. Keuangan
	6	419		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Jeneponto.	Pem. Keuangan
	7	420		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Bulukumba.	Pem. Keuangan
	8	421		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Bantaeng.	Pem. Keuangan
	9	422		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Selayar.	Pem. Keuangan
	10	423		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Tana Toraja.	Pem. Keuangan
	11	424		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Maros.	Pem. Keuangan
	12	425		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Soppeng.	Pem. Keuangan
	13	426		1	LKPD Tahun 2007 Kota Palopo.	Pem. Keuangan
	14	427		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Luwu Utara.	Pem. Keuangan
	15	428		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Luwu Timur.	Pem. Keuangan
	16	429		1	Pilkada Provinsi Suawesi Selatan.	PDTT
	17	430		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Sulawesi Selatan.	PDTT
	18	431		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Jeneponto.	PDTT
	19	432		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Bulukumba.	PDTT
	20	433		1	Operasional PT BPD Sulawesi Selatan.	PDTT
25			**Prov. Sulbar**			
	1	434		1	LKPD Tahun 2007 Provinsi Suawesi Barat.	Pem. Keuangan
	2	435		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Mamasa.	Pem. Keuangan
	3	436		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Majene.	Pem. Keuangan
	4	437		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Mamuju.	Pem. Keuangan
	5	438		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Mamuju Utara.	Pem. Keuangan
	6	439		1	Pelayanan Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.	Pem. kinerja
	7	440		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Sulbar.	PDTT
	8	441		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Majene.	PDTT
26			**Prov. Sulteng**			
	1	442		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Buol.	Pem. Keuangan
	2	443		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Banggai Kepulauan.	Pem. Keuangan
	3	444		1	Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.	Pem. kinerja
	4	445		1	Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.	PDTT
	5	446		1	Belanja Daerah Kabupaten Morowali.	PDTT
	6	447		1	Belanja Daerah Kabupaten Toli-Toli.	PDTT
	7	448		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Sulawesi Tengah.	PDTT
	8	449		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Palu.	PDTT
	9	450		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Parigi Mountong.	PDTT
27			**Prov. Sultra**			
	1	451		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Konawe Selatan.	Pem. Keuangan
	2	452		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara.	Pem. kinerja
	3	453		1	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	PDTT
	4	454		1	Belanja Daerah Kota Bau-Bau.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	5	455		1	Belanja Daerah Kabupaten Buton.	PDTT
	6	456		1	Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.	PDTT
	7	457		1	Belanja Daerah Kabupaten Muna.	PDTT
	8	458		1	Belanja Darah Kota Kendari.	PDTT
	9	459		1	Pilkada (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara.	PDTT
	10	460		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Sulawesi Tenggara.	PDTT
	11	461		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Muna.	PDTT
	12	462		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Bau-Bau.	PDTT
	13	463		1	Operasional PDAM Kab. Kolaka.	PDTT
	14	464		1	Operasional PDAM Kota Kendari.	PDTT
	15	465		1	Operasional BPD Sulawesi Tenggara.	PDTT
28			**Prov. Sulut**			
	1	466		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Sam Ratulangi.	Pem. kinerja
	2	467		1	Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.	PDTT
	3	468		1	Belanja Daerah Kota Bitung.	PDTT
	4	469		1	Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.	PDTT
	5	470		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Sulawesi Utara.	PDTT
	6	471		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kabupaten Minahasa.	PDTT
	7	472		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Tomohon.	PDTT
	8	473		1	Operasional PDAM Kota Bitung.	PDTT
	9	474		1	Operasional PDAM Kab. Monahasa.	PDTT
	10	475		1	Operasional PDAM Kab. Bolaang Mogondow.	PDTT
29			**Prov. Gorontalo**			
	1	476		1	Neraca Awal Kabupaten Gorontalo Utara.	Pem. Keuangan
	2	477		1	Laporan Keuangan PT Gorontalo Fitrah M.	Pem. Keuangan
	3	478		1	Belanja Daerah Kota Gorontalo.	PDTT
	4	479		1	Belanja Daerah Dinas PU Provinsi Gorontalo.	PDTT
	5	480		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Provinsi Gorontalo.	PDTT
	6	481		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Gorontalo.	PDTT
30			**Prov. Papua**			
	1	482		1	LKPD Tahun 2007 Provinsi Papua.	Pem. Keuangan
	2	483		1	LKPD Tahun 2007 Kabupaten Asmat.	Pem. Keuangan
	3	484		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Biak Numfor.	Pem. Keuangan
	4	485		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Boven Digoel.	Pem. Keuangan
	5	486		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Jayawijaya.	Pem. Keuangan
	6	487		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Keerom.	Pem. Keuangan
	7	488		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Mappi.	Pem. Keuangan
	8	489		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Merauke.	Pem. Keuangan
	9	490		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Mimika.	Pem. Keuangan
	10	491		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Nabire.	Pem. Keuangan
	11	492		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Paniai.	Pem. Keuangan

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
	12	493		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Pegunungan Bintang.	Pem. Keuangan
	13	494		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Puncak Jaya.	Pem. Keuangan
	14	495		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Sarmi.	Pem. Keuangan
	15	496		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Supriori.	Pem. Keuangan
	16	497		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Tolikara.	Pem. Keuangan
	17	498		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Waropen.	Pem. Keuangan
	18	499		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Yapen Waropen.	Pem. Keuangan
	19	500		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Abepura.	Pem. kinerja
	20	501		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Wamena.	Pem. kinerja
	21	502		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Papua.	PDTT
	22	503		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kota Jayapura.	PDTT
	23	504		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Jayapura.	PDTT
31			**Prov. Maluku**			
	1	505		1	LKPD Tahun 2007 Prov. Maluku.	Pem. Keuangan
	2	506		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Maluku Tenggara.	Pem. Keuangan
	3	507		1	LKPD Tahun 2007 Kota Ambon.	Pem. Keuangan
	4	508		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Buru .	Pem. Keuangan
	5	509		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Seram Bagian Barat.	Pem. Keuangan
	6	510		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Maluku Tengah.	Pem. Keuangan
	7	511		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. M. Haulussy.	Pem. kinerja
	8	512		1	Belanja Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat.	PDTT
	9	513		1	Belanja Daerah Kab. Kep. Aru.	PDTT
	10	514		1	Belanja DaerahKota Ambon.	PDTT
	11	515		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Maluku.	PDTT
	12	516		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Maluku Tengah.	PDTT
32			**Prov. Maluku Utara**			
	1	517		1	LKPD Tahun 2007 Kota Ternate.	Pem. Keuangan
	2	518		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Halmahera Barat.	Pem. Keuangan
	3	519		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Halmahera Utara.	Pem. Keuangan
	4	520		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Kep. Sula.	Pem. Keuangan
	5	521		1	Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate.	Pem. Keuangan
	6	522		1	Pelayanan Kesehatab RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie.	Pem. kinerja
	7	523		1	Belanja Daerah Prov. Maluku Utara.	PDTT
	8	524		1	Belanja Daerah Kab. Kep. Sula.	PDTT
	9	525		1	Belanja Daerah Kab. Halmahera Utara.	PDTT
	10	526		1	Belanja Daerah Kota Ternate.	PDTT
	11	527		1	Belanja Daerah Kab. Halmahera Tengah.	PDTT
	12	528		1	Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.	PDTT
	13	529		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Maluku Utara.	PDTT
	14	530		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Halmahera Barat.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
33			**Prov. Papua Barat**			
	1	531		1	LKPD Tahun 2007 Prov. Papua Barat.	Pem. Keuangan
	2	532		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Raja Ampat.	Pem. Keuangan
	3	533		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Fak-fak.	Pem. Keuangan
	4	534		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Kaimana.	Pem. Keuangan
	5	535		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Teluk Wondama.	Pem. Keuangan
	6	536		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Sorong Selatan.	Pem. Keuangan
	7	537		1	LKPD Tahun 2007 Kab. Teluk Bintuni.	Pem. Keuangan
	8	538		1	Pelayanan Kesehatan RSUD Manokwari.	Pem. kinerja
	9	539		1	Pengelolaan Dana Otonomi khusus Kab. Fak-fak.	PDTT
	10	540		1	Pengelolaan Dana Otonomi khusus Kab. Sorong Selatan.	PDTT
		541			Pengelolaan Dana Otonomi khusus Kab. Sorong	
	11	542		1	Pengelolaan Dana Otonomi khusus Kab. Kaimana.	PDTT
	12	543		1	Pengelolaan Dana Otonomi khusus Kab. Teluk Wondama.	PDTT
	13	544		1	Pengelolaan Dana Otonomi khusus Kab. Raja Ampat.	PDTT
	14	545		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Prov. Papua Barat.	PDTT
	15	546		1	BOS dan Dana Pendidikan Dasar lainnya Kab. Manokwari.	PDTT
Jumlah APBD/BUMD				**546**		
			BUMN			
1			**KKKS Pertamina EP**	1	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Eks Pertamina Tahun 2007.	PDTT
2			**KKKS Chevron Pacific Indonesia**	1	Pelaksanaan Production Sharing Contract (PSC) Rokan Tahun 2007.	PDTT
3			**KKKS Chevron Indonesia Company (CICo) & Chevron Makasar Limited (CML)**	1	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja East Kalimantan dan Makassar Strait Tahun 2007.	PDTT
4			**KKKS Petrochina Internasional Jabung**	1	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Jabung Tahun 2007.	PDTT
5			**KKKS PT Pertamina & PT Pertamina EP**	1	Perhitungan Kewajiban Kontrak Kerja Sama Sehubungan dengan Koreksi Alokasi Yang diperhitungkan dalam Cost Recovery Pertamina Petroleum Contract (PPC) dan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina (KMGBP Tahun 2003 - 2007).	PDTT
6			**KKKS Chevron Pacific Indonesia & Conoco Philips Gresik**	1	Transaksi Pertukaran (Swap) Minyak Mentah dan Gas Periode 2004 - 2007.	PDTT
7			**Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)**	1	Laporan Keuangan atas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)	Pem. Keuangan
8			**Perum Damri**	1	Laporan Keuangan Tahun 2006 & 2005.	Pem. Keuangan
9			**PT Kereta Api**	1	Biaya Pengelolaan Aset, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, PMN serta Pelaksanaan PSO, IMO, & TAC TA 2006.	PDTT

No			Entitas	Daftar LHP		
				Jml	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan
1			2	3	4	5
10			**PT Industri Kereta Api (INKA)**	1	Pengel. Penjualan Beban Pokok Penjualan, Biaya Usaha, Penyertaan Modal Negara, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya serta Manajemen Aset TB 2006 & Smt I 2007.	PDTT
11			**PT IGLAS**	1	Penjualan, Beban Pokok Penjualan, Biaya Usaha, Investasi, dan Manajemen Aset TB 2006 & Smt I 2007.	PDTT
12			**Perum Peruri**	1	Laporan Keuangan Tahun Buku 2007.	Pem. Keuangan
13			**PT Kertas Leces**	1	Penyertaan Modal Negara,Kegiatan Produksi & Penjualan TB 2006 & 2007 (Smt I).	PDTT
14			**PT Sang Hyang Seri**	1	Subsidi Benih TA 2006.	PDTT
15			**PT Pertani**	1	Subsidi Benih dan BLBU TA 2007.	PDTT
16			**Perum Perhutani**	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya Dan Investasi Tahun 2005 s.d. Semester I 2007.	PDTT
17			**PT BNI Securities**	1	Kegiatan Investasi,Pendapatan Usaha dan Belanja Modal.	PDTT
18			**PT Danareksa**	1	Penyelesaian Piutang Macet & Penjaminan Emisi Saham PT Bank Mandiri (Persero) TA 2007.	PDTT
19			**PT Pos Indonesia**	1	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO) Bidang Pos Tahun Anggaran 2006.	PDTT
20			**PT Bank Mandiri (Persero)**	1	Pengelolaan Kredit.	PDTT
21			**PT Bank Tabungan Negara (Persero)**	1	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.	PDTT
Jumlah BUMN				**21**		
Jumlah				**683**		

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210

Telp : (021) 5704395
Fax : (021) 5705376

www.bpk.go.id